

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan tuntunan - Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2018 telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 sebagai laporan Walikota Dumai kepada DPRD Kota Dumai, menyangkut pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kita merasakan bersama bahwa pembangunan Kota Dumai yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2018 terdapat kemajuan dan keberhasilan dalam rangka memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kita terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT, pelaksanaan program pembangunan selanjutnya pada masa tahun 2016 – 2021 semakin lebih baik dan lebih mensejahterahkan menuju masyarakat Dumai yang makmur dan madani.

Dumai, Maret 2019

WALIKOTA DUMAI


Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	A. Dasar Hukum	I-1
	B. Gambaran Umum Daerah	I-4
	1. Kondisi Geografis	I-4
	a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	I-4
	b. Iklim dan Curah Hujan	I-5
	2. Gambaran Umum Demografis	I-6
	3. Potensi Unggulan Daerah	I-7
	4. Kondisi Ekonomi	I-8
	a. Perkembangan PDRB	I-9
	b. Pertumbuhan PDRB	I-12
	c. Pendapatan Perkapita	I-13
	d. Kemiskinan	I-14
	e. Inflansi	I-16
	f. Kondisi IPM Kota Dumai	I-18
BAB II	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018	II-1
	A. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-1
	B. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-2
	C. Arah Kebijakan Pembangunan	II-2
	D. Prioritas Belanja Daerah	II-9
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	III-1
	A. Target dan Realisasi Pendapatan	III-1
	B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-6
	a. Pajak Daerah	III-6
	b. Retribusi Daerah	III-9
	c. Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	III-15
	d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	III-15
	C. Dana Perimbangan	III-16
	a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	III-16
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	III-16
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	III-16
	D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-16
	a. Pendapatan Hibah	III-16
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintahan lainnya ...	III-17
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	III-18
	E. Permasalahan Dan Solusi	III-18
	F. Pengelolaan Belanja Daerah	III-18
	a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-18

BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	TAHUN 2018	IV-1
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-3
	1. Urusan Wajib Pendidikan.	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV-3
	2. Urusan Wajib Kesehatan.	
	a. Dinas Kesehatan	IV-26
	b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	IV-55
	3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-61
	4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-75
	5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan	
	Perlindungan Masyarakat.	
	a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-83
	b. Satuan Polisi Pamong Praja	IV-89
	c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-98
	6. Urusan Wajib Sosial.	
	Dinas Sosial	IV-104
	B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	IV-115
	7. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	Anak	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	IV-115
	8. Urusan Wajib Tenaga Kerja.	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IV-130
	9. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.	
	Kantor Lingkungan Hidup	IV-143
	10. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-155
	11. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana.....	IV-159
	12. Urusan Wajib Perhubungan	
	Dinas Perhubungan.....	IV-175
	13. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	
	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	IV-183
	14. Urusan Penanaman Modal	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu...	IV-193
	15. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga.	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-201
	16. Urusan Wajib Perpustakaan	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	IV-210
	C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	IV-218
	17. Urusan Pilihan Pertanian.	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	IV-218
	18. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan	
	Dinas Perikanan.....	V-232
	19. Urusan Pilihan Perdagangan.	
	Perdagangan	IV-241
	D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.....	IV-249
	20. Urusan Pemerintahan.	
	a. Sekretariat Daerah.....	IV-249

	b. Sekretariat DPRD	IV-274
	c. Kecamatan Dumai Timur	IV-281
	d. Kecamatan Dumai Selatan	IV-290
	e. Kecamatan Dumai Kota.....	IV-298
	f. Kecamatan Dumai Barat	IV-309
	g. Kecamatan Medang Kampai	IV-320
	h. Kecamatan Bukit Kapur	IV-331
	i. Kecamatan Sungai Sembilan	IV-344
	21. Urusan Pengawasan	
	Inspektorat.....	IV-352
	22. Urusan Perencanaan	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	IV-361
	23. Urusan Keuangan	
	a. Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	IV-372
	b. Badan Pendapatan Daerah.....	IV-388
	24. Urusan Kepegawaian	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	IV-399
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018...	V-1
	A. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura.....	V-1
	B. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan....	V-2
	C. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan.....	V-2
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
	TAHUN 2018.....	VI-1
	A. Kerjasama Antar Daerah	VI-1
	B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	VI-6
	C. Kerjasama Dengan Luar Negeri	VI-26
	D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI-26
	E. Pembinaan Batas Wilayah	VI-28
	F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	VI-43
	G. Pengelolaan Kawasan Khusus	VI-45
	H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	VI-45
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2011-2017	I - 6
Tabel 1. 2	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2017	I - 6
Tabel 1. 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2011-2017.	I - 6
Tabel 1. 4	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	I - 9
Tabel 1. 5	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	I - 10
Tabel 1. 6	Kontribusi Sektoral PDRB Tahun 2013-2017	I - 11
Tabel 1. 7	Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010	I - 12
Tabel 1. 8	Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah	I - 13
Tabel 1. 9	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2013-2017	I - 14
Tabel 1. 10	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau	I - 15
Tabel 1. 11	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2014-2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau	I - 17
Tabel 1. 12	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017	I - 19
Tabel 1. 13	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017	I - 19

BAB. III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Tabel 3.1	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2017 dan Perwako No. 55 Tahun 2017	III - 1
Tabel 3.2	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 Berdasarkan Perwako No. 31 Tahun 2018	III - 2
Tabel 3.3	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 Berdasarkan Perwako No. 57 Tahun 2018	III - 3
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 Berdasarkan Perwako No. 57 Tahun 2018	III - 3
Tabel 3.5	Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2018	III - 18
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018	III - 19

BAB. IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 3
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 26
Tabel 4.3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2010 sampai dengan 2018	IV - 31
Tabel 4.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	IV - 47
Tabel 4.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018 Standar pelayanan kesehatan	IV - 49
Tabel 4.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018 Evaluasi standar pelayanan kesehatan	IV - 49

Tabel 4.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	IV - 50
Tabel 4.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	IV - 50
Tabel 4.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2018	IV - 55
Tabel 4.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2018	IV - 61
Tabel 4.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2018	IV - 75
Tabel 4.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2018	IV - 83
Tabel 4.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2018	IV - 90
Tabel 4.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai Tahun 2018	IV - 99
Tabel 4.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2018	IV - 91
Tabel 4.16	Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2018	IV - 115
Tabel 4.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2018	IV - 130
Tabel 4.18	Jumlah keputusan hubungan Kerja Di Kota Dumai tahun 2018	IV - 135
Tabel 4.19	Persentase Kenaikan Upah Minimum kota Dalam ! Tahun 2016 -2018	IV - 137
Tabel 4.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018	IV - 143
Tabel 4.21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2018	IV - 155
Tabel 4.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2018	IV - 160
Tabel 4.23	Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2018	IV - 162
Tabel 4.24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2018 ..	IV - 175
Tabel 4.25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai Tahun 2018	IV - 183
Tabel 4.26	Penghargaan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2018	IV - 193
Tabel 4.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2018	IV - 193
Tabel 4.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2018	IV - 201
Tabel 4.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 210
Tabel 4.30	Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018 ...	IV - 218
Tabel 4.31	Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018 ...	IV - 232
Tabel 4.32	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2018 ..	IV - 241
Tabel 4.33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2018 ...	IV - 249
Tabel 4.34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2018	IV - 272
Tabel 4.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur Tahun 2018	IV - 281
Tabel 4.36	Prestasi dan Penghargaan Yang diraih di Raih Tahun 2018	IV - 289

Tabel 4.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 290
Tabel 4.38	Capaian Prestasi Keluaran/Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 297
Tabel 4.39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2018	IV - 298
Tabel 4.40	Tabel Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2017-2018	IV - 307
Tabel 4.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat Tahun 2018	IV - 310
Tabel 4.42	Prestasi dan Penghargaan Yang diraih di Raih Tahun 2017-2018	IV - 318
Tabel 4.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2017	IV - 320
Tabel 4.44	Capaian Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Medang Kampai Tahun 2017-2018	IV - 329
Tabel 4.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018	IV - 331
Tabel 4.46	Pencapaian Anggaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018	IV - 332
Tabel 4.47	Penerima Raskin Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018	IV - 334
Tabel 4.48	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017 – 2018	IV - 342
Tabel 4.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2018	IV - 344
Tabel 4.50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Tahun 2018	IV - 352
Tabel 4.51	Skala Penilaian capaian indikator	IV - 352
Tabel 4.52	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2018	IV - 361
Tabel 4.53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2018	IV - 372
Tabel 4.54	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018	IV - 388
Tabel 4.55	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2018	IV - 399

BAB. VI . PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2018

Tabel 6. 1	Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai	VI - 4
Tabel 6. 2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	VI - 4
Tabel 6. 3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Pada Tahun 2018	VI - 5
Tabel 6. 4	Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dumai.	VI - 15
Tabel 6. 5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	VI - 16
Tabel 6. 6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai	VI - 16
Tabel 6. 7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai	VI - 17
Tabel 6. 8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Adm. Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai	VI - 17
Tabel 6. 9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Sosial Kota Dumai	VI - 18
Tabel 6. 10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Pendapatan Kota Dumai.....	VI - 18

Tabel 6. 11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai	VI - 19
Tabel 6. 12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.....	VI - 19
Tabel 6. 13	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada BPKAD Kota Dumai	VI - 20
Tabel 6. 14	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai	VI - 30
Tabel 6. 15	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bag. Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai	VI - 43
Tabel 6. 16	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	VI - 44
Tabel 6. 17	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	VI - 46

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1	Peta Kota Dumai	I -7
Gambar 1. 2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017	I -15
Gambar 1. 3	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau	I -16
Gambar 1.4	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau	I -17
Gambar 1.5	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017	I -20

BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Gambar 4.1	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Dari Tahun 2014 Sampai Dengan 2018	IV-27
Gambar 4.2	Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018	IV-27
Gambar 4.3	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-28
Gambar 4.4	Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018	IV-28
Gambar 4.5	Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-29
Gambar 4.6	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018	IV-30
Gambar 4.7	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2018	IV-30
Gambar 4.8	Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2018	IV-31
Gambar 4.9	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-32
Gambar 4.10	Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018	IV-32
Gambar 4.11	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-33

Gambar 4.12	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-33
Gambar 4.13	Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2014 s/d 2018	IV-34
Gambar 4.14	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-35
Gambar 4.15	Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018	IV-35
Gambar 4.16	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-36
Gambar 4.17	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018	IV-37
Gambar 4.18	Angka Harapan Hidup Kota Dumai <i>Tahun 2015-2017</i>	IV-117
Gambar 4.19	Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Dumai <i>Tahun 2018</i>	IV-120
Gambar 4.20	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis <i>Kekerasan di Kota Dumai Tahun 2018</i>	IV-120
Gambar 4.21	Jumlah Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Di Kota Dumai tahun 2018	IV-121
Gambar 4.22	Pelatihan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai tahun 2018	IV-131
Gambar 4.23	Pencapaian Realisasi dan Target Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai tahun 2018	IV-132
Gambar 4.24	Tenaga Kerja Lokal dan tenaga kerja Luar Kota Dumai tahun 2018	IV-132
Gambar 4.25	Lowongan Kerja Di Kota Dumai tahun 2018	IV-133
Gambar 4.26	Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Dumai tahun 2017- 2018	IV-135
Gambar 4.27	Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Dumai tahun 2017- 2018	IV-135
Gambar 4.28	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota Dalam 1 Tahun 2016-2018	V-137



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan suatu laporan atas penyelenggaraan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada saat ini adalah LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2018.

A. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Pertumbuhan PDRB

Besaran PDRB Kota Dumai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun begitu pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Selalu Beflukuasi selama lima tahun terakhir, tabel 1.7 berikut menyajikan pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2013-2017 atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 1.7 Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Kategori	Pertumbuhan(%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	(1,03)	1,62	0,10	1,14	3,34
B.	Pertambangan & penggalian	0,07	0,90	0,19	(4,04)	(4,95)
C.	Industri pengolahan	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34
D.	Pengadaan listrik dan gas.	10,37	13,65	9,75	18,12	1,04
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,64	1,95	2,76	(0,16)	4,60
F.	Bangunan	3,02	(4,59)	1,85	3,03	4,19
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	2,26	0,95	0,13	2,16	2,84
H.	Transportasi dan pergudangan	6,80	9,92	2,02	4,88	5,53
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,97	9,20	2,35	2,58	6,30
J.	Informasi dan komunikasi	20,87	11,24	7,15	4,13	5,47
K.	Jasa keuangan dan asuransi	18,44	(39,50)	(6,88)	0,13	(0,75)
L.	Real estate	4,73	3,75	5,01	1,41	3,43
M, N	Jasa perusahaan	6,23	8,50	7,67	3,61	6,91
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	1,75	0,42	2,02	0,16	0,04
P.	Jasa pendidikan	5,51	8,96	5,24	0,68	2,70
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	7,99	2,56	9,94	0,87	5,49
R, S, T, U	Jasa lainnya	11,39	11,86	7,81	4,39	8,05
Pertumbuhan ekonomi		3,68	2,69	2,03	4,18	4,45

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 kota Dumai selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Dumai adalah sebesar 3.68%, tahun 2014 dan 2015 melambat menjadi 2,69% dan 2,03%. Tahun 2016 dan Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 4,18% dan 4,45%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi kota Dumai kedepannya.

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

c. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 1.8 dibawah ini:

Tabel 1.8 Kriteria Tipologi Klassen - Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB Perkapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Dimana:

- R_i : laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i
- R : laju pertumbuhan PDRB Provinsi
- Y_i : PDRB per kapita Kabupaten/Kota i
- Y : PDRB per kapita Provinsi

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 1.8 di atas, pada Tabel 1.9 di bawah ini tersaji hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota

- Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

Dumai tahun 2013-2017 dimana Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat** karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau :

Tabel 1.9 Hasil Analisis Tipologi Klasen Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	77.463,01	84.354,52	89.008,77	95.836,36	101.816,17
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	100.691.441,2	109.784.637,1	102.887.810,5	104.952.091	105.990.992,2
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	3,68	2,68	1,91	4,64	4,45
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

d. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2013-2017 fluktuatif. Adapun rincian Data dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut:

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Dalam perkembangannya, Kota Dumai berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Kota Dumai memiliki luas daratan 204.674 (*dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat*) hektar dengan persentase luas per kecamatan seperti terlihat pada Gambar 1.1 Memiliki wilayah perairan seluas 71.393 (*tujuh puluh satu ribu tiga ratus*

Tabel 1.10 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata r (% per tahun)
Kota Dumai						
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	5,29
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	13,72	13,62	14,97	13,76	13,53	(0,35)
Persentase penduduk miskin (%)	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	(2,13)
Provinsi Riau						
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	350.129	379.223	399.211	426.001	456.493	6,86
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	476,46	498,28	531,39	515,40	514,62	0,15
Persentase penduduk miskin (%)	8,42	7,99	8,42	7,98	7,78	(1,96)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 4,98%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,13% menjadi 4,57% di tahun 2017. Sedangkan untuk garis kemiskinan, Kota Dumai selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,29%, dari Rp. 328.158/ kapita/bulan pada tahun 2013 menjadi Rp.403.244,00/kapita/bulan di tahun 2017. Selama periode 2013-2017 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau.

Gambar 1.2 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

sembilan puluh tiga) hektar. Secara geografis terletak pada posisi antara 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara. Secara administratif seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa dan Selat Malaka.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa - rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 - 0,5 m dan ketinggian rata - rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

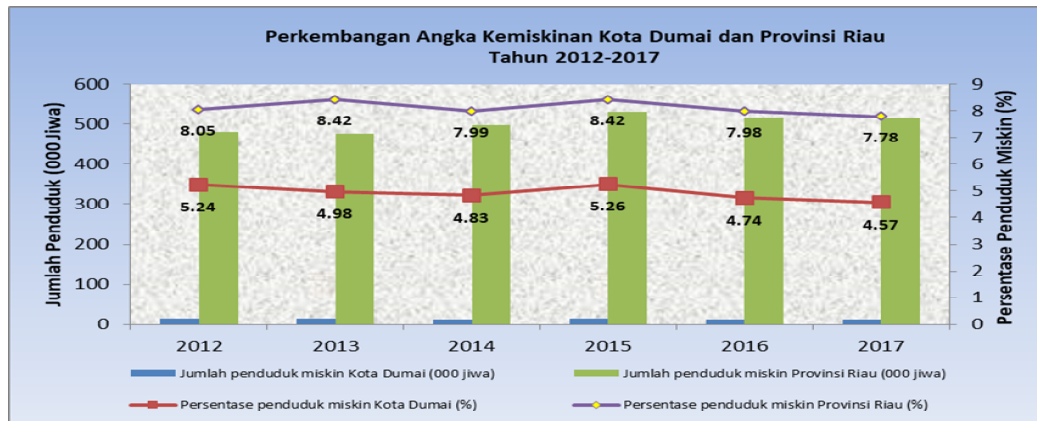
Diwilayah Kota Dumai terdapat 15 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

b. Iklim dan Curah Hujan

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 21°C-36,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai berturut-turut sebesar 358,3 mm³ dan 59,3 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak 9 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel 1.2 Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2017 pemerintah kota Dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,17%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 1.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau :

Gambar 1.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

e. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 1.11 menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan

Tabel 1.1 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2011-2017

Bulan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	19	13	13	13	13	16	20
Februari	6	11	11	11	11	11	21
Maret	15	11	11	11	11	9	12
April	16	11	11	11	11	17	21
Mei	5	14	14	14	14	15	21
Juni	9	7	7	7	7	15	6
Juli	9	14	14	14	14	13	9
Agustus	8	18	18	18	18	9	17
September	15	7	7	7	7	13	20
Oktober	22	17	17	17	17	15	20
Nopember	26	21	21	21	21	21	20
Desember	14	24	24	24	24	20	19
Total	164	168	168	168	168	174	206

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Tabel 1.2 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2017

Bulan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	182,3	130	130	200	200	121,6	411,7
Februari	29,3	132	132	150	150	59,3	418
Maret	45	198	198	201	201	94	182,6
April	403,4	261	261	226	226	194,2	181
Mei	23,3	157	157	190	190	358,3	145
Juni	77,4	49	49	160	160	64,6	95
Juli	162,1	203	203	160	160	122,4	106,7
Agustus	167,1	499	499	200	200	79,7	237,5
September	356,3	153	153	257	257	171,7	237,8
Oktober	260,8	121	121	290	290	82,3	179,4
Nopember	311,3	313	313	299	299	318	238,3
Desember	230,8	368	368	258	258	166,5	166
Total	2.249,1	2.584	2.584	2.591	2.591	1.832,6	2361,5

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2011-2017 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2011-2017 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,46%. Berikut ini laju pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata Kota Dumai selama tahun 2011 sampai dengan 2017.

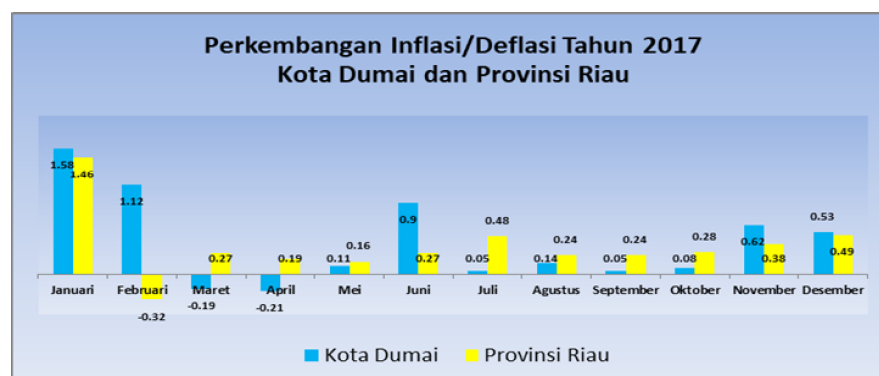
(Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2014-2017 dan Gambar 1.4 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 1.11 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2014-2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Kota Dumai				Provinsi Riau			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Inflasi Bulanan:								
Januari	0,43	-0,37	0,65	1,58	0,80	-0,61	0,33	1,46
Februari	0,30	-0,68	0,32	1,12	0,11	-0,64	-0,34	-0,32
Maret	0,24	0,13	0,23	-0,19	0,15	-0,01	0,47	0,27
April	0,40	0,38	-0,64	-0,21	0,08	0,73	-1,10	0,19
Mei	0,14	0,98	0,06	0,11	0,16	0,53	0,20	0,16
Juni	0,66	0,59	0,79	0,90	0,58	0,70	0,43	0,27
Juli	0,83	0,78	0,46	0,05	0,96	0,61	1,06	0,48
Agustus	0,65	0,55	0,05	0,14	0,89	0,45	0,13	0,24
September	0,64	-0,23	0,64	0,05	0,42	-0,38	0,81	0,24
Oktober	0,42	0,11	0,47	0,08	0,54	-0,15	0,63	0,28
November	1,86	-0,02	0,82	0,62	1,98	0,32	1,15	0,38
Desember	1,66	0,39	0,07	0,53	1,69	1,08	0,23	0,49
Inflasi Tahunan (Y on Y)	8,53	2,63	3,98	4,78	8,65	2,65	4,04	4,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 1.4 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari Tabel 1.11 di atas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2017 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017 inflasi Kota Dumai mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,8% (dari 3,98% pada tahun 2016 menjadi 4,78% di tahun 2017). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan kenaikan juga dari 4,04% pada tahun 2016 menjadi 4,20% pada tahun 2017. Kinerja perekonomian

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2011-2017

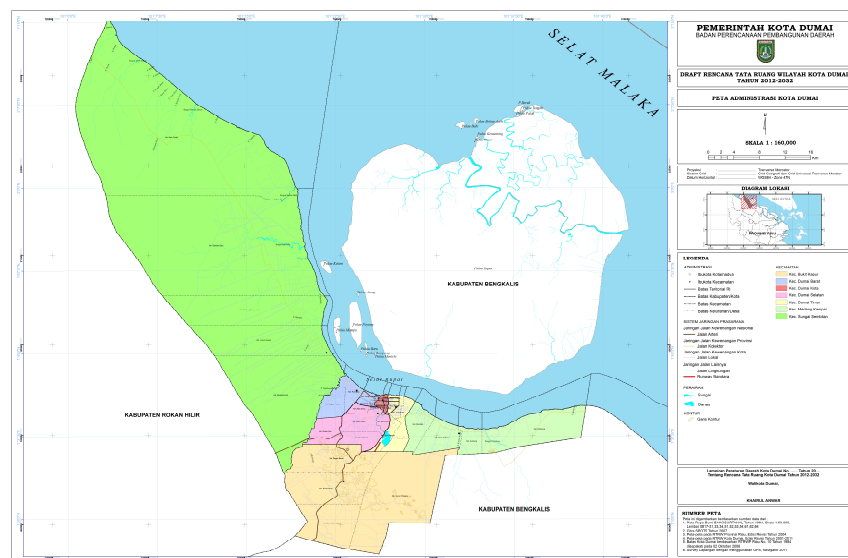
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)							Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Bukit Kapur	40.133	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	2,46
Medang Kampai	10.611	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	2,19
Sungai Sembilan	28.767	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	2,35
Dumai Barat	37.423	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	42.364	2,34
Dumai Timur	56.946	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	2,17
Dumai Kota	41.887	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	2,19
Dumai Selatan	47.209	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	1,96
Kota Dumai	262.976	271.523	280.027	280.199	285.967	291.908	297.638	2,23

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

3. Potensi Unggulan Daerah

Kota Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Rupa dan Selat Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga Kota Dumai menjadi salah satu pelabuhan Samudra yang paling strategis dan potensial untuk kegiatan *eksport* dan *import*. Terletak di tengah - tengah intensitas jalur penghubung darat, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan dan Kota Dumai sebagai penghubung laut yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi Pusat Perdagangan. Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*).

Gambar 1.1 Peta Kota Dumai



Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kota Dumai

yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2017 dengan angka inflasi tahunan sebesar 4,78% (meningkat 0,8%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2017 seperti yang tersaji pada Gambar 1.4 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama terjadi di bulan Januari. Untuk Kota Dumai inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, sementara Provinsi Riau inflasi bulanan terendahnya terjadi di bulan februari. Secara umum tingkat inflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, namun tingkat deflasinya sedikit berbeda antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau dimana Kota Dumai mengalami deflasi terendah pada bulan April sementara Provinsi Riau terjadi pada bulan Februari.

f. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sitem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2010-2017.

Selama periode 2010-2017 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2017 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan

Sebagai sebuah kota yang berkembang pesat, Dumai telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik seperti sarana transportasi (jalan raya, pelabuhan dan bandar udara), listrik, perbankan, layanan telekomunikasi canggih (termasuk telepon seluler dan jaringan internet).

Kota Dumai dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 298.189 jiwa merupakan salah satu Kota Pelabuhan International paling strategis di Provinsi Riau. Sebagai pintu gerbang di pantai timur Sumatera, pelabuhan Dumai berperan penting dalam melayani aktifitas *eksport - import* barang dan penumpang domestik maupun manca negara seperti Malaka - Malaysia. Seiring dengan perkembangan globalisasi, kota Dumai menjadi pelabuhan tersibuk pintu gerbang utama Provinsi Riau. Dengan total area ± 1.000 ha, Kota Dumai mampu menarik investor dari segala belahan dunia dengan persimpangan selat Malaka.

Hal ini disebabkan oleh beberapa lokasi industri Kota Dumai yang kaya akan potensi seperti Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri ini memiliki beberapa keunggulan sekaligus potensi penarik investasi diantaranya disisi pertanian, perkebunan, kelautan, budaya, pariwisata dan keamanan. Kesemuanya melibatkan masyarakat Dumai sebagai sumber daya yang mampu menaikkan nilai ekonomi Kota Dumai itu sendiri. Secara geografis Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan samudera, terletak pada koordinat 01^o - 41' - 14" LU dan 101^o - 27' - 42" BT, terlindungi oleh Pulau Rumat sehingga terbebas dari gelombang dan badai, kondisi pasang surut tertinggi ± 346 cm dan terendah ± 36 cm. Pelabuhan Dumai berada di Provinsi Riau - Indonesia, dibangun tahun 1957 dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah wilayah kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Pelabuhan Dumai mempunyai peran yang penting sebagai pintu gerbang perekonomian nasional Indonesia khususnya Provinsi Riau dan Provinsi lainnya di sekitarnya. Hal ini didukung oleh lokasinya yang strategis berada di Selat Malaka dan memiliki potensi *hinterland* pertanian, perkebunan sawit yang luas, pertambangan minyak bumi dan industri. Pelabuhan Dumai memiliki alur pelayaran sepanjang 55 mil terdiri dari 22 mil melalui Selat Bengkalis dan 33 mil melalui Selat Rumat, kelebaran alur minimum 255 meter dan maksimum 1,7 km dengan kedalaman rata - rata 16 meter, dapat dikunjungi oleh kapal - kapal samudera dan antar pulau dengan ukuran maksimum LOA 255 m, 30.000 Grt, 47.000 DWT dengan draft 10,5 m. Pelabuhan

masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 1.12 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017.

Tabel 1.12 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2017, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 1.13 dibawah. Pada tahun 2017, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 1.12 di atas. Pada tahun 2017 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 73,46 ; 71,79 ; 70,81. Berikut tabel 1.13 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017.

Tabel 1.13 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dumai memiliki area seluas 785.161 M₂, dimanfaatkan untuk fasilitas kepelabuhanan (dermaga, perkantoran, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang dll) juga mempunyai area yang disewakan. Umumnya area yang disewakan dibangun Industri, gudang dan tangki penimbunan CPO. Komoditi dominan melalui Pelabuhan Dumai adalah CPO (*Crude Palm Oil*) dan turunannya serta komoditi curah kering yaitu PKE (*Palm Kernel Ekspeller*), PKS (*Palm Kernel Shell*) serta pupuk.

4. Kondisi Ekonomi

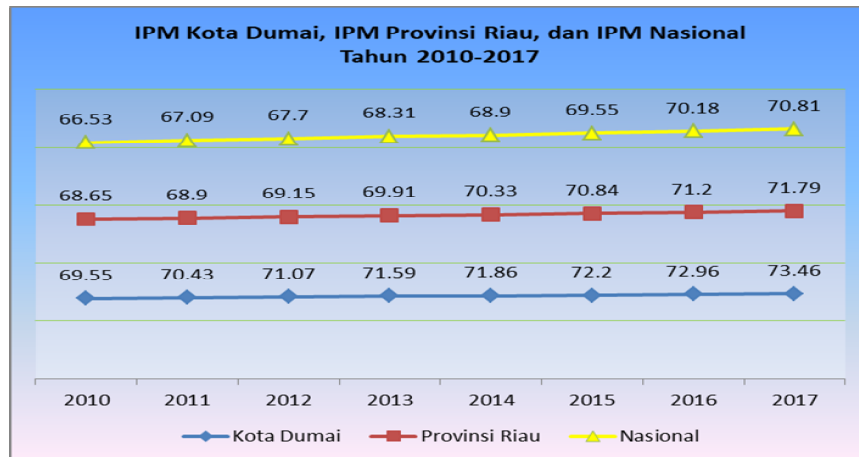
a. Perkembangan PDRB

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2013-2017, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB Kota Dumai dengan migas ADHK adalah sebesar 22 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB adalah sebesar 30 triliun rupiah (tabel 1.4 dan tabel 1.5 Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai.

**Tabel 1.4 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017**

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,119,970.00	1,138,070.00	1,139,160.00	1,152,200.00	1,190,690.00
2.	Pertambangan dan Penggalan	86,480.00	87,260.00	87,420.00	83,890.00	79,730.00
3.	Industri Pengolahan	10,414,550.00	11,059,230.00	11,382,360.00	12,032,420.00	12,675,130.00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,610.00	13,200.00	14,480.00	17,110.00	17,290.00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,360.00	3,430.00	3,520.00	3,520.00	3,680.00
6.	Konstruksi	2,181,410.00	2,081,310.00	2,119,780.00	2,184,090.00	2,275,700.00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,735,620.00	3,771,270.00	3,776,040.00	3,857,610.00	3,967,110.00
8.	Transportasi dan Pergudangan	537,460.00	590,800.00	602,750.00	632,140.00	667,090.00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134,380.00	146,740.00	150,190.00	154,070.00	163,770.00

Gambar 1.5 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
10.	Informasi dan Komunikasi	206,130.00	229,290.00	245,700.00	255,850.00	269,850.00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,330.00	285,150.00	265,540.00	265,880.00	263,890.00
12.	Real Estate	86,990.00	90,250.00	94,770.00	96,110.00	99,410.00
13.	Jasa Perusahaan	880.00	960.00	1,030.00	1,070.00	1,140.00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	419,720.00	421,470.00	429,990.00	430,680.00	430,860.00
15.	Jasa Pendidikan	82,520.00	89,920.00	94,630.00	95,280.00	97,850.00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,650.00	29,380.00	32,310.00	32,590.00	34,380.00
17.	Jasa lainnya	84,600.00	94,630.00	102,020.00	106,500.00	115,080.00
	PDRB	19,605,660.00	20,132,360.00	20,541,690.00	21,401,010.00	22,352,650.00

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 1.5 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,290,660.00	1,437,570.00	1,551,170.00	1,687,640.00	1,807,090.00
2.	Pertambangan dan Penggalian	93,220.00	108,900.00	120,470.00	121,860.00	116,790.00
3.	Industri Pengolahan	10,909,920.00	12,499,500.00	13,544,270.00	15,088,110.00	16,591,040.00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,560.00	11,690.00	18,030.00	24,520.00	27,100.00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,450.00	3,650.00	4,040.00	4,290.00	4,740.00
6.	Konstruksi	2,556,620.00	2,562,180.00	2,869,880.00	3,214,660.00	3,494,630.00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,014,810.00	4,589,150.00	4,691,520.00	5,000,290.00	5,250,800.00
8.	Transportasi dan Pergudangan	615,010.00	727,110.00	807,760.00	877,800.00	941,570.00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	162,080.00	200,380.00	235,070.00	260,520.00	280,820.00
10.	Informasi dan Komunikasi	198,540.00	234,990.00	270,710.00	294,250.00	333,680.00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	578,400.00	366,130.00	355,030.00	365,890.00	374,030.00

12.	Real Estate	100,010.00	113,120.00	127,220.00	134,710.00	143,280.00
13.	Jasa Perusahaan	1,070.00	1,220.00	1,420.00	1,550.00	1,660.00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	474,550.00	494,470.00	524,620.00	541,620.00	552,870.00
15.	Jasa Pendidikan	96,840.00	122,920.00	142,980.00	149,540.00	155,250.00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,350.00	37,780.00	46,880.00	49,790.00	53,470.00
17.	Jasa lainnya	95,670.00	117,700.00	142,500.00	158,360.00	175,540.00
PDRB		21,231,760.00	23,628,460.00	25,453,570.00	27,975,400.00	30,304,360.00

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017

Adapun Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Kontribusi Sektoral PDRB Tahun 2013-2017

No	Sektor/Sub sector	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
a.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6.08	6.08	6.09	6.03	5.96	-0.62
b.	Pertambangan & penggalian	0.44	0.46	0.47	0.44	0.39	-0.09
c.	Industri pengolahan	51.38	52.90	53.21	53.93	54.75	5.45
d.	Pengadaan listrik dan gas.	0.04	0.05	0.07	0.09	0.09	0.05
e.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
f.	Bangunan	12.04	10.84	11.27	11.49	11.53	-0.80
g.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	18.91	19.42	18.43	17.87	17.33	-3.04
h.	Transportasi dan pergudangan	2.90	3.08	3.17	3.14	3.11	0.20
i.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0.76	0.85	0.92	0.93	0.93	0.26
j.	Informasi dan komunikasi	0.94	0.99	1.06	1.05	1.10	0.19
k.	jasa keuangan dan asuransi	2.72	1.55	1.39	1.31	1.23	-1.21
l.	Real estate	0.47	0.48	0.50	0.48	0.47	-0.02
m, n	Jasa perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
o.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosialwajib	2.24	2.09	2.06	1.94	1.82	-0.57
p.	Jasa pendidikan	0.46	0.52	0.56	0.53	0.51	0.04
q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.02
r, s, t, u	Jasa lainnya	0.45	0.50	0.56	0.57	0.58	0.14
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai Tahun 2018



BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 . Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk Periode Lima Tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 dijabarkan pernyataan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana - Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renstra - OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra - OPD dan mengacu pada RKPD, selanjutnya setiap OPD menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

A. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Visi Pembangunan Kota Dumai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai periode 2016 - 2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun
2021”***

B. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Misi Pertama :

” Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar”

2. Misi Kedua :

” Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”

3. Misi Ketiga :

” Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan”

4. Misi Keempat :

” Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”

5. Misi Kelima :

”Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan”

6. Misi Keenam :

“Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah”

7. Misi Ketujuh :

“Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu”

C. Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai, maka disusun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

Misi Pertama : “ Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar”

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting

- b) Peningkatan Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
 - c) Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
 - d) Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
 - e) Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
 - f) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
 - g) Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota.
 - h) Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
 - i) Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase
 - j) Peningkatan luas daerah resapan air
 - k) Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an
2. Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan
 3. Urusan Perhubungan
 - a) Pengembangan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
 - b) Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
 - c) Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL)
 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) Pengembangan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
 - b) Pengembangan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
 - c) Peningkatan Sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah / SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN.
 5. Urusan Lingkungan Hidup
 - a) Peningkatan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik

- b) Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
- c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

Misi Kedua : “ Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing”

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
 - a) Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
 - b) Pengembangan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
 - c) Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
 - d) Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya
 - e) Peningkatan sarana Pendidikan yang modern.
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a) Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
3. Urusan Perpustakaan
 - a) Pengembangan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan serta melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.
4. Urusan Kesehatan
 - a) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
 - b) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
 - c) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat
 - d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan
 - f) Peningkatan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.

- g) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
 - h) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif.
5. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
 - b) Peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
 - c) Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
 - d) Pembangunan GOR
 - e) Revitalisasi sarana olahraga
 - f) Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan

Misi Ketiga : " Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan"

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Peningkatan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM
 - b) Pengembangan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
 - c) Pengembangan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan
 - d) Pengembangan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar
 - e) Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mampu bersain di era global
 - b) Pengintegrasian Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
 - c) Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja
 - d) Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan
3. Urusan Sosial
 - a) Peningkatan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral
 - b) Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan

- c) Peningkatan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin
- d) Pemberdayaan kelompok usaha keluarga miskin
- e) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin
- f) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar
- g) Peningkatan lifeskill keluarga miskin
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS.
- i) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan / jaminan sosial
- j) Peningkatan sosialisasi manfaat keluarga berencana

Misi Keempat : “Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan “

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pemerintahan (Penunjang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan)
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik
 - b) Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir
 - c) Penyaluran aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
 - d) Peningkatan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.
 - e) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
 - f) Penyediaan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
 - g) Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
 - h) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
 - i) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja

- j) Peningkatan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
 - k) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - l) Peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel
 - m) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
 - n) Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable
 - o) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
 - p) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
 - q) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak daerah
 - r) Peningkatan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat
2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) Peningkatan kualitas administrasi kependudukan
 3. Urusan Ketenteraman dan Ketertian Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a) Peningkatan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya
 - c) Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai
 4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tidak kekerasan
 - b) Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
 - c) Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak
 5. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a) Peningkatan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - b) Peningkatan konektivitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

6. Urusan Kearsipan
 - a) Penerapan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
 - b) Peningkatan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Misi Kelima: “Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan”

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Urusan Pertanian
 - a) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
 - b) Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi, meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
 - d) Penguatan/Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis
2. Urusan Pangan
 - a) Peningkatan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a) Ekstensifikasi / intensifikasi pertanian dan sektor perikanan

Misi Keenam : “Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah”

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Urusan Perdagangan
 - a) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
 - b) Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan
 - c) Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa
 - d) Perluasan networking pelaku usaha perdagangan dan jasa

2. Urusan Perindustrian
 - a) Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan kawasan industry
 - b) Penataan kawasan industri
 - c) Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah
 - d) Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah
3. Urusan Penanaman Modal
 - a) Pemantapan kualitas pelayanan perizinan
 - b) Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor

Misi Ketujuh : “Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu”

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
 - a) Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
 - b) Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan
 - c) Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan
2. Urusan Kebudayaan
 - a) Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
 - b) Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
 - c) Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah, budaya dan tujuan wisata.
3. Urusan Pariwisata
 - a) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan

D. Prioritas Belanja Daerah.

Dalam proses penetapan prioritas belanja daerah Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Dumai mempedomani muatan RPJMD Kota Dumai tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018:

1. Penguatan dan Penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat
2. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
3. Memperkuat intensifikasi dan eksrenfikasi disektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan'
4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
6. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak
7. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai.



BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

A. Target Dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 1.142.375.956.774,98,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 245.309.400.186,50.
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 817.066.556.588,48.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 80.000.000.000

Tabel 3.1.
Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018
Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2017 dan Perwako No. 55 Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.309.400.186,50
	Pajak Daerah	117.586.537.699,50
	Retribusi Daerah	38.003.028.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.705.426.187,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83.014.408.300,00
B.	Dana Perimbangan	817.066.556.588,48
	Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48
	Bagi Hasil Bukan Pajak	136.751.398.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	178,155,413,000,00
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	80.000.000.000,00
	Pendapatan Hibah	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahannya	80.000.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
	Jumlah	1.142.375.956.774,98

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 telah menerima Alokasi Bantuan Keuangan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor Kpts.308/IV/2018, tentang Rekapitulasi Alokasi Bantuan Keuangan yang bersumber

dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, sehingga dengan demikian agar APBD Kota Dumai dapat berjalannya secara optimal, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sehingga komposisi APBD Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 1.159.576.556.774,98,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 245.309.400.186,50.
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 821.579.156.588,48.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 92.688.000.000.

Tabel 3.2.
Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018
Berdasarkan Perwako No. 31 Tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.309.400.186,50
	Pajak Daerah	117.586.537.699,50
	Retribusi Daerah	38.003.028.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.705.426.187,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83.014.408.300,00
B.	Dana Perimbangan	821.579.156.588,48
	Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48
	Bagi Hasil Bukan Pajak	136.751.398.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.668.013.000,00
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	92.688.000.000,00
	Pendapatan Hibah	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahanlainnya	80.000.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.688.000.000,00
	Jumlah	1.159.576.556.774,98

Selanjutnya sehubungan dengan tidak adanya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Riau, maka untuk keperluan mendesak yang meliputi gaji, tunjangan PNS, biaya tenaga kesehatan atau paramedis, biaya jasa tenaga kebersihan, biaya listrik, biaya jasa BPJS, JAMPERSAL dan Jasa

JAMKESKO, Kegiatan Mandatory, perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 1.196.221.556.774,98,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 245.309.400.186,50.
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 821.579.156.588,48.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 129.333.000.000.

Tabel 3.3.
Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018
Berdasarkan Perwako No. 57 Tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.309.400.186,50
	Pajak Daerah	117.586.537.699,50
	Retribusi Daerah	38.003.028.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.705.426.187,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83.014.408.300,00
B.	Dana Perimbangan	821.579.156.588,48
	Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48
	Bagi Hasil Bukan Pajak	136.751.398.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.668.013.000,00
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	129.333.000.000,00
	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahanlainnya	80.000.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.688.000.000,00
	Jumlah	1.196.221.556.774,98

Adapun rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018
Berdasarkan Perwako No. 57 Tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET APBD TAHUN 2018	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	1.196.221.556.774,98	1.189.231.664.305,87	99,42%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (A+B+C+D)	245.309.400.186,50	279.649.892.649,64	114,00%
A	PAJAK DAERAH	117.586.537.699,50	127.964.097.216,00	108,83%
1.	Pajak Hotel	4.383.077.030,00	3.569.533.379,00	81,44%
2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	5.583.367.638,00	148,89%
3.	Pajak Hiburan	748.550.000,00	984.303.315,00	131,49%
4.	Pajak Reklame	1.511.334.125,00	1.815.886.998,00	120,15%
5.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	9.173.550.000,00	14.312.249.023,00	156,02%
6.	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.731.422.845,00	19.609.529.109,00	117,20%
7.	Pajak Air Tanah	2.153.580.000,00	1.383.250.108,00	64,23%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.700.000,00	-	
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	70.000.000.000,00	74.437.783.477,00	106,34%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.663.123.699,50	6.153.714.169,00	80,30%
11.	Pajak Parkir	750.000.000,00	30.000.000,00	4,00%
12.	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	84.480.000,00	73,33%
B	RETRIBUSI DAERAH	38.003.028.000,00	30.677.523.061,00	80,72%
1.	Retribusi Jasa Umum	4.227.195.960,00	1.802.922.250,00	42,65%
	• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	900.000.000,00	505.315.000,00	56,15%
	• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	90.169.000,00	5,44%
	• Retribusi Pelayanan Pasar	589.200.000,00	577.675.000,00	98,04%
	• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	955.424.600,00	491.807.250,00	51,48%
	• Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	125.800.000,00	137.956.000,00	109,66%
2.	Retribusi Jasa Usaha	21.338.382.040,00	19.485.167.400,00	91,32%
	• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.035.945.040,00	856.816.800,00	42,08%
	• Retribusi Terminal	18.007.437.000,00	18.003.831.000,00	99,98%
	• Retribusi Tempat Khusus Parkir	530.000.000,00	27.282.000,00	5,15%
	• Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00%
	• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	285.000.000,00	136.548.100,00	47,91%
	• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00	439.689.500,00	97,71%
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	12.437.450.000,00	9.389.433.411,00	75,49
	• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.100.000.000,00	9.084.555.299,00	75,08%
	• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	4.600.000,00	46,23%
	• Retribusi Izin Gangguan	-	299.758.112,00	
	• Retribusi Izin Trayek	2.000.000,00	520.000,00	26%
	• Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	325.500.000,00	0	0,00%
C	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.705.426.187,00	2.189.648.098,00	32,65%
1.	PT. Bank Riau	1.347.426.187,00	1.342.156.713,00	99,61%
2.	PT. Pembangunan Dumai	5.000.000.000,00	636.087.382,00	12,72%

NO.	URAIAN	TARGET APBD	REALISASI	TINGKAT
3.	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	358.000.000,00	211.404.003,00	59,05%
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83.014.408.300,00	118,818,624,274.64	143,13%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	-	73.800.000,00	
2.	Jasa Giro Kas Daerah	1.285.000.000,00	1.987.983.135,91	154,71%
3.	Jasa Giro Bendahara	65.000.000,00	215.617.960,00	331,72%
4.	Penerimaan Bunga Deposito	3.505.136.986,00	2.289.302.925,74	65,31%
5.	Pendapatan Denda Pajak	-	1.130.032.271,00	
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	472.145.738,07	
7.	Pendapatan Denda Retribusi	-	38.006.889,00	
8.	Pendapatan dari Pengembalian dari Temuan	-	1.594.250.715,76	
9.	Pendapatan lain-lain	-	2.600.817.399,85	
10.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	12,744,500.00	
11.	Fasilitas Umum	110.000.000,00	193,170,000.00	175,61%
12.	Pendapatan BLUD RSUD Kota Dumai	65.000.000.000,00	96.273.930.627,21	148,11%
13.	Pendapatan BLUD Puskesmas	13.049.271.314,00	11.936.822.112,10	91,48%
II.	DANA PERIMBANGAN (A+B+C)	821.579.156.588,48	810.190.491.050,00	98,61%
A.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	211.723.054.588,48	216.671.128.595,00	102,34%
1.	Bagi Hasil Pajak	74.971.656.588,48	58.145.053.156,00	77,56%
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	136.751.398.000,00	158.526.075.439,00	115,92%
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00	427.188.089.000,00	100,00%
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.668.013.000,00	166.331.273.455,00	91,06%
1.	DAK Fisik	110.668.646.000,00	101.119.543.037,00	91,37%
2.	DAK Non Fisik	71.999.367.000,00	65.211.730.418,00	90,57%
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (A+B+C)	129.333.000.000,00	99.391.280.606,23	76,85%
A.	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	-	0,00%
1.	Hibah Dana BOS	36.037.000.000,00	-	0,00%
B.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	80.000.000.000,00	86.741.473.606,23	108,43%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17.882.352.398,00	16.789.310.688,41	93,89%
	• Kurang Bayar PKB 2017	1.250.775.101,00	1.955.816.573,00	156,37%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.914.860.372,00	13.887.319.048,82	116,55%
	• Kurang Bayar BBKN 2017	1.550.000.000,00	1.590.731.817,00	102,63%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	31.174.347.737,00	33.274.090.296,00	106,74%
	• Kurang Bayar PBBKB 2017	91.059.155,00	3.371.598.418,00	3702,65%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	734.968.487,00	58.638.779,00	79,55%
	• Kurang Bayar Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan 2017	5.023.119.467,00	101.147.269,00	2,01%
5.	DBH Pajak Rokok	8.000.000.000,00	10.697.575.078,00	133,72%
	• Kurang Bayar DBH Pajak Rokok 2017	2.378.517.283,00	4.489.245.639,00	188,74%
C.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	13.296.000.000,00	12.649.807.000,00	99,14%

NO.	URAIAN	TARGET APBD	REALISASI	TINGKAT
1.	Alokasi Gaji Guru Bantu	7.296.000.000,00	6.968.000.000,00	95,50%
2.	Alokasi PU & PR	6.000.000.000,00	5.681.807.000,00	94,70%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)	1.196.221.556.774,98	1.189.231.664.305,87	99,42%

Sumber: Data Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Un Audited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, rinciannya adalah sebagai berikut :

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 245.309.400.186,50,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 279.649.892.649,64,- atau 114,00% dari target semula. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 117.586.537.699,50,- terealisasi sebesar Rp 127.964.097.216,- atau 108,83% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 4.383.077.030,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.569.533.379,- atau 81,44% dari target semula. Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain:
 - Menurunnya tingkat hunian hotel (Room Accoupancy), yang mengakibatkan omzet/ penerimaan hotel menurun.
 - Adanya beberapa tunggakan dari beberapa hotel yang belum dibayar oleh pihak hotel
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 3.750.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 5.583.367.638,- atau 148,89% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini antara lain;
 - Hal ini disebabkan karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset Restoran meningkat
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 748.550.000,- dan realisasi

pencapaiannya sebesar Rp 984.303.315,- atau 131,49% dari target semula.

Faktor tercapainya target penerimaan ini antara lain :

- Naiknya penerimaan omset Pajak hiburan
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 1.511.334.125,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 1.815.886.998,- atau 120,15% dari target semula, hal ini disebabkan karena :
- Tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
 - Penagihan dilakukan secara terus menerus sehingga mengurangi jumlah tunggakan.
5. Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp 9.173.550.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 14.312.249.023,- atau 156,02% dari target semula. Faktor pendukung tercapainya target penerimaan ini karena meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik Non PLN oleh Perusahaan
6. Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 16.731.422.845,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 19.609.529.109,- atau 117,20% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini , antara lain pembayaran PPJ PLN yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Cab. Dumai dilakukan tepat waktu, hal ini disebabkan karena kebijakan yang dilakukan oleh Pihak PT. (Persero) PLN Pusat, bahwa sejak tahun 2012, Pihak PLN telah menerapkan aplikasi tata usaha langganan terpusat yang bernama AP2T, dimana database sudah terpusat untuk seluruh Indonesia, semua pembayaran PPJ telah terpusat dan langsung di transfer ke Kab./Kota di Indonesia, sehingga semua tagihan PPJ, pembayarannya atau penyalurannya ke Kas Umum Daerah dapat dilakukan tepat waktu.
7. Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp 2.153.580.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.383.250.108,- atau 64,23% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain.
- Adanya penurunan omzet atau penerimaan air tanah.
 - Tarif NPA yang ditetapkan oleh SK Gubernur lebih rendah dari pada SK Walikota Dumai

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 606.700.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 0,- atau 0,00% dari target semula. Faktor penghambat yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan ini adalah sebagai berikut :
- Adanya Surat Edaran dari Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No, 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya **melarang** Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara, dengan adanya surat edaran ini, maka Pemko Dumai belum bisa menerbitkan izin baru terhadap pengusaha Galian C, yang berimbas pada rendahnya penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 70.000.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 74.437.783.477,- atau 106,34% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena :
- Dilakukannya Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar, terlaksananya Kegiatan Analisis Zona Nilai Tanah, adanya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang PBB dan BPHTB, melakukan kegiatan pemutakhiran data objek pajak serta terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan PBB di 7 Kecamatan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 7.663.123.699,50,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 6.153.714.169,- atau 80,30% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan adalah karena rendahnya tingkat transaksi jual beli tanah di Tahun 2018 dan belum dapatnya data transaksi yang sebenarnya dari wajib pajak.

11. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 750.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 30.000.000,- atau 4,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
12. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 84.480.000,- atau 73,33% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena jumlah produksi sarang burung walet mengalami penurunan, dan petugas pemungut pajak selalu tidak bisa ketemu dengan pemilik usaha.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 38.003.028.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 30.677.523.061,- atau 80,72% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut ;

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 4.227.195.960,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 1.802.922.250,- atau 42,65%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut :
 - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp 900.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 505.315.000,- atau 56,15% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :
 - Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan pembayarannya dilakukan sekali setahun, sehingga masyarakat/ toko akan membayar retribusi menjelang akhir tahun.
 - Beberapa obyek retribusi tidak bersedia membayar retribusi karena sampahnya dikelola atau dibuang sendiri
 - Belum diterapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012

- Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional, seperti kontainer dan truk sampah karena ada yang mengalami kerusakan.
 - Objek pajak tidak bertambah dan wajib retribusi ada yang sudah tutup
- 2) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 1.656.771.360,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 90.169.000,- atau 5,44% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah :
- Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp 589.200.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 577.675.000,- atau 98,04% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah karena :
- Pedagang di sekitaran Jl. Ombak apabila di musim hujan dan pasang keling pada saat penertiban menolak untuk melakukan pembayaran retribusi.
 - Untuk kios di Pasar Lepin masih banyak yang kosong sejumlah 28 kios karena kurangnya minat masyarakat untuk berjualan di Pasar Lepin.
- 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp 955.424.600,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 491.807.250,- atau 51,48% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan antar lain disebabkan
- Masyarakat luas belum ada kesadaran untuk andil dalam melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.
 - Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
 - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit seperti penundaan perpanjangan STNK

apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.

- Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
- Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jempot bola ke pemilik kendaraan.

5) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi ditargetkan sebesar Rp 125.800.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 137.956.000,- atau 109,66% dari target semula

2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp 21.338.382.040,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 19.485.167.400,- atau 91,32%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.035.945.040,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 856.816.800,- atau 42,08%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut :

- Tidak tercapainya target Retribusi Sewa Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar Rp 335.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 344.900.000,- atau 102,96% dari target semula .
- Tidak tercapainya target Sewa Gedung/ Ruangan/ Aula dan Asrama yang dikelola oleh PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp 23.178.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 7.704.000,- atau 33,24%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target karena :

- Gedung serba guna yang dikelola oleh PT. Pembangunan Dumai masih belum dapat bersaing dalam hal kompetisi bisnis penyewaan gedung karena keterbatasan fasilitas yang disediakan. Fasilitas yang ada di gedung serba guna saat ini yakni kursi, listrik dan air yang harus dibeli

- PT. Pembangunan Dumai belum mempunyai *Concrete Pump* dan harus menambah *Mobile Truck Mixer* sebanyak 5 (lima) unit, tergantung dari hasil pendapatan pada tahun berjalan
 - Tercapainya target Sewa Mess (Kamar Standar AC) yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 107.850.000,- atau 119,83%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena naiknya tingkat hunian mess Pemko Dumai di Pekanbaru
 - Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Bandar Udara ditargetkan sebesar Rp 1.263.367.040,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 78.987.800,- atau 6,25% dari target semula.
 - Tidak tercapainya target Retribusi Workshop Konveksi ditargetkan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 4.800.000,- atau 33,33% dari target semula Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:
 - Belum adanya minat IKM Konveksi untuk menyewa workshop konveksi dikarenakan:
 - ✚ Terbatasnya modal usaha
 - ✚ Mahalnya upah tenaga kerja sehingga menyulitkan IKM untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang konveksi
 - ✚ Letak UPT BLI yang cukup jauh dari pusat kota
 - ✚ Sebagian alat rusak
 - Tidak tercapainya target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air ditargetkan sebesar Rp 310.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 301.175.000,- atau 97,15% dari target semula.
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kantin Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi pencapaian tahun 2018 sebesar Rp 11.400.000
- 2) Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp 18.007.437.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.003.831.000,- atau 99,98% dari target semula. Retribusi Terminal ini meliputi :

- Terminal Barang target sebesar Rp 17.949.587.000,- dan realisasi sebesar Rp 17.895.771.000,- atau 99,70%.
 - Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang target sebesar Rp 39.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 108.060.000,- atau 272,88%.
 - Retribusi Terminal Oplet target sebesar Rp 18.250.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0,00%.
- 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 530.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 27.282.000,- atau 5,15% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena:
- Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, hal ini dikarenakan tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, Pelabuhan Penumpang Roro dan Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan belum mencapai target
- 4) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 30.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 21.000.000,- atau 70,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini antara lain :
- Pemotongan ternak belum seluruhnya dilakukan di Rumah Potong Hewan di Bagan Besar.
 - Harga sapi yang masih tinggi
- 5) Retribusi Jasa Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 285.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 136.548.100,- atau 47,91% dari target semula. Retribusi Jasa Kepelabuhan ini meliputi:
- Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran) target sebesar Rp 200.000.000,- realisasi sebesar Rp 136.548.400,- atau 68,27%
 - Jasa Dermaga target sebesar Rp 85.000.000,- realisasi sebesar Rp 0,00,- atau 0,00%
- Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah :
- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat menggunakan

transportasi penyebrangan (roro).

- Dinas Perhubungan telah membuat kontrak dengan CV. Mundam Sejahtera dalam pengelolaan dermaga untuk meminta rekomendasi izin dari KSOP, namun tidak mendapat izin tersebut.
- Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 bahwa jasa labuh disetor ke kas negara melalui KSOP

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 439.689.500,- atau 97,71% dari target semula :

- Retribusi Pabrik Es Balok ditargetkan sebesar Rp 400.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 419.004.000,- atau 104,75% dari target semula.
- Retribusi Bibit Ikan, Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 20.685.500,- atau 41,37% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil dan Pengadaan Pakan Ikan untuk induk ikan masih belum memenuhi kadar gizi yang baik untuk menghasilkan bibit ikan yang baik dan berkualitas.

3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 12.437.450.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 9.389.433.411,- atau 75,49%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak tercapainya target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 12.100.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 9.084.555.299,- atau 75,08% dari target semula.
- 2) Tidak tercapainya target Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,- realisasi pencapaiannya Rp 4.600.000,- atau sebesar 46,23%.
- 3) Retribusi Izin Gangguan tidak ditargetkan pada tahun 2018, namun ada realisasi pencapaiannya sebesar Rp 299.758.112,- dari target semula. Karena adanya pembayaran tunggakan oleh wajib retribusi izin gangguan yang belum melunasi kewajibannya di tahun-tahun

sebelumnya.

- 4) Tidak tercapainya target Retribusi Izin Trayek ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 520.000,- atau 26,00% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah menurunnya tingkat pengurusan izin angkutan kota.
- 5) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ditargetkan sebesar Rp 325.500.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 0,- atau 0,00% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
 - Tidak adanya izin perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 6.705.426.187,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 2.189.648.098,- atau 32,65% dari target semula. Perincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah:

1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank Riau ditargetkan sebesar Rp 1.347.426.187,- dan realisasai pencapaian sebesar Rp 1.342.156.713,- atau 99,61% dari target semula.
2. PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp 5.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 636.087.382,- atau 12,72% dari target semula.
3. PT. Pelabuhan Dumai Berseri ditargetkan sebesar Rp 358.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari target semula.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 83.014.408.300,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 118.818.624.274,64,- atau 143,13% dari target semula.

C. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 821.579.156.588,48,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 810.190.491.050,- atau 98,61% pada Pendapatan Daerah 2018. Penerimaan ini terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp 211.723.054.588,48,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 216.671.128.595,- atau 102,34% dari target semula. Dana ini terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp 74.971.656.588,48,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 58.145.053.156,- atau 77,56% dari target semula.
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp 136.751.398.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 158.526.075.439,- atau 115,92% dari target semula.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 427.188.089.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 427.188.089.000,- atau 100,00% dari target semula.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp 182.668.013.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 166.331.273.455,- atau 91,06% dari target semula.

D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp 129.333.000.000,- terealisasi sebesar Rp 99.391.280.606,23,- atau 76,85%. Penerimaan ini terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 36.037.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0,00%.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintahan lainnya

Dana ini ditargetkan sebesar Rp 80.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 86.741.473.606,23,- atau 108,43%. Adapun realisasi tersebut terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp 17.882.352.398,- dan realisasi sebesar Rp 16.789.310.688,41,- atau 93,89%. Dan Kurang Bayar PKB Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.250.775.101,- dan realisasi sebesar Rp 1.955.816.573,- atau 156,37%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp 11.914.860.372,- dan realisasi sebesar Rp 13.887.319.048,82,- atau 116,55%. Dan Kurang Bayar BBNKB Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.550.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.590.731.817,- atau 102,63%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp 31.174.347.737 dan realisasi sebesar Rp 33.274.090.296,- atau 106,74%. Dan Kurang Bayar PBBKB Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 91.059.155,- dan realisasi sebesar Rp 3.371.598.418,- atau 3702,65%
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditargetkan sebesar Rp 734.968.487,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 584.638.779,- atau 79,55%. Dan Kurang Bayar AP Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 5.023.119.467,- dan realisasi sebesar Rp 101.147.269,- atau 2,01%
5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp 8.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 10.697.575.078,- atau 133,72%. Dan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 2.378.517.283,- dan realisasi sebesar Rp 4.489.245.639,- atau 188,74%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target untuk DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Triwulan IV Desember Tahun 2018.

c. **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya**

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp 13.296.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.649.807.000,- atau 95,14% yang terdiri dari :

1. Alokasi Gaji Guru Bantu, ditargetkan sebesar Rp 7.296.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 6.968.000.000,- atau 104,19%.
2. Alokasi PU&PR, ditargetkan sebesar Rp 6.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 5.681.807.000,- atau 94,70%.

E. **Permasalahan Dan Solusi**

Situasi perekonomian saat ini masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dimana berbagai krisis masih tetap berlangsung menimbulkan dampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Disisi lain perekonomian yang menurun tadi menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun **permasalahan** yang ada, antara lain:

- a. Belum semua Objek Pajak terdata dan terdaftar secara baik.
- b. Wajib Pajak belum melaporkan omzet sesuai dengan hasil transaksi atau kondisi sebenarnya
- c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum optimal

Adapun **solusi** yang diusulkan yaitu :

- a. Melakukan pendataan dan pendaftaran secara intensif dan *continue* (terus-menerus) terhadap Wajib Pajak.
- b. Melakukan pemeriksaan Wajib Pajak serta memasang alat perekam data transaksi (*tapping box*).
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban objek pajak.
- d. Melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah kepada wajib pajak.

F. **Pengelolaan Belanja Daerah**

a. **Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Kebijakan Umum Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan

dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Disamping itu juga untuk menerapkan kesepakatan antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap prioritas yang perlu dicapai dan ditingkatkan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 yang kemudian dibahas kembali dengan penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang, kemudian untuk dapat menjadi kegiatan dengan urutan prioritas, maka harus ditetapkan Strategis dan Prioritas Belanja Daerah. Strategis dan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam mencapai arah dan Kebijakan Umum APBD. Mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sehingga diperlukan adanya penentuan strategi dan pemilihan prioritas dalam upaya pencapaian arah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.142.375.956.774,98 dengan realisasi sebesar Rp. 1.112.539.432.590,74 atau 97,39%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2018 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Tabel 3. 5.
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
2	Belanja	1.142.375.956.774,98	1.112.539.432.590,74	(29.836.524.184,24)	97,39
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	507.020.227.369,00	478.490.986.107,00	(28.529.241.262,00)	94,37
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	495.892.458.089,00	465.147.119.027,00	(30.745.339.062,00)	93,80
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	7.975.000.000,00	11.098.600.000,00	3.123.600.000,00	139,17
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	2.652.769.280,00	2.245.267.080,00	(407.502.200,00)	84,64
2 . 1 . 8	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
2 . 2	Belanja Langsung	635.355.729.405,98	634.048.446.483,74	(1.307.282.922,24)	99,79
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.922.893.100,00	81.765.530.048,00	9.842.636.948,00	113,68
2 . 2 . 2	Belanja Barang Dan Jasa	389.631.726.186,39	377.938.084.053,74	(11.693.642.132,65)	97,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	173.801.110.119,59	174.344.832.382,00	543.722.262,41	100,31

Sumber : Data Un Audit (per tanggal 01/03/2019) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, BPKAD Kota Dumai

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2018 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Adapun anggaran belanja tidak langsung kota dumai pada tahun 2018 sebesar Rp. 507.020.227.369,00 dengan realisasi sebesar Rp. 478.490.986.107,00 atau 94,37 % yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 495.892.458.089,00 dengan realisasi sebesar Rp. 465.147.119.027,00 atau 93,80 %.
- b) Belanja Hibah sebesar Rp. 7.975.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.098.600.000,00 atau 139,17 %.
- c) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.652.769.280,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.245.267.080,00 atau 84,64 %.
- d) Belanja Tak Terduga Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi sebesar 0,00 atau 0,00%.

2) Belanja Langsung

Adapun anggaran Belanja Langsung Kota Dumai pada tahun 2018

sebesar Rp. 635.355.729.405,98 dengan realisasi sebesar Rp. 634.048.446.483,74 atau 99,79 % yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai Rp. 71.922.893.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.765.530.048,00 atau 113,68 %.
- b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 389.631.726.186,39 dengan realisasi sebesar Rp. 377.938.084.053,74 atau 97,00 %.
- c) Belanja Modal Rp. 173.801.110.119,59 dengan realisasi sebesar Rp. 174.344.832.382,00 atau 100,31 %.

2. Realisasi Belanja Menurut OPD Pemerintah Kota Dumai.

Adapun realisasi belanja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018, baik jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dapat terlihat pada **Tabel 3. 6** berikut ini.

Tabel 3. 6.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018.

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN (%)
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Dinas Pendidikan dn Kebudayaan			
	- Belanja Tidak Langsung	232.057.944.649,00	209.751.131.163,00	90,38
	- Belanja Langsung	67.905.130.551,00	66.180.466.667,00	97,46
2	Dinas Kesehatan			
	- Belanja Tidak Langsung	35.725.957.700,00	35.268.939.948,00	98,72
	- Belanja Langsung	59.154.377.475,00	59.482.360.606,00	100,55
3	Dinas Perhubungan			
	- Belanja Tidak Langsung	10.629.964.000,00	8.615.910.838,00	81,05
	- Belanja Langsung	15.736.024.292,00	14.217.552.206,00	90,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	- Belanja Tidak Langsung	8.928.792.070,00	8.119.881.997,00	90,94
	- Belanja Langsung	104.847.313.346,55	101.117.680.628,00	96,44
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	- Belanja Tidak Langsung	2.607.951.320,00	2.544.397.020,00	97,56
	- Belanja Langsung	44.047.173.435,60	28.934.846.323,00	65,69
6	Badan Pendapatan			
	- Belanja Tidak Langsung	11.352.026.285,00	12.327.038.937,00	108,58
	- Belanja Langsung	12.937.066.400,00	10.649.354.844,00	82,31
7	Dinas Sosial			
	- Belanja Tidak Langsung	2.403.539.860,00	1.887.164.602,00	78,51
	- Belanja Langsung	4.091.466.955,00	3.583.973.929,00	87,59
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	- Belanja Tidak Langsung	3.530.203.140,00	3.404.030.514,00	96,42
	- Belanja Langsung	4.199.696.560,00	3.564.306.789,00	84,87
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	- Belanja Tidak Langsung	3.235.839.480,00	3.082.343.635,00	95,25
	- Belanja Langsung	3.045.000.000,00	2.655.496.276,00	87,20
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			

	- Belanja Tidak Langsung	3.586.349.360,00	3.496.653.367,00	97,50
	- Belanja Langsung	5.169.707.408,00	4.845.828.615,00	93,74
11	Dinas Perikanan			
	- Belanja Tidak Langsung	3.513.529.440,00	3.229.743.302,00	91,92
	- Belanja Langsung	3.760.451.926,00	3.290.357.343,00	87,49
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	- Belanja Tidak Langsung	7.652.139.240,00	7.495.672.466,00	97,95
	- Belanja Langsung	9.882.030.050,00	9.463.137.245,00	95,76
13	Dinas Perdagangan			
	- Belanja Tidak Langsung	4.829.119.880,00	4.416.239.777,00	91,45
	- Belanja Langsung	3.895.097.675,00	4.721.615.496,00	121,21
14	Dinas Perindustrian, Koperasi , UKM			
	- Belanja Tidak Langsung	3.809.334.518,00	3.823.861.626,00	100,38
	- Belanja Langsung	4.025.525.665,00	3.570.716.376,00	88,70
15	Inspektorat			
	- Belanja Tidak Langsung	5.116.234.310,00	6.310.989.371,00	123,35
	- Belanja Langsung	4.018.579.868,00	3.395.487.100,00	84,49
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	3.734.977.010,00	3.721.428.014,00	99,63
	- Belanja Langsung	9.002.963.379,83	7.193.426.654,00	79,90
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
	- Belanja Tidak Langsung	2.852.613.100,00	2.516.216.087,00	88,20
	- Belanja Langsung	5.037.215.100,00	4.297.310.767,00	85,31
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	3.554.689.640,00	3.399.423.685,00	95,63
	- Belanja Langsung	2.885.162.900,00	1.625.339.718,00	56,33
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	- Belanja Tidak Langsung	3.230.555.540,00	2.999.780.598,00	92,85
	- Belanja Langsung	5.508.945.476,00	4.275.556.744,00	77,61
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	- Belanja Tidak Langsung	5.383.080.000,00	5.534.121.258,00	102,80
	- Belanja Langsung	7.075.625.400,00	5.550.552.253,00	78,44
21	Sekretariat DPRD			
	- Belanja Tidak Langsung	4.434.832.340,00	4.445.361.216,00	100,23
	- Belanja Langsung	22.477.200.000,00	18.482.825.443,00	82,22
22	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
	- Belanja Tidak Langsung	27.402.930.700,00	29.034.436.499,00	105,95
	- Belanja Langsung	118.056.307.590,00	135.986.450.162,74	115,18
23	Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja			
	- Belanja Tidak Langsung	5.501.410.140,00	5.377.548.919,00	97,74
	- Belanja Langsung	3.968.537.300,00	3.524.150.878,00	88,80
24	Dinas Lingkungan Hidup			
	- Belanja Tidak Langsung	4.102.961.460,00	4.144.029.676,00	101
	- Belanja Langsung	15.394.056.913,00	15.062.978.239,00	97,84
25	Ktr. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			
	- Belanja Tidak Langsung	1.053.636.240,00	1.038.461.982,00	98,55
	- Belanja Langsung	3.368.380.069,00	3.125.620.310,00	92,79
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	28.417.555.787,00	30.379.585.544,00	106,90
	- Belanja Langsung	12.479.963.633,00	9.966.412.639,00	79,85
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	- Belanja Tidak Langsung	2.556.405.940,00	2.586.077.752,00	101,16
	- Belanja Langsung	2.296.716.016,00	2.136.391.726,00	93,01
28	Sekretariat Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	15.268.873.240,00	14.860.813.634,00	97,32
	- Belanja Langsung	56.216.953.499,00	42.930.456.792,00	76,36
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

	- Belanja Tidak Langsung	3.052.513.740,00	3.454.417.089,00	113,16
	- Belanja Langsung	2.825.800.105,00	2.551.565.439,00	90,29
30	Kecamat an Dumai Barat			
	- Belanja Tidak Langsung	4.516.301.840,00	4.492.966.452,00	99,48
	- Belanja Langsung	3.048.637.550,00	3.017.677.546,00	98,98
31	Kecamatan Dumai Timur			
	- Belanja Tidak Langsung	5.062.820.280,00	4.994.292.761,00	98,64
	- Belanja Langsung	3.584.365.802,00	3.521.432.467,00	98,24
32	Kecamatan Bukit Kapur			
	- Belanja Tidak Langsung	5.668.896.840,00	5.505.058.573,00	97,10
	- Belanja Langsung	2.905.565.600,00	2.849.150.543,00	98,05
33	Kecamatan Medang Kampai			
	- Belanja Tidak Langsung	4.891.068.920,00	4.493.730.346,00	91,87
	- Belanja Langsung	2.331.506.000,00	2.275.872.129,00	97,61
34	Kecamatan Dumai Kota			
	- Belanja Tidak Langsung	5.743.272.360,00	5.443.819.611,00	94,78
	- Belanja Langsung	3.527.423.426,00	3.442.352.028,00	97,58
35	Kecamatan Dumai Selatan			
	- Belanja Tidak Langsung	5.433.834.220,00	5.257.063.708,00	96,74
	- Belanja Langsung	3.611.201.084,00	3.495.445.019,00	96,79
36	Camat Sungai Sembilan			
	- Belanja Tidak Langsung	5.348.530.180,00	5.275.789.526,00	98,63
	- Belanja Langsung	3.038.560.956,00	2.980.069.807,00	98,07

Sumber : Data Unaudit (pertanggal 15/2/2019) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Dumai

Keterangan **Tabel 3.6** diatas : Data Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 posisi **Un Audit..**



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintah.

Adapun Urusan Wajib beserta organisasi yang melaksanakannya adalah sebagai berikut

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Urusan Wajib Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Urusan Wajib Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Urusan Wajib Sosial oleh, Dinas Sosial.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Urusan Wajib Tenaga Kerja oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 5. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Urusan Wajib Perhubungan oleh Dinas Perhubungan;
 7. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Urusan Wajib Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 10. Urusan Wajib Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- C. Urusan Pilihan beserta organisasi yang melaksanakannya sebagai berikut :
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai;
 2. Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
 3. Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai.
- D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang beserta organisasi yang melaksanakannya sebagai berikut :
1. Urusan Pemerintah oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai dan 7 Kecamatan se-Kota Dumai;
 2. Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Kota Dumai;
 3. Urusan Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;
 4. Urusan Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;
 5. Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian dalam (%)
Angka melek huruf	99,45	99,46	100,01
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,5	99,74	100,24
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	92,26	93,19	101,01
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,98	99,98
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 339	1:290,70	85,75
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	1 : 473	1: 386,42	81,70
Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	83	98,10	118,19
Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	87	80,37	92.38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa baca tulis. Target capaian kondisi akhir 2017 adalah 99,53% sedangkan realisasi 2018 adalah 99,46% yang menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2017 tetapi jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,45% dapat dikatakan capaian telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian yaitu 100,01%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan angka melek huruf yaitu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD dan jenjang SMP. Selain itu untuk

penduduk yang putus sekolah, pada program ini terdapat kegiatan penyelenggaraan Paket A dan Paket B untuk menekan angka buta huruf.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Target Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2017 adalah 107,33%, pada tahun 2018 target capaian APM SD/MI/Paket A adalah sebesar 99,50% sedangkan realisasi tahun 2018 adalah 99,74% yang berarti capaian sudah mencapai target yaitu sebesar 100,24%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun usia masuk sekolah pendidikan dasar cenderung semakin cepat. Menurut data tahun 2016 siswa baru yang memasuki sekolah SD di tingkat pertama atau calon siswa yang mendaftar masuk SD atau sederajat lebih hampir 15% belum mencukupi umur 7 tahun. Bahkan masih ada yang belum mencapai umur 6 tahun.

Hal ini pada dasarnya diharapkan peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu sesuai dengan kematangan psikologi perkembangan anak dan sesuai juga dengan lingkungan pendidikan yang diterimanya. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa jika banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun secara usia belum cukup, yang seringkali diasumsikan seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi sebuah keluarga atau masyarakat.

Namun tentu saja selain berpengaruh terhadap kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pendidikan secara mental dan emosional, hal ini juga mempengaruhi angka partisipasi murni, dimana indikator ini membandingkan siswa SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun (bukan seluruh siswa SD/ sederajat) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Hal ini didukung oleh surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan umur calon peserta didik bagi sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dipandang penting karena jika aturan umur tidak secara ketat dilakukan pada tingkat SD/ sederajat akan mempengaruhi APM di tingkat pendidikan selanjutnya.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Capaian indikator ini sampai tahun 2017 adalah 100,89%, target tahun 2018 adalah sebesar 92,26% sedangkan realisasi tahun 2018 adalah 93,13% yang berarti capaian sudah melebihi target yaitu sebesar 101,01%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sama seperti APM SD/MI/SDLB/ Paket A, pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Hal ini tentu saja selain berpengaruh terhadap APM di tingkat pendidikan selanjutnya. Diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

d. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Indikator sasaran Angka Kelulusan (AL) SD/MI menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang SD/MI yang lulus pada tahun ajaran 2017/2018. Capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 100%, target tahun 2017 adalah sebesar 100% adapun realisasi tahun 2018 sebesar 100% yang berarti capaian sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung

peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

e. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS

Indikator sasaran Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang SMP/MTS yang lulus pada tahun ajaran 2017/2018. Capaian indikator ini pada tahun 2017 adalah 100%, target tahun 2018 adalah sebesar 100% adapun realisasi tahun 2018 sebesar 99,98% yang berarti capaian hampir memenuhi target yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya

f. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah untuk penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. Pada tahun 2018 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:290,70 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SD/MI dapat melayani kurang lebih 290 penduduk usia 7-12 tahun. Capaian tahun 2018 ini dapat dikatakan baik karena mendekati target yaitu 1:339 dengan persentase capaian yaitu 85,75%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah ini.

g. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercukupinya kebutuhan sekolah untuk penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2018 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah 1:386,42 hal ini berarti 1 sekolah jenjang SMP/MTs dapat melayani kurang lebih 386 penduduk usia 13-15 tahun. Capaian tahun 2018 ini dapat dikatakan baik karena mendekati target yaitu 1:473 dengan persentase capaian yaitu 81,70%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit

sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah ini.

h. Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, realisasi implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar pada tahun 2017 adalah sebesar 97,14% sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 83% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar sudah mengimplementasikan budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar. Pada tahun 2018 realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 98,10%, hal ini dapat dikatakan cukup baik karena persentasi capaian melebihi target yang ditetapkan. Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

i. Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Pada tahun 2017 realisasi penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar adalah sebesar 79,20% sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 87% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar menerapkan nilai-nilai agama. Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 80,37% yang dapat dikatakan baik karena walaupun belum mencapai target pada tahun 2018, tetapi capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, untuk indikator kinerja

yang belum tercapai diantaranya adalah pada urusan kebudayaan. Untuk selanjutnya diharapkan indikator-indikator ini dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 299.963.075.200,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 232.057.944.649,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 67.905.130.551. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 209.751.131.163,- atau 90,39% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 66.180.466.667,- atau 97,46%.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kegiatan :

a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) atau sebesar 99,46%. Adapun tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran bertambahnya ruang kelas yang dibangun.

b. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 198.560.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,28%. Kegiatan pembangunan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir.

c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 185.493.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 97,63%. Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat capaian sebesar 100%

d. Pengadaan mebeluer sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 97.640.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar

97,64%. Kegiatan pengadaan meubeler sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran

e. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 158.617.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau sebesar 99,14%. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Ruang kelas yang direhabilitasi.

f. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 53.991.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 44.441.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 82,31%. Kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk.

g. Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp dengan realisasi sebesar Rp. atau sebesar. Kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatkan prestasi kepala sekolah, guru dan siswa PAUD.

h. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.75.379.127,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 68.778.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 91,24%. Kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD.

i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 72.334.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 62.005.000,- (enam puluh dua juta lima ribu rupiah) atau sebesar 85.72%. Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD.

j. Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 78.931.000,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 66.540.000,- (enam puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 84,30%. Kegiatan Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatkan Kreatifitas Pendidik PAUD

k. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 113.477.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya prestasi guru dan siswa PAUD

l. Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 702.863.500,- (tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 571.016.047 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 81,24%. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.073.765.885,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp. 7.830.561.637,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,99%. Kegiatan pembangunan gedung sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Bertambahnya Sarana Pendidikan.

b. Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.465.445.989,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.551.106.934,- (tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 47,57%. Kegiatan penambahan ruang kelas tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya daya tampung pendidikan dasar

c. Penambahan ruang guru sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 727.600.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 697.263.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 95,83%. Kegiatan penambahan ruang guru sekolah tingkat capaian sebesar 100%.

d. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.857.061.200,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.841.335.300,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99,15%. Kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Jumlah laboratorium yang dibangun.

e. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. . 1.083.400.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.057.043.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 97,57%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat capaian

sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir.

f. Pembangunan ruang ibadah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 198.880.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,44%. Kegiatan Pembangunan ruang ibadah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Jumlah ruang ibadah yang dibangun.

g. Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitary

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.444.524.102,- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.875.014.102,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu seratus dua rupiah) atau sebesar 89,54%.. Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi sekolah.

h. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 596.426.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,40%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa.

i. Pengadaan Meubeler

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 515.110.000,- (lima ratus lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 98.68%. Kegiatan pengadaan meubeler sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan meubiler disekolah.

j. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.354.990.130,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus

Sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.738.581.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 81.63%. Kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terciptanya kenyamanan proses pembelajaran

k. Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.755.294.324,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.749.342.324,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 99.87%. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Ruang kelas dalam kondisi baik.

l. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 153.896.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 130.853.640,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 85.03%. Kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatkan kualitas dan kompetensi Guru khususnya dalam pembuatan kurikulum.

m. Penyediaan Bantuan Operasional sekolah BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. . 4.126.319.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.537.815.140,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus empat puluh rupiah) atau sebesar 85.74%. Kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terpenuhinya indeks kebutuhan siswa per tahun yang disubsidi.

- n. Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.025.000,- (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 91.98%. Kegiatan penyelenggaraan Paket A setara SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SD/setara di Kota Dumai.
- o. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.415.000,- (seratus dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 88.411.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah) atau sebesar 86.33%. Kegiatan penyelenggaraan Paket B setara SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SMP/setara di Kota Dumai.
- p. Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 150.006.200,- (seratus lima puluh juta enam ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 115.246.200,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 76.83%. Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai.
- q. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 396.660.199,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 347.818.087,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 87.69%. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.

- r. **Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 285.798.400,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 281.798.400,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 98.60%. Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai.
- s. **Penyediaan Beasiswa Transisi**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.445.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.152.723,- (sebelas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 97.45%.. Kegiatan penyediaan beasiswa transisi tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Jumlah pembuatan SPJ transisi.
- t. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 233.549.150,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 118.617.750,- (seratus delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 50.79%. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terdatanya program wajib belajar sembilan tahun.
- u. **Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 375.621.762,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 362.309.357,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96.46%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.
- v. **Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 924.673.400,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 879.961.053,- (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 95.16%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

w. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 249.287.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 249.287.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

x. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 377.674.019,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 376.748.469,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 99.75%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

y. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 273.670.600,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 273.670.600,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

- z. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 209.794.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 209.794.000,- (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- aa. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 269.894.290,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 267.286.935,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 99.03%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- bb. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 125.173.050,- (seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 124.509.550,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99.47%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.
- cc. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 204.850.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 204.850.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

- dd. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 262.539.600,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 262.539.600,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- ee. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 251.303.600,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 251.303.600,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- ff. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 382.360.500,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 382.360.500,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- gg. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 526.244.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 525.688.945,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 99.89%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

- hh. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 134.580.400,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 134.580.400,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- ii. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Negeri Binsus
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 734.138.275,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 722.542.075,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98.42%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Negeri Binsus tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- jj. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 244.507.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 244.507.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- kk. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 251.641.750,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 239.141.750,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 95.03%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17 tingkat capaian sebesar

100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

II. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 207.057.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 204.807.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) atau sebesar 98.91%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

mm. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 240.582.600,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 239.734.600,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99.65%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

nn. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.149.061.900,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 902.745.791,- (Sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 78.56%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terlaksananya pelaksanaan ujian nasional tingkat SD dan SMP

oo. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 272.271.600,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 272.271.600,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau

sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

pp. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 243.635.100,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 243.635.100,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

3. Program Pendidikan Non Formal

a. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 260.779.980,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 218.570.660,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 83.81%. Kegiatan Pengembangan kebijakan pendidikan non formal tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya tenaga pendidik non formal yang berkualitas

4. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 155.045.750,- (seratus lima puluh lima juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 135.037.750,- (seratus tiga puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 87.10%. Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya kompetensi guru dan pengawas sekolah.

b. Pelaksanaan uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 188.620.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (nol) atau sebesar 0%. Kegiatan uji

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran adalah meningkatnya kemampuan dan keahlian guru.

c. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 134.499.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 119.728.500,- (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 89.02%. Kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standard kompetensi tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terpenuhi kompetensi guru untuk kurikulum.

d. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 327.764.865,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 277.177.100,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar 84.55%. Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Kreatifitas Mengajar guru semakin baik.

e. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.578.090.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.024.096.000,- (empat belas milyar dua puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 185.07%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional 2. Meningkatnya kesejahteraan PTK.

f. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 415.231.900,- (empat ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 370.680.806,- (tiga ratus

tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam rupiah) atau sebesar 89.27%. Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Adanya Kesejahteraan tenaga pendidik.

- g. Pengembangan Sistem Perencanaan dan pengendalian Program Profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 352.768.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 249.428.080,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) atau sebesar 70.71%. Kegiatan pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya guru mengikuti pelatihan.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 80.850.000,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 86.58%. Kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya laporan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.

- b. Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 343.206.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 332.170.578,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 96.78%. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya laporan monitoring yang efisiensi dan efektifitas

- c. Pembinaan Komite Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 32.881.000,- (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 19.536.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 59.41%. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terlaksananya sekolah berwawasan lingkungan (Sekolah bersih)

d. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.085.739.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 872.828.158,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 80.39%. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan.

e. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 951.749.250,- (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 831.586.731,- (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 85.48%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Peserta yang mengikuti kegiatan.

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 147.246.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 122.063.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 82.90%. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya sarana dan prasarana sekolah se Kota Dumai. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat

capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 184.631.500,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 165.011.350,- (seratus enam puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 89.37%. Kegiatan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Berkembangnya budaya dan pariwisata

b. Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 79.596.500,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 55.984.386,- (lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 70.34%. Kegiatan Pengembangan nilai dan geografi sejarah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Berkembangnya nilai dan geografi sejarah

c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 235.618.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 211.856.200,- (dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 89.92%. Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Jumlah entry registrasi cagar budaya Kota Dumai.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 455.500.000,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 363.147.453,- (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 79.73%.. Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah tingkat

capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terjaganya seni dan budaya daerah.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan
Kota Dumai Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 22	7,1.0	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 30	9,00	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	115	63,40	100%
4.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,00	70,37	100%
5.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	1	0,01	100%
6.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	85,39	97,03%
7.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0,79	100%
8.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	57	44,51	100%
9.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 3	0,02	100%
10.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 6	0,31	100%
11.	Jumlah				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

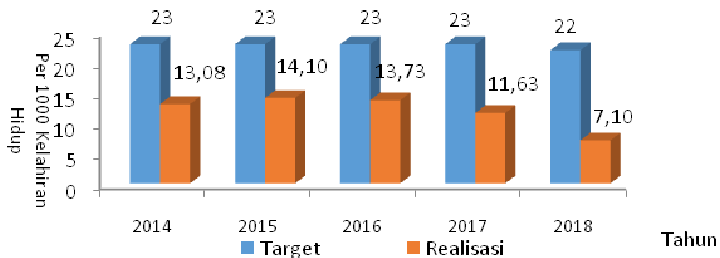
Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2018 adalah sebesar 99,26%, meningkatnya status gizi pada tahun 2018 adalah sebesar 100%.

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 56 kasus dari 7.886 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 7,10 per 1.000 kelahiran hidup. Bila

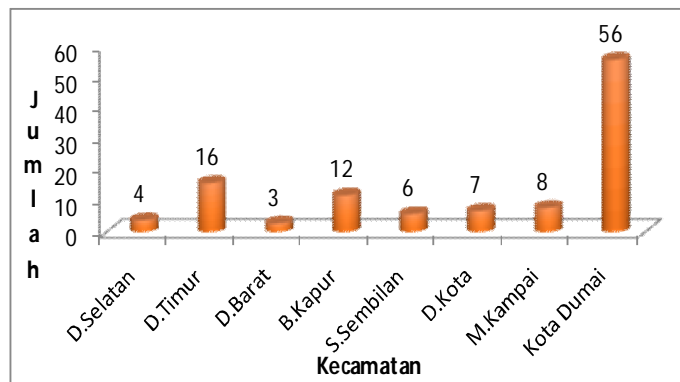
dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dimana angka kematian bayi sebesar 11,63 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2018 yakni 22 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2014 sampai dengan 2018 Kota Dumai dapat pada Gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 16 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 12 kasus, seperti terlihat pada Gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2. Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018

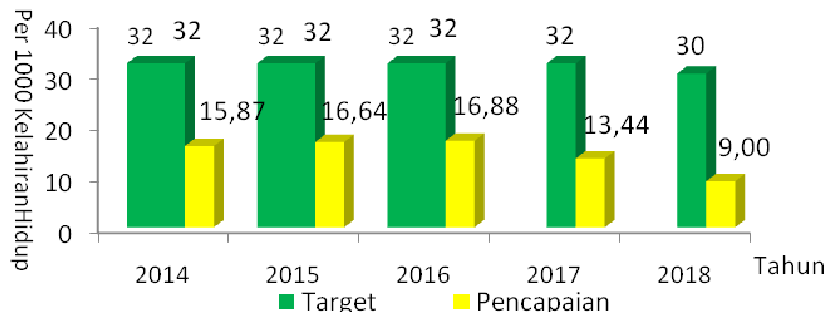


Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

b. Angka Kematian Balita

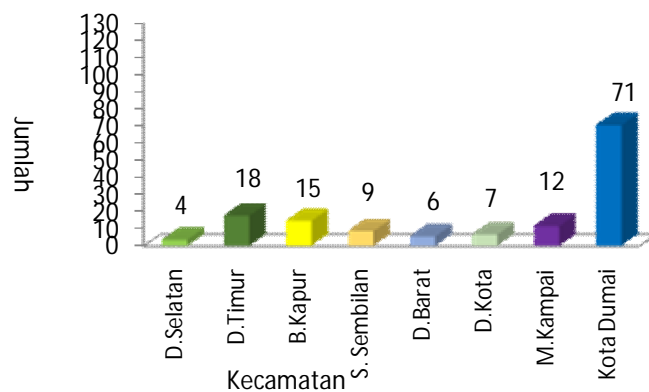
Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 71 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2018 di Kota Dumai sebesar 9,00 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dimana angka kematian bayi sebesar 13,44 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya penurunan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2018 yakni 30 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2014 sampai dengan 2018 Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 18 kasus, disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 15 kasus, seperti terlihat pada Gambar 4.4 berikut ini

Gambar 4.4. Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018

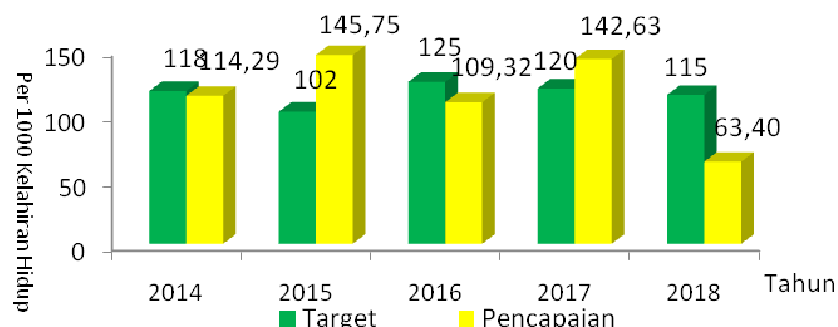


Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan Penyebab lain.

c. Angka Kematian Ibu

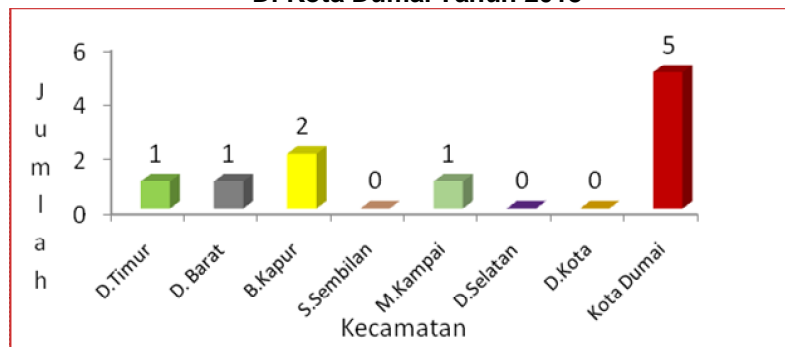
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 5 kasus dari 7.886 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2018 di Kota Dumai sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, di mana angka kematian ibu sebesar 142,63 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada penurunan angka kematian ibu pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2018 yakni 115 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini dibawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Kota Dumai dapat di lihat pada Gambar 4.5 berikut ini :

Gambar 4.5. Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018



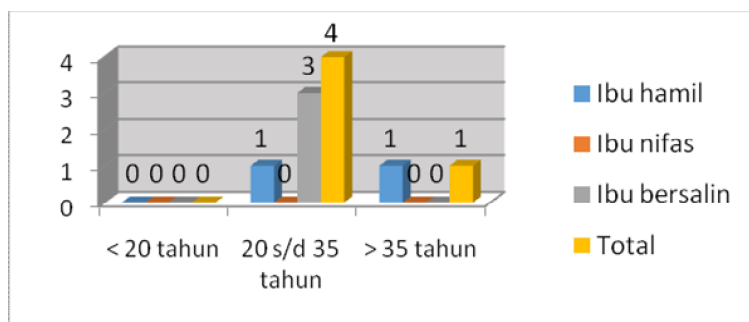
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 2 kasus, seperti terlihat pada Gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena pre eklmiasi sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun yakni sebanyak 4 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu bersalin sebanyak 3 kasus seperti terlihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 4.7. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2018

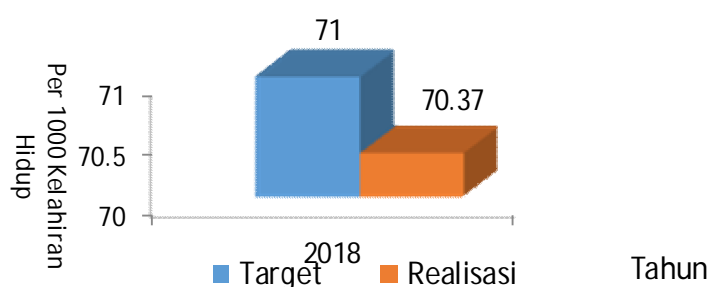


d. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2017 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Pada tahun 2018 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,37 tahuntahun (diasumsikan sama dengan tahun 2017 karena

data terbaru dari BPS belum ada). Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 yakni sebesar 70,31 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2018 dapat di lihat pada Gambar 4.8 berikut ini :

Gambar 4.8. Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2018



Tabel 4.3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2010 sampai dengan 2018

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	69,81	70,15	69,93
2.	2011	70,01	70,32	69,95
3.	2012	70,20	70,49	70,02
4.	2013	70,40	70,67	70,04
5.	2014	70,59	70,76	70,05
6.	2015	70,70*	70,93	70,25
7.	2016	70,70*	70,93	70,25
8.	2017	70,70*	70,97	70,31
9.	2018	70,70*	70,99	70,37

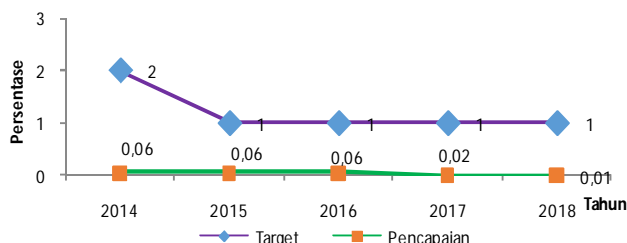
Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2017 (AHH," Life Expectancy of Population")

e. Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 519 kasus malaria klinis. Dari 519 kasus yang ada terdapat 2 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 di mana *Annual Parasite Incidence*(API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya menurun. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2018

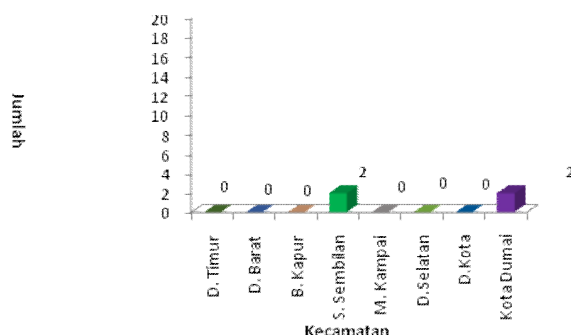
yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian dapat dilihat dari Gambar 4.9 dibawah ini:

Gambar 4.9. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan yakni sebanyak 2 kasus (40%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensi berkembangnya nyamuk malaria, seperti terlihat pada Gambar 4.10 berikut ini :

Gambar 4.10. Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018

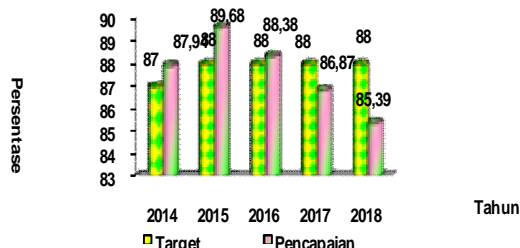


f. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2018 dari total 400 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 341 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 85,25%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 86,87%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2018 belum

mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat dari Gambar 4.11 berikut ini :

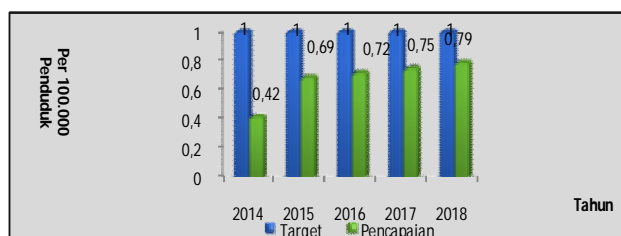
Gambar 4.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018



g. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

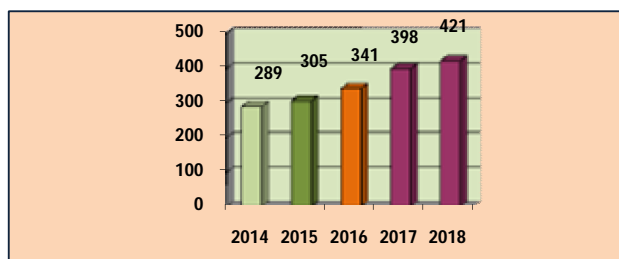
Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 421 kasus yang terdiri dari 398 kasus lama dan 23 kasus baru yang ditemukan tahun 2018. Dari 421 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 161 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 260 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2018 adalah sebesar 0,79% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 32.719 orang).

Gambar 4.12. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,75%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2018 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

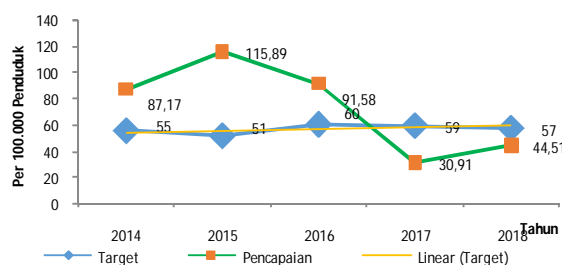
**Gambar 4.13. Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2014 s/d 2018**



h. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

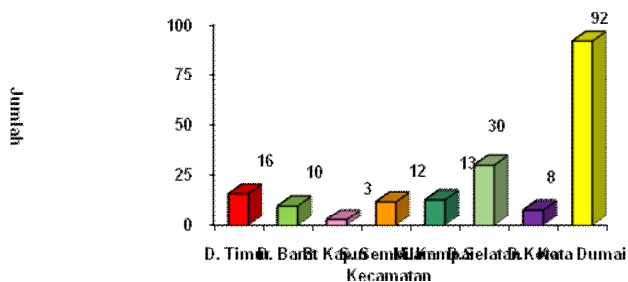
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2018 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 135 kasus atau IR = 44,51 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 2 orang atau CFR = 1,48%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 92 kasus atau IR = 30,91 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 1 kasus atau CFR = 1,09%, maka ada sedikit penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 57 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut dibawah target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ± 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan Gambar naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Gambar 4.14. Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan 2018



Kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 44 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Kota sebanyak 31 dan Dumai Barat 30 kasus, seperti terlihat pada Gambar 4.15 berikut ini:

Gambar 4.15. Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2018



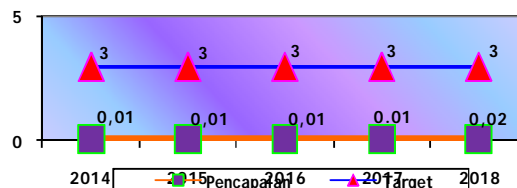
Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah terinfeksi (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi terinfeksi dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M² dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

i. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah

penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2013 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2018 ditemukan 6 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Bumi Ayu, Bukit Timah, Medang Kampai, Jaya Mukti dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2018 adalah 0,02%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 5 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2018 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Gambar 4.16. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018

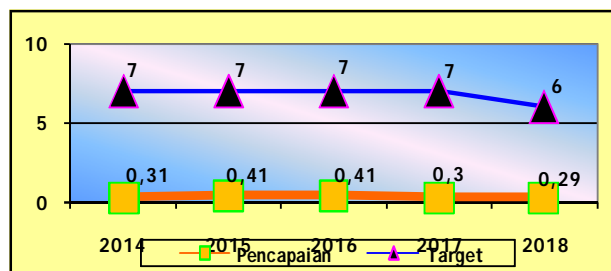


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

j. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2018 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 108 kasus dari 35.145 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,31%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,30%, terlihat ada penurunan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2018 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Gambar 4.17. Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2018 ditemukan 225 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2018 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 48 kasus balita gizi kurang.

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 94.880.335.175,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 35.725.957.700,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.59.154.377.475,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 35.268.939.948,- atau terserap 98,72 % dan belanja langsung terserap Rp. 59.482.360.606,- atau 92,74 %:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.583.907.200,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 2.249.835.675,- atau sebesar 87,07 % untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan dana sebesar Rp. 290.600.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 163.246.254,- atau sebesar 56,18%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun, jumlah pemakaian wifi dalam 1 tahun dan jumlah pemakaian air dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 184.200.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 158.837.000,- atau sebesar 86.23%. adapapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan realisasi 100%.

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 17.927.845,- atau sebesar 78,63%. Adapun indicator kinerjakeeluaran kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dengan realisasi 100%.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 307.566.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 292.890.000,- atau sebesar 95,23%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dinas kesehatan dan puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

e. Penyediaan alat tulis kantor

Pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 391.285.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 304.408.500,- atau sebesar 77,80%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun sebesar 100%.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 65.260.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 43.540.000,- atau sebesar 66,72%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun dengan realisasi sebesar 100%.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 8.238.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.602.000,- atau sebesar 92,28%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

Pada kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dialokasikan dana sebesar Rp. 5.065.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.4.677.000,- atau sebesar 92,34%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah peralatan kebersihan dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp.94.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 60.480.000,- atau sebesar 63,80%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

j. Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman dialokasikan dana sebesar Rp. 53.750.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 39.970.000,- atau sebesar 74,36%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman tamu selama 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan dana sebesar Rp.602.100.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.599.807.076,- atau sebesar 99,62 %. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

l. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor dialokasikan dana sebesar Rp.558.243.200,-dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 556.450.000,- atau sebesar 99,68%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor dinas kesehatan dan puskesmas dengan realisasi sebesar 100%

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.093.168.600,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.047.256.987,- atau sebesar 95,80 % untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pada kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 97.300.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 75.381.000,- atau sebesar 77,47%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi sebesar 100%.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 118.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 114.272.000,- atau sebesar 96,43%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi sebesar 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 85.693.600,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 85.210.000,- atau sebesar 99,44%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan realisasi sebesar 100%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 711.475.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 696.493.687,- atau sebesar 97,89%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 37.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 33.850.000,- atau sebesar 91,49%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 43.200.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 42.050.000,- atau sebesar 97,34%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah Printer yang terpelihara dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 335.024.520. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 288.888.500 atau sebesar 86,23% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dialokasikan dana sebesar Rp. 121.324.520,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 83.088.500,- atau sebesar 68,48%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional perawat dan perawat gigi sesuai kementerian tahun 2014 dan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrasi kepegawaian dengan realisasi 50%.

b. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Pada kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur dialokasikan dana sebesar Rp. 213.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 205.800.000,- atau sebesar 96,30%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas dengan realisasi 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 133.754.000. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 64.400.000 atau sebesar 48,15% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp. 133.754.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.400.000,- atau sebesar 48,15%. Adapun indicator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan konsolidasi realisasi capaian kinerja keuangan yang dihasilkan dengan realisasi 100%

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pada anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.429.972.000,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 5.088.517.267,- atau sebesar 93,71% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 5.429.972.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 5.088.517.267,- atau sebesar 93,71%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 24.172.991.822,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 23.030.177.466,- atau sebesar 95,27% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12.901.267.172,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp

12.767.369.100,-atau sebesar 98,96% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalahpelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan dengan realisasi sebesar 100%.

- b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.496.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.465.920.381,-atau sebesar 97,98% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%

- c. Peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 44.754.400,-. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 34.197.000atau sebesar 76,41% dari anggaran.Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelatihan mutu kader posyandu dengan realisasi semuanya 100%.

- d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.575.358.500,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.909.042.095,- atau sebesar 74,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi serta pelaksanaan workshop bedah kasus maternal dengan realisasi semuanya 100%.

- e. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 41.500.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 41.500.000,- atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera, jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program kesehatan jiwa dan jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan dengan realisasi semuanya 100%.

- f. Peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 6.995.227.750,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp

6.696.262.390,-atau sebesar 95,73% dari anggaran. Adapun indicator keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas dengan realisasi 75% dan, Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas, jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunat masal dan pelaksanaan kegiatan sahabat ambulance PSC 119 dengan realisasi semuanya 100%.

g. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp118.784.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp115.886.500,- atau sebesar 97,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS, Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas, dan pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit kota dumai semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp71.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp70.917.000 atau sebesar 99,88% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp71.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp70.917.000 atau sebesar 99,88% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah apotik yang diawasi dan di bina 30 sarana, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 30 sarana, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 35 sarana, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina 30 sarana dan jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina 10 puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.461.112.000,- Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.240.877.809,- atau sebesar 84,93% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp169.637.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp137.794.509,- atau sebesar 81,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif 20 kelurahan dengan realisasi 100%, jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan media cetak (buletin koran) 11 kali dengan realisasi 81,82%, dan jumlah pelaksanaan promkes dengan menggunakan mediatelevisi semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.211.274.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.027.403.300,- atau sebesar 84,82% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan PHBS tatanan sekolah 18 sekolah dengan realisasi 33,33%, jumlah penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya 45 sekolah, jumlah pelatihan guru pembina UKS, jumlah pelatihan dokter kecil semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

c. Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp80.200.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp75.680.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya 50 orang, jumlah puskesmas yang dibina 10 puskesmas, jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 50 tempat, jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis ketenagaan 10 puskesmas, dan jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 4 orang dengan realisasi sebesar 100%.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp401.380.900,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp338.196.900,- atau sebesar 84,26% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp165.432.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp117.663.800,- atau sebesar 71,13% dari anggaran. Adapun indikator

kinerja keluaran PMT pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk 30 balita dan pelaksanaan data bumil KEK dan PMT bumil KEK 13 orang semuanya

- b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp235.948.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp220.533.100,- atau sebesar 93,47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan pengumpulan data pemantauan garam beryodium 33 kelurahan, pengadaan balok SKDN 250 lembar dan peningkatan kinerja program gizi 60 orang, semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp1.288.348.055,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp1.264.171.250,- atau sebesar 98,12% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.288.348.055,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.264.171.250,- atau sebesar 98,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan survey study EHRA 1 kali semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp3.070.074.200,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp2.564.980.297,- atau sebesar 83,55% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

- a. Kegiatan penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp378.207.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp307.620.000,- atau sebesar 81,34% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan *fogging* fokus sebanyak 250 semuanya

mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- b. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
 Jumlah Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp72.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.148.000 atau sebesar 98,00% dari anggaran.
 Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD242 liter semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.
- c. Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp19.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp15.000.000,- atau sebesar 76,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah VAR yang disediakan 45 vial dengan realisasi 66,67%, dan jumlah pengambilan vaksin rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi 1 Tahun semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.
- d. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp601.187.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp418.257.000 atau sebesar 69,57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan catch up campaign campak SD di 114 SD dengan realisasi 26,32% dan pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah dengan realisasi semuanya sebesar 100%.
- e. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.081.205.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp998.273.967,- atau sebesar 92,33% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
 Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018
 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Terlaksananya larvasidasi massal	Kali	2	2	100%
Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif	Kasus	200	135	100%
Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB paru	Kasus	250	250	100%
Pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS	Puskesmas	10	10	100%
Pelaksanaan pengendalian penyakit IMS	Puskesmas	10	10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.4 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk terlaksananya larvasidasi massal, Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif realisasi 67,50%, Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru, pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan pelaksanaan pengendalian penyakit IMS semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Kegiatan peningkatan imunisasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp319.500.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp215.200.000,-atausebesar 67.36% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan peningkatan cakupan imunisasi di 10 puskesmas, pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin 12 bulan dengan realisasi 100%, dan jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi 150 kasus dengan realisasi sebesar 2,67%.

g. Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp597.875.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp539.491.330,-atau sebesar 90,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji, pelaksanaan vaksinasi meningitis jemaah calon haji, jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program kesehatan jiwa dan jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu semuanya mencapai cakupan 100%

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp13.972.648.765,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp12.437.075.855,-atau sebesar 89,01% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp79.880.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp38.860.000,-atau sebesar 48.65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018
Standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan	Dokumen	2	2	100%
Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp57.434.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp41.900.000 atau sebesar 72.95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah:

**Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018
Evaluasi standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen DHA yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.6 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun, dan jumlah dokumen DHA yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c. Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.216.860.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp1.120.470.577,- atau sebesar 92.08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan	Kali	2	0	0%
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	Puskesmas	10	10	100%
Jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	RS	3	3	100%

Dapat dilihat dari tabel 4.7 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp118.444.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 59.084.000,- atau 49.88% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 4.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2018
Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan	Dokumen	4	4	100%
Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel 4.8 diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah

dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.731.462.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.525.187.251,-atau sebesar 88.09% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp902.466.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp866.092.531 atau sebesar 95.97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

g. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.092.300.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.030.307.173 atau sebesar 94.32% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

h. Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.002.396.026 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.802.256.694 atau sebesar 90,01% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

i. Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp773.118.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp735.128.298 atau sebesar 95,09% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- j. Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.043.184.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp960.094.650 atau sebesar 92,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah adalahterlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.
- k. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp538.005.537 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp468.867.106 atau sebesar 87,15% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalahterlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.
- l. Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp2.307.517.300dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.813.346.876 atau sebesar 78,58% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalahterlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan100% dari realisasi target kinerja.
- m. Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp746.270.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp709.745.189 atau sebesar 95,11% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalahterlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan100% dari realisasi target kinerja.
- n. Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.363.310.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.265.715.510 atau sebesar 92.84% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalahterlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan100% dari realisasi target kinerja.
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp9.664.331.663. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp9.434.177.500 atau

sebesar 97,62% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pembangunan puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.6.173.610.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.974.352.000 atau sebesar 96,77% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibangun 2 unit dengan realisasi 100%

b. Kegiatan rehap sedang/berat puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.071.236.548 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.068.347.000 atau sebesar 99,73% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah rehabilitasi puskesmas sebanyak 1 puskesmas dengan realisasi 100%

c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.600.000 atau sebesar 95,20% dari anggaran.

d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 190.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 178.462.500,- atau sebesar 93,93% dari anggaran.

e. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.762.740.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 761.040.000 atau sebesar 99,78% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ambulance yang diadakan di puskesmas 2 unit dengan realisasi 100%

f. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.344.254.315 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.331.886.000 atau sebesar 99,08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan rehabilitasi puskesmas sebanyak 3 unit dengan realisasi sebesar 100%.

g. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp72.490.800 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp72.490.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pembinaan puskesmas sebanyak 4kali dengan realisasi sebesar 100%

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp237.543.105 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp166.499.100 atau sebesar 70,09% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp15.923.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.923.500 atau sebesar 62,32% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan evaluasi SDIDTK di 10 puskesmas, pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak 10 puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

b. Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp221.619.605 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp156.575.600 atau sebesar 70,65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali, jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan SDIDTK 20 orang, dan pelaksanaan pelatihan SHK (Skrining Hipotyroid Kongenital) 1 kali semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pada tahun 2018 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.227.015.210 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.196.389.000 atau sebesar 86,51% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp227.015.210 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp198.389.000 atau sebesar 86,51% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan bimbingan teknis program lansia, serta

Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program dengan realisasi semuanya sebesar 100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan WajibKesehatan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4. 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2018

Indikator kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Dalam (%)
Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)	80%	83,06%	103,83%
ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	3 Hari	3,52 Hari	117
TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai	1,5 Hari	0,94 Hari	63
BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur	78 Kali	65,8 kali	84
GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	31%	31,55%	102
NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	20%	16,66%	83%

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)

BOR (*Bed Occupancy Ratio*) Menurut Huffma (1994) adalah : The ratio of Patient Service days to inpatient bed count days in a period under consideration

"Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.

Angka persentasi tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai selama tahun 2018 yaitu 83,06 melebihi dari target yang telah di rencanakan di dalam RPJMD sebesar 103% namun demikian angka tersebut masih memenuhi standar Indikator DEPKRS 2005 .Adapun standar ideal BOR menurut depkes 2005 adalah 60 – 85%. Dan perlunya pengembangan rumah sakit untuk pelayanan lebih baik.

2. ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai

AVLOS menurut Huffman (1994) adalah " The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration AVLOS menurut

Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien.

Dengan demikian Rata rata lamanya seorang pasien dirawat di rumah sakit adalah 3,52 hari dengan capaian 117% selama tahun 2018, dengan target Indikator 3 Hari. Hal ini terjadi karena adanya status RSUD Kota Dumai sebagai Rumah Sakit Rujukan dan perubahan dari Tipe C ke Tipe B yang mengakibatkan banyaknya antrian pasien melakukan rujukan di RSUD Kota Dumai dari dalam dan luar Kota Dumai. Adapun standar ideal AVLOS menurut depkes 2005 adalah 6-9 hari.

3. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD di Kota Dumai

Menurut DEPKEKES 2005 TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak di tempati dari dan telah diisi ke saat terisi berikutnya. Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu antara waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya yaitu 0,94 dengan target 1.5 Hari, jumlah realisasi 63% dengan capaian kurang dari 100% dari taget yang di tetapkan pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya status RSUD Kota Dumai sebagai Rumah Sakit Rujukan dan perubahan dari Tipe C ke Tipe B yang mengakibatkan banyaknya antrian pasien melakukan rujukan di RSUD Kota Dumai dari dalam dan luar Kota Dumai . Adapun standar ideal TOI menurut depkes 2005 adalah 1-3 hari.

4. BTO, Frekuensi Pemakaian tempat tidur

BTO menurut Huffman (1994) ..*the net effect of changed in accupancy rate and length of stay*, BTO menurut DEPKEKES 2005 adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 78 kali dengan realisasi sebesar 84% atau 65,80 kali dari indicator ini terlihat ketidak efisiensi penggunaan tepat tidur di rumah sakit umum daerah kota Dumai. sedangkan batas ideal BTO adalah 40 – 50 kali/ pasien.

5. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 31,55 0/00 dengan capaian 102% dari target sebesar 31 0/00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum

daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien masih dalam batas normal. Hal ini sesuai dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar

6. NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumahsakit.

Indikator ini mempunyai target 20 0/00 dengan realisasi sebesar 83% angka ini lebih kecil dari 4,5% berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan pridikat mutu pelayanan yang semakain ber mutu dengan artian 25 orang dari setiap 1000 penderita keluar.

Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 30.594.961.100, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.55.247.929.435,00-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp.29.039.436.499,-atauterserap 94,91%danbelanja langsung terserapRp. 51.489.781.266,-. atau 93,19%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk program ini, jumlah anggaransebesar Rp. 6.556.560.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.158.918.568,- atau 93,94% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :

- a. PelayananPenyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.569.212.568,- atau 89,46 %, untuk 8 bulan.
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.333.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.255.202.000,- atau 96,65 %.
- c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%, dikarenakan Pihak ke 3 tidak bias menyelesaikan pekerjaan yang telah ditawarkan, mengakibatkan tidak terserapnya anggaran belanja yang telah di anggarkan.
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.264.000,- atau 51,81 %.
- e. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 748.266.000,- atau 99,70 %.
- f. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.659.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.549.974.000,- atau 93,42 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah program di anggarkan sebesar Rp. 103.250.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.89.119.000,- atau 86,31% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 93.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.983.000,- atau 87,92 %
- b. Pengadaan Mebeleur
dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.136.000,- atau 20,39 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 972.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 959.455.000,- atau 98,66%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah program dianggarkan sebesar Rp. 105.360.450,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.95 104.437.500,- atau 99,12% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp.35.660.600,- dengan realisasi sebesar Rp.35.312.800,- atau 100 %.
- b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggran
dialokasikan anggran sebesar Rp. 34.389.850,- dengan realisasi sebesar Rp.34.054.700,-,-atau 100%.

- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp.35.070.000,- atau 100.%
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp2.839.331.123,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.775.935.773,- atau 97,77% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
 - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.839.331.123,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.775.935.773,- atau 97,77%.
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan.
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.839.331.123,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.775.935.773,- atau 97,77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaannya akreditasi RSUD hasil terlaksannya akreditasi RSUD.
7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.792.409.362,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 29.683.499.162,-atau 93,37% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :
 - a. Pembangunan Rumah Sakit
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.21.554.337.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.920.298.017,- atau 92,42%.
 - b. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.689.363.312,-dengan realisasi sebesar Rp. 2.528.347.719,- atau 94,01%.
 - c. Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.087.547.050,- dengan realisasi sebesar Rp.4.003.504.161,- atau 97,94%..
 - d. Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 198.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.154.770.000,- atau 77,81%.

e. Pengadaan Logistik keperawatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.643.808.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 618.963.100,- atau 96,14%.

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru.

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.800.608.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.706.398.863,- atau 96,64% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.060.938.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.037.208.000,- atau 98,85%.

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 282.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 282.577.250,- atau 98,85 %.

c. Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,-Realisasi Rp. 0,- tidak dilakukan dikarenakan kerusakan kendaraan operasional tersebut terlalu besar mengakibatkan tidak dilakukan kegiatan tersebut.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 412.000.000,- Realisasi Rp. 353.118.613,- atau 85,66%

9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.812.486.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 8.838.334.100,- atau 90,71% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.708.095.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.742.405.000,- atau 90,05%.

b. Pelatihan dan Pendidikan tenaga Keperawatan RSUD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.391.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.929.100,- atau 91,89%.

10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar 65.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.84.496.669.431,- atau 130% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 65.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.84.496.669.431,- atau 130%. mengalami kenaikan sebesar 30% dari total anggaran dimana nilai ambang batas maksimal 30% tingkat capaian Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

**3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	800	888	111
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	53,85	51,82	96,23
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	56,80	56.80	100
Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	40	40	100
Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) terhadap permohonan KRK	%	80	80	100

Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	80	80	100
--	---	----	----	-----

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air MInum Perpipaan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 800 SR dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 888 SR atau 111%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, Rehabilitasi / Pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

2. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 53,85 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 51,82 atau 86,23 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan.

3. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 56,80 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 56,80 atau 100 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-

gorong.

4. Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 40 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 40 % atau 100 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir.

5. Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) terhadap permohonan KRK

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 80 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 80 % atau 100 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.

6. Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 80 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 80 % atau 100 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang, Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang, Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang, Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik target tahun 2018 sebesar 51,82% atau 96,23% capaian dari perbandingan antara realisasi dan target tahun 2018. Tidak tercapainya target persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ini dikarenakan pada penerapan target menggunakan SK jalan tahun 2016 dimana pada SK tersebut terdapat ruas jalan Nasional sepanjang 288,47 KM dalam kondisi baik

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 119.776.105.416,55,00,- dengan rincian Belanja

Tidak Langsung Rp. 8.929.792.070,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 110.847.313.346,55,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 8.119.881.997,00,- atau terserap 90,94% dan belanja langsung terserap Rp. 101.117.680.628,00,- atau 91,22%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 2.258.774.757,98 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.843.682.878,00 atau sebesar 81,62 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 638.545.208,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 298.686.620,00 dan atau sebesar 46,78 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 215.765.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 206.736.000,00 dan atau sebesar 95,82 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Service Peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 221.719.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 220.526.200,00 dan atau sebesar 99,46 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman dengan target 35 Ruang atau capaian realisasi 100%

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 185.884.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 155.682.427,00 dan atau sebesar 83,75 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%

- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 183.144.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.601.350,00 dan atau sebesar 99,16 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.320.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.320.000,00 dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%
- g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 37.080.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.300.000,00 dan atau sebesar 57,44 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun dengan target 324 EB atau capaian realisasi 100%
- h. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.906.909,00 dan atau sebesar 71,81 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%
- i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 473.466.749,98 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 472.073.372,00 dan atau sebesar 99,71 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.250.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

191.250.000,00 dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga kewanteran kantor dengan target 9 Orang atau capaian realisasi 100%.

- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.600.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.600.000,00 dan atau sebesar 93,24 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran dengan target 1 Orang atau capaian realisasi 100%
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 4.322.304.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.479.974.216,00 atau sebesar 80,51 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.408.020.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.242.859.853,00 dan atau sebesar 93,14 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang dibangun dengan target 2 Unit atau capaian realisasi 100%.
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 579.135.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 517.499.000,00 dan atau sebesar 89,36 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.765.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 56.842.600,00 dan atau sebesar 72,17 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 662.860.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

481.396.863,00 dan atau sebesar 72,62 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%

e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 593.524.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.375.900,00 dan atau sebesar 30,56 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 377.999.999,98 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.972.165,00 atau sebesar 73,01 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 377.999.999,98 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.972.165,00 dan atau sebesar 73,01 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 40 Orang atau capaian realisasi 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 300.009.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 290.344.850,00 atau sebesar 96,78 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 67.848.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.475.700,00 dan atau sebesar 89,13 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 59.406.800,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.524.050,00

dan atau sebesar 98,51 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Laporan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 172.754.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 171.345.100,00 dan atau sebesar 99,18 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 15.235.950.875,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.813.645.739,00 atau sebesar 90,66 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.315.913.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.268.301.900,00 dan atau sebesar 99,25 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 90 KM atau capaian realisasi 100 %

b. Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 172.218.450,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar 0 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena status tanah (lahan) belum selesai dalam tahap study kelayakan.

c. Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 828.237.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 538.132.340,00 dan atau sebesar 64,97 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipelihara dengan target 15 Unit atau capaian realisasi 100 %

d. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 704.734.100,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 612.458.000,00 dan atau sebesar 86,91 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 1000 M atau capaian realisasi 100 %

e. Pembangunan infrastruktur Air Bersih

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.214.847.925,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.394.753.499,00 dan atau sebesar 88,63 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersih dengan target 4000 Jiwa atau capaian realisasi 100 %

6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 326.542.650,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.245.150,00 atau sebesar 82,45 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 326.542.650,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.245.150,00 dan atau sebesar 82,45 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan prasarana yang dibangun dengan target 1 Unit atau capaian realisasi 100 %

7. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 81.050.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 75.672.737,00 atau sebesar 93,37 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.050.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 75.672.737,00 dan atau sebesar 93,37 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %

8. Program Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 149.221.810,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 126.251.810,00 atau sebesar 84,61 % yang direalisasikan

melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.570.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.570.000,00 dan atau sebesar 69,41 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen TABG dengan target 48 Dokumen atau capaian realisasi 100 %

b. Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.176.960,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.326.960,00 dan atau sebesar 97,88 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Survey Pemetaan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %

c. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 53.474.850,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.354.850,00 dan atau sebesar 90,43 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 100 %.

9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 47.728.190,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.178.190,00 atau sebesar 92,56 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 47.728.190,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.178.190,00 dan atau sebesar 92,56 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pengawasan IMB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

10. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 63.071.335.043,59 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.291.907.266,00 atau sebesar 95,59% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.

61.234.561.343,59 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.592.291.566,00 dan atau sebesar 95,69% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang jalan yang dibangun dengan target 10 Km atau capaian realisasi 100%.

b. Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.491.223.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.465.751.700,00 dan atau sebesar 98,29% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang dibangun dengan target 5 Unit atau capaian realisasi 100%

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 345.550.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 233.864.000,00 dan atau sebesar 67,68 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan bulanan kegiatan dengan target 5 Laporan atau capaian realisasi 100 %

11. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 7.802.525.295,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.854.113.750,00 atau sebesar 87,84 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.550.250.175,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.957.824.050,00 dan atau sebesar 90,96 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara dengan target 5 Ruas atau capaian realisasi 100%

b. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.252.275.120,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 896.289.700,00 dan atau sebesar 71,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Jembatan yang di Rehabilitasi/Pelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 2.092.229.850,00 dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.627.870.242,00 atau sebesar 77,81 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.842.422.650,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.382.386.042,00 dan atau sebesar 75,03 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat berat yang dipelihara dengan target 22 Unit atau capaian realisasi 68,18%.

b. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 249.807.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 245.484.200,00 dan atau sebesar 98,27% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara dengan target 15 Unit atau capaian realisasi 66,67%

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 4.988.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.469.847.450,00 atau sebesar 69,56 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 335.138.900,00 dan atau sebesar 67,03 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 66,67%. Selain menangani semenisasi jalan kegiatan ini juga melakukan pembangunan drainase sebanyak 3 unit.

b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 301.514.600,00 dan atau sebesar 60,30 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 83,33%. Selain menangani semenisasi jalan kegiatan ini juga melakukan pembangunan drainase sebanyak 1 unit.

c. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 493.279.600,00 dan atau sebesar 98,66 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 66,67%.

d. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 311.891.600,00 dan atau sebesar 62,38 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 66,67%.

e. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 721.407.400,00 dan atau sebesar 72,14 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 33,33%. Selain menangani semenisasi jalan kegiatan ini juga melakukan pembangunan jembatan sebanyak 3 unit dan drainase 1 unit.

f. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 705.104.650,00 dan atau sebesar 70,51 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 100%. Selain menangani semenisasi jalan kegiatan ini juga melakukan pembangunan jembatan sebanyak 1 unit..

g. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 988.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 601.510.700,00 dan atau sebesar 60,88% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 50,00%. Selain menangani semenisasi jalan kegiatan ini juga melakukan pembangunan aula gedung kantor 1 Unit, dan jembatan 1 unit.

14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 5.158.204.375,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.438.167.083,00 atau sebesar 86,04 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.216.024.600,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.798.899.583,00 dan atau sebesar 87,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dengan target 1200 M atau capaian realisasi 100%

b. Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.942.179.775,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.639.267.500,00 dan atau sebesar 84,40 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 3 KM atau capaian realisasi 100%.

15. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 606.687.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 453.108.950,00 atau sebesar 74,69 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 265.626.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 126.409.000,00 dan atau sebesar 47,59% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku perencanaan/DED Turap dengan target 13 Buku atau capaian realisasi 15,38%.

b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.061.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 326.699.950,00 dan atau sebesar 95,79 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang turap yang dibangun dengan target 125 M atau capaian realisasi 64,71%.

16. Program Pengendalian Banjir

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 4.028.749.000,00 dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.763.698.152,00 atau sebesar 93,42 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 975.964.800,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 842.541.752,00 dan atau sebesar 86,33 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di pelihara dengan target 300 M atau capaian realisasi 56,50%.
- b. Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 373.204.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 364.159.000,00 dan atau sebesar 97,58 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir dengan target 100 M atau capaian realisasi 100%.
- c. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.679.579.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.556.997.400,00 dan atau sebesar 95,43 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun dengan target 3 Unit atau capaian realisasi 66,67%

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bahwa dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat didalam renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2016-2021, maka dapat disampaikan pencapaian pada anggaran tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5,5 Ha	7 Ha	100%
Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	3,44%	3,82%	111%
Prosentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,8%	17,5%	625%
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	6%	23,84 %	397,33%

Ruas Jalan dengan sarana penerangan jalan umum	395 Rj	392 Rj	92%
--	--------	--------	-----

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

a. Fasilitas Lahan untuk Pemakaman Umum

Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh OPD terkait yaitu Tempat Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Pahlawan berjumlah 2 lokasi dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman. (Pada tahun 2018, pada obyek Taman Makam Pahlawan telah di serahkan dalam hal pengelolaannya pada OPD Dinas Sosial).

b. Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan

Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2018 jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 59 ruas jalan/gang dengan lebar lebih kecil dari atau sama dengan 3 meter. Adapun realisasi nya 3,82 % dengan capaian realisasinya 111%

c. Prosentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

Sesuai dengan buku MPS kota Dumai tahun 2015-2019 bahwa jumlah yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit yaitu IPAL, Tangki septic komunal dan MCK ++. Berdasarkan realisasi tahun 2018 telah terbangun 7 unit dengan realisasi IKU nya 17,5 %.. Adapun capaian realisasinya berjumlah 625 % .

d. Persentase pembangunan rumah tidak layak huni

Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan OPD DPRKP, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 2609 RTLH. Yang dilaksanakan pada tahun 2018 lebih kurang 622 unit, yang brsumber dari DAK, Dana Dekonsentrasi (regular), APBD provinsi dan APBD Kota Dumai. Adapaun realisasi IKUnya 23,84 % dengan capaian realisasinya 397,33%

e. Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada

tahun 2018 telah dilaksanakan \pm 23 paket (Ruas Jalan). Adapun capaian realisasinya 99,2%

Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 46.655.124.755,60 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.607.951.320,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 44.047.173.435,60,- Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.544.397.020,- atau terserap 97,56 % dan belanja langsung terserap Rp. 28.934.846.323,- atau 65,69 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 923.031.370,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 792.743.523,- atau sebesar 85,88 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dianggarkan dana sebesar Rp. 5.800.000,- dan telah digunakan sebesar Rp. 2.400.000,- atau terealisasi (41,38 %). Adapun indicator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata surat yang disampaikan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

dianggarkan dana sebesar Rp. 101.960.000,- dan telah digunakan sebesar Rp.60.660.789,- atau terealisasi (59,49 %), dana ini diperuntukkan sebagai operasional dan pelayanan kantor yang dibayarkan sesuai dengan tagihan pemakaian listrik air, dan telpon untuk kegiatan dinas. Adapun indicator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase kinerja yang baik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

dianggarkan dana sebesar Rp. 22.944.375,- dan telah digunakan Rp. 10.252.440,-. atau terealisasi (44,68%) Dana ini digunakan untuk kegiatan operasional rutin petugas lapangan dalam kegiatan pengawasan. Adapun indicator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

dianggarkan dana sebesar Rp. 56.435.350,- dan telah digunakan Rp. 44.567.900,-. atau terealisasi (78,97 %), dana tersebut digunakan sebagai bentuk pemeliharaan rutin kebersihan kantor berupa pembelian alat- alat

kebersihan untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan bersih dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase ruangan kerja yang bersih dan nyaman

e. Penyediaan alat tulis kantor

dianggarkan dana sebesar Rp. 110.132.845,- dan telah digunakan Rp.109.591.900,- atau terealisasi sebesar (99,51%). Dana tersebut digunakan sebagai bentuk kegiatan rutin pelayanan kantor berupa alat tulis untuk menunjang tugas rutin dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

dianggarkan dana sebesar Rp. 48.064.300,- dan telah digunakan Rp.36.511.000,- atau terealisasi sebesar (75,96 %) Dana tersebut digunakan sebagai bentuk kegiatan rutin pelayanan kantor berupa cetak blangko pelayanan perizinan dan fotocopy serta untuk menunjang tugas rutin dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen yang terakomodir

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

dianggarkan dana sebesar Rp. 12.507.000,- dan telah digunakan Rp. 11.222.000,- atau terealisasi sebesar (89,73 %) Dana tersebut digunakan. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi

h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

dianggarkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- dan telah digunakan Rp. 6.600.000,- atau terealisasi sebesar (82,50 %) Dana tersebut digunakan dalam bentuk penyediaan surat kabar setiap hari untuk sumber informasi bagi PNS dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makan dan minum

dianggarkan dana sebesar Rp.19.500.000,- dan telah digunakan Rp.7.100.000,- atau terealisasi sebesar (36,41 %) Dana tersebut digunakan untuk makan dan minum rapat dan tamu di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kota Dumai. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dianggarkan dana sebesar Rp.446.480.500,- dan telah digunakan Rp.445.180.506,- atau terealisasi sebesar (99,71%) Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam bentuk kunjungan dinas ke daerah lain untuk bertukar informasi dan melakukan perbandingan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan daerah lain. Adapun indicator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

- k. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor dianggarkan dana sebesar Rp. 91.207.000 dan telah digunakan Rp. 58.657.000,- atau terealisasi sebesar Rp. (64,31%). Dana tersebut digunakann untuk pembayaran gaji petuga jaga malam/Security sehingga terciptanya keamanan kantor. Adapun indicator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.081.586.743,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 792.294.000,- atau sebesar 73,25 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp.348.200.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.193.658.000,- atau terealisasi sebesar 55,62 %.. Adapun dana pada kegiatan tersebut di gunakan untuk melengkapi perlengkapan gedung kantor dengan indikator keluaran Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dianggarkan dana sebesar Rp.387.386.743,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.351.436.000,- atau terealisasi sebesar (90,72%). Adapun anggaran pada kegiatan ini di peruntukkan untuk perawatan kendaraan operasional di lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Adapun indikator Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dianggarkan dana sebesar Rp.346.000.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.247.200.000,- atau

terrealisasi sebesar (71,45%). Adapun indikator Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 24.162.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.654.000,- atau sebesar 93,76 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

dianggarkan dana sebesar Rp. 24.162.200,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 22.654.000,- atau terealisasi sebesar (93,76%). Dengan indicator Persentase identitas pekerja lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 81.803.717,72,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

dianggarkan sebesar Rp. 81.803.717,72 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan indikator keluarannya adalah Persentase kinerja pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penetapan Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 105.107.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.874.000,- atau sebesar 61,72 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dianggarkan dana sebesar Rp. 47.160.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.25.173.000,-. atau terealisasi sebesar (53,38%). Adapun indicator Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

dianggarkan dana sebesar Rp. 28.160.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.19.426.000,- atau terealisasi sebesar (68,98%). Adapun indicator Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

dianggarkan dana sebesar Rp. 29.787.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp.20.275.000,- atau terealisasi sebesar (68,07%). Adapun indicator Jumlah

Penyusunan rencana kinerja SKPD

6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.192.617.195,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 812.970.453,- atau sebesar 68,17 % yang direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 593.660.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 270.000.000,- atau 45,48 % Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 598.957.195,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 542.970.453,- atau 90,65 % adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

7. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.14.627.399.250,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.9.873.224.509,- atau 67,50% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.627.399.250,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.9.873.224.509,- atau 67,50% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik. Capaian realisasi kegiatan 67,5% masih belum optimal dilaksanakan, akibat dari 15 ruas jalan yang tidak dilaksanakan.

8. Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 383.799.100,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 383.799.100,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% . Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

9. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 13.357.419.852,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.046.593.818,- atau 30,29% Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.014.776.900,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 529.017.088 atau 26,26 % Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana rumah Sederhana Sehat. Capaian realisasi kegiatan tersebut disebabkan tidak dilaksanakan 20 unit RLH, akibat tidak sesuai dengan aturan terkait.

b. Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.342.642.952,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.517.576.730 atau 31,01 % Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pembangunan Sanitasi. Capaian realisasi kegiatan tersebut disebabkan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan SOP pusat dan sulitnya atas ketersediaan lahan.

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan merupakan kegiatan yang berjalan di bidang listrik, pada penerangan jalan umum pada khususnya. Adapun pada program ini memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum, dan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum. Adapun program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 12.270.247.007,88 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.529.492.008,- atau 102,11% :

a. Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum

Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum dianggarkan dana sebesar Rp. 1.787.051.877,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 1.469.210.709 atau terealisasi (82,21%). Dengan indicator Jumlah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum.

b. Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum dianggarkan dana sebesar Rp. 10.483.195.130,88,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 11.060.281.299,- atau terealisasi (105,50%). Dengan indicator Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum.

5. URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	100%	100%	100%
Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	70%	70%	100%

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

a. Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Kota Dumai yaitu 100% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 100% atau 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah. Adapun kegiatan ini merupakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

b. Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Dumai Kota Dumai yaitu 70% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 70% atau 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah. Adapun kegiatan ini merupakan Komunitas Intelijen Daerah yang disebut KOMINDA sebagai Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Dumai

Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.422.016.309,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.053.636.240,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.368.380.069,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.038.461.982,- atau terserap 98,56% dan belanja langsung terserap Rp. 3.125.620.310,- atau 92,79%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.316.533.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.226.318.453,- atau sebesar 93,15% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 184.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 178.050.000,- dan atau sebesar 96,50% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga administrasi dan perlengkapan surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.120.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 41.449.053,- dan atau sebesar 98,41% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan jaringan internet, air bersih dan telepon dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.600.000,- dan atau sebesar 27,08% adapun indikator kinerja keluaran

adalah partisipasi pada pameran Duami Expo dan pawai ta'aruf dengan target 3 kali atau capaian realisasi 35,00%.

d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 105.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 102.366.000,- dan atau sebesar 97,49% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga dan peralatan serta bahan kebersihan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.795.000,- dan atau sebesar 50,19% adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya peralatan kerja dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 55,00%.

f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 110.947.650,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 108.743.050,- dan atau sebesar 98,01% adapun indikator kinerja keluaran adalah alat-alat tulis kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 158.264.550,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 157.045.750,- dan atau sebesar 99,23% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya cetak dan baleho dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat listrik yang cukup dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp. 40.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan kantor yang cukup dengan target 100% atau capaian realisasi 100%.

- j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.760.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.225.000,- dan atau sebesar 73,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya surat kabar dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 90,00%.
- k. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.999.500,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya makanan dan minuman dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.160.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.760.000,- dan atau sebesar 56,42% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman tamu dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 75,00%.
- m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 409.602.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 409.585.100,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah aparatur yang mengikuti rapat dan koordinasi ke luar daerah dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- n. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 108.480.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.500.000,- dan atau sebesar 95,41% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dengan target 4 orang atau capaian realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 108.735.769,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.009.900,- atau sebesar 94,73% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 108.735.769,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.009.900,- dan atau sebesar 94,73% adapun indikator kinerja keluaran adalah kendaraan operasional yang terawat dengan baik dengan target 5 unit atau capaian realisasi 95,00%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 40.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- atau sebesar 56,25% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dan atau sebesar 56,25% adapun indikator kinerja keluaran adalah pelatihan yang diikuti dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 70,00%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 69.825.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.200.000,- atau sebesar 74,76% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.275.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dan atau sebesar 74,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen laporan dengan target 4 dokumen atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp. 23.275.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dan atau sebesar 74,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen laporan dengan target 2 dokumen atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.275.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dan atau sebesar 74,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen laporan dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 100%

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.738.555.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.629.330.337,- atau sebesar 93,72% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat inteligen daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 549.114.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 520.939.320,- dan atau sebesar 94,87% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota KOMINDA yang aktif dengan target 33 orang atau capaian realisasi 90,00%.

b. Kegiatan Pemantauan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.062.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 157.813.000,- dan atau 99,21% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terpantau dengan target 10 bulan atau capaian realisasi 95,00%.

c. Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 276.897.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 275.140.000,- dan atau 99,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing dengan target 10 bulan atau capaian realisasi 90,00%.

- d. Kegiatan Rumusan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 753.481.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 675.438.017,- dan atau 89,64% adapun indikator kinerja keluaran adalah :

- meningkatnya pengetahuan aparatur dan stakeholder yang terkait informasi potensi konflik dengan target 90%;
- terselenggaranya rakor/pertemuan rutin guna percepatan penyelesaian realisasi rencana aksi Kota Dumai Tahun 2017 dengan target 10 bulan. atau capaian realisasi 90,00%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 94.730.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.261.620,- atau sebesar 97,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 47.880.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.246.620,- dan atau 98,68% adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya pertemuan antara Pemerintah Kota Dumai dengan FKUB dengan target 4 kali atau capaian realisasi 95,00%.

b. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.850.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.015.000,- dan atau 96,08% adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya pertemuan antara Pemerintah Kota Dumai dengan FPK dengan target 4 kali atau capaian realisasi 85,00%.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Cakupan patroli petugas Satpol PP	2,35 Patroli/Kec	2,25 Patroli/Kec	100 %
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang Sigap dan Tanggap	30 %	30 %	100 %
Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Perwako	45 %	40 %	100 %
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketertiban, dan keindahan)	55 %	55 %	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Capaian keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli ini dengan kegiatan mengamati dan mengawasi kondisi kota yang mampu memberikan rasa tenang dan kondisi yang tertib dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan dan tempat keramaian/hiburan baik hiburan permainan maupun hiburan malam. Tetapi dalam implementasi Patroli yang dilaksanakan tidak mencakup 7 kecamatan se- Kota Dumai tetapi diprioritaskan sesuai kemampuan dan kekuatan personil di 4 Kecamatan, yaitu Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Selatan dan Dumai Barat :

$$\text{Cakupan Patroli} = \frac{3 \text{ kelompok} \times 3 \text{ kali}}{4 \text{ Kecamatan}} = 2,25 \text{ Patroli / Kec}$$

Sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian Laporan Kinerja Satpol PP Tahun tahun 2016 yang menggunakan rumusan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka disampaikan realisasi Cakupan Patroli dengan 4 Kecamatan yaitu:

$$\text{Cakupan Patroli} = \frac{2 \text{ kelompok} \times 3 \text{ kali}}{4 \text{ Kecamatan}} = 1,5 \text{ kalipatroli / Kec}$$

Maka terjadi peningkatan dari 1,5 Patroli/Kec menjadi 2,25 Patroli/Kec yang disebabkan ada penambahan anggaran operasional Satpol PP dan Efektifitas mobil patroli yang sudah bisa digunakan kembali. Patroli di 4 Kecamatan meliputi sasaran antara lain Penertiban Perizinan Usaha Warung Internet, Penertiban Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Sudirman dan area Bukit Gelanggang, Penertiban Karaoke yang melewati batas waktu izin operasi yang ditentukan oleh OPD Terkait, serta Pengawasan perizinan Tempat Usaha Salon dan Karaoke.

Namun pencapaian hal tersebut diatas masih dibawah target SPM Nasional yaitu 3 Patroli/Kec sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang Sigap dan Tanggap

Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan social kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

$$\text{Cakupan Petugas Linmas} = \frac{100 \text{ Org Petugas}}{1 \text{ Wilayah Kerja}} = X100\%$$

3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Perwako

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

$$\text{Penegakan Perda} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} = X100\%$$

4. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah

aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll. Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

$$\text{Penyelesaian K3} = \frac{\text{K3 yang diselesaikan}}{\text{Pelanggaran K3}} = X 100 \%$$

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9.469.947.440,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.501.410.140,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.968.537.300,-. Untuk realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 sebesar Rp. 8.736.209.647,- atau capaian realisasi 92,25%. Capaian tersebut dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.377.548.919,- Atau capaian 97,74% dan Realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.358.660.728,- atau capaian 84,63 %

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini sebesar Rp. 619.204.300,-, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 586.617.206,- yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dialokasikan dana sebesar Rp. 45.600.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 45.000.000,-. Adapun Target jumlah bulan

materai dan benda pos lainnya terpenuhi serta honorarium tenaga honor dibayarkan target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dialokasikan dana sebesar Rp. 76.920.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 56.280.147. Adapun Target jumlah bulan tagihan rekening telepon dan listrik serta jumlah bulan pembelian air, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dialokasikan dana sebesar Rp. 62.240.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 59.895.000. Adapun Target jumlah bulan panitia pengadaan barang jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan, serta admin RUP dibayarkan honorinya, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dialokasikan dana sebesar Rp. 43.745.800,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.577.000. Adapun Target jumlah bulan tenaga kebersihan dibayarkan honorinya dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dialokasikan dana sebesar Rp. 61.098.100,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.887.100. Adapun Target jumlah bulan alat tulis kantor dibutuhkan dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dialokasikan dana sebesar Rp. 16.841.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.835.300. Adapun Target jumlah bulan barang cetak dibutuhkan dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dialokasikan dana sebesar Rp. 15.216.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.216.000. Adapun Target jumlah bulan kebutuhan alat listrik dan elektronik dan lancarnya pelayanan administrasi

- perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Dialokasikan dana sebesar Rp. 21.600.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.600.000. Adapun Target jumlah bulan kebutuhan surat kabar harian dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dialokasikan dana sebesar Rp. 23.883.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.883.000. Adapun Target jumlah bulan bahan logistik kantor terpenuhi dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- j. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dialokasikan dana sebesar Rp. 241.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 240.388.871. Adapun Target jumlah bulan pegawai mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- k. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Dialokasikan dana sebesar Rp. 10.560.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.054.788. Adapun Target tenaga kontrak satpol pp yang di asuransikan dan persentase tenaga kontrak Satpol PP yang di asuransikan, dari target 44 orang terealisasi 44 orang atau capaian kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dialokasikan dana sebesar Rp. 42.203.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.025.000,-. Adapun Target pengadaan peralatan sarana dan prasarana gedung kantor dan lancarnya pelayanan operasional perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Dialokasikan dana sebesar Rp. 288.750.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 266.350.520. Adapun Target jumlah bulan kendaraan dinas / operasional terawat baik dan lancarnya kegiatan operasional perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dialokasikan dana sebesar Rp. 28.250.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.250.000. Adapun Target jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan dan lancarnya pelayanan operasional perkantoran, dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Dialokasikan dana sebesar Rp. 115.150.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.250.000,-. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dari target sebesar 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau capaian kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dialokasikan dana sebesar Rp. 90.300.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.994.980,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. P Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Dialokasikan dana sebesar Rp. 38.250.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.600.000,-

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dialokasikan dana sebesar Rp. 38.550.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.800.000

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dialokasikan dana sebesar Rp. 21.675.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.100.000

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sebesar Rp. 1.631.395.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.488.297.500,- (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) atau sebesar 91,22% dengan capaian target mencapai 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- a. **Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
Dialokasikan dana sebesar Rp. 963.675.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 893.010.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) Atau sebesar 92,66%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari target sebesar 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau capaian kinerja 100%.
- b. **Pengendalian Keamanan Lingkungan**
Dialokasikan dana sebesar Rp. 341.170.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 327.265.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Atau sebesar 95,92%. Adapun capaian indikator keluaran(output) kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dari target sebesar 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau capaian kinerja 100%.
- c. **Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka Hari Besar**
Dialokasikan dana sebesar Rp. 94.650.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) Atau sebesar 84,94%. Adapun capaian indikator keluaran(output) kegiatan Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka Hari Besar dari target 6 kegiatan terealisasi 6 kegiatan atau capaian kinerja 100%
- d. **Pengamanan dan Penertiban**
Dialokasikan dana sebesar Rp. 231.900.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 187.622.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) 80,90%. Adapun capaian indikator

keluaran(output) kegiatan Pengamanan dan Penertiban dari target 3 kali terealisasi 3 kali atau capaian kinerja 100%.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ini sebesar Rp. 717.130.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 616.277.672,- (Enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 85,93% dengan capaian indikator program yaitu persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan target 100% dengan realisasi sebesar 85,93% atau capaian target sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dialokasikan dana sebesar Rp. 277.280.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) , dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 203.322.090,- (dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 73,32%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dari target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan atau capaian kinerja 100%.
- b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dialokasikan dana sebesar Rp. 274.350.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 250.100.000,- (dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah), atau sebesar 91,16%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dengan target sebesar Jumlah Operasi Yustisi 2 kali terealisasi juga 2 kali dengan capaian kinerja 100%.
- c. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dialokasikan dana sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 162.855.582,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima

puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), atau sebesar 98,40%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ini sebesar Rp. 337.680.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 301.020.000,- (tiga ratus satu juta dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 89,14% dengan capaian indikator program yaitu peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan target sebesar 15%, maka realisasi sebesar 15% atau capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :
 - a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
dialokasikan dana sebesar Rp. 147.480.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 133.010.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 90,18%. Adapun capaian indicator keluaran (output) kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dari target 184 orang terealisasi sebanyak 184 orang atau capaian kinerja 100%.
 - b. Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai
dialokasikan dana sebesar Rp. 190.200.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 168.010.000,- (seratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 88,33%. Adapun capaian indicator keluaran (output) kegiatan Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai dari target 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau capaian kinerja 100%.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 yang

diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 4. 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dumai Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	8%	3,50%	99,14
2	Tingkat waktu tanggap darurat (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebencanaan	30% permukiman 15% lahan 20% hutan	12% permukiman 8% lahan 6% hutan	40% permukiman, 53% lahan, 30% hutan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Adapun Realisasi pelaksanaan Indikator pada Tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya

dengan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana dialokasikan dana sebesar Rp 117.585.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 58.453.200,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau 49,71%.

2. Tingkat waktu tanggap darurat (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebencanaan

Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana dialokasikan dana sebesar Rp 753.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 69.295.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 9,19% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kejadian penanganan bencana dengan target kinerja 100 kali kejadian (Hotspot).

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6.439.852.540,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.554.689.640,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.885.162.900 ,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.399.423.685,- atau terserap 95.63 % dan belanja langsung terserap Rp. 1.455.900.477,- atau 50,46%.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 733.891.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 546.427.446,- atau 74,46%

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 567.000, atau 14,54% dengan indikator keluaran jumlah materai 6000 dan 3000 dan target kinerja keluaran 800 lembar.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 96.000.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 42.718.926, atau 44,50% dengan indikator keluaran jumlah jasa telepon, listrik, internet dan air dan target kinerja keluaran 12 bulan
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 45.200.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 33.000.000, atau 73,01% dengan indikator keluaran jumlah pelaksanaan kegiatan Dumai Expo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha dan target kinerja keluaran 3 kali.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 72.706.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 64.343.000, atau 88,50% dengan indikator keluaran jumlah petugas kebersihan kantor dan target kinerja keluaran 4 orang.
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.700.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 2.895.000, atau 27,06% dengan indikator keluaran jumlah peralatan yang diservis dan target kinerja keluaran 17 unit
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 70.814.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 50.584.500, atau 71,43% dengan indikator keluaran jumlah kebutuhan ATK dan target kinerja keluaran 12 bulan.
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 27.900.300,- dengan realisasi penyerapan Rp. 2.827.000, atau 10,13% dengan indikator keluaran jumlah kebutuhan barang cetak dan target kinerja keluaran 12 bulan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.555.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 3.555.000, atau 100% dengan indikator keluaran jumlah kebutuhan komponen listrik dan target kinerja keluaran 12 bulan

- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 12.120.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 9.970.000, atau 82,26% dengan indikator keluaran jumlah koran/bahan bacaan kantor dan target kinerja keluaran 8 media/surat kabar
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 20.840.600,- dengan realisasi penyerapan Rp. 3.819.000, atau 18,32% dengan indikator keluaran jumlah rapat yang dilaksanakan dan target kinerja keluaran 12 kali
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 299.620.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 273.903.020, atau 91,42% dengan indikator keluaran jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta target kinerja keluaran 55 kali.
 - l. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 70.536.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 58.245.000, atau 82,57% dengan indikator keluaran jumlah tenaga keamanan kantor dan target kinerja keluaran 3 orang.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 277.263.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 180.372.370,- atau 65,05% :
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 18.865.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 5.800.000, atau 30,74% dengan indikator keluaran jumlah peralatan mesin dan alat kantor dan target kinerja keluaran 4 unit.
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 98.208.400,- dengan realisasi penyerapan Rp. 39.850.570, atau 40,58% dengan indikator keluaran jumlah peralatan komputer/laptop dan target kinerja keluaran 4 unit.
 - c. Pengadaan Mebeleur

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 4.350.000, atau 54,38% dengan indikator keluaran jumlah penyediaan pengadaan meubeler kantor dan target kinerja keluaran 4 unit.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 152.190.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 130.371.800, atau 85,66% dengan indikator keluaran jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara serta target kinerja keluaran 20 unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 54.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 13.500.000,- atau 24,77% :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 54.500.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 13.500.000, atau 24,77% dengan indikator keluaran jumlah PNS yang mengikuti diklat dan target kinerja keluaran 11 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.050.000,- atau 93,50% :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 6.450.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 6.450.000, atau 100% dengan indikator keluaran jumlah dokumen laporan yang disusun dan target kinerja keluaran 3 dokumen.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 12.900.000, atau 100% dengan indikator keluaran jumlah laporan triwulan dan prognosis dan target kinerja keluaran 6 laporan.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.650.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 8.700.000, atau 81,69% dengan indikator keluaran jumlah dokumen keuangan dan target kinerja keluaran 3 dokumen.

5. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 208.021.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 73.024.961,- atau 35,10%:

a. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam.

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 66.121.600,- dengan realisasi penyerapan Rp.23.242.000, atau 35,15% % dengan indikator keluaran tercapainya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana se Kota Dumai dan target kinerja keluaran 12 bulan.

b. Identifikasi Potensi dan Dampak Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 141.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.782.961,- atau 35,08% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.782.961,- atau 35,08% dengan indikator keluaran tersedianya dokumen data informasi bencana dan target kinerja keluaran 1 dokumen.

6. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 710.151.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 486.777.500,- atau 68,55%:

a. Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.794.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.442.000,-atau 51,71% dengan indikator keluaran jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan ancaman bahaya kebakaran dan target kinerja keluaran 80 orang.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 122.870.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.695.000,-atau 66,46% dengan indikator keluaran jumlah peralatan dan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis dengan target kinerja keluaran 16 unit.

c. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 555.487.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 388.676.500,-atau 69,97% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 388.676.500,- atau 69,97% dengan indikator keluaran jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dan target kinerja keluaran 7 kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 753.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 69.295.000,- atau 9,19%:

a. Fasilitas Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 753.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 69.295.000,- atau 9,19% dengan indikator keluaran jumlah kejadian penanganan bencana, target kinerja keluaran 100 kali kejadian (hotspot).

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 117.585.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.453.200,- atau 49,71%:

a. Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 117.585.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.453.200,- atau 49,71% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.453.200,- atau 49,71% dengan indikator keluaran jumlah yang mengikuti rakor penanggulangan daerah rawan bencana, target kinerja keluaran 14 orang.

6. URUSAN WAJIB SOSIAL

DINAS SOSIAL

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Sosial Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Sosial
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Dalam (%)
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	48%	47%	98%
Persentase PMKS yang tertangani	26%	19%	73%
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk	80%	49%	61%

pemenuhan kebutuhan dasar			
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	6%	5%	83%

Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk di dalam indikator kinerja sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 48% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 47% dengan capaian 98%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH). Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2013. Di Tahun 2018 jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 5.410 KPM dengan nilai sebesar Rp. 1.440.953.500 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kegiatan Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu. Adapun kegiatan ini Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan.

2. Persentase PMKS yang tertangani

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 26% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 19% dengan capaian 73%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal. Adapun kegiatan ini dikirimnya anak putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru sebanyak 15 orang. Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan ini pada tahun 2018 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 38 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan. Adapun kegiatan ini melakukan penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 5

kasus yang ditangani langsung oleh Pekerja Sosial sedangkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun ini sebanyak 29 kasus/orang yang penanganan dan pendampingannya langsung dilakukan oleh Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan.

3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 80% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 49% dengan capaian 61%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH). Disamping itu bagi keluarga miskin pemerintah Pusat juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2013. Di Tahun 2018 jumlah penerima bantuan keluarga penerima manfaat sebanyak 5.410 KPM dengan nilai sebesar Rp. 1.440.953.500 ,- yang digelontorkan setiap triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat miskin telah meningkat kesejahteraannya. Kegiatan Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu. Adapun kegiatan ini Pemerintah melaksanakan program raskin/rastra para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan bantuan berupa beras 15 (lima belas) kg /bulan per RTM yang diperuntukan kepada 8.481 RTM Kota Dumai yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tigapuluh tiga) Kelurahan. Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE). Adapun kegiatan ini Kota Dumai memiliki 30 kelompok usaha bersama (KUBE) yang beranggotakan 1 (satu) Kelompok sebanyak 10 orang. Program ini merupakan program Kementrian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin yang mau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini menerima bantuan melalui dana dekosentrasi dari Dinas Sosial Provinsi Riau sebesar Rp. 20.000.000,-/Kelompok

4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Pada tahun 2018 Korban bencana yang telah menerima

bantuan sosial di Kota Dumai melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 209 KK

5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 6% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 5% dengan capaian 83%. Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) merupakan kegiatan Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi Lansia miskin Kota Dumai mendapatkan bantuan langsung dari Kementerian Sosial RI sebanyak 30 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.210.500.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.495.006.815,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2.403.539.860,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.4.091.466.955,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 1.877.164.602,- atau terserap 78% dan belanja langsung terserap Rp. 3.583.973.929,- atau 87,60% :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.390.587.525,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.334.143.408,- atau 95,94% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 102.110.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 101.753.000,- atau 99,65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.776.209,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 95.314.187,- atau 75,18% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor Dinas Sosial.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 22.120.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- atau 85,44% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 158.887.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 155.187.200,- atau 97,67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya kebersihan kantor.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.944.180,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.758.500,- atau 99,48% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan kerja yang baik.

f. Kegiatan Penyediaan jasa alat tulis kantor

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 125.897.226,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 125.578.325,- atau 99,75% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 88.617.910,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 88.378.750,- atau 99,73% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.610.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.710.500,- atau 93,38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan komponen listrik.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 67.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.035.000,- atau 99,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

- j. Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.140.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.140.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup.
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.960.000,- atau 55,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya surat kabar.
- l. Penyediaan bahan logistik kantor
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.094.000,- atau 92,07% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya minuman pegawai.
- m. Penyediaan makanan dan minuman
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.210.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.840.000,- atau 80,59% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu.
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 427.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 427.209.946,- atau 99,86% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya rapat koordiansi dan konsultasi program kerja.
- o. Penyediaan jasa keamanan kantor
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.994.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 164.284.000,- atau 98,97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 (satu) tahun
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 333.793.570,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 308.489.747,- atau 92,42% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 149.676.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 148.862.550,- atau 99,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 184.117.570,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.627.197,- atau 86,70% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 24.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 18.000.000,- atau 74,23% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
- a. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- atau 74,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya bimbingan teknis.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 68.024.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 68.024.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
- a. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhitsar realisasi kinerja SKPD
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.900.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja SKPD.
 - b. Pelaporan prognosis realisasi anggaran
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.100.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.100.900,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya dokumen anggaran.

- c. Pelaporan keuangan akhir tahun anggaran
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.024.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.024.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 408.127.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 274.027.489,- atau 67,14% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:
 - a. Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 307.077.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 180.830.189,- atau 58,89% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data PMKS dan PSKS, tersedianya data Verivali PBI JKN.
 - b. Kegiatan Pengembangan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 101.050.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 93.197.300,- atau setara dengan 92,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH.
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp1.308.095.660,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.116.090.055,- atau 85,32% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :
 - a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
jumlah anggaran Rp. 54.844.200,- dengan realisasi Rp. 36.054.200,- atau 65,74%. Adapun Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan
 - b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 184.999.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp164.492.396,-

atau 88,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya bantuan kepada korban bencana, Terlaksananya rekrutmen Taruna Siaga Bencana. Yang mengalami korban bencana selama tahun ini sebanyak 209 KK dengan rincian jumlah korban bencana kebakaran rumah di Kota Dumai yang ditangani sebanyak 38 KK dengan 16 kali kebakaran di Kota Dumai selama tahun 2018, sedangkan korban banjir sebanyak 154 KK Korban Angin Puting beliung sebanyak 16 KK yang terjadi dalam 1 (Satu) tahun.

c. Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 233.890.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.603.106,- atau 71,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai.

d. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 109.234.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.333.900,- Atau 57,06% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tertanamnya arti nilai-nilai kepahlawanan keperintisan pada usia anak sekolah.

e. Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 57.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 41.179.956,- Atau 71,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap kelompok usaha bersama (KUBE).

f. Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu dengan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 505.5580.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 491.826.197,- Atau 97,28% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah rastra atau raskin tersalurkan kepada masyarakat kurang mampu, Pelaksanaan sosialisasi peralihan dari penyaluran beras ke E-WARONG.

g. Kegiatan perlindungan Sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.161.997.860,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.152.600.300,- atau 94,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah, orang terlantar dan korban tindak kekerasan.

7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 88.330.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.141.506,- atau 82,80% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 88.330.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.141.506,- atau 82,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dilakukan pembinaan pendayagunaan.

8. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 178.475.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.420.152,- atau 65,79% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.025.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.950.152,- atau 61,19% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi.

b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Jumlah anggaran Rp. 116.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.470.000,- atau 68,24% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah gelandangan, pengemis yang dikembalikan ketempat asalnya.

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 291.783.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 274.637.572,- atau 94,12% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 48.468.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.163.900,- Atau 99,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan senam lansia.

b. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 243.315.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 226.473.672,- atau 93,08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Peningkatan Kinerja TKSK, Peningkatan Kinerja PSM, Peningkatan Kinerja Kessos Masyarakat. Jumlah Peningkatan SDM yang menjadi mitra Kerja Sosial.

Adapun penghargaan yang diperoleh dapat dilihat dengan penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Kota Dumai sebagai berikut :

1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 3 an. ARNITA.
2. ORSOS (Organisasi Sosial) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2010 Peringkat 1 an. Yayasan Halimahtussa'diah Muhammadiyah.
3. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Peringkat 3 an. MURTIANINGSIH.
4. Peringkat 1 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2012 Kel. Teluk Makmur.
5. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 1 an. NASRI BUTAR-BUTAR.
6. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 4 an. ARNITA.
7. Peringkat 1 Tk. Nasional Tahun 2014 an. SUPARJIH Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial.
8. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2016 Peringkat 2 an. PRAYITNO SUSILO, ST

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**7. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Tabel 4.16. Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87	90,52	104
Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	53.05	54,85	103
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	80	82,76	103
Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0.100	0.02	20
Capaian kota layak anak (KLA)	Predikat	Madya	Madya	100

Keberhasilan dari 5 Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain :

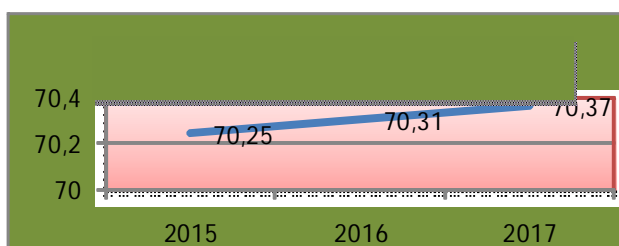
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target dari indikator sasaran ini yaitu 87 dengan realisasi capaian pada tahun 2018 sebesar 90,52%. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 104% (melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018). Keberhasilan ini didukung oleh program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%, serta terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target kinerja sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 100%. Pendataan gender dan anak serta kelembagaan organisasi perempuan dan anak yang dilaksanakan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai dan lembaga lainnya, sehingga dihasilkan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang

responsif gender. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, bekerja sama dengan organisasi perempuan yang ada di Kota Dumai harus didukung oleh tiga pilar yang terdiri dari keberadaan SDM yang baik, sistem penataan organisasi yang baik, serta target capaian organisasi yang tercakup dalam Visi-Misi. Proses peningkatan kapasitas dan pembangunan karakter SDM menjadi hal yang mutlak dilakukan dan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pendidikan maupun pelatihan (diklat) yang berbasis kompetensi, pembinaan pola karir yang jelas, tugas belajar, atau pola permainan yang kesemuanya untuk meningkatkan performa SDM organisasi dalam menjalankan tugasnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam rangka peningkatan kapasitas antara lain melalui pelatihan, senam bersama, lomba dan perayaan HUT organisasi perempuan, sehingga diharapkan penanganan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu lebih optimal dan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dapat dihindari karena meningkatnya pengetahuan kaum perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG = Gender Development Index) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2016). Indikator pembangunan gender terbagi dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan aktivitas ekonomi. Salah satu indikator penting dalam pengukuran IPG adalah Angka Harapan Hidup saat lahir. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat masyarakat. Angka Harapan Hidup Kota Dumai tahun 2015 sampai dengan 2017 seperti digambarkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.18. Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kota Dumai Tahun 2017

2. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 53.05 % dengan realisasi capaian pada tahun 2018 sebesar 54.85 % atau sebanyak 10.442 jiwa dari 19.039 jiwa angkatan kerja. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 103% (melebihi target). Keberhasilan ini didukung oleh berbagai program antara lain:

a. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan antara lain :

- Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan target kinerja 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau sebesar 100%, dan terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja 7 kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 kecamatan atau sebesar 100%. Kegiatan penyuluhan dalam rangka pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dilakukan pada 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai, dengan mengikutsertakan aparat Kecamatan dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Kader PKK Kelurahan, Kader Posyandu, Kelompok UP2K dan tokoh perempuan. Pelaksanaan penilaian P2WKSS tahun 2018 di Kota Dumai difokuskan pada Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan tepatnya di jalan rimbun raya. Kegiatan ini merupakan salah satu program peningkatan perempuan dengan menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
- Pembinaan organisasi perempuan
Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya

pembinaan organisasi perempuan dengan target kinerja 30 organisasi dan terealisasi sebanyak 30 organisasi atau sebesar 100%, terlaksananya peringatan seminar, dan lomba dalam rangka hari kartini dan hari ibu dengan target kinerja sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100%, serta terlaksananya kegiatan sehari bersama al-quran dan lomba tahfidz quran dengan target kinerja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 0% (program tidak tercapai). Tidak terealisasinya kegiatan sehari bersama al quran dan lomba tahfidz quran yang diperuntukkan bagi anak-anak di Kota Dumai dikarenakan bertepatan dengan libur semester genap yang dimulai dari awal bulan ramadhan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pemimpin perempuan dalam manajemen organisasi, mengidentifikasi persoalan dasar para pemimpin perempuan dalam pengembangan sebuah organisasi di Kota Dumai, serta mendapatkan rumusan/formula, strategi serta langkah perbaikan kualitas sebuah organisasi yang bergerak dalam isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pembinaan organisasi perempuan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau sebesar 100%, yang melibatkan peserta perempuan dari berbagai partai politik yang ada di Kota Dumai. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan calon legislatif pada pemilu 2019, dan meningkatkan jumlah perempuan calon legislatif yang meraih kursi di legislatif pada pemilu 2019. Melalui Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai salah satu focal point dalam menggerakkan segenap komponen untuk peningkatan keterwakilan politik perempuan, sangat relevan melakukan sosialisasi politik dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas politik bagi perempuan dengan memperhatikan keberagaman kelompok perempuan. Dampak dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas politik perempuan calon legislatif pada pemilu 2019, meningkatkan kapasitas politik perempuan calon legislatif pada kontekstualisasi pemahaman dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif berorientasi pada pembentukan karakter bangsa sampai pada terbangunnya pranata-pranata sosial serta harus benar-benar merupakan proses transformasi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan yang bermuara pada keteladanan, serta terbentuknya ruang lingkup peningkatan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang mampu membangun kembali memori kolektif sejarah menjadi bangsa.

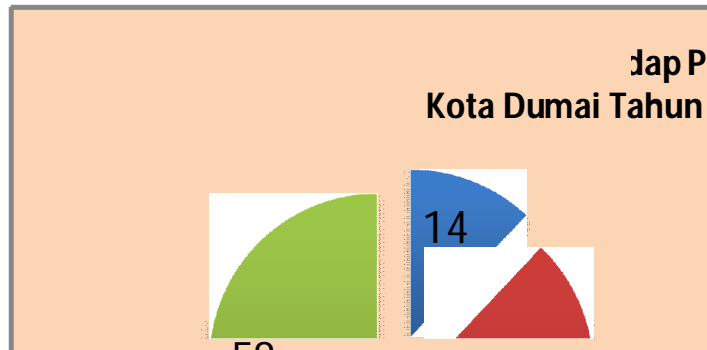
- c. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar

Target dari indikator sasaran ini yaitu 80 % dengan realisasi capaian pada tahun 2018 sebesar 82,76% atau sebanyak 48 kasus dari 58 kasus yang telah dilaporkan pada tahun 2018. Dengan demikian pencapaian target indikator sasaran tersebut sebesar 103% (melebihi target kinerja). Keberhasilan ini didukung oleh berbagai kegiatan antara lain program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak dengan target 40 kasus dan terealisasi sebanyak 40 kasus (100%).

Tujuan dari kegiatan ini antara lain meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan kapasitas SDM manager kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak kota Dumai tahun 2018 dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

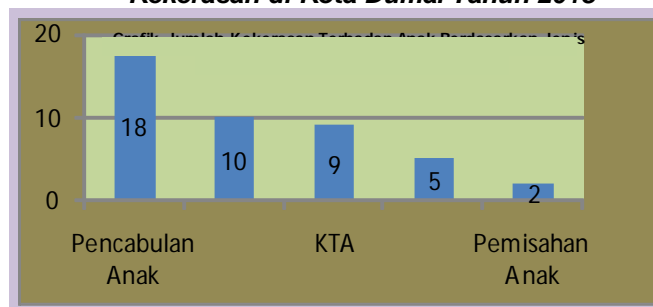
Gambar 4.19 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Dumai Tahun 2018



Sumber: P2TP2A Kota Dumai Tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa penemuan kasus kekerasan di Kota Dumai pada tahun 2018 sebanyak 58 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14 kasus, dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 44 kasus. Dari 44 kasus kekerasan terhadap anak terdapat 18 kasus pencabulan, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 10 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 9 kasus, dan kasus penelantaran sebanyak 5 kasus, serta pemisahan anak sebanyak 2 kasus, seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.20. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Dumai Tahun 2018



Sumber : P2TP2A Kota Dumai Tahun 2018

Dari 44 kasus di atas, telah dilakukan beberapa tindakan antara lain pendampingan kasus oleh petugas P2TP2A, Tindakan Mediasi sebanyak 16 kasus yaitu kasus KTA, Penelantaran dan Pemisahan Anak. layanan konseling 40 kasus, layanan konsultasi hukum 6 kasus, konsultasi psikologis 10 kasus, yang telah selesai ditangani sebanyak 58 kasus. Sedangkan kasus kekerasan

terhadap perempuan di Kota Dumai Tahun 2018 didominasi oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 12 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 kasus, seperti yang tergambar dalam gambar dibawah ini :

Gambar 4.21. Jumlah Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Di Kota Dumai tahun 2018



Sumber: P2TP2A Kota Dumai Tahun 2018

Dari 14 kasus di atas, telah dilakukan beberapa tindakan antara lain pendampingan kasus oleh petugas P2TP2A, Tindakan Mediasi, dan layanan konseling. Keseluruhan kasus diatas telah selesai ditangani pada tahun 2018. Dari keseluruhan kasus di atas, telah dilaksanakan tindak lanjut pembahasan kasus kekerasan dalam acara coffee morning/bedah kasus sebanyak 6 kali pada tahun 2018 dengan melibatkan lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, Lapas, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PKK Kota dan Kecamatan/kelurahan.

Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Dumai, pengaduan kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak dapat lebih ditingkatkan sehingga keberadaan wadah tersebut dapat membantu masyarakat Kota Dumai agar lebih memiliki kesadaran dan kemauan untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

d. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO

Target dari indikator sasaran ini yaitu 0,100% dengan realisasi capaian pada tahun 2018 sebesar 0,02% atau sebanyak 32 kasus perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dari 138.095 jiwa jumlah penduduk perempuan. Dengan demikian pencapaian target indikator sasaran tersebut sebesar 20% dengan kata lain realisasi capaian perempuan korban kekerasan termasuk

TPPO lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dari Dinas PPPA pada tahun 2018. Keberhasilan ini didukung oleh program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan indikator kegiatan terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan target kinerja sebanyak 20 orang dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 20 orang (100%).

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain meningkatkan kapasitas petugas penanganan kasus dan pendamping terhadap pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan pengetahuan petugas tentang jenis pelayanan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu kasus, serta meningkatkan wawasan petugas terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan sasaran kegiatan adalah manager kasus dan pendamping sebanyak 20 orang. Disamping itu juga telah dilaksanakan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah dengan indikator kegiatan terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan serta target kinerja sebanyak 20 orang dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 20 orang (100%).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam rangka terintegrasi sosial, yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat dilingkungannya. Tahun 2018 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Dumai sebanyak 12 kasus. Sebagai tindak lanjut penanganan KDRT, melalui APBD Kota Dumai Tahun 2018 maka Dinas PPPA telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dengan pendekatan pembelajaran bersama atau kesetaraan yang menitikberatkan pada semua pelaksanaan kegiatan melalui proses belajar bersama agar tercipta kesetaraan yang berkesinambungan dalam kesejajaran dan kemitraan. Peserta pelatihan adalah perempuan KDRT yang diistilahkan sebagai orang yang selamat (survivor), didampingi oleh tim P2TP2A Kota Dumai dengan jumlah peserta sebanyak 20

orang. Perempuan korban KDRT (survivor), tetap membutuhkan proses pemulihan jangka panjang untuk terus memupuk pertumbuhan pribadi dan kekuatan dirinya. Kemampuan keluar dari trauma KDRT inilah yang dapat menjadi indikator keberhasilan penanganan KDRT secara menyeluruh.

e. Capaian kota layak anak (KLA)

Target dari indikator sasaran ini adalah tercapainya kota layak anak atau (KLA) dengan predikat madya dan realisasi capaian pada tahun 2018 masih dalam predikat madya. Dengan demikian pencapaian target indikator sasaran tersebut sebesar 100% atau program tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan antara lain :

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan indikator kegiatan terselenggaranya bimbingan teknis konvensi hak anak dengan target 25 orang dan terealisasi sebanyak 25 orang (100%)
- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator kegiatan terselenggaranya bimbingan teknis puskesmas ramah anak bagi tenaga kesehatan di puskesmas dengan target 25 tenaga kesehatan puskesmas dan terealisasi sebanyak 25 tenaga kesehatan puskesmas (100%). Tenaga kesehatan puskesmas yang dilatih berasal dari 10 puskesmas se-Kota Dumai. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan deklarasi untuk pembentukan puskesmas ramah anak yang terdiri dari 9 puskesmas yaitu Puskesmas Dumai Kota, Puskesmas Dumai Timur, Puskesmas Dumai Barat, Puskesmas Bukit Kapur, Puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Medang Kampai, Puskesmas Sungai Sembilan, Puskesmas Bukit Timah, dan Puskesmas Jayamukti. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan indikator kegiatan terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 20 aktivis PATBM dan terealisasi sebanyak 20 aktivis PATBM (100% atau program tercapai). PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya - upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak. Tahun 2018 telah dilaksanakan

bimbingan teknis pada 2 kelompok PATBM yang berjumlah 20 aktivis, masing-masing berasal dari kelurahan Purnama dan kelurahan STDI.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dan adanya dukungan dari kepala daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.878.313.845,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.052.513.740,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.825.800.105,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.454.417.089,00,- atau terserap 92,72 % dan belanja langsung terserap Rp. 2.551.565.439,- atau 90,29%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.811.623.508 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.753.589.292 atau sebesar 92.85% melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.51.450.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.51.450.000 atau sebesar 100%, adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Pembantu jasa surat menyurat (3 orang) dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.122.250.000 dan terealisasi Rp.87.411.201 atau sebesar 71.50%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya belanja telpon, belanja air, belanja listrik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.41.199.050 dan terealisasi Rp.39.700.000 atau sebesar 96.36%, adapun indikator keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 100% atau capaian realisasi 96.36 %.

- d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.85.754.000 dan terealisasi Rp.85.735.000 atau sebesar 99.98%, adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 100% atau capaian realisasi 99.98%.
- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.752.675 dan terealisasi Rp.27.588.325 atau sebesar 99.41%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 99.41%.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.73.385.953 dan terealisasi Rp.73.385.522 atau sebesar 100%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.55.069.970 dan terealisasi Rp.35.589.700 atau sebesar 64.63%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 64.63%.
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.5.489.100 dan terealisasi Rp.5.489.100 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedianya dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.10.500.000 dan terealisasi Rp.8.520.000 atau sebesar 81.14%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 90%.
- j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.20.735.000 dan terealisasi Rp.20.735.000 atau sebesar 100%, adapun

indikator keluaran adalah tersedianya makanan dan minum rapat dan tamu dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.273.640.000 dan terealisasi Rp.273.639.944 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya Fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

l. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.44.397.760 dan terealisasi Rp.44.345.500 atau sebesar 99.88%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya pelayanan pengamanan perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 99.88%

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.71.720.000 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.374.000 atau sebesar 99.52% melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.45.370.000 dan terealisasi Rp.45.024.000 atau sebesar 99.24%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan target 7 unit atau capaian realisasi 99.52%.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.10.350.000 dan terealisasi Rp.10.350.000 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.16.000.000 dan terealisasi Rp.16.000.000 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya pelayanan kantor yang dapat berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.46.182.500 dan terealisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp.46.182.500 atau sebesar 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.26.748.000 dan terealisasi Rp.26.748.000 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersusunya Dokumen LKJ,LPPD,LKPJ dan RENSTRA dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

- b. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.800.000 dan terealisasi Rp.14.800.000 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersusunya rencana kerja anggaran murni dan perubahan dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

- c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.634.500 dan terealisasi Rp.4.634.500 atau sebesar 100%, adapun indikator keluaran adalah tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.103.347.900 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.96.397.950 atau sebesar 93.28% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.103.347.900 dan terealisasi Rp.96.397.950 atau sebesar 93.28%, adapun indikator keluaran adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 93.28%.

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.1.110.426.098 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.980.794.263 atau sebesar 88.33% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.322.599.146 dan terealisasi Rp.284.514.939 atau sebesar 88.19%, adapun indikator keluaran adalah terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak dengan target 1 dokumen, terlaksananya pendataan gender dan anak 1 dokumen dengan target 1 dokumen, terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan atau capaian realisasi 88.19%.

- b. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.120.069.253 dan terealisasi Rp.97.630.083 atau sebesar 81.31%, adapun indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis konveksi hak anak dengan target 25 orang atau capaian realisasi 100%.

- c. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.168.052.100 dan terealisasi Rp.145.899.400 atau sebesar 86.82%, adapun indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis pukesmas ramah anak bagi tenaga kesehatan dipukesmas dengan target 25 tenaga kesehatan pukesmas atau capaian realisasi 100%.

- d. Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.98.473.000 dan terealisasi Rp.85.553.025 atau sebesar 86.88%, adapun indikator keluaran adalah tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dan tersedianya media informasi dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 86.88%

- e. Kegiatan Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.229.333.346 dan terealisasi Rp.222.620.616 atau sebesar 97.07%, adapun indikator keluaran adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 40 kasus atau capaian realisasi 97.07%.

- f. Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp.171.899.253 dan terealisasi Rp.144.576.200 atau sebesar 88.11%, adapun indikator keluaran adalah Terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 20 aktivisi PATBM atau capaian realisasi 88.11%

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.258.122.950 dan terealisasi sebesar Rp.253.365.750 atau sebesar 98.16% melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.47.100.000 dan terealisasi Rp.46.770.000 atau sebesar 99.30%, adapun indikator keluaran adalah Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target 20 orang atau capaian realisasi 99.30%

b. Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.101.922.950 dan terealisasi Rp.97.640.000 atau sebesar 95.80%, adapun indikator keluaran adalah terlaksananya Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 100 orang atau capaian realisasi 95.80%.

c. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.109.100.000 dan terealisasi Rp.108.955.750 atau sebesar 99.87%, adapun indikator keluaran adalah terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan target 20 orang atau capaian realisasi 99.87%

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan tahun 2018, jumlah anggaran Rp.424.377.149 dan terealisasi sebesar Rp.349.861.684 atau sebesar 82.44% melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.304.303.999 dan terealisasi Rp.231.040.970 atau sebesar 75.92%, adapun indikator keluaran adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target 30 organisasi ,terlaksananya peringatan seminar

,dan lomba dalam rangka hari kartini dan hari ibu dengan target 2 kegiatan. atau capaian realisasi 75.92%.

- b. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.120.073.150 dan terealisasi Rp.118.820.714 atau sebesar 98.96%, adapun indikator keluaran adalah terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan target 10 kelurahan.dan terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target 7 kecamatan atau capaian realisasi 98.96%.

8. URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib Ketenagakerjaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4. 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2018

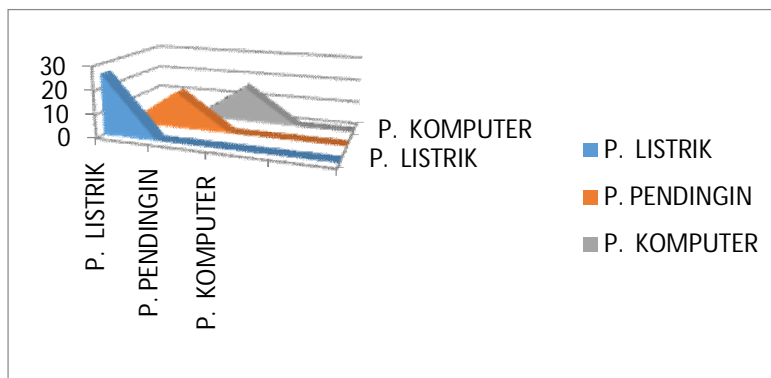
Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	73%	73%	100%
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	35%	35%	100%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	35%	35%	100%
Jumlah pelayanan dan penyuluhan bagi warga transmigrasi	25%	0	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

1. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan

Indikator Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan ditargetkan dalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 73%, dan telah dilakukan Pelatihan sebanyak 58 orang dari 58 orang yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai sehingga realiasi yang telah tercapai adalah 100%.

Gambar 4.22. Pelatihan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai tahun 2018



Berdasarkan hasil Pelatihan Kerja bagi pencari kerja yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dengan hasil berupa Ketrampilan serta sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) serta meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas ;

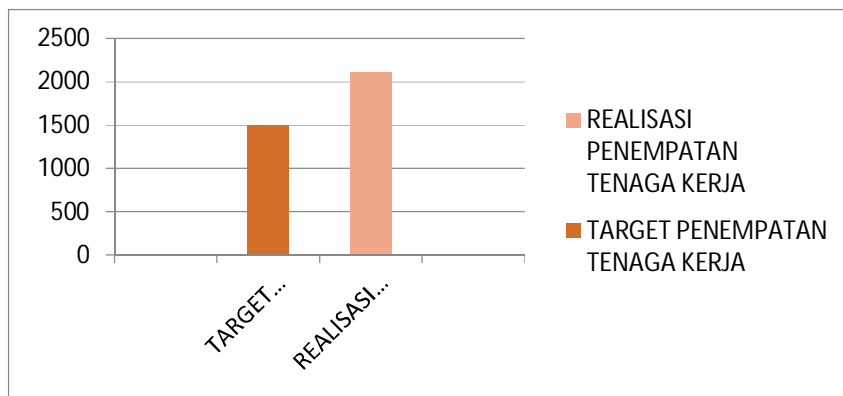
1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. ;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan ;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia ;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja ;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga pelayanan dasar non wajib ini belum mencapai target adalah karena belum maksimalnya pagu anggaran yang di usulkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran.

2. Besaran tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan

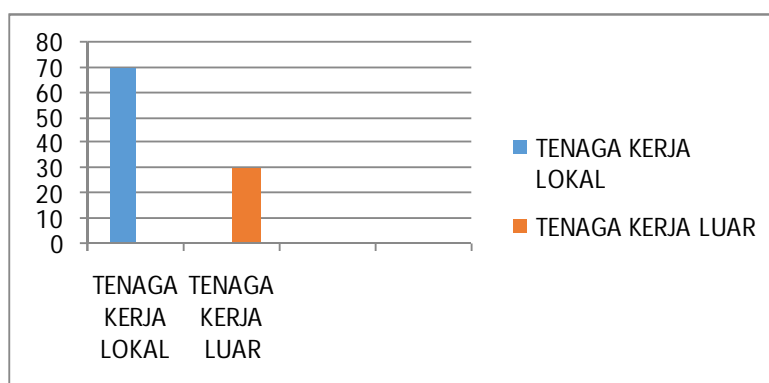
Indikator Besaran Tenaga Kerja tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan ditargetkan dalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 35% dan telah di Data dan dievaluasi bahwa Tahun 2018 tenaga kerja yang terdaftar 2.112 orang sehingga realiasi yang telah tercapai adalah 100% (data terlampir).

Gambar 4.23. Pencapaian Realisasi dan Target Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai tahun 2018



Kegiatan pendukung Sasaran yaitu kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dimana kegiatan tersebut Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan telah melampaui Target Sasaran di Renstra. Meskipun Target Sasaran di Renstra telah tercapai namun sesungguhnya kuantitas pencari kerja yang mendapatkan suatu pekerjaan masih perlu di evaluasi . Penempatan Tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan merupakan suatu tantangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi permasalahan pengangguran. Kepres nomor 04 thn 1980 tentang wajib lapor ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Dumai sudah mengeluarkan PERDA 10 tentang ketenagakerjaan yang terdiri dari 70% tenaga kerja lokal dan 30% dari tenaga kerja luar dan Perwako Dumai juga mengotpimalkan penempatan tenaga kerja helper 100%.

Gambar 4.24. Tenaga Kerja Lokal dan tenaga kerja Luar Kota Dumai tahun 2018

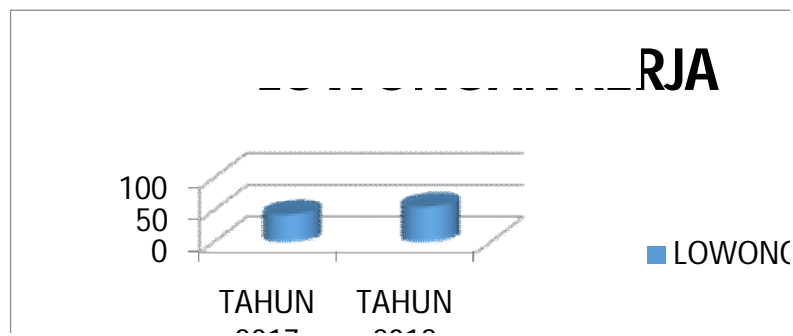


Kegiatan pendukung Sasaran yaitu kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja , kegiatan ini dilakukan untuk Mengumpulkan dan meneliti data hasil antar kerja (data pencari kerja, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja), mengatur dan menyusun data dalam kelompok umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan sektor lapangan usaha di buat dalam suatu Dokumen

Rencana Tenaga Kerja

Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Informasi lowongan pekerjaan memuat Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan; Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan untuk itu perlu adanya Informasi Bursa Kerja Kepmenaker 07 /MEN/IV/2008 dan Kep Dirjen Nomor : 251/DPPTK/IX/2008, KEP DIRJEN 258//DPPTK/IX/2008. Sesuai web informasi pasar kerja (<https://devinfokerja.kemnaker.go.id/>) adapun lowongan pekerjaan di perusahaan yang berada di Kota Dumai Tahun 2017 sebanyak 44 Perusahaan, tenaga kerja yang terdaftar di tahun 2017 berjumlah 1,210 orang dan di Tahun 2018 sebanyak 56 Perusahaan , tenaga kerja yang terdaftar di tahun 2018 berjumlah 1.701 orang.

Gambar 4.25. Lowongan Kerja Di Kota Dumai tahun 2018



3. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) ditargetkan dalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 35% Tahun 2018 sebanyak 48 kasus atau realisasi 100%

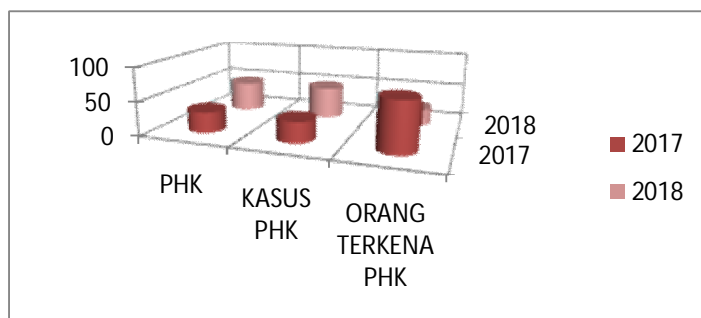
Keberhasilan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai karena adanya dukungan regulasi yang tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh perusahaan serta tingginya kesadaran pekerja dan pengusaha akan pentingnya menjadi peserta BPJS.

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui

musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak tidak memilih atau justru memilih mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam forum mediasi.

Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Gambar 4.27. Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Dumai tahun 2017- 2018**Tabel 4.18. Jumlah pemutusan hubungan Kerja Di Kota Dumai tahun 2018**

NO	KASUS	2017	2018
1	PHK	32	48
2	Kasus PHK	32	48
3	Orang Terkena PHK	75	26
	JUMLAH	139	118

Upah Minimum juga termasuk pemeriksaan setiap tahunnya yang ada di Perusahaan Kota Dumai. Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sektoral, mengikuti rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan

perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

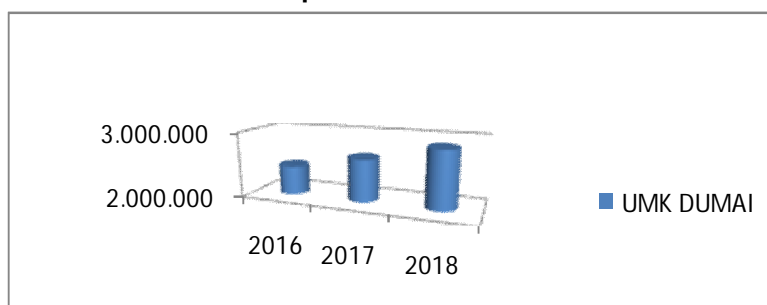
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Formula tersebut mengharuskan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun, berdasarkan akumulasi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Adapun begitu Dewan Pengupahan masih berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, seperti membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dan juga melakukan survei kebutuhan hidup layak setiap 5 tahun sekali.

Gambar 4.28. Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota Dalam 1 Tahun 2016-2018**Tabel 4.19. Persentase Kenaikan Upah Minimum kota Dalam ! Tahun 2016 -2018**

No	TAHUN	UMK	KET (%)
1	2016	2.453.000	89.68%
2	2017	2.655.372	92.37%
3	2018	2.888.665	91.98%

4. Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik, semula hanya diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tercapainya indikator kegiatan akan mengakibatkan tercapai pula target kinerja program yang telah dirumuskan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam 2 (dua) urusan, namun di tahun anggaran 2018 program/ kegiatan yang ada dibidang ketransmigrasian tidak dapat dilaksanakan berkenaan program/kegiatan telah dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Riau, untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut sudah dianggarkan ke APBD P Kota Dumai namun APBD P Kota dalam hal ini di batalkan di karenakan keterlambatan dalam penyusunan APBD P Kota Dumai sehingga kegiatan Penyuluhan bagi warga transmigrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.560.000 dengan realisasi 0%.

Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.187.543.480,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.235.839.480,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.045.000.000 Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.082.343.635,- atau 95,26 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.655.496.276- atau 87,21%.

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dengan Jumlah 8 program dan 27 kegiatan di Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 1.384.541.900 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.222.798.528 atau sebesar 88% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah benda pos dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 264.960.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 125.424.340,- dan atau sebesar 47,34%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan jasa komunikasi air dan listrik yang terpenuhi dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- c. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 46.500.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan dan Pelaksanaan kegiatan Dumai Expo dengan target 8 kali atau capaian realisasi 100%.
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.802.508,- dan atau sebesar 42,58%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas dengan target 6 unit atau capaian realisasi 100%.
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 74.163.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 74.163.800,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah anggaran petugas kebersihan dan peralatan kebersihan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- f. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan jasa kerja dengan target 65 unit atau capaian realisasi 100%.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.916.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 126.015.000,- dan atau sebesar 99,29%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan akan ATK dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.430.000,- dan atau sebesar 88,31%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan barang cetakan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

i. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.344.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.344.500,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.930.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.330.000,- dan atau sebesar 62,48%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.720.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.720.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan logistik kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 140.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.377.000,- dan atau sebesar 65,94%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
 - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.190.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.983.500,- dan atau sebesar 99,83%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.780.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.267.000,- dan atau sebesar 98,44%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Penyusunan Dokumen Renja dan Lakip dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.820.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.820.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.606.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.606.200,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2017 dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%
 4. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 542.619.300,- dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 474.977.166,- atau sebesar 87,53% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 542.619.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 474.977.166,- dan atau sebesar 87,53%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan memiliki keahlian serta bersertifikasi dengan target 58 orang atau capaian realisasi 100 %.

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 2.55.425.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 230.554.882,- atau sebesar 90,26% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.496.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.496.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kepres RI No. 04 Tahun 1980 dengan target 50 Perusahaan atau capaian realisasi 100%.

b. Penyebarluasan Informasi Busra Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 211.929.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.058.882,- dan atau sebesar 88,26%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Data Informasi asar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 182.325.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.520.000,- atau sebesar 95,72% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 182.325.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 174.520.000,- dan atau sebesar 95,72%, adapun Indikator Kinerja

keluaran adalah Jumlah Peningkatan LKS Tripartit dan Hari Buruh (May Day) dengan target 100 Perusahaan atau capaian realisasi 100%.

7. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 174.635.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 156.305.000,- atau sebesar 89,50% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Dewan Pengupahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 174.635.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 156.305.000,- dan atau sebesar 89,50%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah rapat rutin dewan pengupahan Kota Dumai atau capaian realisasi 100%.

8. Program Transmigrasi Lokal

Pada Tahun 2018, jumlah Anggaran Rp. 49.560.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 49.560.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0%- dan atau sebesar 0%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah warga transmigrasi yang diberikan penyuluhan atau capaian realisasi 0%.

9. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Jumlah Wilayah Pengelolaan Sampah Perkotaan yang tertangani	4 wilayah	4 wilayah	100
Persentase Kualitas Udara	70%	62%	88%

Persentase Kualitas Air	70%	98%	100
-------------------------	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Adapun Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Wilayah Pengelolaan Sampah Perkotaan yang Tertangani

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu presentase jumlah sampah yang tertangani selama 1 tahun, dengan adanya perubahan indikator Kinerja penanganan sampah dibagi menjadi wilayah. Untuk tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dimana kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 5.200.243.900,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. Rp. 5,187,375,800.00,- atau sebesar 100 %,- artinya dari total anggaran yang disediakan hanya dapat mengagulang timbunan sampah pada tahun 2018 sebesar 59.130 M3/Tahun sedangkan produksi timbunan volume sampah kota Dumai sebesar 83,585 M3 /Tahun artinya volume sampah yang dihasilkan 83,585 M3 hanya dapat ditanggulangi sebesar 59.130 M3/Tahun. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana (15 armada dan 12 Bak container) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum dapat mengakomodir semua titik rawan sampah sehingga target yang diinginkan yaitu meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat belum berjalan optimal.

b. Persentase Kualitas Udara .

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara Kota Dumai target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan pengambilan analisa sampel sebanyak 10 titik di Kota Dumai. Dengan anggaran sebesar 105.530.000,- dan realisasi keuangan sebesar 94.859.049,- atau 90%. Hasil analisa sample terhadap uji parameter didapat kualitas udara di Kota Dumai tidak ada yang melebihi ambang batas sesuai Kep No. 50/MENLH/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, dan Baku tentang Tingkat Kebisingan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

c. Persentase Kualitas Air

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air sumur sebanyak 4 sampel, air sungai sebanyak 15 sampel, air laut sebanyak 10 sampel, air drainase sebanyak 6

sampel, air hujan sebanyak 2 sampel di Kota Dumai. Dengan realisasi 4 sumur di Kecamatan Kota Dumai air sungai Kota Dumai sebanyak 14 sample, air laut sebanyak 12 sample dan drainase sample sebanyak 4 sample. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 188.189.288,- dan realisasi keuangan sebesar 176.497.876,- atau 94%. Artinya ada beberapa target yang belum terealisasi dikarenakan dana tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian sample. Dari hasil pengujian dari beberapa parameter tidak ditemukannya sample yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.635.202.148,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.290.381.260,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.635.202.148,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.144.029.676,- atau terserap 100% dan belanja langsung terserap Rp. 15.062.978.239,- atau 92 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 208,253,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 148,442,118,- atau 71% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% bulan dengan keluaran penyedia jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi .
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 70,080,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70,080,000.00,- atau 100% dengan target indikator 100% dan target realisasi indikator 100% dengan keluaran peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.70,415,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70,383,310.00,- atau 100% dengan target indikator 76 unit dan target realisasi indikator 100% dengan keluaran belanja jasa KIR dan STNK.
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19,910,520.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19,831,250.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 98.00% dengan keluaran terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun.

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38,845,600.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38,729,100.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan keluaran pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat-alat kebersihan kantor.

f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia Rp. 142,656,520.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 141,000,150.00,- atau 99% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan keluaran tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 43,202,500.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43,200,000.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran tersedianya kebutuhan akan barang dan cetakan.

h. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14,369,500.00,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 14,369,500.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indicator keluaran jumlah komponen listrik selama 1 tahun

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25,000,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14,330,000.00,- atau 57% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 95% dengan indikator keluaran tersedianya informasi bahan bacaan.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 73,570,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73,569,000.00,- atau

100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

- k. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 606,812,163.00,- dan realisasi keuangan Rp. 606,741,720.00,- atau 100% dengan target indikator 80% dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 92,517,600.00,- dan realisasi keuangan Rp. 92,151,400.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran pembayaran honor tenaga keamanan kantor.
 - m. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 240,643,030.00,- dan realisasi keuangan Rp. 240,097,030.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 43,796,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 43,743,500.00,- atau 100% dengan target indikator 32 unit dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 127,800,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 118,121,000.00,- atau 92% dengan target indikator 2 unit dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 80,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 79,960,000.00,- atau 100%

dengan target indikator 1 unit dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran terpeliharanya gedung kantor.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,313,525,400.00,- dan realisasi keuangan Rp. 3,088,987,875.00,- atau 93% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 95% dengan indikator keluaran tersedianya BBM, Pelumas dan Service pendukung operator kantor.

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 34,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 34,000,000.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran terpeliharanya peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 150,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 83,000,000.00,- atau 55% dengan target indikator 30 orang dan target realisasi indikator 45% dengan indikator keluaran jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 42,815,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 42,815,000.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran laporan capaian kinerja dan ikhtisarnya kinerja realisasi SKPD yang disusun.

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25,280,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 25,280,000.00,- atau 100% dengan target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran terpenuhinya laporan akuntabilitas dan keuangan akhir tahun

- c. Penyusunan rencana kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15,160,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 15,160,000.00,- atau 100% target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100%.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai saat ini armada yang ada kurang memadai dalam menanggulangi masalah sampah. rata rata timbunan sampah pertahun mencapai 83.585 m3/tahu, sedangkan armada yang tersedia hanya 15 Truk sampah dan 12 kontainer. artinya dengan armada yang tersedia produksi sampah pertahunnya hanya dapat ditanggulangi sebesar 59.139 m3/Tahun. Pada Tahun 2018 pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sampah sebesar Rp. 283,900,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 281,883,414.00,- artinya secara anggaran yang tersedia dengan terealisasi mencapai 99% target indikator 12 bulan dan target realisasi indikator 100%, tetapi dengan anggaran yang tersedia perlu ditambah guna menanggulangi masalah sampah. Karena indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang memadai.
 - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.200.243.900,- dan realisasi keuangan Rp. 5.187.375.800,- atau 100% dengan target indikator keluaran 12 bulan dan target realisasi indikator 100% dengan meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat artinya dengan anggaran yang tersedia dan jumlah anggaran yang terealisasi telah menunjukan progres capaian kinerja yang optimal terhadap komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pengelolaan lingkungan yang berbasis ramah lingkungan.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pada kegiatan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota bersih, sehat, teduh, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 89.775.100.00,- sedangkan realisasi keuangan Rp.

6,840,000.00,- atau 7,62% . dengan target indikator 8.00% dan target realisasi indikator 100% yang diinginkan yaitu terwujudnya Kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan. Dari jumlah Anggaran yang tersedia dengan realisasi keuangan hanya 7.62 % artinya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sesuai Dokumen perencanaan karena pada tahun 2018 tidak ada penilaian Adipura dari pusat.

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 163,110,000.00,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 155,299,000.00,- atau 95%. Dengan target indikator 85% dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air, data kualitas air.

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52,200,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar 50,070,510.00,-atau 95%. Dengan target indikator 70% dan target realisasi indikator 100% dengan indikator keluaran monitoring kegiatan industri Kota Dumai.

d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pada Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 merupakan kegiatan yang salah satu kegiatan melakukan sampling terhadap perusahaan Pertamina RUU II Dumai pada tempat penyimpanan sementara (TPS) dengan parameter sumur pantau dengan realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 80,649,600.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77,234,704.00,- atau 96% dengan target indikator 85% dan target realisasi indikator 100% dengan target keluaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pada ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen dan perizinan serta pengaduan. Pada tahun 2018 realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.967.200.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19,967,200.00,- atau 100% target indikator 50% dan target realisasi indikator 100% artinya dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi sudah mencapai target yaitu adanya verifikasi dan evaluasi pengaduan masyarakat. Yang mana pada tahun 2018 ada beberapa perusahaan yang

diawasi/diperiksa terkait pengaduan masyarakat terhadap tumpahan minyak oleh PT. Ivo mas pada air laut (dermaga) pada saat diperiksa tidak ditemukannya tumpahan minyak pada laut. Dan ada juga pengaduan masyarakat terhadap pencemaran udara pada PT. semen Padang hasil temuan dilapangan masih ditemukan adanya debu yang berterbangan.

f. Pengendalian Pencemaran Air

Pada Kegiatan penegndalian pencemaran bertujuan sebagai acuan untuk menentukan kelas ier dikota dumai, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan serta tersedianya data pemantauan kualitas air yang optimal. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 178,655,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 176,497,876.00,- atau 99% dengan target indikator 80% dan target realisasi indikator 95% dengan target keluaran tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air. Artinya dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi keuangan kegiatan ini dapat berjalan optimal sehingga hasil pengujian (lima) sample pada kualitas air. Terhadap air sungai, air drainase, air sumur, air laut, air hujan. Hasil analisa terhadap sample yang dilakukan didapati hasil pengujian kualitas air sungai untuk kualitas fisika dan kimia anorganik masih belum memenuhi baku mutu untuk Kelas air I, II, III dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil pengujian air laut untuk kualitas fisika dan kimia rata-rata telah memenuhi baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, tetapi analisa padatan tersuspensi total masih ditemukan melewati baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 (Lampiran I) tentang Baku Mutu Air Laut. Hasil pengujian kualitas air hujan Air Hujan Pengujian parameter Bau didapat hasil tidak berbau dengan metode analisa SNI 06-6859.2002. Hasil pengujian Air Drainase pada beberapa titik di dapat Pengujian parameter temperatur tidak melewati baku mutu terhadap kelas I, II, III dan IV didapat hasil 25,5°C dengan metode analisa SNI 06-6989.23-2005. Hasil pengujian air hujan didapat Pengujian parameter Jumlah Zat Padat Terlarut tidak melewati baku mutu (1500 mg/L) hasil yang didapat 7 mg/L dengan metode analisa SNI 06-6989.27-2005.

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap sekolah – sekolah (Sekolah Adiwiyata) untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sehingga pada akhirnya siswa ini bisa menjadi motor penggerak atau teladan baik itu di sekolah yang bersangkutan maupun ditengah masyarakat atau diseperti tempat tinggal siswa sehingga terciptanya kelestarian alam. Dengan terciptanya kesadaran terhadap lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga lingkungannya dan mengurangi beban pemerintah dalam pelestarian lingkungan terutama dalam hal pendanaan pengelolaan sampah. Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 87,091,900.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81,921,040.00,- atau sebesar 94%. Dengan target indikator 40 sekolah dan target realisasi indikator 90.00% Dengan target capaian jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata. Dari anggaran yang disediakan telah dilakukan pembinaan sebanyak 12 sekolah.
 - b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 140,200,000.00,- realisasi keuangan sebesar Rp. 134,778,000.00,- atau 96% dengan target indikator 3 dokumen dan target realisasi indikator 95.00% dengan indikator keluaran kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup.
 - c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud peran serta dinas lingkungan hidup dalam mengikuti efen efen nasional tentang lingkungan hidup, dengan diikutinya efen- efen ini diharapkan Pengelolaan Lingkungan di kota Dumai dapat menjadi lebih baik. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 169,400,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158,493,500.00,- atau sebesar 93%. target indikator 1 kali dan target realisasi indikator 100% telah mencapai target yang diinginkan yaitu pecan lingkungan hidup.
8. Program pengendalian kebakaran hutan
- a. Pengujian polusi udara ambien

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara kota Dumai . pada tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 96,130,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94,859,049.00,- atau sebesar 98%, dengan target indikator 80% dan target realisasi indikator 95.00% dengan target indikator keluaran status mutu udara ambient Kota Dumai, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sample di 8 titik lokasi yang ada di kota Dumai hasil pengujian dari beberapa parameter tersebut didapat tingkat plutan di Kota Dumai tidak ada yang melebihi nilai baku mutu.

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Penyusunan program pengembangan RTH

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 152,200,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145,244,000.00,- atau sebesar 95%, target indikator 1 dokumen dan target realisasi indikator 100% telah mencapai target yang diinginkan yaitu prosentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara..

b. Pemeliharaan RTH

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,383,427,615.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,330,122,193.00,- atau sebesar 98%, target indikator 80% dan target realisasi indikator 100% telah mencapai target yang diinginkan yaitu terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam kota.

c. Pengembangan Taman Rekreasi

Kegiatan ini merupakan upaya dinas lingkungan Hidup dalam melakukan pengembangan ruang Terbuka hijau agar lokasi yang ada di kota Dumai menjadi lebih tertata .Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 59,600,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59,600,000.00,- atau sebesar 98%, target indikator 80% dan target realisasi indikator 100% telah mencapai target yang diinginkan yaitu tertatanya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang.

CAPAIAN KINERJA URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja dan prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dicapai sejak tahun 2016 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- Penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional SMPN 1 Dumai.
- Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai, MAN Dumai.
- Meraih predikat adiwiyata tingkat kota tahun 2016 yaitu, MAN Dumai, SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai, SDN 009 Tanjung Palas Dumai, dan SMP Lancang Kuning Dumai
- Meraih predikat adiwiyata tingkat kota tahun 2018 yaitu, SMPN 11 Bukit Kayu Kapur, SMP YKPP, SD 07 Tanjung Penyembal.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- a. Kurangnya anggaran dan tenaga aparatur dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Kegiatan Pengawasan bidang lingkungan hidup sangat diperlukan apalagi dengan semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industri baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut.

- b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang kompleks, sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai kepentingan ekonomi,, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu masih adanya keterbatasan pengetahuan teknis dalam pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan/ usaha.

Kapasitas kelembagaan

- c. Kompleksnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Dumai serta kewajiban melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan instansi lain dengan kapasitas kelembagaan yang lebih besar.

SOLUSI

Adapun upaya / solusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan Lingkungan hidup adalah :

- a. Masih kurangnya anggaran dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan minimnya tenaga aparatur dalam bidang pengawasan lingkungan hidup.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya penambahan anggaran untuk pemeriksaan parameter secara lengkap sehingga hasil yang didapat juga akan maksimal demikian juga personil pengawas, memberikan pemahaman kepada berbagai pihak untuk dapat memandang persoalan lingkungan sebagai persoalan bersama dan menganjurkan untuk lebih menekankan upaya preventif terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan daripada melakukan upaya perbaikan yang sering biayanya lebih mahal dan lebih rumit penanganannya. Juga mencari berbagai pendekatan yang tepat kepada berbagai pihak.
- b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.
Oleh karena itu upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan senantiasa melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, industri tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang terkait. Disamping itu terus diupayakan mengikuti perkembangan kemajuan teknis dan konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Adanya pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- f. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target 2018	Realisasi tahun 2018
Kepemilikan KTP Elektronik	%	74,2	89,43
Kepemilikan Akta Kelahiran	%	87	88,89
Kepemilikan Akta Perkawinan	%	70	89,8
Kepemilikan KIA	%	20	26,08
Kepemilikan KK	%	93	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Secara umum, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan program dan Kegiatan berdasarkan indikator sasaran yang telah di tetapkan, adapun pencapaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a. Kepemilikan KTP Elektronik

Target awal dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terkumpulnya data Bio Metrik wajib KTP-e

b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Target dari indikator sasaran ini yaitu tercapainya akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sesuai dengan target nasional sebesar 85% dimana Dumai telah melebihi target nasional sebesar 88,89%.

c. Kepemilikan Akta Perkawinan

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Non Muslim pada tahun 2018 sebesar 89,8% pasangan yang mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

d. Kepemilikan KIA

Target indikator sasaran ini yaitu terlaksananya pencetakan Kartu Identitas Anak untuk tahun 2018 realisasi pencetakan KIA sebanyak (26,083%).

e. Kepemilikan KK

Target dari indikator ini yaitu Jumlah KK yang terdata pada data base kependudukan tercapai 100%.

Tahun 2018, jumlah anggaran untuk 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah sebesar Rp. 7.729.899.644,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.530.203.140,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.199.696.506,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.404.030.514,- atau terserap 96,43% dan belanja langsung terserap Rp. 3.564.306.789,- atau 84,87 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran Rp. 10.710.000,00 realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 tingkat pencapaian terealisasi sebesar 93,37% berupa terlaksananya administrasi surat menyurat selama 1 (satu) tahun

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran Rp. 296.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 167.648.942,00 tingkat pencapaian terealisasi sebesar 56,64% terpenuhi penyediaan jasa komunikasi air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran Rp. 97.750.000,00 realisasi sebesar Rp. 81.500.000,00 tingkat pencapaian terealisasi sebesar 83,37% dengan indikator yaitu jumlah even yang di ikuti sehingga hasil yang dicapai adalah tersampainya pesan pelayanan ke masyarakat melalui pelaksanaan dumai expo dan pawai.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran Rp. 148.808.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.148.764.675,00 tingkat pencapaian terealisasi sebesar (99,97%) dengan indikator jumlah petugas kebersihan kantor dan hasil terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor.
- e. Penyediaan Alat Tulis kantor
Jumlah anggaran sebesar Rp. 169.204.510,00 Realisasi Rp. 169.092.196,00 (99,93%) dengan indikator keluaran jumlah kebutuhan alat tulis kantor dan hasil tersedianya Kebutuhan akan Alat Tulis Kantor dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah anggaran Rp. 163.780.000,00 realisasi Rp. 147.708.000,00 tingkat pencapaiannya adalah sebesar 99,18% berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan kepada masyarakat.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran Rp. 55.419.000,00 realisasi sebesar Rp. 55.366.500,00 (99,912%) dengan indikator keluaran berupa tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran Rp. 35.411.200,00 realisasi Rp. 19.535.000,00 (55,16%) dengan indikator keluaran jumlah surat kabar yang berlangganan.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman

- Jumlah anggaran Rp. 35.500.000,00 realisasi Rp. 35.375.000,00 (99,65%) dengan indikator tersedianya makan dan minum rapat dan tamu.
- j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah anggaran Rp. 470.766.000,00 Realisasi Rp. 470.492.159,00 (99,94%) terlaksananya rapat koordinasi konsultasi ke Luar daerah.
- k. Penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah anggaran Rp. 122.900.000,00 realisasi Rp. 122.400.000,00 (99,59%) indikator keluaran jumlah tenaga keamanan kantor dengan hasil terwujudnya keamanan kantor.
- l. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah anggaran Rp. 246.000.000,00 realisasi Rp. 246.000.000,00 (100%) dengan indikator keluaran jumlah tenaga honorer yang dibayarkan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah anggaran Rp. 99.500.000,00 realisasi Rp. 97.130.000,00 (97,62%) dengan indikator keluaran jumlah gedung kantor yang di rehab.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Jumlah anggaran Rp. 146.408.500,00 realisasi Rp. 112.531.370,00 (76,86%) dengan indikator keluaran jumlah kendaraan dinas yang terpelihara.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran Rp.120.000.000,00 realisasi Rp. 119.154.000,00 (99,29%) dengan indikator keluaran yaitu jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Jumlah Anggaran Rp. 50.575.000,00 realisasi Rp. 50.525.000,00 (99,90%) dengan indikator keluaran tersusunnya laporan capaian kinerja dan Renstra.
- b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah anggaran Rp. 25.241.000,00 Realisasi Rp. 24.790,00 (98,21%) dengan indikator keluaran yaitu tersusunnya penyusunan prognosis dan realisasi anggaran.
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah anggaran Rp. 17.950.000,00 realisasi Rp. 17.940.000,00 (99,94%) dengan indikator keluaran yaitu tersusunnya pelaporan akhir tahun

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan).

Pada kegiatan ini jumlah anggaran Rp. 920.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 878.490.486 (95,47%) dengan indikator keluaran terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-ktip di daerah, serta telaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data informasi penduduk yang akurat dan terpadu
 - b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
Pada kegiatan ini jumlah anggaran Rp. 371.000.000,- dengan realisasi Rp. 0.00,- (0%) dengan indikator keluaran meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.
 - c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
pada kegiatan ini jumlah anggaran Rp. 150.000.000,- dengan realisasi Rp. 149.960.000 (99,97%) dengan indikator keluaran Tersosialisasinya informasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - d. Pendataan Penduduk Non Permanen
Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,00 Realisasi 98.140.000,00 (98,14%) dengan indikator terlaksananya pendataan penduduk non pemanen di Kota Dumai.
 - e. Pendataan Rentan
Jumlah anggaran Rp. 150.000.000,00 Realisasi 147.780.000,00 (98,52%) dengan indikator terlaksananya pendataan penduduk Rentan di Kota Dumai
 - f. Pendataan Akta Kelahiran
Jumlah anggaran Rp. 99.148.600,00 realisasi Rp. 97.212.161,00 (98,04%) dengan indikator keluaran Termonitornya jumlah akta klahiran di Kota Dumai
 - g. Pendataan Warga Negara Asing (WNA)
Jumlah anggaran Rp. 96.904.000,00 realisasi Rp. 96.771.300,00 (99,86%) dengan indikator keluaran Termonitornya jumlah WNA di Kota Dumai.

11. URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun

2016-2021 urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Dumai Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
1.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,074 %	1,08 %	147,83
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	61,9 %	69,02 %	111,47
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	18,8 %	16,08 %	114,89
4.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	15 Institusi	20 Institusi	133,33

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Target dari Indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 2,074% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 1,08% atau dengan capaian 147,83%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelayanan KIE. Adapun kegiatan ini meliputi :

1. Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan

Latar Belakang Sekolah Siaga Kependudukan juga tidak bisa dilepaskan dari program Generasi Berencana (Genre) yang sudah lama digulirkan. Terlebih selama ini sekolah dianggap satu-satunya agen perubahan (*agent of change*) secara formal di Indonesia. Alasan SSK juga dikuatkan mengingat selama materi ini materi kependudukan tidak terintegrasi kesemua pelajaran. Pembelajaran kependudukan juga masih bersifat tekstual, yang seharusnya pendidikan kependudukan aplikatif dan bisa dilakukan langsung oleh siswa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru pembina, dan lingkungan sekitar sekolah dalam melakukan penerapan Pendidikan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- b. Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program KKBPK kepada peserta didik

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Pendidikan kependudukan dapat terintegrasi kedalam mata pelajaran dan kurikulum.
- b. Peserta didik matang dalam mengolah data kependudukan.
- c. Peserta didik memahami konsep kependudukan, dan pembekalan siswa menghadapi bonus demografi.
- d. Koalisi kependudukan dan TP-PKK pendamping Kampung KB dapat berperan aktif dalam program SSK yang menunjang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

2. Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 49 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan, dan keluarga yang dilaksanakan melalui sensus, survey dan pendataan keluarga. Hal ini kemudian diperjelas dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga pada pasal 53 menjelaskan Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

Pada Tahun 2015 Pendataan Keluarga telah dilaksanakan pada tanggal 1 sd 31 Mei 2015 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendataan Keluarga secara langsung akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil Pasangan Usia Subur (PUS) baik yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) maupun yang belum, menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap *by name by address*, dimana Basis Data Keluarga termasuk profil PUS ini tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali hanya diperoleh melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga. Secara lebih rinci pendataan keluarga akan menghasilkan data keluarga di Indonesia yang terdiri dari data demografi, data Keluarga Berencana dan data Keluarga Sejahtera.

Data yang diperoleh dari Pendataan Keluarga akan dimanfaatkan untuk

pengambilan kebijakan antara lain Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana yang antara lain adalah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS), menurunkan angka *unmeet need*, meningkatkan kesertaan ber-KB Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Perencanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan PIK Remaja/Mahasiswa, serta kebijakan mengenai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

Basis Data Keluarga Indonesia perlu Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga di Indonesia ini dilaksanakan pada Tingkat RT se-Indonesia dengan memberdayakan seluruh kader KB untuk memutakhirkan data seluruh keluarga di Kota Dumai, Pada Tahun 2018 PBDKI difokuskan di 7 (tujuh) Kampung KB se Kota Dumai, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.23. Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2018

No	Kampung KB	Jumlah KK	Ket
1	Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai	1.517 KK	-
2	Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota	778 KK	-
3	Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai timur	2.396 KK	-
4	Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat	1.850 KK	-
5	Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan	1.712 KK	-
6	Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur	1.323 KK	-
7	Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan	1.200 KK	-
		10.776 KK	

3. Kegiatan Pembekalan Pokja Kampung KB

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di

seluruh wilayah;

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai dan
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KB

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembekalan dan kesepakatan bersama tentang fungsi dan peran pokja dalam pengembangan dan penggerakan Kampung KB, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju masyarakat Dumai makmur dan madani.

4. Honorarium Tenaga Administrator Data Informasi Pengendalian Lapangan.

Dengan diterbitkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mekanisme pengelolaan data rutin pengendalian lapangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di semua tingkat wilayah. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga, sehingga kegiatan pengelolaan data rutin pengendalian lapangan sangat penting untuk program kependudukan, keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan berbagai program lainnya.

Bahwa proses kegiatan dan hasil pengendalian lapangan yang dilakukan oleh lini lapangan harus dilakukan pengelolaan datanya sebagai bukti nyata (*evidence base*) dan pemenuhan akuntabilitas publik. Yang penginputan datanya dilakukan secara berjenjang oleh petugas administrator data informasi pengendalian lapangan

5. Tersedianya Media Informasi dan Pelaporan antara lain Baligho, Leaflet, Spanduk, Backdrope, Formulir, Laporan Pemutakhiran Data. Media Informasi dan pelaporan di atas tersebar di semua wilayah Pemerintah Kota Dumai, dan dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan KIE.

6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Dalam rangka pembinaan Kampung KB dengan hasil kegiatan :

- Menginventaris kebutuhan Kampung KB untuk kelancaran dan operasional
- Pembinaan kader untuk pelaksanaan kegiatan Kampung KB

b. Dalam rangka Informasi Pendidikan Kependudukan Dengan hasil kegiatan :

- Menyampaikan informasi pendidikan kependudukan terkait perkembangan piramida kependudukan
- Mengolah data kependudukan di wilayah Kampung KB se Kota Dumai
- Menyusun piramida kependudukan

b. Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*)

Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 61,9% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 69,02% atau 111,47%

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Adapun kegiatan ini meliputi Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan Permoment yang dilaksanakan pada setiap Puskesmas. Pelayanan Kontrasepsi TNI KB Kes dilaksanakan pada Bulan April s/d Juni adapun Jumlah Akseptor KB Baru yang terpacai IUD 102 Akseptor, Implant 340 Akseptor, MOW 109 Akseptor, Kondom 381 Akseptor, Suntik 2022 Akseptor, Pil 1454 Akseptor. Total Jumlah Pelayanan TNI KB Kes 4408 Akseptor. Pelayanan Kontrasepsi Bhayangkara KB Kes dilaksanakan pada Bulan Juli s/d September adapun Jumlah Akseptor KB Baru yang tercapai IUD 35 Akseptor, Implant 74 Akseptor, MOW 44 Akseptor, Kondom 133 Akseptor, Suntik 646 Akseptor, Pil 608 Akseptor Total Jumlah Pelayanan Bhayangkara KB Kes 1540 Akseptor. Pelayanan Kontrasepsi PKK KB Kes dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d November adapun Jumlah Akseptor KB Baru yang tercapai IUD 78 Akseptor, Implant 134 Akseptor, MOW 42 Akseptor, Kondom 89 Akseptor, Suntik 218 Akseptor, Pil 146 Akseptor Total Jumlah Pelayanan PKK KB Kes 617 Akseptor.

Tidak tercapainya PPM MOP, IUD, Implan, Suntik, dan Kondom Karna tidak terlaksananya 1 Kegiatan IBI KB Kes dikarenakan pengurangan anggaran/rasionalisasi diawal tahun 2018.

c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)(%)

Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 18,8% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 16,08% atau 114,89%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pembinaan ini meliputi :

1. Kegiatan Lomba Poktan Tk Kota

BKB

BKB merupakan Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua (Ayah dan Ibu) dan anggota keluarga lain untuk mengasuh & membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan SDM yg berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan. Melalui BKB diharapkan orangtua balita dapat mengetahui tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak dan cara merangsang/menstimulus sehingga anak dapat berkembang sebagai anak yang cerdas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian kuat dengan berbudi luhur. Pembinaan salah satu wujud dari pembinaan diadakan lomba BKB tingkat Desa, Kec, Kab dan Nasional

Adapun pemenang Lomba BKB Tk Kota yaitu :

- Peringkat I : BKB HI KASIH IBU dari kelurahan STDI
- Peringkat II : BKB MATAHARI dari kel. Bukit Timah
- Peringkat III : BKB HI PERMATA BUNDA dari Kel. Basilam Baru

BKL

BKL merupakan Kelompok Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Keluarga Lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga di atas 60 tahun keatas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lanjut usia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan utama yg dilakukan kelompok BKL/kader yaitu penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan, pencatatan dan pelaporan.

Adapun pemenang Lomba BKL Tk Kota yaitu :

- Peringkat I : BKL SEJAHTERA dari kelurahan Laksamana
- Peringkat II : BKL MEKAR SETAMAN dari kelurahan kampung baru

- Peringkat III : BKL TUN TEJA dari kelurahan Purnama

UPPKS

UPPKS merupakan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan.

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang berbasis instansional untuk memberikan pelayanan informasi Kependudukan dan Keluarga, pelayanan konseling maupun pelayanan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Bina Keluarga dan pengurus kelompok UPPKS.

Adapun pemenang Lomba UPPKS Tk Kota yaitu :

- Peringkat I : UPPKS KURNIA dari kelurahan Bukit Batrem
- Peringkat II : UPPKS KARTIKA dari kelurahan Laksamana
- Peringkat III : UPPKS KELAPA GADING dari kelurahan Kampung baru

2. Kegiatan Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW , dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis.

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPB dan program pembangunan lainnya di kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi Perangkat Daerah Lintas Sektor, camat, kepala desa/lurah, PKB/PLKB, ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/Sub PPKBD dan Anggota kelompok kerja.

Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di kampung KB yang dihadiri oleh Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan.

Lokakarya mini tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah pertemuan evaluasi kegiatan Kampung KB, identifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah / kendala yang dihadapi Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan perngakat desa/kelurahan, camat dan perangkat kecamatan, PKB/PLKB, petugas lapangan instansi terkait, kader kelompok kegiatan KKBPK dan Kader kelompok kegiatan lintas sektor

3. Kegiatan Penyuluhan Kampung KB

Penyuluhan Kampung KB merupakan proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Staff meeting adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program KKBPK setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT KB/koordinator/PLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB.

4. Sosialisasi PPKS

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling , bimbingan dan fasilitasi.

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang berbasis instansional untuk memberikan pelayanan informasi Kependudukan dan Keluarga, pelayanan konseling maupun pelayanan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Bina Keluarga dan pengurus kelompok UPPKS.

5. Perlombaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)

Merupakan organisasi kelompok maupun perorangan yang mempunyai peran sebagai mitra PLKB/PKB dalam pengelolaan program kependudukan dan KB dilapangan. IMP ini sering disebut dengan istilah Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan atau PPKBD. Antar PLKB dan IMP tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan KB di lapangan, karna mereka merupakan motor penggerak terdepan sukses program KB selama ini.

Dan cara untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada IMP selaku motor penggerak terdepan program KB dilapangan, pemerintah secara berkala setiap tahun menjelang peringatan hari keluarga menyelenggarakan IMP disetiap tingkatan wilayah yang dimaksudkan untuk pembinaan dan motivasi

penghargaan kepada mereka yang telah berjuang dengan pengabdian terbaik dalam mensukseskan program kependudukan KB Nasional.

Adapun pemenang Lomba IMP Juara I Rasmisah di kelurahan Kampung Baru, Juara II Ayuniar di kelurahan Jaya Mukti dan Juara III Azrida Laili di Kelurahan Teluk Makmur

6. Perlombaan KB Lestari

Pasangan KB Lestari adalah pasangan usia subur yang telah memakai alat kontrasepsi secara terus menerus selama 10, 15, 20 tahun tanpa diselingi kehamilan.

Pemberian penghargaan kepada pasangan KB Lestari yang dilakukan selama ini dimaksudkan sebagai “reward” atau penghargaan serta memberikan rasa bangga bagi mereka serta merupakan momentum yang sangat strategis dan masih diprioritaskan kepada pasangan usia subur yang memakai alat kontrasepsi MKJP terus menerus tanpa diselingi kehamilan atau ganti cara selama 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun.

- Lomba KB lestari kategori 10 tahun
 - Juara I : Misnawati di Kelurahan Bukit Timah
 - Juara II : Mahdalena di Kelurahan Mundam
 - Juara III : Umi Kalsum di Kelurahan Ratu Sima
- Lomba KB lestari Kategori 15 tahun
 - Juara I : Kasmalina di Kelurahan Bukit Datuk
 - Juara II : Jati Amperawati di Kelurahan STDI
 - Juara III : Firma Hariyati di Kelurahan Sukajadi
- Lomba KB lestari Kategori 20 tahun
 - Juara I : Rosnah di Kelurahan Mundam
 - Juara II : Misni di Kelurahan Tanjung Penyebal
 - Juara III : Mistiani di Kelurahan Kampung Baru

d. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 15 Institusi dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 20 Institusi atau 133,33%.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.739.501.016 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.230.555.540,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5,508.945.476,-. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. 2.999.780.598,- atau terserap 92,86% dan Belanja Langsung terserap Rp. 4.275.556.744 atau 77,61%

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 777.028.405,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 725.247.293,- atau sebesar 93,34 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp65.670.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.670.000,-. Atau 100% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (4 orang) dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.363.130,-. Atau 99,84% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp7.100.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.100.000,-. Atau 100% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

d. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp111.620.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.817.805,- Atau 89,43%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

e. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp40.952.675,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.667.500,- Atau 96,86%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp58.956.830,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.686.000,- Atau 85,97%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

g. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp55.033.550,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.335.000,- Atau 89,65%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

h. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp5.543.450,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.888.000,- Atau 88,18%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp6.840.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.840.000,- Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau

100%.

- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp39.511.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.891.000,-
Atau 88,31%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersediannya Bahan Makanan dan Makan Minum Rapat dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
 - k. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp223.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 204.588.858,-
Atau 91,38%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersediannya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
 - l. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp74.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 74.400.000,-
Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersediannya Tenaga Pengamanan Kantor (2 org) dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 275.234.350,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 271.600.000,- atau sebesar 98,68 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp45.680.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.680.000,-
Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersediannya sarana dan prasarana kantor dengan target 16 Unit atau capaian realisasi 16 Unit atau 100%.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp210.954.350,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 207.590.000,- Atau 98,41%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersediannya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik dengan target

12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp18.600.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.330.000,- Atau 98,55%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 54.404.621,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 47.433.500,- atau sebesar 87,19 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp41.437.071,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.468.500,- Atau 83,18%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunya dokumen LKj, LKPJ, LPPD dan RENSTRA dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 4 Dokumen atau 100%.

b. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp8.390.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.390.000,- Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunya rencana kerja anggaran murni dan perubahan dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 2 Dokumen atau 100%.

c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp4.577.550,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.575.000,- Atau 99,94%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 1 Dokumen atau 100%.

4. Program Keluarga Berencana

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 3.922.640.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.815.386.291,- atau sebesar 71,77 % yang

direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan KIE

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp393.798.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 336.430.491,- Atau 85,43%adapun Indikator kinerja keluaran adalah.

- Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan KB dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- Jumlah Keluarga yang di data dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 7 Kecamatan atau 100%.
- Tersedianya informasi komunikatif dan efektif dengan target 1 Kali atau capaian realisasi 1 Kali atau 100%.
- Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat dengan target 1 Kali atau capaian realisasi 1 Kali atau 100%.

b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.839.842.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.506.065.800,- Atau 81,86%adapun Indikator kinerja keluaran adalah :

- Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahteradengan target 3 Kelompok atau capaian realisasi 3 Kelompok atau 100%.
- Tersedianya operasional 11 orang tenaga penyuluh lapangan KB dengan target 12 Kali atau capaian realisasi 12 Kali atau 100%.
- Terlaksananya pembinaan kader IMP dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai dengan target 3 Kelompok atau capaian realisasi 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

c. Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.045.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 329.670.000,- Atau 31.55%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target 4 Unit atau capaian realisasi 3 Unit atau 75%.

d. Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluhan KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp644.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 643.220.000,- Atau 99,88%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target 3 Unit atau capaian realisasi 3 Unit atau 100%

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 243.384.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 227.399.900,- atau sebesar 93,43 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 243.384.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 227.399.900,- Atau 93,43%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Ajang Prestasi Remaja (Kelompok PIK) Tingkat Kota Dumai dengan target 25 Kelompok atau capaian realisasi 25 Kelompok atau 100%.

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk Rp. 236.253.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.489.760,- atau sebesar 79,78 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 236.253.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.489.760,- Atau 79,78%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dengan target 4 Kegiatan atau capaian realisasi 3 Kegiatan atau 75%.

Adapun Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Juara I Duta Genre Putri Jalur Pendidikan tingkat Provinsi
2. Juara I Lomba Cerdas Cermat Genre tingkat Provinsi
3. Juara III Rangking I Genre tingkat Provinsi
4. Juara III Yel – Yel Genre tingkat Provinsi
5. Penghargaan Lomba Poktan Tk Provinsi di Kabupaten Pelalawan.

DINAS PERHUBUNGAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Jumlah uji KIR Angkutan umum	10.140 unit	9344 unit	92,15%
Persentase layanan Angkutan Darat	0.68%	0.0068%	1%
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6 terminal	6 terminal	100%
Rasio izin trayek	1:37.988 rasio	1:32.556 rasio	85,70
Pemasangan Rambu-Rambu	24%	26,16%	109

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

1. Jumlah uji KIR Angkutan Umum

di dalam indikator ini ditargetkan 10.140 namun dalam realisasinya belum dapat terlaksana 100% dikarenakan tingkat kesadaran pemilik kendaraan pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar laik jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus uji serta sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor yang belum memadai dan baru dianggarkan pada tahun berjalan.

2. Persentase Layanan Angkutan Darat

di dalam indikator ini ditargetkan 0,68% dalam realisasinya hanya 0.0068% yang diantaranya unit kendaraan oplet (Angkutan Kota). Belum tercapainya indikator kinerja tersebut disebabkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan perkotaan dan kurangnya peremajaan angkutan sehingga tidak tercapainya apa yang ditargetkan.

3. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Teminal Bis

Didalam indikator ini ditargetkan 6 terminal dan sudah mencapai target yang diantaranya Terminal Penumpang, terminal Barang, Bandar Udara Pinang Kampai, Pelabuhan Penumpang, Terminal Penumpang / Penyeberangan Ro-Ro, terminal penumpang (angkot).

4. Rasio izin trayek

di dalam indikator ini ditargetkan 1 : 37.988 dalam realisasinya 85,70%. Ini disebabkan masih adanya angkutan perkotaan yang belum mempunyai izin

trayek. Serta belum terlaksananya kegiatan operasi penertiban dokumen angkutan penumpang dan barang dikota Dumai yang dikarenakan kekurangan anggaran.

5. Pemasangan Rambu-rambu

didalam indikator ini ditargetkan 24% dalam realisasinya sudah 26.16% yang diantaranya pengadaan kaca tikung rawan kecelakaan, Papan Rambu RPPJ dan rambu tiang tunggal. sudah tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan karena prioritas Dinas Perhubungan dalam meningkatkan aspek ketertiban, keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 26.365.988.292,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.629.964.000,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.736.024.292. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.615.910.838,- atau 81,05 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.034.944.206,- atau 89,19%.

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrai Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.338.000,- atau 41.81%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.271.700.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 960.645.492,- atau 75.54%.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 688.106.450,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 677.706.450,- atau 98.49%.

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.150.000,- atau 100%.

e. Penyediaan alat tulis kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 125.161.316,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.161.316,- atau 47.27%.

- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 348.132.310,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 332.075.235,- atau 95.39%.
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.491.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.491.000,- atau 100%.
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 58.842.050,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.805.000,- atau 98.24%.
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.384.850,- atau 84.33%.
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.765.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.755.000,- atau 99.95%.
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 381.565.176,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 381.477.397,- atau 99.98%.
 - l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.009.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 998.800.000,- atau 98.99%.
 - m. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 187.480.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.000.000,- atau 83.74%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 298.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.000.000,- atau 19.46%.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 36.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.970.000,- atau 99.92%.

c. Pengadaan mebeleur

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.800.000,- atau 48.89%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 315.494.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 312.132.200,- atau 98.93%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 498.491.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 477.674.766,- atau 98.52%.

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 725.583.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.719.697200,- atau 99.19%

3. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerjan Lapangan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 34.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.408.000,- atau 99.73%.

4. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 42.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.000.000,- atau 100

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 33.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.797.250,- atau 99.99%.

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.180.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.955.000,- atau 98.61%.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.900.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.065.000,- atau 95.80%.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.112.360.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.411.819.000,- atau 86,30% yang dialokasikan melalui kegiatan–kegiatan dibawah ini :

a. Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 184.046.800,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.120.486.800,- atau 65,47 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah jumlah koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan yang berupa Forum LLAJ.

b. Study, Survey, Pencacahan dan Pengumpulan Data

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.148.200.000,- atau 98,80 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah jumlah dokumen kajian teknis dan SOP Dinas Perhubungan berupa :

- Penyusunan Kajian tematik kebijakan fungsi dan kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan penyeberangan kota Dumai
- Penyusunan kajian eksplorasi dan inventaris dan potensi kebijakan penyelenggaraan dan penegak hukum bidang perhubungan di kota dumai
- Penyusunan kajian tematik kebijakan dalam pengembangan sumber pendapatan asli daerah bandar udara tersier dan tempat pendaratan helikopter (heliped)

- c. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.778.313.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 4.291.332.200,- atau 89,81 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah jumlah terminal angkutan darat, laut dan udara yang terkelola.
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.158.979.610,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.146.120.000,- atau 91,91% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 158.979.610,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.120.000,-atau 91,91% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di Kota Dumai.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.579.173.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.532.814.050,- atau 97,06%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :
- a. Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.210.335.780,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.183.324.050,-atau 97,77% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga teknis kontrak.
- b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 368.837.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 349.490.000,- atau 94,75% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil

(Outcomes) kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.202.000,- atau 96,81% dari anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.202.000,- atau 96,81 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah Halte yang terbangun yang dialokasikan melalui kegiatan Rehab Halte Sekota Dumai namun dalam pelaksanaannya fisiknya sudah mencapai 100%.

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.683.470.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.507.108.000,- atau 93,43%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 365.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 361.367.000,- atau 99,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah jumlah rambu lalu lintas yang lengkap dan memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas, yang berupa tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas.

b. Pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.260.775.000,- atau 93,39% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah jumlah marka jalan yang terbangun guna terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, teratur dan terkendali keluaran kegiatan ini yaitu :

a. Pengadaan dan pengecatan Zona Selamat Sekolah Dumai Selatan

- b. Pembuatan dan pengecatan Marka zebra cross setiap lampu traffic light
 - c. Pembuatan dan pengecatan marka sepanjang jalan Budi Kemuliaan
 - d. Pembuatan dan pengecatan marka sepanjang jalan Sultan Syarif Kasim I
 - e. Pembuatan dan pengecatan marka sepanjang jalan Sultan Syarif Kasim II
 - f. Pita Kejut SDN 003 Kelurahan Mekar Sari
 - g. Pembuatan dan Pengecatan Marka Sepanjang Jalan Kamboja
 - h. Pembuatan dan Pengecatan Marka Sepanjang Jalan Ombak II
 - i. Pembuatan dan Pengecatan Marka Parkir Sekota Dumai
- c. Operasi penertiban dan penegakan hukum
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 228.470.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 228.470.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah operasi Penertiban . Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan Angkutan Umum, yaitu :
- a. Operasi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dipersimpangan pasar dan lokasi sekolah pada pagi dan siang hari.
 - c. Operator Radio Orari.
 - d. Jaga Pos Pengendalian Lalu Lintas (Posdallalin).
- d. Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 540.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 458.316.000,- atau 84,87% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah lokasi pemasangan APILL dan LPJU Tenaga Surya yaitu berupa kegiatan :
- a. Pemasangan Lampu Rambu Lalu Lintas di Simpang SMPN 20 Kelurahan Mundam
 - b. Pengadaan Lampu Traffic Light Simpang Cempedak - Budi Kemuliaan
 - c. Pengadaan Lampu Warning Tiang Lurus Jl. Pawang Sidik Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Pengadaan Lampu Traffic Light Simpang Bukit Datuk - Pasar Pulau Payung.
- e. Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 198.180.000,- atau 99,09% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya median jalan dan pulau jalan yang memadai yaitu berupa kegiatan :

- a. Pembuatan pedestrian pada jalan kota dalam wilayah Kec Dumai Kota
- b. Pembuatan pedestrian pada jalan kota dalam wilayah kec Dumai Timur

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 :

**Tabel 4. 25. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Persentase koperasi yang aktif	86,96 %	82,71%	95,11%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	77,8 %	98	125,96%
Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	60 %	50,29	83,81%
Persentase Pengembangan Kawasan Industri	68 %	50	73,52%
Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	86 %	75,58	87,88%

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi :

a. Persentase Koperasi yang Aktif

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu 86,96 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 95,11%.

b. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu 77,8 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 125,96%.

c. **Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu 60 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 83,81%.

d. **Persentase Pengembangan Kawasan Industri**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu 68 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 50%.

e. **Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu 86 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 87,88%.

Anggaran Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.834.860.183,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.809.334.518,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.025.525.665,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 3.823.861.626,00,- atau terserap 100,38% dan belanja langsung terserap Rp. 3.570.716.376,00,- atau 88,70%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.649.210.503,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.543.965.806 - atau sebesar 93,62% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau % adapun indikator kinerja keluaran adalah

tersedianya penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.219.090.000,- (dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.167.454.016,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam belas rupiah) atau 76,43% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.194.866.520,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.173.177.350,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 88,87% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya Perlengkapan kebersihan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.86.231.283,- (delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.86.155.238,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 99,91 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.17.884.750,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.17.804.750,- (tujuh belas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 99,55 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- f. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12.351.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.11.751.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 95,14% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.160.010.400,- (seratus enam puluh juta sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.158.456.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau 99,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun atau capaian realisasi 75%.
- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.880.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) atau 74,60% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.11.055.000,- (sebelas juta lima puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.8.625.000,- (rupiah) atau 78,02% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makan dan minum dan tamu dengan target 11 bulan atau capaian realisasi 100%.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.503.761.150,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.480.382.452,- (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atau 95,36% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi program kerja dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 95,36%.

k. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.240.900.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.240.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 100 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

l. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.185.804.400,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.185.784.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau 99,99% adapun indikator kinerja keluaran tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 195.460.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 155.517.785, - atau sebesar 79,56% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.16.352.755,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau 85,62% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kendaraan roda 2 dengan target 1 unit atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya dengan target 1 tahun atau capaian realisasi 100%.

- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.143.635.400,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.119.265.030,- (seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh rupiah) atau 83,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 83,03%.
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.28.325.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 54,72% adapun indikator kinerja keluaran adalah terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya dengan target 1 tahun atau capaian realisasi 54,72%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 53.504.130,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.497.750, - atau sebesar 99,99% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.20.742.180,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.20.735.800,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau 99,97 % adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 99,97%.
- b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.15.053.170,- (lima belas juta lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 15.053.170,- (lima belas juta lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau 100% adapun

indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya laporan semesteran dengan target 1 laporan atau capaian realisasi 100%.

- c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.17.708.780,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 17.708.780,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 100%
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 203.214.565,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.161.883.708 atau 79,66% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bimbingan dan Konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.116.475.620,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.83.009.778,- (delapan puluh tiga juta sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 71,27%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM , sosialisasi perda IUI dengan target 20 IKM dan 150 IKM atau capaian realisasi 71,27%.
 - b. Evaluasi pendataan industri kecil dan industri menengah (IKM)
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.86.738.945,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.78.873.930,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 90,93%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah adanya data dan informasi IKM yang akurat dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 90,93%.
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.636.646.750,- (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus

lima puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.559.541.443 atau 87,89% yang alokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan kemampuan teknologi industri

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.137.202.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.133.288.950,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 97,15%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM di bidang pengelasan listrik dengan target 15 Orang atau capaian realisasi 100%.

b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.245.740.450,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.189.853.524,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau 77,26%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM konveksi rajutan dan tenun dengan target 40 IKM atau capaian realisasi 100%.

c. Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.253.703.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.236.398.969,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 93,18%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan industri kerajinan daerah bekerjasama dengan Dekranasda, terlaksananya promosi produk kerajinan daerah, dan terlaksananya pembinaan pengrajin daerah dengan target 100% atau capaian realisasi 100%.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.440.905.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.387.572.550,- atau 87,90%. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.245.387.950,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 87,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, serta camat peduli koperasi dengan target 70 % atau capaian realisasi 90%.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.78.645.500,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.70.748.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 89,96 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi yang produktif di Kota Dumai dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 90%.
 - c. Pelatihan Penyusunan laporan dan neraca koperasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.980.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.71.436.600 (tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau 87%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan penyusunan dan neraca keuangan bagi pengurus koperasi dengan target 1 kali kegiatan atau capaian realisasi 87,14%.
7. Program Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil Menengah Yang Konduksif
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 381.574.117,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 371.632.667, - atau sebesar 97,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.136.839.667,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.130.129.667,- (seratus tiga puluh juta

seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuhpuluh) atau 95,10% adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya sertifikat halal dengan target 40 UMKM atau capaian realisasi 100%.

b. Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.244.734.450,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.241.503.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) atau 98,68% adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan UMKM di setiap kecamatan dengan target 7 kecamatan atau capaian realisasi 100%.

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 253.739.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.146.940.241,- atau 57,91% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.153.930.200,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.146.940.241,-(seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,46%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM dengan target 50 UMKM atau capaian realisasi 100.

b. Pengembangan pemasaran produksi melalui promosi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.99.809.500 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan riabu lima ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.0,- (rupiah) atau 0,00%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pemasaran produksi UMKM melalui promosi luar daerah atau capaian realisasi 0%.

9. Program Penataan Struktur Industri

Pada tahun 2018, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.211.270.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.190.164.426,- atau 90,01%. Jumlah

anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kebijakan keterkaitan struktur industri

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.211.270.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 190.164.426,- (seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) atau 90,01%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya naskah akademik dan ranperda RPIK Kota Dumai dengan target 2 dokumen atau capaian realisasi 90,01%.

Tabel 4.26. penghargaan
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Pertama dalam Pembinaan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2018	Peringkat Pertama	

Adapun penghargaan yang diraih oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, usaha kecil dan Menengah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai adalah **“Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Pertama dalam Pembinaan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2018”**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2018 urusan Penanaman Modal, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pesandian maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Nilai Investasi PMA	Rp.5.788.267.749.296,-	Rp.2.006.313.400.000,-	31,42

dan PMDN			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	76	84,57	111,27

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Indikator pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

a. Jumlah nilai investasi berkala Nasional (PMDN/PMA)

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Rp. 5.788.267.749.296,- dan capaian indikator sampai tahun 2018 yaitu Rp. 2.006.313.400.000,- atau sebesar 34,67% Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi unggulan daerah, Kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi dan Kegiatan Sosialisasi penanaman modal.

b. Indikator Kepuasan Masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu 76 dan capaian indikator sampai tahun 2018 yaitu 84,57 atau sebesar 111,27% Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Kegiatan Sosialisasi pelayanan terpadu, Kegiatan Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Survey penerbitan perizinan.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja yang belum tercapai yaitu belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pada nomenklatur rekening kegiatan diatas yang diusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan, sehubungan dengan tidak disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2018 maka indikator kinerja

kegiatan tersebut belum bisa terlaksana

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 12.458.705.400,- dengan rincian belanja tidak langsung 5.383.080.000,- Dan belanja langsung sebesar 7.075.625.400,- , untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi 5.534.121.258,- Atau terserap 102,80% Dan belanja langsung terserap 5.550.552.253,- Atau 78,45%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.791.802.060,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.631.440.624,- atau sebesar 91,05%. yang direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
dialokasikan dana sebesar Rp.219.050.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.218.901.100,- atau sebesar 99,83%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya kegiatan surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%
- b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dialokasikan dana sebesar Rp. 318.248.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 180.964.530,- atau sebesar 56,86%. Adapun indikator kinerja keluarannya terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
dialokasikan dana sebesar Rp. 15.500.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.255.359,- atau sebesar 79,07%. Adapun indikator kinerja keluarannya terbayarnya izin kendaraan dinas dengan target 9 unit atau capaian realisasi 88,80%.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
dialokasikan dana sebesar Rp. 129.050.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 129.045.999,- atau sebesar 99,99%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

dialokasikan dana sebesar Rp. 46.400.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.590.000,- atau sebesar 70,24%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya peralatan kerja yang layak pakai dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
dialokasikan dana sebesar Rp. 168.727.584,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.106.139,- atau sebesar 99,04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah penyediaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dialokasikan dana sebesar Rp. 192.341.476,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 191.584.300,- atau sebesar 99,61%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- h. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dialokasikan dana sebesar Rp. 41.710.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.276.200,- atau sebesar 99,61%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya peralatan listrik kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dialokasikan dana sebesar Rp. 14.420.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- atau sebesar 99,86%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya bahan bacaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
dialokasikan dana sebesar Rp. 61.200.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.647.000,- atau sebesar 99,10%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 502.100.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 500.619.997,- atau sebesar 99,71%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target atau capaian realisasi 100%.

- f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 236.468.400,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 236.436.641,- atau sebesar 99,39%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 86.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- atau sebesar 36,63% Yang direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
dialokasikan dana sebesar Rp. 86.000.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- atau sebesar 36,63%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah bimtek / pelatihan dengan target 8 Orang atau capaian realisasi 100%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 114.920.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.661.400,- atau sebesar 58,87% yang direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dialokasikan dana sebesar Rp. 70.833.400,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.933.400,- atau sebesar 42,26%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah laporan kinerja dan keuangan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
 - b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dialokasikan dana sebesar Rp. 12.100.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.350.000,- atau sebesar 93,80%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah laporan semester keuangan dengan target 2 laporan atau capaian realisasi 100%.
 - c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp. 31.987.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.378.000,- atau sebesar 82,46%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 laporan atau capaian

realisasi 100%

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 941.314.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 488.092.788,- atau sebesar 58,85%. Yang direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 157.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp.112.625.438,- atau sebesar 71,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah informasi potensi dan peluang investasi dengan target 1 kegiatan atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

dialokasikan dana sebesar Rp.308.901.900,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya koordinasi terkait dengan kegiatan penanaman modal di kota Dumai dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 0%.

c. Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

dialokasikan dana sebesar Rp. 167.437.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.905.000,- atau sebesar 53,69%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya laporan kerja penanaman modal (LKPM) yang akuntabel dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

dialokasikan dana sebesar Rp. 180.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.886.050,- atau sebesar 91,51%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya laporan kerja penanaman modal (LKPM) yang akuntabel dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

e. Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal

dialokasikan dana sebesar Rp. 127.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 110.676.300,- atau sebesar 86,87%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah sosialisasi peraturan investasi dengan target 1 kegiatan atau capaian realisasi 100%.

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 271.969.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 232.960.000,- atau sebesar 85,66%. Yang

direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dialokasikan dana sebesar Rp. 271.969.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 232.960.000,- atau sebesar 85,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
- Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 2.183.440.740,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.435.057.800,- atau sebesar 65,72%. Yang direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu dialokasikan dana sebesar Rp. 481.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.990.300,- atau sebesar 65,58%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
 - b. Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dialokasikan dana sebesar Rp. 617.188.000,- dengan realisasi sebesar Rp.490.792.500,- atau sebesar 79,52%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya koordinasi penerbitan izin dengan target 12 dokumen atau capaian realisasi 100%.
 - c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 285.318.240,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terpantau izin-izin yang diterbitkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
 - d. Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perzinaan dan non perizinan dialokasikan dana sebesar Rp. 272.334.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.805.000,- atau sebesar 49,13%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
 - e. Kegiatan Survey penerbitan perizinan dialokasikan dana sebesar Rp. 526.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 494.470.000,- atau sebesar 93,87%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah izin yang akan diterbitkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai tahun 2016- 2021 urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4. 28. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (%)
Prestasi olahraga ditingkat propinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah /POPDA)	5 prestasi	10 Prestasi	0%
Persentase organisasi pemuda yang aktif	55 %	55%	100%
Jumlah Klub Olahraga	82 Klub	82 Klub	100%
Lapangan Olahraga	2 Lapangan	2 Lapangan	100%
Jumlah pembinaan cabang olahraga	28 Cabang	32 Cabang	114%
Kunjungan wisata			
- Mancanegara	12.757	12.908	89,35%
- Domestik	39.263	33.572	
Kunjungan Wisata	40%	89,35%	

a. Prestasi olahraga ditingkat propinsi (Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah /POPDA)

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2018 Kota Dumai yaitu menduduki peringkat ke 5. Diskopar Kota Dumai dalam pelaksanaan POPDA hanya mengirimkan 5 Cabor (Volly, silat, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw) dari 8 cabor yang dipertandingkan. Peserta terdiri dari 12 kab/kota se-propinsi Riau yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Kota Dumai mendapat peringkat ke-10 dari 12 Kabupaten/Kota yang mengikuti POPDA tersebut, sangat jauh dari target yang diinginkan pada Tahun 2018 yaitu peringkat ke-5. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya cabor yang dikirim dari cabor yang diperlombakan karena terbatasnya anggaran, untuk kegiatan penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah tersebut Dumai hanya mengirim 5 cabor dari 8 cabor yang dipertandingkan.

b. Presentase organisasi pemuda yang aktif

Dari organisasi pemuda yang ada dikota Dumai organisasi pemuda yang aktif sebanyak 55%, hal ini sesuai dengan target indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Target indikator sasaran renstra untuk kegiatan kepemudaan ditarget 55 % organisasi pemuda, kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan karena terbatasnya anggaran, akhirnya bisa dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan seleksi dan pembinaan Paskibraka dan kegiatan Seleksi dan pembinaan Pemuda marchingband dengan realisasi sebesar 100 %.

c. Jumlah klub olahraga

Dari jumlah klub olahraga yang ada dikota Dumai, klub olahraga sebanyak 82 klub. Pada tahun 2018 tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah klub olahraga dikota Dumai sebanyak 82 klub.

d. Lapangan Olahraga

Target awal dari indikator sasaran renstra untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga ada 1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga namun karena terbatasnya anggaran kegiatan sarana dan prasarana olahraga belum terealisasi ditahun 2018.

e. Jumlah pembinaan cabang olahraga

Dalam meningkatkan prestasi olahraga, perlu didukung dengan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, terutama untuk membina mental dan memupuk bakat-bakat yang ada. Dalam rangkaian tersebut, dukungan klub-klub olahraga akan sangat membantu untuk menciptakan bibit-bibit pemuda yang berprestasi dibidang olahraga. Pada tahun 2018 target capaian tercatat 28 klub olahraga sementara realisasi mengalami peningkatan klub olahraga sebanyak 32 klub yang tercatat di KONI. Untuk kegiatan pada tahun 2018 realisasinya sebesar **114 %**.

f. Persentase Jumlah Kunjungan Wisata

Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2018 sebanyak 52.020 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisatawan menjadi 46.480 wisatawan. dengan rincian kunjungan domestic mengalami penurunan dari 39.263 orang yang ditargetkan sedangkan realisasi sebanyak 33.572 orang, sedangkan kunjungan mancanegara mengalami kenaikan

1,18 % dari target 12.757 orang menjadi 12.908 orang. Jadi target realisasi jumlah kunjungan domestic dan mancanegara mencapai 89,35%.

Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.756.056.768,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.586.349.360,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.169.707.408,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.496.653.367,- atau 33,93% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.845.828.615- atau 55,34%.

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.220.220.337,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.160.164.124,- atau sebesar 95,08% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.939.556,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.472.378,- dan atau sebesar 65,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembayaran rekening listrik, air, rekening telepon dan tagihan internet, tv kabel dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 90%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.720.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.720.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan dengan target 3 bulan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 173.632.300,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 173.632.300,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

d. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 77.540.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.540.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah

pengadaan alat – alat tulis kantor untuk 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- e. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.024.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.988.400,- dan atau sebesar 99,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- f. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.040.330,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.039.372,- dan atau sebesar 99,99% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah komponen listrik bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- g. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.668.930,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.551.000,- dan atau sebesar 98,66% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 20 unit atau capaian realisasi 100%.

- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.250.000,- dan atau sebesar 75,62% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan dengan target 15 exemplar atau capaian realisasi 90%.

- i. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.875.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.875.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.760.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.628.000,- dan atau sebesar 86,99% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 465.289.821,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 465.202.674,- dan atau sebesar 99,98% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan target 1 tahun atau capaian realisasi 100%.

- l. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.205.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.205.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan jasa keamanan kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- m. Kegiatan penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.325.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.060.000,- dan atau sebesar 99,52% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 257.379.816,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 246.181.900,- atau sebesar 95,65% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 53.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.775.000,- dan atau sebesar 99,58% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan target paket atau capaian realisasi 100%.

- b. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 167.839.816,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 156.866.900,- dan atau sebesar 93,46% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas yang perlu dilakukan perawatan yang dibayarkan dengan target 6 kendaraan dinas atau capaian realisasi 100%.

- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 36.540.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 36.540.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan sarana kerja lainnya dengan target 18 buah atau capaian realisasi 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 77.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.622.591,- atau sebesar 83,93% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 77.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.622.591,- dan atau sebesar 83,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 7 orang atau capaian realisasi 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 80.978.650,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.639.250,- atau sebesar 83,53% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.914.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.464.000,- dan atau sebesar 96,77% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen LAKIP/LKj-IP, LPPD, LKPJ dan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan target 4 dokumen atau capaian realisasi 100%.

- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.541.150,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.540.000,- dan atau sebesar 99,99% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Laporan akhir tahun kantor dengan target 1 Laporan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.676.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.635.250,- dan atau sebesar 99,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen Rencana Kerja dengan target 3 dokumen atau capaian realisasi 100%

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 734.308.300,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 685.623.800,- atau sebesar 93,37% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Seleksi dan Pembinaan PASKIBRAKA

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 546.552.050,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 498.675.050,- dan atau sebesar 91,24% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 35 orang atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pemuda Marchingband

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 187.756.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 186.948.750,- dan atau sebesar 99,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta macrhinband yang dilatih dengan target 80 orang atau capaian realisasi 100%.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 928.487.650,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 789.899.850,- atau sebesar 85,07% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.703.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.488.750,-

dan atau sebesar 65,68% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar dengan target 3 cabang atau capaian realisasi 65%.

b. Senam kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 224.806.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 183.818.000,- dan atau sebesar 81,77% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Car Free Day) dengan target 44 minggu atau capaian realisasi 73%.

c. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 287.601.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.601.100,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi Bola Volly Walikota Cup dengan target 12 kab/kota atau capaian realisasi 100%.

d. Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 118.872.300,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 69.257.500,- dan atau sebesar 58,26% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelajar dan masyarakat yang ikut memeriahkan perlombaan dengan target 2 kegiatan atau capaian realisasi 50%.

e. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 197.504.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 183.734.500,- dan atau sebesar 93,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang diikuti dengan target 8 cabang olahraga sementara realisasi hanya 5 cabang yang diikuti atau capaian realisasi 62,5%.

7. Program pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 399.890.305,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 390.126.000,- atau sebesar 97,56% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 399.890.305,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 390.126.000,-

dan atau sebesar 97,56% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pameran yang diikuti dengan target 2 pameran atau capaian realisasi 100%.

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.260.676.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.240.790.100,- atau sebesar 98,42% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.154.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.136.462.000,- dan atau sebesar 98,48% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata dengan target 4 sarana dan prasarana atau capaian realisasi 100%.

b. Pembersihan dan pemeliharaan Lahan Wisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 106.676.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.328.100,- dan atau sebesar 97,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lahan objek wisata yang dibersihkan dengan target 1 objek atau capaian realisasi 100%.

9. Program Pengembangan Kemitraan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp.210.766.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.781.000,- atau sebesar 95,26% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut

a. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti seleksi Bujang dan Dara dengan target 2 orang atau capaian realisasi 100%.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.766.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 170.781.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah

peserta yang mengikuti lomba mancing dengan target 700 orang atau capaian realisasi 100%.

Prestasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata :

1. Predikat stand pameran terbaik se- nusantara pada Pameran Batam Expo (Gelar Wisata dan Budaya Nusantara 2018)
2. Juara 2 dan harapan I Kompetisi Olahraga Volly Walikota Cup I tahun 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RPJMD kota Dumai Tahun 2016 - 2021, Urusan Wajib Perpustakaan, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Dumai Tahun 2018**

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (%)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	21.000	29.370	139,85%
2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	12.036	11.986	99,58%
3.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	44	44	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

a. Jumlah pengunjung Perpustakaan pertahun

Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Kota Dumai pada Akhir Tahun 2018 dengan target 21.000 pengunjung/pemustaka, realisasi kunjungan masyarakat ke perpustakaan hanya sebesar 29.370 pengunjung/pemustaka atau sebesar 139.85% yang terdiri dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah Kota Dumai, Perpustakaan Keliling, perpustakaan masyarakat dan kelurahan serta perpustakaan tugu reformasi/lancang kuning.

b. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah Kota Dumai pada Akhir Tahun 2018 dengan target 12.036 judul buku, untuk realisasi koleksi judul buku di

perpustakaan sebesar 11.986 judul buku atau sebesar 99.58% yang terdiri dari buku bantuan hibah dari Perpustakaan Nasional

c. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Untuk persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada Akhir

Tahun 2018 dengan target 44% atau tambahan sebanyak 5 OPD, dan terealisasi sebesar 100%.

Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.853.121.956,00 dengan dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.556.405.940,00 sedangkan Belanja Langsung Sebesar Rp.2.296.716.016,00. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.586.077.752,00 atau terserap 101% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.136.391.726,00 atau sebesar 93%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah ketersediaan kelengkapan surat menyurat dengan target 700 pcs dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran proses surat menyurat dinas perpustakaan dan kearsipan kota dumai dengan target 90% dan terealisasi juga sebesar 90%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 169.080.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.770.637,- atau 72,61% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah belanja jasa pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran kegiatan operasional kantor dengan target 90% dan terealisasi juga sebesar 90%

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 123.319.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 123.317.400,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kebutuhan tenaga kebersihan dengan target 7 orang dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan kenyamanan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah dengan target 95% dan terealisasi juga sebesar 95%

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.805.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.805.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat dengan target 73 unit dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan kelancaran aktifitas/pekerjaan perkantoran dengan target 90% dan terealisasi juga sebesar 90%

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 88.131.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.787.600,- atau 99,61% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kebutuhan ATK Dinas Perpustakaan dan Kersipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran administrasi perkantoran dengan target 95% dan terealisasi juga sebesar 95%

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.262.639,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.014.600,- atau 94,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan Dinas Perpustakaan dan Kersipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 94.13%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dengan target 100% dan terealisasi juga sebesar 100%.

g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.784.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.784.200,-

atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan dengan target 12 jenis dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase kelancaran kegiatan operasional dan administrasi perkantoran dengan target 95% dan terealisasi juga sebesar 95%.

- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.890.000,- atau 68,68% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah ketersediaan media massa dan buku perundang-undangan dengan target 10 media massa dan terealisasi sebesar 68.68%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan pengetahuan umum aparatur dengan target 80% dan terealisasi juga sebesar 80%.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.291.000,- atau 87,31% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah ketersediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 87.31%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah priode terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%.
- j. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 299.014.676,- atau 99,67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan target 71 kali dan terealisasi sebesar 99.67%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan SDM/kinerja aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 91.912.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.600.000,- atau 97,48% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ketersediaan tenaga keamanan dengan target 4 orang dan terealisasi sebesar 100%, dan

out come dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan keamanan dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 118.211.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.572.045,- atau 99,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dengan target 3 jenis pengadaan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan fasilitas kerja dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

b. Pengadaan Meubeler

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.294.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.214.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah paket pengadaan mebeleur dengan target 3 jenis dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase ketersediaan mebeleur kantor dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 394.334.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 359.013.660,- atau 91,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kendaraan dinas/operasional kantor perpustakaan dan kearsipan yang dirawat dengan target 6 unit dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%.

d. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.474.000,- atau 99,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor dengan target 2 jenis pekerjaan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan fasilitas kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.81.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- atau 66,67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang akan diikuti dengan target 18 kali dan terealisasi sebesar 66.67% dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan SDM aparatur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- atau 97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah dokumen laporan yang harus diselesaikan dengan target 7 dokumen dan terealisasi sebesar 100% dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan pengawasan dan evaluasi kerja aparatur dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.400.000,- atau 97,27% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah dokumen laporan yang harus diselesaikan dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 100% dan *out come* dari kegiatan ini adalah meningkatnya system pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai SAP dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah

Dengan anggaran sebesar Rp.103.343.300,- dan terlealisasi Rp. 93.946.200,- atau 90,91%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah perpustakaan desa/kelurahan, khusus dan masyarakat yang dibina atau terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah jumlah

perpustakaan desa/kelurahan, khusus dan masyarakat yang menjalankan standar pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan undang-undang/peraturan perpustakaan dengan target sebanyak 4 (empat) perpustakaan dan terealisasi 100%.

b. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.289.249.997,00 dan realisasi Rp.289.722.877,00 atau 99.47% . *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah lomba mendongeng, lomba duta pustaka, lomba perpustakaan kelurahan/perpustakaan khusus, pameran perpustakaan provinsi dengan target sebanyak 3 (tiga) jenis kegiatan/lomba dan teralisasi 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah sama dengan diatas yaitu jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan umum daerah kota Dumai dan perpustakaan binaan lainnya dengan target 21.000 pemustaka dan teralisasi 29.370 pemustaka atau sekitar 139.85%.

6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a. Pengumpulan Data;

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 39.485.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.327.000,- atau 89.47%, dengan Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang diakuisisi dengan target 5 (lima) OPD dengan realisasi 5 OPD yang menyerahkan data atau terealisasi 100%, Sedangkan hasil (*Out come*) dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah dokumen arsip yang terkumpulkan dengan target sebanyak 85%.

b. Pengklasifikasian Data

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. . 54.862.780,- dan terealisasi Rp. 42.878.800,- atau berkisar 78.16% Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang ditata/dibina dibidang kearsipan yaitu dengan target sebanyak 5 OPD dan terealisasi 100%, sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah OPD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku dengan target yaitu dengan 5 OPD, terealisasi 100%.

7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

a. Penduplikasian dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika;

Jumlah anggaran sebesar Rp. 20.857.350,- dan realisasi anggaran Rp.

17.681.500,- atau sebesar 84,77%. Indikator kinerja keluaran (*Output*) dari kegiatan ini adalah Jumlah arsip yang diduplikasikan dalam bentuk informatika dengan target sebanyak 1.600 lembar dan terealisasi sebanyak 1.824 lembar arsip textual dan 37 exemplar cetak photo.

Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan keselamatan arsip daerah dengan target 85% dan terealisasi 85% dari target tersebut.

8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

a. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Untuk kegiatan ini Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 15.183.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.186.531 atau sebesar 80.26%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan arsip daerah dengan target 2 kali dan terealisasi 100%. Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah Persentase peningkatan keselamatan arsip daerah yang diperkirakan 85%, dan terealisasi sebesar 85%. Minimnya fasilitas pemeliharaan dokumen arsip akan mempengaruhi dokumen arsip yang sudah ada dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada pada saat ini. Dengan bertambah nya alat-alat untuk pemeliharaan/perawatan dokumen/arsip yang tersimpan sehingga keselamatan arsip yang tersimpan juga semakin meningkat.

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

17. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pelaksanaan urusan pilihan pertanian sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sampai dengan tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30. Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018

No	Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (%)
1	Angka Kecukupan Protein	50 gr/kap/hari	52,25 gr/kap/hari	100,00
2	Cakupan Bina Kelompok Tani	93 kelompok	88 kelompok	94,61
3	Produksi Komoditi Pertanian	20.596 Ton	24.412 Ton	100,00
4	Produksi Komoditi Perkebunan	84.256 Ton	84.856 Ton	100,00
5	Populasi Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.253 Satuan Ternak	100,00
6	Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	12 Kasus	0 Kasus	100,00
7	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	23 Kasus	7 Kasus	100,00
8	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	25 Kasus	3 Kasus	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kecukupan Protein

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2018 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 50 gr/kapita/hari. Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2018 yakni 52,25 gr/kapita/hari atau tercapai 100,00% dari target 50 gr/kapita/hari. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

2. Cakupan Bina Kelompok Tani

Dari target sebanyak 93 Kelompok dengan realisasi tercapai 88 Kelompok atau 94,61 %. Capaian tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang hanya 33

Kelompok. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pengembangan tanaman (Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan), Sarana Produksi ternak dan bantuan berupa pelatihan peningkatan SDM Petani/Peternak. Dari target 93 kelompok tani yang direncanakan dapat bantuan hanya 88 kelompok tani yang terealisasi. Capaian indikator ini tidak maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran pada setiap program dan kegiatan. Selain itu ada juga satu kegiatan yang pengadaannya tidak terlaksana dikarenakan adanya kenaikan harga dari barang yang akan diadakan.

3. Produksi Komoditi Pertanian

Produksi Komoditi Pertanian dari target sebesar 20.596 Ton tercapai 24.412 Ton atau tercapai 100,00 %. Komoditi utama pendukung indikator ini adalah produksi tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi Cabe Merah, Nenas dan Kacang Tanah. Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui 3 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Untuk menunjang peningkatan produksi di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2018 memberikan bantuan kepada petani berupa sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura baik berupa benih, pupuk dan sarana pendukungnya untuk komoditi cabe merah, sayuran, semangka, jagung manis dan lainnya.

4. Produksi Komoditi Pertanian

Produksi Komoditi Perkebunan dari target sebesar 84.256 Ton tercapai 84.856 Ton atau tercapai 100,00 %. Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Komoditi utama pendukung indikator ini adalah dari produksi tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, pinang dan kakao. Produksi Kelapa Sawit sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 82.121,05 Ton, Karet 1.799,44 Ton, Kelapa 877,28 Ton, Pinang 48,05 Ton dan Kakao 10,07 Ton. Untuk menunjang peningkatan produksi di sektor perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2018 memberikan bantuan kepada petani berupa bibit unggul kepala sawit untuk 25 ha.

5. Populasi Ternak Unggulan

Populasi Ternak dari target pada tahun 2018 sebanyak 5.883 Satuan Ternak dengan capaian 6.253 Satuan Ternak atau 100,00%. Jenis Ternak unggulan tersebut meliputi sapi, kerbau dan kambing. Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Dua program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak dan dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Untuk mencapai indikator ini pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai melaksanakan beberapa upaya melalui kegiatan yaitu Inseminasi buatan sebanyak 950 ekor pada ternak sapi. Inseminasi buatan (IB) disebut juga dengan kawin suntik merupakan suatu terobosan yang boleh dikatakan baru dalam membantu peternak untuk meningkatkan hasil produksi. Sekarang IB diIndonesia boleh dikatakan sudah mulai memasyarakat, khususnya pada sapi karena dapat dengan cepat meningkatkan populasi ternak dengan cepat

6. Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2018 sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan capaian sebanyak 0 (nol) kasus atau tercapai 100,00%. Tahun 2018 diadakan surveylen sebanyak 30 sampel, hasil dari surveylen tersebut tidak ditemukan adanya Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan. Target awal penurunannya sebanyak 12 kasus dan terealisasi 100 % karena tidak ditemukan kasusnya. Jumlah surveylen tahun 2018 sebanyak 30 sampel memang mengalami penurunan jika dibanding jumlah surveylen tahun 2017 sebanyak 90 sampel hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

7. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator

kinerja Jumlah Penurunan Kasus Hewan Menular Strategi Zoonosis pada tahun 2018 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) kasus atau tercapai 100,00%. Penurunan Kasus Hewan Menular Strategi Zoonosis melebihi dari yang direncanakan, sehingga capaiannya sangat baik. Tujuh Kasus Hewan Menular Strategi Zoonosis pada tahun 2018 meliputi Rabies, HPAI, Antrax dan Brucellosis. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

8. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Penurunan Kasus Hewan Menular Strategi Non Zoonosis pada tahun 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus dengan capaian hanya 3 (tiga) kasus atau tercapai 100,00%. Penurunan Kasus Hewan Menular Strategi Non Zoonosis melebihi dari yang direncanakan, sehingga capaiannya sangat baik. Tiga Kasus Hewan Menular Strategi Non Zoonosis pada tahun 2018 meliputi Penyakit Jembrana, Septichamia Epizootica, Surra dan PMK. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Anggaran Belanja Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 18.524.094.290,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.652.139.240,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.10.871.955.050,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.495.672.466,- atau 97,95% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.463.137.245,- atau 87,04 %

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.993.303.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.855.012.343,00 atau 93,06% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.342.000,00 atau 84,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya

Administrasi Surat Menyurat 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 302.280.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 201.159.291,00 atau 66,55 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 63.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 63.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 31.692.020,00 atau 79,23 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional 62 Unit dengan realisasi 62 Unit.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 340.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 335.964.000,00 atau 98,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.421.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 71.400.000,00 atau 99,97 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 73.720.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 73.500.000,00 atau 99,70% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan

- h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.602.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 10.500.000,00 atau 99,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.350.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 146.180.000,00 atau 88,41% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Jenis dengan realisasi 8 Jenis.
- j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.840.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 18.000.000,00 atau 82,42% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.690.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 14.690.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 36 Kali dengan realisasi 36 Kali.
- l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 688.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 688.185.032,00 atau 99,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 166.800.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 166.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 dengan realisasi 12 Bulan.

n. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 27.600.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 27.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terselengaran Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 541.346.450,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 312.617.661,00 atau 57,75% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 210.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 63.338.050,00 atau 30,16% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor 6 Unit dengan realisasi 2 Unit.

b. Kegiatan Pengadaan Meubelair

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.720.000,00 atau 51,63% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.158.450,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 48.022.450,00 atau 56,39 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 171.188.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 162.537.161,00 atau 94,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 10 Unit dengan realisasi 10 Uni

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 39.615.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 39.015.000,00 atau 98,49% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.715.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 30.115.000,00 atau 98,05% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terselenggaran Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan perencanaan tahun 2019 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.900.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.900.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 674.262.350,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 582.854.932,00 atau 86,44% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:
- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 367.030.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 315.250.000,00 atau 85,89% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Berpartisipasi dan berperan aktif pada PRA PEDTA KTNA sebanyak 80 Orang dengan realisasi 80 Orang, dan Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengurus Kelompok Tani 15 Poktan dengan realisasi 15 Poktan atau 100%.
 - b. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.727.350,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.792.400,00 atau 73,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah peternak yang terlatih 80 KK dengan realisasi 80 Orang.
 - c. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 246.505.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 222.812.532,00 atau 90,39% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pengembangan Tanaman Hortikultura 5 Kelompok dengan realisasi 5 Kelompok atau 100%.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.278.281.850,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.206.324.160,00 atau 96,84% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 94.564.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 83.415.100,00 atau 88,21% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data SKPG 1 laporan dengan realisasi 1 laporan.

b. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 361.840.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 324.014.460,00 atau 89,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktifitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 222.595.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.612.250,00 atau 89,55% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.

d. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 358.951.350,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 296.659.730,00 atau 82,65%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga 4 kelompok dengan realisasi 4 kelompok.

e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.

172.179.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 133.905.790,00 atau 77,77% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN (Pengembangan Padi 1000 Ha) 1 Kegiatan dan terealisasi 100%.

f. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 203.336.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 166.825.500,00 atau 82,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Berpartisipasi mengikuti lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya lomba cipta menu B2SA tingkat Kota 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah 400 orang dengan realisasi 400 orang, Terlaksananya sosialisasi menu B2SA untuk anggota PKK tingkat kecamatan 210 orang dengan realisasi 210 Orang.

g. Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 864.816.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 768.613.613,00 atau 88,88% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengembangan Tanaman Cabe 9 Ha dengan realisasi 9 Ha, Terlaksananya pelatihan agribisnis bawang merah 1 kali kegiatan dengan realisasi 1 kali kegiatan, Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan di KPT 3.900 batang dengan realisasi 3.900 batang.

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 306.496.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 277.098.980,00 atau 90,41% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 177.085.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 164.953.000,00 atau 93,15% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya CPCL penerima bantuan alsintan tahun 2019.

b. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 129.411.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 112.145.980,00 atau 86,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 2 Kelompok dengan realisasi 2 kelompok.

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 787.847.300,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 524.583.400,00 atau 66,58% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 133.404.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.859.350,00 atau 89,85% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Temu Lapang/bimtek budidaya tanaman perkebunan 3 kali dengan realisasi 3 kali, Terlaksananya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali

b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.649.800,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.636.800,00 atau 20,68% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; 1).Terlaksananya intensifikasi tanaman perkebunan 50 Ha dengan realisasi 0 Ha, indikator ini tidak tercapai dikarenakan pengadaan barang berupa pupuk tidak terlaksana hal ini disebabkan adanya kenaikan harga pupuk yang signifikan sehingga tidak terbeli dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 2).Terlaksananya pembinaan/ perlindungan tanaman perkebunan 50 KK dengan realisasi 50 KK.

c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 462.793.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 365.087.250,00 atau 78,89% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya peremajaan sawit rakyat 25 Ha dengan realisasi 25 Ha.

8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.042.717.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 957.306.900,00

atau 91,81% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

- a. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 272.736.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 252.284.400,00 atau 92,50% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya diklat/magang dan sertifikasi profesi penyuluh pertanian 5 orang dengan realisasi 5 orang. Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

- b. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 769.981.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 705.022.500,00 atau 91,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pembuatan demplot sebanyak 7 demplot.

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.528.091.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 481.142.455,00 atau 91,11% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

- a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 277.174.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 258.933.000,00 atau 93,42% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan, Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan keswan 1 kegiatan.

- b. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 250.917.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 222.209.455,00 atau 88,56% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya Pengawasan Pematangan Hewan Qurban 1 Kali.

10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 960.789.650,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 872.613.099,00 atau 90,82% yang

dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a. Pembibitan dan Perawatan Ternak

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 613.750.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 585.288.400,00 atau 95,36% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan 950 Ekor dengan realisasi 950 ekor.

b. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 298.417.500,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 347.039.650,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 287.324.699,00 atau 82,79% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya seleksi calon petani calon dan lokasi 15 Kelompok dengan realisasi 15 Kelompok.

11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 139.727.050,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.124.610.550,00 atau 89,18% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 139.727.050,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 124.610.550,00 atau 89,18% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya operasional perawatan ternak di UPT Peternakan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan

12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 589.552.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 548.791.000,00 atau 93,09% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 589.552.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 548.791.000,00 atau 93,09% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun 15 kali dengan realisasi 15 kali.

13. Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 600.220.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 528.461.980,00 atau 88,04% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembibitan Tanaman Penghijauan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 480.780.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 414.328.480,00 atau 86,17% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pembibitan tanaman penghijauan yang bernilai produktif 1 ha dengan realisasi 1 Ha.

b. Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 119.440.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 114.133.500,00 atau 95,55 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terpeliharanya tanaman penghijauan tahun II 3.000 Batang dengan realisasi 3.000 Batang dan Terlaksananya tanaman penghijauan BMN 2016 Tahun II sebanyak 1.000 Batang dengan realisasi 1.000 Batang

14. Program Penanaman Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah

Pada tahun 2018, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 389.705.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 385.973.502,00 atau 95,55% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penanaman Di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 389.705.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 385.973.502,00 atau 95,55 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya penanaman pohon pada sempadan danau dan daerah tangkapan air 5.000 batang dengan realisasi 5.000 Batang.

PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Prestasi atau penghargaan yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Juara III Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi (Samsul Huda, SP) Tingkat Provinsi Riau

2. Juara II Kelembaga Ekonomi Berprestasi Tingkat Provinsi Riau (Bumi Ayu, Kota Dumai)
3. Juara II Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi Riau (Bumi Ayu, Kota Dumai)

18. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Perikanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Kelautan dan Perikanan, disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.31. Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian dalam (%)
Nilai Konsumsi ikan	31 Kg/kapita/th	103,24kg/kapita/th	100 %
Produksi perikanan budidaya	238,5 ton	256,64 ton	126 %
Produksi perikanan tangkap	289,19 ton	571,72 ton	197,69%
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	31 kelompok	25 kelompok	73,52 %
Cakupan bina kelompok nelayan	28 kelompok	18 kelompok	64,28 %

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

1. Nilai Konsumsi ikan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 31 kg/kapita/th, dan target dapat dicapai atau realisasi tahun 2018 yaitu 103,24kg/kapita/th. Pencapaian dapat tercapai karena di penuhi ikan yang berasal dari luar Kota Dumai. kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya terus dilakukan seperti sosialisasi makan ikan atau gemar ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan yang diketua oleh Walikota Dumai dengan bekerjasama PKK Kota Dumai dan Dinas Perikanan Kota Dumai. Program yang capai target ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan. Kegiatan ini juga dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai.

2. Produksi perikanan budidaya

Target dari indikator sasaran ini yaitu 238 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 256,64 ton atau 126% dari target, capaian ini tidak terlepas bagaimana upaya

peningkatan dengan pendampingan teknologi baik sektor air tawar maupun air payau, berupa teknologi intensif pemeliharaan udang.

3. Produksi Perikanan Tangkap

Target dari indikator sasaran ini yaitu 289,19 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 571,72 ton atau 197,69% dari target, capaian ini tidak terlepas dari pembinaan nelayan melalui tenaga pendamping yang berasal dari pusat dan Kota Dumai sendiri. Bila mencermati angka capaian akan terlihat sangat signifikan sekali, hal ini karena adanya perbaikan cara menghitung data yang dipusatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai dan pendataan yang dilakukan langsung oleh tenaga pendamping perikanan tangkap/ bidang kenelayanan.

4. Cakupan bina kelompok pembudidaya

Target dari indikator sasaran ini yaitu 28 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 28 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 5 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 3 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016.

5. Cakupan bina kelompok nelayan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 25 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 25 kelompok atau 100 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 3 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kotadanpusatsebanyak 2 orang yang merupakanlanjutanpada program PUMP tahun 2015 dan 2016. Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.273.981.366,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.513.529.440,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.760.451.926,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.229.743.302,- atau 91,92 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.290.357.343,- atau 87,50 %

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
anggaran sebesar Rp. 1.887.529.001,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.725.381.529,- atau sebesar 91,41 % dengan dukungan 14 kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 448.000,- atau 18,67 % dan target capaian kegiatan (output) terkirim surat dalam 12 bulan sebanyak 1000 surat, realisasi target terkirim sebanyak 837 surat atau 83,70 %.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 897.369.001,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 802.463.564,- atau 89,42 % dan target capaian kegiatan (output) jumlah rekening telepon sebanyak 12 rekening, jumlah pemakaian listrik sebanyak 204 rekening, jumlah pemakaian internet sebanyak 36 rekening, realisasi kegiatan rekening telepon sebanyak 12 rekening, jumlah pemakaian listrik sebanyak 204 rekening, jumlah pemakaian internet sebanyak 36 rekening atau seluruhnya 100 %.
- c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 76.780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.250.000,- atau 66,75 % dan target capaian kegiatan (output) tersedianya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 kali, realisasi target terlaksana sebanyak 3 kali atau 100%.
- d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 9.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.909.349,- atau 87,40 % dan target capaian kegiatan (output) terbayarnya izin kendaraan dinas sebanyak 5 unit, realisasi target terlaksana sebanyak 5 unit atau 100%.
- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 88.719.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.853.600,- atau 96,77 % dan target capaian kegiatan (output) 1. Terbayarnya jasa pemotongan rumput selama 12 bulan, 2. Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan kantor 4 unit kerja selama 12 bulan, realisasi target terlaksana 1. Pemotongan rumput sebanyak 30 kali, 2 peralatan dan bahan kebersihan untuk 4 unit kerja selama 12 bulan atau 100%.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 82.567.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.567.000,- atau 100 % dan target capaian kegiatan (output)

tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan, realisasi target terlaksana sebanyak 12 bulan atau 100%.

- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 40.266.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.240.000,- atau 90 % dan target capaian kegiatan (output) terpenuhi barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, realisasi target terlaksana sebanyak 12 bulan atau 100%.
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.432.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau 29,50% dan target capaian kegiatan tersedianya peralatan listrik pada 4 unit kerja selama 12 bulan, realisasi target terlaksana sebanyak 12 bulan atau 100%.
- i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 22.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.263.598,- atau 89,27% dan target capaian kegiatan (output) pengadaan laptop 2 unit, realisasi target terlaksana sebanyak 2 unit atau 100%.
- j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 14.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.930.000,- atau 55,07% dan target capaian kegiatan (output) jumlah bahan bacaan, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 2880 eksamplar, realisasi target terlaksana sebanyak 2700 eksamplar atau 93,75%.
- k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 20.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.575.000,- atau 80,07% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya makanan dan minuman sebanyak 1550 orang kali, realisasi target terlaksana sebanyak 1400 orang kali atau 71,87%.
- l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 380.781.418,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 380.781.418,- atau 99,88% dan target capaian kegiatan (output) terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi lain sebanyak 50 OHK, terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau sebanyak 108 OHK dan terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota

kabupaten/kota lain sebanyak 10 OHK , realisasi target terlaksana sebanyak secara berurutan 50 OHK, 108 OHK dan 10 OHK atau 100%.

- m. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 81.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.600.000,- atau 99,63% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya tenaga keamanan kantor sebanyak 48 (4 Orang 12 Bulan), realisasi target terlaksana sebanyak 48 OB atau 100%.
 - n. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 144.776.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya penataan/tertib administrasi kantor sebanyak 96 (8 Orang 12 Bulan), realisasi target terlaksana sebanyak 96 OB atau 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
anggaran sebesar Rp. 401.776.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.093.967,- atau sebesar 92,36 % dengan dukungan 3 kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- atau 89,47 % dan target capaian kegiatan (output) terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 ruangan, realisasi target terlaksana untuk 1 ruangan atau 100%.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 360.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 335.493.967,- atau 92,98 % dan target capaian kegiatan (output)
1. Terpelihara jumlah unit kendaraan dinas sebanyak 8 unit, 2. Service kendaraan dinas sebanyak 45 kali, 3. Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas sebanyak 8 unit, 4. Tersedianya bbm kendaraan dinas sebanyak 1737 voucher, realisasi kegiatan secara berurutan 8 unit, 45 kali, 8 unit dan 1302 voucher atau 74,96 %.
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 21.936.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.600.000,- atau 84,79 % dan target capaian kegiatan (output)
1. Terlaksananya rutinitas service peralatan gedung kantor sebanyak 44 kali, realisasi kegiatan terlaksananya sebanyak 43 kali atau 97,73 %.

3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp. 59.709.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.444.600,- atau sebesar 99,56 % dengan dukungan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 29.739.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.589.600,- atau 99,49 % dan target capaian kegiatan (output) dokumen capaian kinerja 4 dokumen, realisasi target terlaksana 4 dokumen atau 100%
 - b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.885.000,- atau 98,85 % dan target capaian kegiatan (output) tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen, realisasi kegiatan terlaksana 2 dokumen atau 100 %.
 - c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.970.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.970.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) 1. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen, realisasi kegiatan terlaksananya sebanyak 1 dokumen atau 100%.
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan anggaran sebesar Rp. 148.710.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut
 - a. Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 148.710.000,- dan realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 0 atau sebesar 0 %. Kegiatan ini juga dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai.
5. Program pengembangan budidaya perikanan anggaran sebesar Rp. 567.676.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 536.601.263,- atau sebesar 94,53% dengan dukungan 3 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 309.731.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 307.738.900,- atau 99,36. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran tersedianya peralatan pembenihan sebanyak 13 item, tersedianya pakan untuk budidaya 10.350 kg. Tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 800.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 100%, Produksi benih dicapai sebesar 402.963 ekor. Tidak tercapainya target benih karena adanya keterlambatan dalam pengelolaan manajemen pengadaan pakan dan adanya kerusakan pada sumur bor Balai Benih Ikan.

b. Pembinaan dan pengembangan perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar 74.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.177.363 atau sebesar 87,96%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 60 kali dan hasilnya mendapat pembinaan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 25 kelompok. Realisasi kegiatan berupa pembinaan pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, pembinaan di fokuskan pada kesehatan lingkungan budidaya, CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) yang diharapkan meningkatkan produksi budidaya sebesar 256,64 ton dari pembudidaya. Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 233,79 ton, produksi budidaya air payau 22,84 ton.

c. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Anggaran pada kegiatan sebesar 140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.300.000 atau sebesar 88,79%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 30 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 25 kelompok. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi pada tahun 2018 sebesar 256,64 ton dari pembudidaya ikan Kota Dumai, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 233,79 ton, produksi budidaya air payau 22,84 ton. Bila di bandingkan dengan target

produksi budidaya perikanan tahun 2018, maka dapat disimpulkan telah tercapai 100%.

6. Program Pengembangan Perikanan produksi perikanan tangkap anggaran sebesar Rp. 400.482.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 395.757.800,- atau sebesar 98,82% dengan dukungan 2 kegiatan sebagai berikut:

a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Realisasi Keuangan Sampai dengan bulan Desember 2018, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp. Rp.203.050.000,- dan Realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar Rp.202.445.800,- atau 99,70%. Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayanan sebanyak 3 orang dan belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 36 kali dengan hasil kunjungan terhadap 28 KUB (Kelompok Usaha Bersama). Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap hanya ada 18 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya. Adapun kelompok nelayan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. KUB Nelayan Ramadhani, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Medang Kampai.
2. KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
3. KUB Camar Laut, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
4. KUB Mekar Jaya, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
5. KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
6. KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
7. KUB Terbit Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
8. KUB Selat Basilam, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
9. KUB Basilam Pesisir, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan.

10. KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
11. KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
12. KUB Tanjung Penyembal, berlokasi di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan
13. KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
14. KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai.
15. KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
16. KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
17. KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
18. KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai

b. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2018, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp.197.432.000,- dan Realisasi serapan anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 193.312.000,- atau 97,91% dari jumlah keseluruhan anggaran kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini memiliki indikator capaian keluaran terlaksananya operasional pabrik es balok sebanyak 2 unit selama 1 tahun, hasil yang di peroleh terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung TPI.

7. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
anggaran sebesar Rp. 294.568.725,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.078.184,- atau sebesar 68,60% dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya Perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar Rp.294.568.725,- ,dengan realisasi anggaran sebesar Rp202.078.184,- atau 68,60%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terlaksananya pemeliharaan udang selama 1 periode.

Realisasi dilakukan rehabilitasi tambak sebanyak 5 unit tambak dengan dana sebesar Rp. 80.000.000. dan pemasangan aliran listrik ketambak sebesar 105 KWH. Kegiatan memiliki andil dalam meningkatkan hasil produksi perikanan air payau.

19. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

DINAS PERDAGANGAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Dumai dan RPJMD tahun 2016- 2021, maka disampaikan pencapaian tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	21,44%	17,33%	80,83%
Ekspor bersih perdagangan	Rp. 1.826,02 M	USD 11.851.461.497	9333,08%
Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	23%	20%	86,95%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Dumai

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pencapaian indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB ini kondisi akhir Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 21,44 (dalam USD) sedangkan realisasinya adalah 17,33 (dalam USD). Angka ini di dapat dari hasil retribusi pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 80,83%.

2. Ekspor Bersih Perdagangan

Pencapaian indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB ini kondisi akhir Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.826,02 M (dalam USD) sedangkan realisasinya adalah 11.851.461.497 (dalam USD). Angka ini di dapat dari hasil retribusi pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 9333,08%

3. Persentase pasar tradisional yang sesuai standard

Pencapaian indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB ini kondisi akhir Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada tahun

2018 ditargetkan sebesar 23(dalam USD) sedangkan realisasinya adalah 20 (dalam USD). Angka ini di dapat dari hasil retribusi pasar. Sehingga capaian realisasi tahunannya adalah sebesar 86,95 %.Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.724.217.555,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.829.119.880,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.239.097.675,00,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 4.416.239.777,00,- atau terserap 91,45% dan belanja langsung terserap Rp. 4.721.615.496,00,- atau 90,23%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau100%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya proses administrasi surat – menyurat dan target 12 bulan dengan realisasi 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 295.150.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 224.750.553,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau76,15%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik dan target 12 bulan dengan realisasi 76,15%.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 287.070.200 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 272.545.130,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tga puluh rupiah) atau94,94%. Indikator keluaran yang dicapai adalah perawatan berkala kendaraan dinas kantor dan target 14 unit dengan realisasi 94,94%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 427.530.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 420.719.500,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau 98,41%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya kebersihan kantor dan target 12 bulan dengan realisasi 98,41%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.084.100 (enam puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 60.924.100,00 (enam puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) atau 99,74%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya alat-alat tulis kantor dan target 12 bulan dengan realisasi 99,74%.

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 82.686.650 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 62.194.650,00 (enam puluh dua juta seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 75,22%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan kebutuhan kantor dan target 150 exemplar dengan realisasi 75,22%.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 39.603.125 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 37.729.300,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau 95,27%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya komponen penerangan gedung kantor dan target 12 bulan dengan realisasi 95,27%.

h. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 31.320.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 23.159.500,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 73,94%. Indikator

keluaran yang dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (alat-alat metrologi) dan target 100% dengan realisasi 73,95%.

i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 12.960.000 (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 11.635.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 89,78%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan dan target 144 exemplar dengan realisasi 89,78%.

j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 384.200.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 384.007.602,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu enam ratus dua rupiah) atau 99,94%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis di luar daerah dan target 12 bulan dengan realisasi 99,95%.

k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 369.300.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 366.684.180,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) atau 99,29%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya jasa keamanan kantor dan target 12 bulan dengan realisasi 99,30%.

l. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 469.200.000 (empat ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 458.830.250,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 97,79%. Indikator keluaran yang dicapai adalah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran dan target 12 bulan dengan realisasi 97,79%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau 67,10%. Indikator keluaran yang dicapai adalah pemasangan paving block dan pagar kantor dan target 1 unit dengan realisasi 67,11%.

b. Pengadaan Meubeler

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 24.265.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 22.880.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau 94,29%. Indikator keluaran yang dicapai adalah pengadaan mebeleur kantor dan target 9 unit dengan realisasi 94,30%.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 25.250.000 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 21.920.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 86,81%. Indikator keluaran yang dicapai adalah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan target 12 bulan dengan realisasi 86,82%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 97.800.000 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 33.439.010,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu sepuluh rupiah) atau 34,19%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dan target 1 tahun dengan realisasi 34,20%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.350.000 (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 35.575.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 88,17%. Indikator keluaran yang dicapai adalah penyusunan laporan capaian kinerja berupa Lakip dan Renja dan target 100% dengan realisasi 88,17%.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau 93,60%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya laporan keuangan semesteran dan target 100% dengan realisasi 93,60%.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau 94,55%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran dan target 100% dengan realisasi 94,55%.

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Pengembangan pelayanan UPT Metrologi Legal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 343.415.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 323.289.963,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau 94,14%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP dan target 1833 dengan realisasi 94,14%.

b. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 172.800.00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 154.676.300,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau 89,51%. Indikator keluaran yang dicapai adalah jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha dan target 500 UTTP dengan 93,42%.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 47.990.000 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 44.322.300,00 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 92,36%. Indikator keluaran yang dicapai adalah tersosialisasinya peraturan dan prosedur ekspor impor dan target 35 eksportir dengan realisasi 92,36%.

7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 121.500.000 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 81.691.508,00 (delapan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) atau 67,24%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah dan target 100% dengan realisasi 67,24%.

b. Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 126.765.000 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 95.044.750,00 (Sembilan puluh lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 74,98%. Indikator keluaran yang dicapai adalah Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar dan target 3 Pasar dengan realisasi 74,98%.

c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 221.664.600 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 164.892.650,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 74,39%. Indikator keluaran yang dicapai adalah Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat dan target 7 Kecamatan dengan realisasi 74,39%.

8. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 99.044.000 (Sembilan puluh Sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 79.353.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau 80,12%. Indikator keluaran yang dicapai adalah frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan asongan dan target 3 bulan dengan 80,12%.

b. Pendataan Pedagang Kaki Lima

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 32.550.000 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 30.350.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 93,24%. Indikator keluaran yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pendataan pedagang kaki lima dan target 1 kegiatan dengan realisasi 93,25%.

D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

20. URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 7	Peringkat 8	87,00%
Jumlah Konflik/Permasalahan Tanah di Kota Dumai yang terselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	100%
Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan ke Media Masa	85%	85%	100%
Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan	267 kelompok binaan PKK	267 kelompok binaan PKK	100%
PKK Aktif	100%	100%	100%
Posyandu aktif	100%	100%	100%
Kategori E-Government Kota Dumai	1,75	PROSES	PROSES
Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK)	16 OPD	16 OPD	100%
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	3 KIM	3 KIM	100%

Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Perubahan Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan adalah, sebagai berikut :

a. Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau

tahun 2017 adalah dengan target pada peringkat 7 dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi adalah peringkat 8 atau dengan capaian persentase sebesar 78%. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);

b. Jumlah konflik/permasalahan tanah di Kota Dumai yang terselesaikan

adalah dengan target 5 kasus. Capaian indikator kinerja sasaran ini dari penyelesaian konflik/permasalahan tanah yang telah diselesaikan pada tahun 2018 dari target 5 kasus sudah terealisasi yaitu 5 kasus yang telah diselesaikan atau dengan capaian persentase sebesar 100%. Adapun konflik/permasalahan tanah yang telah diselesaikan pada tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Permasalahan tanah Asrama Haji Kota Dumai di Jalan Patimura Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Permasalahan tanah untuk Jalan Abdulrab Khan kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Permasalahan tanah yang berada di areal kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Permasalahant tanah antara masyarakat RT.08 Kelurahan Bukit Nenas dengan PT. Arara Abadi distrik Bukit Kapur dan yang di atasnya berdiri bangunan fasilitas Pemerintah Kota Dumai di empat (4) Kelurahan, yaitu Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Bukit Batrem dan Kelurahan Bintan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BPKAD/2018 tanggal 21 November 2018. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah sebagai berikut: Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan daerah Kota Dumai.

c. Persentase informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan ke media masa

adalah dengan target persentase 85%. Capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi persentase 85% yaitu berupa berita/dokumen/informasi daerah (media, TV dan Radio) dan realisasinya adalah 85% atau capaian kinerja dengan persentase 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan dan Penyediaan dokumen kegiatan pemerintah kota duma, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi serta Pengelolaan media online humas dan infokom pemko dumai.

d. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

adalah dengan target sebanyak 267 kelompok binaan PKK. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi sebanyak 267 kelompok binaan PKK, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan melalui 7 PKK Kecamatan dan 33 PKK Kelurahan di setiap kelurahan. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK).

e. PKK aktif dan Posyandu aktif

dengan target persentase adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah PKK aktif di Kota Dumai sebanyak 41 PKK aktif dan terealisasi sebanyak 41 PKK aktif. Posyandu aktif

dengan target persentase adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah Posyandu aktif di Kota Dumai sebanyak 196 Posyandu aktif dan terealisasi sebanyak 196 Posyandu aktif atau dengan persentase 100%. Dalam hal ini, PKK aktif dan Posyandu aktif Kota Dumai melakukan pembinaan di 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan PKK Kota Dumai tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut: jambore PKK tingkat nasional dan kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan sosialisasi program PKK. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) dan Kegiatan Revitalisasi dan pembinaan Pokjandal Posyandu.

f. Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan internet

adalah dengan target sebanyak 16 OPD. Capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi yaitu 16 OPD atau dengan persentase capaian kinerja adalah 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

g. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina

dengan target yaitu 3 KIM. Capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dengan realisasi sebanyak 3 KIM yaitu Mataram Wek Wek Kelurahan Bukit Kapur, Kesuma Kelurahan Jaya Mukti, Cahaya Laksamana Kelurahan Laksamana atau dengan persentase 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan. Kategori e-government Kota Dumai adalah dengan target dengan nilai 1,75. Capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 masih dalam proses penilaian di Kementerian PANRB Jakarta. Kegiatan pendukung sasaran ini adalah kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.71.485.826.739,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.15.268.873.240,- sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.56.216.953.499,- Untuk realisasi belanja tidak langsung adalah Rp.14.860.813.634,- atau dengan persentase sebesar 97,00% dan belanja langsung realisasi sebesar Rp.42.930.456.792,- atau dengan persentase sebesar 76,37%. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Dumai pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM

Terdiri dari 4 program dan 6 Kegiatan dengan pagu Rp.710.417.250 dan realisasi keuangan adalah Rp.439.288.559,- atau dengan persentase 61,84% adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.76.941.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.70.651.150,- atau dengan persentase 91,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Dumai dan I-LPPD dari target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan persentase adalah 100%
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
 - a. Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.99.715.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.78.594.250,- atau dengan persentase 78,82%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bantuan untuk 12 Partai Politik (Parpol) dari target 12 Parpol dan realisasi 12 Parpol dengan persentase 100%.
3. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah
 - a. Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.75.499.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.56.117.158,- atau dengan persentase 74,33% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ranperda pemekaran kelurahan dari target ranperda pemekaran kelurahan dengan realisasi 100%.
 - b. Penyelesaian konflik perbatasan antar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.259.629.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.86.408.018,- atau dengan persentase 33,28%, adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan batas antar kecamatan dan batas antar daerah dengan realisasi 100%.
4. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
 - a. Penyusunan buku monografi Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.54.165.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.46.020.550,- atau dengan persentase 84,96%, adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya 1 buku monografi Kota Dumai dari

target 1 buku dengan realisasi 100%.

b. Kegiatan penyusunan data rupa - rupa bumi

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.144.465.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.101.497.433,- atau dengan persentase 70,26%, adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen nama-nama rupa bumi dari target 1 dokumen dengan realisasi 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terdiri dari 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan, dengan pagu Rp.8.567.662.750 dan realisasi keuangan adalah Rp.6.727.586.996,- atau dengan persentase 78,52% adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.141.260.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- atau dengan persentase 79,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen hasil monitoring/survey lapangan objek yang mengajukan/menerima hibah/bansos tahun 2018 dari target 1 dokumen monitoring/survey hibah/bansos dan realisasi 1 dokumen monitoring/survey hibah/bansos atau dengan persentase kinerja 100%.

b. Peningkatan koordinasi hibah/bansos

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.175.677.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.164.149.120,- atau dengan persentase 93,44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah sosialisasi hibah/bansos bagi aparat/organisasi dan verifikasi proposal hibah/bansos bagi badan/lembaga/organisasi masyarakat dengan persentase target dan realisasi kinerja adalah 100%.

2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a. Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.277.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.984.000.000,- atau dengan persentase 87,13%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah honorium tenaga pendidikan TPQ, DTAdan Madrasah dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Masyarakat

a. Penyediaan Beasiswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.663.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.225.550.000,- atau dengan persentase 33,97%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mahasiswa/i berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Dumai sebanyak 212 dari target dan realisasi 78 orang dengan persentase realisasi adalah 36.79%.

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat Kota dan tingkat Provinsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.018.878.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.903.634.500,- atau dengan persentase 88,69%. Adapun indikator kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota Dumai dan keikutsertaan Kota Dumai pada event MTQ tingkat Provinsi Riau Ke-37 tahun 2018 di Kota Pekanbaru, dengan realisasi kegiatan 100%.

b. Pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.840.667.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.486.933.184,- atau dengan persentase 57,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah ibadah haul ke Basilam Langkat, penguatan rutin setiap bulan dan pelaksanaan fardhu kifayah dengan target dan realisasi kegiatan 100%.

c. Peningkatan pelayanan dan pembinaan haji Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.167.034.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.021.773.192,- atau dengan persentase 87,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelayanan dan pembinaan bagi calon jemaah haji Kota Dumai yang dimulai dari proses seleksi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), pelaksanaan manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau hingga pulang ke Kota Dumai, dengan realisasi kinerja adalah 100%.

d. Peringatan, penyambutan dan perayaan hari - hari besar keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.283.195.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.1.829.947.000,- atau dengan persentase 80,15%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan peringatan, penyambutan dan perayaan hari besar agama Islam, dari target 7 hari besar agama Islam dan realisasi 7 hari besar agama Islam dengan realisasi kinerja 100%. (Maulid Nabi Muhammad, SAW, Isra' Mikrat Nabi Muhammad, SAW, Penyambutan Bulan Suci Ramadhan, Safari Ramadhan, Nuzul Qur'an, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Tahun Baru Islam 1437 H).

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 6 (enam) kegiatan, dengan pagu Rp.1.708.718.017,- dan realisasi keuangan adalah Rp.1.369.296.037,- atau dengan persentase 80,14% dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.276,171,992,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.250,607,000,- atau 90,74%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah persentase meningkatnya posyandu aktif di Kota Dumai dengan target 196 posyandu aktif dan realisasi 196 posyandu aktif dengan dengan persentase capaian kinerja adalah 100%

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.373,834,600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.284,001,500,- atau 75,97%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai dengan target 41 PKK dan realisasi 41 PKK. Kegiatan PKK ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Dumai (jambore, HKG dan sosialisasi PKK) melalui pembinaan-pembinaan PKK yang berada di 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan dengan capaian kinerja dengan persentase 100%.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.186,323,800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.158,279,100,- atau 84,95%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah

persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan UEK-SP dengan target 80% dan realisasi 80% yang dilaksanakan terhadap 33 UEK-SP di Kota Dumai dari target 33 UEK-SP dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%..

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.479,525,000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.326,782,498,- atau 68.15%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalahkegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Dumai, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2018 dengan target dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

b. Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.160,447,675,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.135,023,470,- atau 84.15%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalahjumlah informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan target dan persentase kinerja 100% yaitu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Kota Dumai pada tahun 2018.

c. Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.232,414,950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.214,602,469,- atau 92,34%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalahlomba kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2018 dengan target lomba kelurahan tingkat Kota Dumai dan realisasi kinerja adalah 100%.Tujuannya evaluasi perkembangan kelurahan iniadalah memberdayakan masyarakat dengan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan.

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 4 (empat) kegiatan, dengan pagu Rp.960.687.072,- dan realisasi keuangan adalah Rp.615.834.871,- atau dengan persentase 64,10% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Bantuan hukum dan pelayanan hukum Pemerintah Kota Dumai

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.443.554.272,- dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp.258.690.140,- atau 58,32% yang adapun indikator keluarannya adalah Jumlah bantuan hukum bagi PNS Kota Dumai dan kerja sama antara TIM kuasa hukum Pemerintah Kota Dumai dengan konsultan hukum (advocatc/pengacara/mediator) dengan target 12perkara dan terealisasi 9 (enam) perkara dengan persentase capaian kinerja adalah 75%.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Digitalisasi Perda dan pemeliharaan Peraturan Perundang -Undangan dan pembelian buku Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.179.446.100,- dengan realisasi sebesar Rp.158.383.498,- atau 88,26%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah produk hukum bagi SKPD/OPD dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yaitu Situs dalam bentuk layanan inormasi, yaitu: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Dumai Bagian Hukum dan HAM, buku lembaran daerah, berita daerah dan pembuatan naskah akademis dengan target dan realisasi adalah 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

3. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

a. Legislasi rancangan peraturan perundang - undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.223.254.800,- dengan realisasi sebesar Rp.198.761.260,- atau 89,03%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah Peraturan Daerah Kota Dumai sebanyak 8 Perdadari taget 8 Perda dan terealisasi 5 Perda dengan capaian kinerja 62,5%. Adalah sebagai berikut :

- Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan tanggung awab sosial perusahaan;
- Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBD Kota Dumai T. A 2017;
- Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;

- Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBD Kota Dumai T. A 2019.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Terdiri dari dari 3 (tiga) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp.710.745.015,- dan realisasi keuangan adalah Rp.623.055.147,- atau dengan persentase 87,66% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.278.631,720,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.234.436,547,- atau dengan persentase 87,37%. Indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya penyeleksian, pemilihan dan pelantikan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai sesuai target dengan pencapaian realisasi sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.219,426.795,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.197,456.500,- atau dengan persentase 89,99% dari anggaran. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah pameran Dumai ekspodengan capaian realisasi *out put* adalah 1 (satu) event pameran dengan capaian realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.212.686,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.182.162.100,- atau dengan realisasi 85,65%. Adapun indikator keluaran adalah kontribusi TIM pengendalian inflasi daerah terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga dengan target 100% dan capaian realisasi sebesar 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Terdiri dari 1 (satu) program serta 4 (empat) kegiatan, dengan pagu Rp.1.454.175.100,- dan realisasi keuangan adalah Rp.1.176.549.385,- atau dengan persentase 80,91% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Pelaksanaan pengawasan secara berkala

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.111.620.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.101.379.732,- atau 90,83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen yaitu laporan kinerja (LKjIP) 2017 dan rencana kerja (Renja) 2019 dari target dan realisasi adalah 2 dokumen dengan realisasi capaian kinerja 100%.

b. Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Dumai

Kegiatan ini anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.118.380.000,- dan realisasi NOL (0) karena rasionalisasi anggaran pada tahun 2018

c. Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.504.863.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.411.370.163,- atau 81,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket yang lelang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan target 77 paket dan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

d. Pengembangan dan penataan LPSE Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.719.311.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.663.799.490,- atau 92,28%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah peningkatan pelayanan layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan persentase 90% dari target persentase 90% dengan capaian realisasi kinerja 100%.

BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 5 (lima) kegiatan, dengan pagu Rp.2.400.578.450,- dan realisasi keuangan adalah Rp.1.964.094.271,- atau dengan persentase 81,82% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.1.767.763.450,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.464.994.071,- atau sebesar 82,87%, dengan indikator kinerja keluaranyaitu Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) dengan target pada tahun 2018 sebanyak 16 OPD dan realiasi 16 OPD atau dengan persentase 100%.

Adapun 16 Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.279.551.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.274.766.000,- atau sebesar 88,63%, dengan indikator kinerja keluaran penerapan aplikasi e-government sebesar 40%

c. Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.193.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.99.950.000,- atau sebesar 51,79%, dengan indikator kinerja keluaran jumlah peralatan alat studio dan jaringan TIK sebanyak 2 unit dengan realisasi kinerja 60%

2. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.102.160.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.94.158.200,- atau sebesar 92,17%, dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang data, komunikasi dan informasi dengan target sebanyak 36orang dan realiasi adalah 36orang atau dengan persentase 100%.

3. Program Kerjasama Inormasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.58.104.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.57.225.000,- atau sebesar 98,49%, dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang di bina dengan target sebanyak 3 KIM yaitu Mataram Wek Wek di Kelurahan Bukit Kapur, Kesuma di Kelurahan Jaya Mukti, Cahaya Laksamana di Kelurahan Laksamana dan realiasi adalah 3 KIM atau dengan persentase kinerja adalah 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

Terdiri dari 2 (dua) program serta 5 (lima) kegiatan, dengan pagu Rp.962.917.050,- dan realisasi keuangan adalah Rp.664.865.800,- atau dengan persentase 69,05% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a. Sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.281.530.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.175.530.900,- atau dengan persentase 62,35%. Adapun indikator kinerja jumlah data/persil tanah asset Pemerintah Kota Dumaisebanyak 15 persildari target 15 persil dengan capaian kinerja 100%.
 - b. Inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.188.819.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.156.615.600,- atau dengan persentase 89,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah data tanah masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumai di 10 Kelurahan (sebanyak 10 persildari target 10 persil) dengan capaian kinerja 100%.
2. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan
 - a. Penyelesaian konflik - konflik pertanahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.Rp.188.819.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.166.734.200,- atau dengan persentase 88,30%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah konflik/permasalahan tanah di Daerah Kota Dumai yang terfasilitasi/terselesaikan yaitu realisasidata penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 5kasus dari target dan realisasi 5 kasus dengan capaian kinerja adalah 100%.

BAGIAN UMUM

Terdiri 6 (enam) program serta 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan pagu Rp.34.018.510.975,- dan realisasi keuangan adalah Rp.25.214.101.310,- atau dengan persentase 74,12% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.137.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.550.000,- atau sebesar 66,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi 7.287 surat, realisasi target 6.941 surat atau 86,76%

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.238.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.800.408.440,- atau 55,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya sarana prasarana komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.97.176.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.630.000,- atau 92,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi 100% atau dengan capaian kinerja 100%.

d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 145.740.486,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 131.434.510,- atau 90,18%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya barang milik daerah dengan realisasi 45 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 773.947.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 672.282.500,- atau 86,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan kantor 28 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

f. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 866.301.640,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 692.088.700,- atau 78,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi 100%.

- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 326.805.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 209.964.500,- atau 64,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan realisasi 100%
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 498.866.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 208.129.650,- atau 41,72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi 6 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.
- i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.275.700.011,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.143.080.000,- atau 89,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi 311 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.149.015.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.007.955.000,- atau 87,72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makan dan minum untuk tamu dan kegiatan kantor selama 11 bulan dari target 11 bulan atau dengan realisasi 100%.
- k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.648.815.061,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.648.661.892,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan realisasi 100% adalah 1.400 orang kali atau dengan persentase capaian kinerja 100%.
- l. Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 861.039.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 839.114.500,-

atau 97,45%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa tenaga keamanan kantor 22 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

m. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.126.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.105.600.000,- atau 83,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah umlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 5 orang. Dari target dan realisasi 5 orang dengan persentase kinerja adalah 100%.

n. Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pejabat Negara/pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan dana sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau sebesar 0%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 450.000.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 443.308.000,- atau 98,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya gedung kantordengan realisasi 1 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 467.352.740,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 298.058.000,- atau 63,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinsadengan realisasi 27 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.215.501.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.105.392.415,- atau 49,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota dengan realisasi 2 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.249.169.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 930.783.500,-atau 74,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

- terpeliharanya rumah dinas dengan realisasi 1 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 889.090.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 790.583.000,- atau 88,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi 7 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.
- f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 774.366.317,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 366.479.000,- atau 47,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya mobil jabatan dengan realisasi 4 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.836.233.320,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.098.161.135,- atau 54,69%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan realisasi 63 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 370.935.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.676.700,- atau 8%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan realisasi 504 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- i. Kegiatan pemeliharaan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK dan media center
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.056.996.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 997.079.750,- atau 94,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihantaman gedung kantor walikota, pendopo, PKK, dan media center dengan realisasi 39 orang atau dengan capaian kinerja 100%.
- j. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 718.851.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 657.507.118,- atau 91,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan mes Pemerintah Kota Dumai dengan target dan realisasi 1 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.185.400.000,- atau 92,70%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pakaian dinas (KDH/WKDH) beserta perlengkapannya dengan realisasi 2 orang (KDH/WKDH) atau dengan capaian kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a. Dialog/audiensi dengan tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 567.700.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.304.550.000,- atau 53,65%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh - tokoh masyarakat/ pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan target24 kali ataudengan persentase 100%.

b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.574.310.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 731.550.000,- atau 46,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan target30 kali atau dengan persentase 00%.

c. Koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah lainnya.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.435.080.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.435.080.000,-atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan realisasi 100%.

- d. Penyediaan biaya rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 646.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 643.725.000,- atau 99,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makan dan minum harian dengan realisasi 100%.
- e. Kegiatan pisah sambut muspida Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 564.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 155.400.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau 27,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan pisah sambut forkopimda kotadengan target adalah 5 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali dengan persentase 60%.
- f. Open house Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 442.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 366.550.000,- atau 82,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Open House Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Dumai daerah dengan realisasi 100%.
4. Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 122.340.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.640.000,- atau 63,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terciptanya tertib administrasi arsip dinamis dengan realisasi 90%
5. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - Hari Besar
- a. Peringatan hari - hari besar dengan tokoh masyarakat dan ormas
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.844.125.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.746.500.000,- atau 94,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dengan realisasi 10 kegiatan atau dengan persentase 100%.
- b. Upacara/apel peringatan hari kesadaran nasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 187.915.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

184.290.000,- atau 98,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyelenggaraan upacara/apel hari kesadaran nasional dengan realisasi 7 kegiatan atau dengan persentase 100%.

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Terdiri dari 4 (empat) program serta 10 (sepuluh) kegiatan, dengan pagu Rp.3.006.255.000,- dan realisasi keuangan adalah Rp.2.739.919.5000,- atau dengan persentase 91,14% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.197.675.000,- dan realisasinya sebesar Rp.141.320.000,- atau sebesar 71,49%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah media yang berlangganan sebanyak 20 media dari target 20 dan terealisasi 15 media atau dengan persentase 75%.

b. Penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.158.515.000,- dan realisasinya sebesar Rp.135.813.000,- atau sebesar 85,68%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah dokumen Pemko Dumai adalah 3 (tiga) dokumen yaitu foto, pidato dan kliping koran dari 3 target dokumen dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.162.300.000,- dan realisasinya sebesar Rp.151.296.000,- atau sebesar 93,22%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi audio visual Pemerintah Kota Dumai yang efektif dengan capaian kinerja 100%.

b. Pengelolaan media online humas dan infokom Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.216.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.167.000.000,- atau sebesar 77,31%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi audio visual Pemerintah Kota Dumai yang efektif..

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang kehumasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.117.370.000,- dan realisasinya sebesar Rp.108.920.000,- atau sebesar 92,80%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah SDM yang dilatih dalam bidang kehumasan sebanyak 300 peserta dengan capaian kegiatan adalah 100%.

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.537.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp.519.364.000,- atau sebesar 96,61%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah adanya informasi yang komunikatif sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu baleho, kalender, buku kerja dan *paper bag* dari 4 target dokumen dengan capaian kinerja 100%.

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.012.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp.1.001.800.000,- atau sebesar 99,70%. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah media cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 berupa himbauan, galeri, radio, advertorial dengan capaian kinerja 100%. Adapun keterangannya sebagai berikut : publikasi 20 media dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dengan realisasi 15 media atau dengan capaian persentase 75%, untuk radio dari target 5 radio dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 3 radio atau dengan capaian persentase 60% sedangkan target capaian untuk publikasi 3 TV dengan capaian kondisi akhir tahun 2017 dan terealisasi 4 publikasi di TV atau dengan capaian persentase 110% melebihi realisasi dari target yang ditetapkan 100%.

c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.64.065.000,- dan realisasinya sebesar Rp.40.061.400,- atau sebesar 99,75%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 3 pertemuan dari 3 target pertemuan dengan capaian kinerja 100%.

d. Pembinaan media peliput dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.362.100.000,- dan realisasinya sebesar Rp.326.475.100,- atau sebesar 90,16%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah jumlah majalah gerak pembangunan Pemerintah Kota Dumai dalam bentuk 1 (satu) majalah dari target 1 (satu) majalah dengan capaian kinerja 100%.

e. Penyebarluasan informasi hari - hari besar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.178.130.000,- dan realisasinya sebesar Rp.147.870.000,- atau sebesar 83.01%. Adapun indikator Kinerja keluarannya adalah terpublikasinya kegiatan hari besar, antara lain: hari jadi Kota Dumai dan HUT RI dari target yang telah ditetapkan atau dengan capaian kinerja 100%.

BAGIAN ORGANISASI

Terdiri dari 2 (dua) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp.630.269.950,- dan realisasi keuangan adalah Rp.450.342.687,- atau dengan persentase 71,45% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SPM)

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.172.650.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.148.199.700,- atau sebesar 98,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen survey kepuasan masyarakat (5 OPD) dari target 1 (satu) dokumen SPM dan realisasi 1 dokumen SPM dengan realisasi 100%.

2. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

a. Monitoring, Evaluasi Perwa Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.137.345.00,- dan realisasi anggaran adalah Nol (0) persen karena adanya rasionalisasi pada tahun 2018 ini

b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.320.274.750,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.302.142.987,- atau dengan persentase sebesar 94,34%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen pedoman pelaksanaan analisis jabatan (Anab) dan analisis beban kerja(ABK) yaitu target

dan realisasi adalah dokumen anjab dan ABK dengan realisasi dengan capaian kinerja adalah 100%.

BAGIAN KUANGAN DAN ASET

Terdiri dari 2 (dua) program serta 8 (delapan) kegiatan, dengan pagu Rp.1.086.016.870,- dan realisasi keuangan adalah Rp.918.791.230,- atau dengan persentase 84,60% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.47.776.900,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.38.489.010,- atau dengan persentase sebesar 80,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan semester I Sekretariat Daerah tahun 2018 adalah dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.68.831.700,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.57.497.800,- atau dengan persentase sebesar 83,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan akhir keuangan Sekretariat Daerah tahun 2017 dari 1 laporan akhir keuangan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.169.740.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.137.364.313,- atau sebesar 80,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan asset dengan target 15 orang dan teralisasi 15 orang atau dengan persentase 100%.

b. Penertiban Aset

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.199.222.360,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.156.372.554,- atau sebesar 78,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah adalah 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan 100%.

c. Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.321.700.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.319.295.643,- atau sebesar 99,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mengikuti konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah adalah 48 kali dan realisasi 48 kali atau dengan persentase 100%.

d. Rekonsiliasi Aset SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.59.198.800,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.43.831.479,- atau sebesar 74,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah rekonsiliasi aset tahun 2017 dan Rekonsiliasi Aset Semester I Tahun 2018 dengan realisasi 100%.

e. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.56.797.110,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.43.447.030,- atau sebesar 76,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah rekonsiliasi laporan keuangan tahunan 2017 dan rekonsiliasi laporan keuangan semester I 2018 adalah 2 rekonsiliasi dan realisasi 2 rekonsiliasi atau dengan persentase 100%.

f. Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.162.750.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.122.493.411,- atau sebesar 75,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah adalah 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau dengan persentase 100%

SEKRETARIAT DPRD

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.34. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2018

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)
Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	85	85	85
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada	ada	ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan	ada	ada	ada

fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan			
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

1. Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu 85 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 85 atau 100 %.

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, Satuannya RKT

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu adadan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu ada atau 100 %.

3. Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (Rpjm) maupun Dokumen Rencana Tahunan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu ada dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu ada atau 100 %.

4. Terintegrasinya Program-Program Dprd Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan Dprd

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu adadan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu ada atau 100 %.

Pada tahun 2018, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 26.912.032.340,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.434.832.340,- dan terserap anggaran sebesar Rp. 4.445.361.216,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 22.474.200,- dan terserap Rp. 18.482.825.443,- atau 82,23%. Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Hearing/ Dialog dan Koordinasi ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 11.457.693.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.104.000.814,- atau sebesar 88,19% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.153.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 115.200.000,- dan atau sebesar 75,20 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 504.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 340.504.506,- dan atau sebesar 67,56 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa rekening listrik, telepon dan jaringan internet dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 201.300.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.117.000.000,- dan atau sebesar 58,12 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dekorasi dan sewa peralatan event DPRD Kota Dumai dengan target 8 dekorasi/event atau capaian realisasi 50 %.

d. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.42.987.000,- dan atau sebesar 53,73 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah izin STNK kendaraan dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

e. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 570.644.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 527.044.250,- dan atau sebesar 92,36 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah

tenaga kebersihan dan perlengkapan kantor serta rumah Pimpinan DPRD Kota Dumai dengan target 26 orang/12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.893.950,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.892.875,- dan atau sebesar 100 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan alat tulis Kantor DPRD dan Sekretariat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 292.391.150,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 230.716.071,- dan atau sebesar 78,91 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

h. Kegiatan Penyediaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 148.001.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 105.501.400,- dan atau sebesar 71,28% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bahan habis pakai (alat listrik dan elektronik) untuk penerangan dan listrik Kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.760.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.935.000,- dan atau sebesar 26,98 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bahan bacaan/informasi dari media cetak/koran/online dan publikasi dengan target 9 media atau capaian realisasi 55 %.

j. Kegiatan bahan logistik kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 185.063.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.867.172,- dan atau sebesar 98,27 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makanan dan minuman untuk Pimpinan DPRD dan tersedianya keperluan materi dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

k. Kegiatan Penyediaan makan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 215.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 175.400.000,- dan atau sebesar 81,24 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan Pimpinan DPRD dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

l. Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.726.192.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.042.259.667,- dan atau sebesar 91,15 % adapun indikator kinerja keluaran adalah konsultasi dan koordinasi Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ke Ibu Kota Provinsi Riau, Ibu Kota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 633.948.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 624.548.000,- dan atau sebesar 98,52 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah keamanan kantor DPRD dan rumah Pimpinan DPRD dengan target 20 orang atau capaian realisasi 100 %.

n. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.400.000,- dan atau sebesar 100 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga honor untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dengan target 5 orang/12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

o. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Pengelolaan Aset

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.350.200,- dan atau sebesar 84,50 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang di asuransi dengan target 3 unit atau capaian realisasi 100 %.

p. Kegiatan Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 254.394.673,- dan atau sebesar 72,68 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatandengan target 30 orangatau capaian realisasi 100 %

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp. 1.701.176.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 1.169.761.040,- atau sebesar 68,76 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 118.538.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan atau sebesar 13,50% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Gedung kantor yang disediakan dengan target 16 unitatau capaian realisasi 0 %.

b. Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 277.268.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.720.000,- dan atau sebesar 78,16 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Pemeliharran Gedung kantor DPRD Kota Dumai dan Jumlah Petugas pemeliharaandengan target 1 gedung/8 orangatau capaian realisasi 100 %.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.106.120.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 843.041.000,- dan atau sebesar 76,22 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRDdengan target 16 Roda empat dan 7 Roda dua atau capaian realisasi 100 %.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.250.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.000.040,- dan atau sebesar 47,18 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik, dan Meubeler kantor)dengan target 12 bulanatau capaian realisasi 100 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran **Rp. 325.500.000-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 324.840.000,-** atau sebesar 99,80 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. **325.500.000-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **324.840.000,-** dan atau sebesar 99,80 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai dengan target 150 stel atau capaian realisasi 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran **Rp. 270.000.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 211.500.000,-** atau sebesar 78,33 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. **270.000.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **211.500.000-** dan atau sebesar 78,33 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisai dan lain-lain dengan target 45 orang atau capaian realisasi 100 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran 133.020.000- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.800.000,- atau sebesar 8,15% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 64.820.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.110.000,- dan atau sebesar 43,37 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD yang baik dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 100 %.

b. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 36.800.000,- dan

atau sebesar 46 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Usulan Rencana Kinerja SKPD dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp. 8.578.010.250,- dengan Realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.607.813.589,- atau 77,03%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai Berikut :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.353.998.250,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp. 1.095.198.570,- atau 80,89%. Adapun indikator Kinerja Keluarannya jumlah pembahasan pansus dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah dengan target 5 pansus dan terealisasi atau 100 %.

b. Hearing/ Dialog dan Koordinasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 423.300.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 59.000.000,- atau 13,94%. Adapun Indikator jumlah pertemuan atau dialog dengan stakeholders bersama DPRD Kota Dumai dengan target 3 kegiatan dan realisasi 0 kegiatan atau 13,94% dengan alasan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

c. Rapat Alat kelengkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 289.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.430.000,- atau 50,58%. Adapun indikator kinerjanya adalah jumlah alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan rapat dengan target 100% dan terealisasi 100%.

d. Rapat - Rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.086.370.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp. 829.980.000,- atau 76,40% adapun target indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan target 32 paripurna dan terealisasi 34 paripurna atau 106,2%.

e. Kegiatan Reses

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesarRp. 2.221.050.000,- dengan realisasi Anggaran sebesarRp. 2.114.050.000,- atau 95,18% adapun indikator kinerja keluaran nya adalah jumlah reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Dumai dengan realisasinya 3 kegiatan/ masa sidang anggota DPRD atau 100 %

f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesarRp. 885.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 607.826.059,- atau 68,68 adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota DPRD yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kegiatan Bimtek Pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai.

g. Kunjungan Kerja Komisi –Komisi DPRD

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesarRp. 1.025.400.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 838.014.124,- atau 81,73 % adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi anggota DPRD Kota Dumai dengan target 6 kabupaten/ kota dengan tingkat capaian 6 kabupaten/ kota atau 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kunjungan kerja komisi DPRD Kota Dumai.

h. Penyampaian Aspirasi masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesarRp. 28.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyerapan aspirasi masyarakat langsung kepada DPRD dengan target 3 kegiatan dengan realisasi 0 kegiatan dengan alasan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

i. Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS,RAPBD KUA-PPASP, RAPBD-P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.754.192.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.500.878.836,- atau 66,41%. Adapun indikator kinerja keluaran nya adalah jumlah pembahasan

KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis dan tindak lanjut LHP BPK RI dengan target 3 perda dan realisasi 3 perda atau 100%.

j. Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.511.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 416.400.000,- atau 81,46%. Adapun indikator nya adalah jumlah tenaga ahli, staf tenaga ahli, fraksi-fraksi, tenaga ahli fraksi DPRD Kota Dumai dengan target 8 fraksi dengan realisasi 8 orang/ fraksi atau 100% dengan alasan terlaksananya tenaga ahli untuk seluruh fraksi.

KECAMATAN DUMAI TIMUR

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Timur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 35. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Dumai Timur
Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70%	96,41 %	137
kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70%	99,99%	142
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70%	99,59 %	140

Sumber : Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Adapun realisasi pelaksanaan Capaian Indikator pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2018 adalah 96,41%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 hampir maksimal (100%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2018 adalah 99,59%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

Dilihat pada tabel pencapaian indikator diatas, jika disandingkan capaian kinerja tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. pada indikator cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, capaian kinerja tahun 2016 (98,70%), tahun 2017 (96,30%) dan tahun 2018 (96,41%) mengalami penurunan akan tetapi telah memenuhi target pada indikator kinerja.
2. Pada indikator kualitas sumber daya lembaga masyarakat, capaian kinerja tahun 2016 (100%) , tahun 2017 (96,30%) dan tahun 2018 (99,99%) persentase sedikit menurun dan telah memenuhi target pada indikator kinerja
3. Pada indikator persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat, capaian kinerja tahun 2016 (100%), tahun 2017 (98,5%) dan tahun 2018 (99,59%) persentase meningkat dan telah memenuhi target pada indikator kinerja.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Timur pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 8.647.186.082,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.062.820.280,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.584.365.802,-. Untuk Belanja Langsung Realisasinya sebesar Rp 3.521.432.467,-atau terserap 98,24%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.160.858.887,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.119.275.178,- atau 96,41% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.

58.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 56.687.000,- atau 97,74%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai dan benda pos lainnya dalam 1 tahun.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 91.333.260,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 78.923.737,- atau 86,41%. Indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah pemakaian telepon, air, speedy dan listrik dalam 1 (satu) tahun selama 12 bulan dan realisasi kinerjanya 100%. Pembayaran listrik melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 43.630.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 37.630.000,- atau 86,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 378.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 377.920.812,- atau 99,9%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja dengan realisasi kinerja 100%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 44.140.125,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.140.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya penyediaan alat tulis kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 31.109.002,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 31.108.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

- g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.780.000,- atau 99,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.480.000,- atau 59,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terbayarnya jumlah koran/majalah dalam 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.
- i. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 77.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 65.080.500,- atau 84,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 208.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 208.086.129,- atau 99,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 203.824.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 198.874.000,- atau 97,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga keamanan kantor dengan realisasi kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 97.740.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.974.644,- atau 88,99% yang dialokasikan melalui kegiatan:

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah terlaksananya perlengkapan gedung kantor sebanyak 6 (enam) unit selama 1 tahun dengan realisasi kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 97.740.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 86.974.644,- atau 88,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua selama 1 tahun dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34.160.135,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.160.135,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.396.135,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.396.135,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja (Lkj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 2 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.250.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terealisasinya laporan prognosis tahun 2018 sebanyak 2 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.514.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.514.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi kinerja 100%

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 401.196.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 401.196.500,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 401.196.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 401.196.500,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 20 orang dengan realisasi kinerja 100 %.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 638.692.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 638.692.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 606.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 606.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 32.692.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 32.692.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penilaian perlombaan Kelurahan se-Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 75.730.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 75.730.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.730.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 75.730.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 281.848.280,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 276.379.697,- atau 98,06 % yang dialokasikan

melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 281.848.280,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 276.379.697 atau 98,06 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya operasional kelurahan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

8. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 797.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 797.100.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 797.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 797.100.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.240.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 27.240.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 27.240.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 27.240.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 dengan realisasi kinerja 100 %.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.986.000,- atau 99,97 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.986.000,- atau 99,97 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan kegiatan PKK selama 1 (satu) tahun 4 Pokja dengan realisasi kinerja 100 %.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Dumai Barat mempunyai luas wilayah ± 48,6km² yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Jaya Mukti
2. Kelurahan Tanjung Palas
3. Kelurahan Teluk Binjai
4. Kelurahan Buluh Kasap
5. Kelurahan Bukit Batrem .

Letak yang strategis dijangung Kota Dumai membuat Kecamatan Dumai Timur menjadi barometer pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Timur diantaranya adalah :

**Tabel 4. 36. Prestasi dan Penghargaan
Yang diraih di Raih Tahun 2018**

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
2018				
1.	Juara I BBGRM	Kel. Jaya Mukti	Tingkat Provinsi Riau	Gubernur Riau
2.	Juara I BBGRM	Kel. Jaya Mukti	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
9.	Juara II BKR	Kel. Tangjung Palas	Tingkat Kota Dumai	Dinas PP dan KB

PERMASALAHAN

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Timur antara lain adalah :

1. Tugas dan fungsi umum Camat sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar melakukan tugas umum pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi. Hal ini menyebabkan Camat sulit untuk mengambil keputusan strategis untuk menjawab respon masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi;
2. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Dumai dalam mengaplikasikan/mengakomodir pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga tidak semua kegiatan dalam program dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran strategis.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di Kecamatan sehingga belum mampu sepenuhnya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Persoalan ini ditambah dengan kurangnya pemahaman dan

tanggung jawab aparatur kecamatan/kelurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan;

4. Hasil musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya pada tingkat kelurahan maupun kecamatan belum mampu mengakomodir setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menghadiri kegiatan musrenbang baik yang diadakan kelurahan maupun kecamatan pada masa mendatang

SOLUSI

Untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Dumai Timur telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

- a. Penguatan fungsi koordinasi kepada OPD yang terkait dan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. Melakukan penyesuaian kemampuan anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra Kecamatan;
- c. Memaksimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada guna peningkatan kinerja;
- d. Melakukan upaya pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up selain Musrenbang untuk mengakomodir kepentingan dan keluhan masyarakat.

KECAMATAN DUMAI SELATAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Selatan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 37. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Dumai Selatan
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	100%	100%	100%
Persentasewadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut adalah untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan Rencana Strategis dan RPJMD diatas.

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik.

Target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 100%. Keberhasilan dari capaian indikator ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan maupun di kelurahan melalui program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan.

2. Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat

Target Renstra untuk indikator kinerja sasaran ini adalah 100% dan realisasi juga sebesar 100%. Tercapainya target ini disebabkan Kecamatan Dumai Selatan berhasil menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan PKK. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai pada tingkat Kecamatan akan tetapi juga pada tingkat kelurahan

3. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan

Target Renstra untuk indikator kinerja sasaran ini adalah 100% dan realisasi juga sebesar 100%. Tercapainya target ini disebabkan Kecamatan Dumai Selatan berhasil menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan PKK. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai pada tingkat Kecamatan akan tetapi juga pada tingkat kelurahan.

Anggaran belanja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 9,045,035,304,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp.5,433,834,220,- sedangkan Belanja langsung sebesar Rp. 3,611,201.084,- untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 5.257.063.708,- atau terserap 96,75% dan belanja langsung terserap Rp. 3,495,445,019 atau 96,79%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 877.076.734,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 865.592.838,- atau 98,69% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 88.800.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 88.794.000,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran dengan realisasi 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 53.724.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 45.986.419,- atau 85,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy dengan realisasi 86%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 59.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesarRp. 57.900.000,- atau 98,14%. Adapun indikator keluaran JumlahJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi 98,14%

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.061.000,- atau 76,53%. Adapun indikator keluaran Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional dengan realisasi 84%

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.534.950,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesarRp. 126.534.950,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi 100%

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- atau 99,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara dengan realisasi 99,26%

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.687.384,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.657.366,- atau 99,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Alat Tulis Kantor pada Kecamatan dengan realisasi 100%.

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.973.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 29.595.000,- atau 98,74%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama dengan realisasi 99%.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.749.800,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor dengan dengan realisasi 100%.

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.624.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.244.000,- atau 95,02%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Koran / Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kantor dengan realisasi 95,02%.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.520.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 64.864.800,- atau 99,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan dengan realisasi 99%.

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.663.400,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 199.505.503,- atau 99,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan realisasi 100%.

m. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.

163.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Keamanan Kantor dengan realisasi 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 263.070.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 253.511.909,- atau 96,37% yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.699.700,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.286.000,- atau 99,32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dengan realisasi 100%

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.650.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 41.680.909,- atau 95,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan dengan realisasi 100%

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.821.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 50.660.000,- atau 90,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dengan realisasi 91%.

d. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 102.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 100.885.000,- atau 98,04%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Kantor dengan realisasi 98,04%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 52.370.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 51.918.600,- atau 99,14% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.425.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 13.345.000,-

atau 99,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dengan realisasi 99,40%.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.990.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 16.863.600,- atau 99,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Prognosis Tahun 2018 dengan realisasi 99,261%.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.955.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.710.000,- atau 98,88%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi 99%

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 304.468.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 288.547.750,- atau 94.77% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 304.468.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 288.547.750,- atau 94.77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi 95%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 531.990.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 531.300.500,- atau 99,87% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 485.550.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 485.027.000,- atau 99.89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila dengan realisasi 100%.

b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.440.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 46.273.500,-

atau 99,64%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 147.615.325,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 142.790.000,- atau 99,73% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Kehidupan beragama.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.615.325,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 142.790.000,- atau 96,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan dengan realisasi 97%

7. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar

Adapun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun 2018 sehingga tingkat Capaian Kinerja 0%

8. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 341.412.877,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 329.938.822,- atau 96.64% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 341.412.877,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 329.938.822,- atau 96.64%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 100%.

9. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 917.185.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 905.860.000,- atau 98,77% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 917.185.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 905.860.000,- atau 98,77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan dengan realisasi 99%.

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.050.000,- dan realisasi penyerapan

Anggaran sebesar Rp. 41.950.000,- atau 99,76% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.050.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 41.950.000,- atau 99.76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 dengan realisasi 100%.

11. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 84.611.948,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.034.600,- atau 99.32% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Pembinaan PKK Kecamatan.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.611.948,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.034.600,- atau 99.32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah TP. PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi 99,32% .

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Dumai Selatan adalah salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur yang luas ± 69,02 Km², terdiri dari 5 (lima) kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Ratu Sima
2. Kelurahan Bukit Timah
3. Kelurahan Mekar Sari
4. Kelurahan Bukit Datuk
5. Kelurahan Bumi Ayu

Prestasi Kecamatan Dumai Selatan yang telah diraih pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4. 38 Capaian Prestasi Keluaran/Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2018

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
1.	Juara I Lomba Yel – Yel 10 Program Pokok PKK Jambore Kader PKK Tk. Kota Dumai.	Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai	TP. PKK Kota Dumai
2.	Juara I Tk. Kota Ibu Kasmalia KB. Lestari 15 Tahun	Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai	BKKBN
3.	Juara II Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tingkat Kota Dumai Tahun 2018	Kecamatan Dumai Selatan	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai

- | | | | | |
|----|--|-------------------------|------------|--------------------|
| 4. | Juara II Lomba Desain dan Peragaan Busana Melayu Harian Jambore Kader PKK Tk, Kota Dumai | Kecamatan Dumai Selatan | Kota Dumai | TP. PKK Kota Dumai |
| 5. | Juara III Stand PKK Kec. Terbaik Lomba HKG PKK Tk. Kota Dumai | Kecamatan Dumai Selatan | Kota Dumai | TP. PKK Kota Dumai |
| 6. | Juara III Penyuluhan 10 Program Pokok PKK Jambore Kader PKK Tk. Kota Dumai. | Kecamatan Dumai Selatan | Kota Dumai | TP. PKK Kota Dumai |

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

KECAMATAN DUMAI KOTA

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Kota dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Dumai Kota
Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (Dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70	84	120
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70	70	100
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70	70	100

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran di atas pada Tahun 2018, untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2018 adalah (84%) dan tingkat capaian sebesar (120%), sebagaimana keterangan dibawah ini.

$$y = a / b \times 100 \% \text{ ----> } 1.206 / 1.441 \times 100\% = 84 \%$$

y= Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik

a= Sarana dan Prasarana Kondisi Baik

b= Jumlah Keseluruhan Sarana Prasarana

(Kondisi Baik + Kondisi Rusak atau Jumlah Kebutuhan)

Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan

prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Dumai Kota masih perlu penyempurnaan, belum bisa memenuhi kebutuhan Kantor Camat Dumai Kota yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan seperti mebeleur (meja, lemari arsip, kursi kerja, kursi rapat, kursi tunggu pelayanan), peralatan kantor (komputer, printer, AC, mesin fotocopy) dan perlengkapan kantor (kamera digital) dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dan tenaga honorer sebanyak 20 (dua puluh) orang

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2018 adalah (70%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2018 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Kota khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat RASTRA Kecamatan Dumai Kota sampai tahun 2018 adalah :

a) Kelurahan Laksamana	199 KK
b) Kelurahan Dumai Kota	153 KK
c) Kelurahan Bintan	167 KK
d) Kelurahan Sukajadi	188 KK
e) Kelurahan Rimba Sekampung	262 KK

Jumlah penerima beras RASTRA sampai tahun 2018 ini adalah **969 KK**, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras **15 kg/KK** setiap bulannya. Selanjutnya pengganti RASTRA adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu Rp 110.000.000,-/bln/KK berupa beras dan telur. Pencairan Tahap I bulan Desember 2018 untuk pemakaian bulan November 2018.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2018 adalah (70%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2018 ini pada Kecamatan Dumai Kota, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan akibat pasang surut air laut (banjir ROBB). Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2018 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 22 (dua puluh

dua) orang petugas yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Kota sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Kota pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.270.695.786,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.743.272.360,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.527.423.426,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 5.443.819.611,- atau terserap 94,79 % dan Belanja Langsung Rp 3.442.352.028,- atau terserap 97,60 % :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 936.895.650,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 877.749.100,- atau 93,69 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 24.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 19.950.000,- atau 80,61 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah materai, benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 98.460.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 79.612.050,- atau 80,86 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah

rekening telepon, air bersih, listrik dan speedy dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %. Pembayaran telepon, listrik dan speedy melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp Rp 71.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 68.050.000,- atau 94,84 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp Rp 177.229.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 176.209.000,- atau 99,42 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

e. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 53.720.460,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 48.208.350,- atau 89,74 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 29.166.950,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 26.061.400,- atau 89,35 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 3.149.440,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.914.600,- atau 92,54 %. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah kebutuhan alat listrik kantor selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 23.029.800,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16.909.000,- atau 73,42 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor dengan realisasi kinerja 100 %.

i. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 47.990.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 32.420.000,- atau 67,56 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 244.450.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 244.214.700,- atau 99,90 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dengan realisasi kinerja 100 %.

k. Penyediaan jasa tenaga keamanan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.200.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar orang dengan realisasi kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar sebesar Rp 132.625.800,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 126.797.450,- atau 95,61 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 28.730.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 27.500.000,- atau 95,72 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 4 unit dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Pengadaan mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.400.000,- atau 88,00 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mebeleur kantor yang diadakan sebanyak 2 set dengan realisasi kinerja 100 %.

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 69.195.800,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 65.292.450,- atau 94,34 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 8 unit dengan realisasi kinerja 100 %.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 29.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 29.605.000,- atau 99,68 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 53.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.490.000,- atau 95,08 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 18.650.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.050.000,- atau 96,78 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen laporan kinerja (LKj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 4 (empat) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 16.750.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16.100.000,- atau 96,12 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan prognosis tahun 2018 sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 17.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16.340.000,- atau 92,32 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 479.765.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 479.461.450,- atau 99,94 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 479.765.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 479.461.450,- atau 99,94 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 22 orang dengan realisasi kinerja 100 %.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 550.304.176,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 549.765.000,- atau 99,90 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 520.440.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 520.440.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 29.864.176,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 29.325.000,- atau 98,19 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 104.225.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 104.225.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 104.225.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 104.225.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan yang diadakan sebanyak 4 jenis lomba dengan realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 303.880.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 293.536.478,- atau 96,60 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah in :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 303.880.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 293.536.478,- atau 96,60 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi untuk 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100 %.

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 876.884.550,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 870.584.550,- atau 99,28 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 876.884.550,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 870.584.550,- atau 99,28 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina selama 12 (dua belas) bulan sebanyak 147 orang dengan realisasi kinerja 100%

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.743.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.743.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 39.743.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.743.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.000.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 TP PKK dengan realisasi kinerja 100 %.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Kecamatan Dumai Kota adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± 17 km², terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

- a) Kelurahan Rimba Sekampung
- b) Kelurahan Sukajadi
- c) Kelurahan Dumai Kota
- d) Kelurahan Bintan
- e) Kelurahan Laksamana

Letak yang strategis di jantung Kota Dumai membuat Kecamatan Dumai Kota menjadi *barometer* pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 s/d 2018 adalah :

Tabel 4. 40 Tabel Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2017-2018

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara II Lomba Pelaksana Terbaik Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Kelurahan Bintan	Provinsi Riau	Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
2	Juara II Lomba Kelurahan	Kelurahan Sukajadi	Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
3	Juara I Lomba Kelurahan	Kelurahan Sukajadi	Kota Dumai	Bag. Pemberdayaan Masyarakat Setdako Dumai
4.	Juara III BBGRM (Lomba Pelaksanaan GORO Masyarakat)	Kelurahan Sukajadi	Kota Dumai	Bag. Pemberdayaan Masyarakat Setdako Dumai
5.	Peringkat III Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	Inspektorat Kota Dumai
TAHUN 2018				
1.	Juara I Lomba Pelaksana Terbaik Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
2.	Juara Harapan I Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Bag. Pemberdayaan Masyarakat Setdako Dumai
3.	Juara I Lomba Dasawisma RT.03	Kelurahan Bintan	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
4.	Juara I PKK KB KES	Kelurahan Laksamana	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Kota Dumai
5.	Juara I BKL Sejahtera	Kelurahan Laksamana	Kota Dumai	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Dumai
6.	Juara II UPPKS Kartika	Kelurahan Laksamana	Kota Dumai	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Dumai

PERMASALAHAN

- a) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
- b) Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.
- c) Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

- d) Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

SOLUSI

- a) Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan, dan harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis
- b) Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KENDALA / HAMBATAN

Tahun 2018, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Kota setelah perubahan sama dengan APBD murni sebesar Rp. **3.527.423.426,-** yang mana tidak ada penambahan pagu anggaran dan jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan di Kecamatan Dumai Kota, dan sebagian besar anggaran atau 56,6 % merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Pemekaran khususnya. Mencermati hal di atas, mengingat terbatasnya APBD Kecamatan Dumai Kota, maka sangat dibutuhkan adanya tambahan dana dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota ke depannya.

KECAMATAN DUMAI BARAT

Pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Barat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan Pemerintahan Umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Dumai Barat Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan yang baik	70%	60%	86%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70%	70%	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat	70%	70%	100%

Sumber : Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 4.41 diatas dalam pencapaian sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut yang sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2018 adalah 60% atau tingkat capaian sebesar 86%, karena program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Dumai Barat belum bisa memenuhi kebutuhan Kantor Camat dan 4 (empat) Kantor Lurah se-Kecamatan Dumai Barat yang kekurangan meubeler (meja, kursi kerja, kursi rapat, lemari dll), peralatan kantor (Komputer, printer, laptop dll) dengan jumlah ASN dan Tenaga Honorer sebanyak 67 (enam puluh tujuh) personil.

2) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2018 adalah 70% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan pelayanan posyandu ada yang sudah dikerjakan secara swadaya dan swakelola masyarakat setempat dan ketua RT/LPMK sangat pro aktif dalam menampung usulan masyarakat dan mengerti administrasi tingkat RT dan pengurus posyandu aktif dalam pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan posyandu balita dan usila pada kader 4 (empat) kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan masyarakat pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader

Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Barat sudah melaksanakan Penilaian Lomba kelurahan dan meraih peringkat Juara II Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Pada Tahun 2018 ini Kecamatan Dumai Barat meraih juara umum MTQ/STQ Tingkat Kota Dumai, Juara I Lomba Hatinya PKK Tingkat Kota Dumai, Juara I Lomba BKB (Bina Keluarga Balita) Tingkat Kota Dumai, Juara II Penilaian KB Lestari Kategori 15 Tahun Tingkat Kota Dumai dan Lomba Parade Devile dalam rangka Jambore Kader PKK Tingkat Kota Dumai meraih peringkat ke III Tingkat Kota Dumai. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras sejahtera (rastra) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Barat khususnya pada 4 (empat) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat rastra Kecamatan Dumai Barat Tahun 2018 adalah :

- Kelurahan Purnama	252	KK
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihksan	95	KK
- Kelurahan Bagan Keladi	260	KK
- Kelurahan Pangkalan Sesai	177	KK

Jumlah penerima beras sejahtera sampai tahun 2018 ini adalah 784 KK, yang mana setiap KK mendapat Bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Kartu Keluarga sejahtera (KKS) Rp. 110.000.000,-/bln/KK yang berupa beras dan telur

3) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2018 (70%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2018 adalah 70% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan gotong royong di Kecamatan Dumai Barat sangat tinggi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk sms terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian dalam pelaksanaan program dan

kegiatan berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, Pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Keberhasilan dari indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Kantor Camat Dumai Barat dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2018 sebesar Rp. 7.564.939.390,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.516.301.840,- sedangkan Belanja Langsung Rp. 3.048.637.550,-. Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.492.966.452,- atau terserap 99,48% dan Belanja Langsung terserap Rp. 3.017.677.546,- atau 98,98%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.025.306.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.014.796.881,- atau 98,97% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 137.830.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 137.830.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai, benda pos lainnya dan jumlah jasa tenaga pelayanan administasi perkantoran selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.622.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 57.331.980,- atau 96,16%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rekening telephon, air bersih dan speedy/TV Kabel selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 69.070.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 65.550.000,- atau 94,90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 170.615.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 170.615.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.710.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 56.700.000,- atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 47.808.000,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 47.805.000,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

g) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 15.715.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 15.700.000,- atau 99,90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kebutuhan alat listrik kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.000.000,- atau 55,56%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 68.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 68.650.000,- atau

100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makanan/minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 249.286.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 247.814.901,- atau 99,41%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

k) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 142.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 142.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa tenaga keamanan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 191.241.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 180.175.060,- atau 94,21% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 66.341.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 64.916.060,- atau 97,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan realisasi 100%.

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 29.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 29.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%

c) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 91.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 85.459.000,- atau 89,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 53.250.000,- dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.250.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 14.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan capaian kinerja selama 1 tahun dengan realisasi 100%.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 17.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2018 dengan realisasi 100%.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.450.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan realisasi 100%.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 272.995.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 271.841.500,- atau 99,58% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 272.995.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 271.841.500,- atau 99,58%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 100%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 393.905.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 393.905.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 372.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 372.000.000,- atau

100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di kecamatan dengan realisasi 100%.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.905.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.905.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan dengan realisasi 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 101.529.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 101.529.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 101.529.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 101.529.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi 100%.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 263.909.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 255.737.605,- atau 96,90% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintah Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 263.909.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 255.737.605,- atau 96,90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 100%.

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 641.524.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 641.524.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 641.524.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 641.524.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina dengan realisasi 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.276.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 43.276.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 43.276.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 43.276.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 dengan realisasi 100%.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 61.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 61.642.500 atau 99,91% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 61.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 61.642.500,- atau 99,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK Kecamatan dan kelurahan yang dibina dengan realisasi 100%.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Dumai Barat mempunyai luas wilayah ± 6453 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Pangkalan Sesai 882 Ha.
2. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan 1.800 Ha.
3. Kelurahan Purnama 2.700 Ha.
4. Kelurahan Bagan Keladi 1.071 Ha

Kecamatan Dumai Barat mempunyai batas-batas wilayah Administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumai Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sembilan.

Prestasi/ Penghargaan yang diraih selama 2 (dua) tahun terakhir (2017 dan 2018), Kecamatan Dumai Barat telah mengikuti beberapa perlombaan dan seleksi

baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi. Uraian prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Dumai Barat diantaranya adalah :

Tabel 4. 42. Prestasi dan Penghargaan Yang diraih di Raih Tahun 2017-2018

No	Uraian Prestasi	Pemenang	Tingkat Lomba	Penyelenggara
2017				
1.	Juara Umum MTQ	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	Kesra
2.	Juara I Festival Rebana Pede	Kelurahan STDI	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
3.	Juara II Lomba Stop Buang Air Besar Sembarang	Kelurahan Bagan Keladi	Kota Dumai	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4.	Juara III Lomba Penyuluhan POKJA III	Kec. Dumai Barat	Provinsi Riau	PKK Provinsi Riau
5.	Juara II Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat terbaik	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
6.	Juara III Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
7.	Harapan V Lomba Perpustakaan dan Arsip (Pustaka Tuah Ilmu)	Kel. Bagan Keladi	Provinsi Riau	Dinas Perpustakaan Prov. Riau
2018				
1.	Juara I MTQ	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai	Kesra
2.	Juara I Lomba Hati PKK	Kel. Bagan Keladi	Provinsi Riau	PKK Provinsi Riau
3.	Juara I Lomba BKB (Bina Keluarga Balita)	Kel. STDI	Kota Dumai	BKPPA
4.	Juara I Lomba Menghias Tumpeng	Kel. STDI	Kecamatan	PKK Kota Dumai
5.	Juara II Penilaian KB Lestari Kategori 15 Tahun	Kel. STDI	Kota Dumai	BKPPA
6.	Juara II Lomba Kelurahan	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	BKP SDM
7.	Juara III Lomba Parade Devile Jambore PKK	Kantor Camat Dumai Barat	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
8.	Harapan I Lomba BBGRM	Kel. Bagan Keladi	Kota Dumai	BKP SDM
9.	Harapan II Lomba Joget Koran	Kantor Camat Dumai Barat	Kota Dumai	Dharma Wanita Kota Dumai
10.	Harapan II Lomba Kelurahan	Bagan Keladi	Provinsi Riau	BKP SDM

PERMASALAHAN

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.

3. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang - undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegasi/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
4. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

SOLUSI

1. Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan, dan harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis.
2. Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KENDALA/HAMBATAN

Pada Tahun 2018, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Barat Sebesar Rp. 3.048.637.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.017.677.546,- atau sebesar 98,98%, jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan di Kecamatan Dumai Barat, dan sebagian besar anggaran merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan di Kecamatan induk Khususnya.

KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 43. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Medang Kampai
Tahun 2017**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70%	100%	100%
Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat	70%	98,69%	98,69%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70%	98,37%	98,37%

Sumber : Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas dalam pencapaiin sasaran terdapat beberapa capaian kinerja tersebut yang sama dengan target atau sudah mencapai target dan melewati capaian target capaian kineja tahun 2018 dapat dilihat uraian dibawah ini :

1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai yaitu 70% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 356.950.000 atau 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Kegiatan Penilaian Kinerja unit pelayanan publik. Adapun kegiatan ini mengukur Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Posyandu balita dan usila yang ada dan mengukur seberapa besar swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medang Kampai. Dari Data tersebut total posyandu yang ada di Kecamatan Medang Kampai berjumlah 130 org dan 26 posyandu terdiri dari balita dan usila. Dalam hal ini pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pembentukan kampung keluarga berencana Kota Dumai (KB), pembentukan Kelompok bina keluarga balita (BKB) "melati", Kelompok bina keluarga lansia (BKL) "dahlia" dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) "Sakura" yaitu kelurahan Pelintung. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di

masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Medang Kampai sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya.

2) Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai yaitu 70% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 367.478.000 atau 98.69%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan LPMK dan RT. Adapun kegiatan ini mengukur Persentase peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan LPMK dan RT yang ada. Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2018 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

3) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai yaitu 70% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 51.463.000 atau 98.37%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Adapun kegiatan ini terlaksananya kegiatan 10 Program TP.PKK Tingkat Kecamatan Medang Kampai, kegiatan tersebut memiliki sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1 (satu) indikator kegiatan yaitu Terlaksananya Kegiatan 10 Program TP.PKK Tingkat Kecamatan Medang Kampai dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 98,37% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa dalam penyerapan anggaran Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Anggota PKK Kecamatan Medang Kampai untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Medang Kampai serta seberapa tertibnya anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan PKK Kecamatan Medang Kampai. Dari data yang

diterima Jumlah PKK Kecamatan Medang Kampai berjumlah 110 orang Kelurahan dan Kecamatan. Pada tahun 2018 Kecamatan Medang Kampai meraih peringkat kesatu, kedua dan ketiga dalam penilaian (Lomba Parade Devile, Lomba Desain dan Peragaan budhana melayu harian, Lomba Dasawisma, Lomba yel yel 10 program Pokok PKK, Lomba Joget Rebutan Kursi dan UP2K Terbaik Lomba HKG PKK, Lomba Parade (dalam rangka jambore PKK Kota Dumai dan Provinsi Riau). PKK Kecamatan Medang Kampai berjumlah 110 orang Kelurahan dan Kecamatan Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerja sama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja sudah maksimal hal ini disebabkan keberhasilan pencapaian dapat dilihat pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan untuk masing kegiatan tersebut, perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100% Dilihat pada tabel pencapaian indikator di atas, jika disandingkan capaian kinerja tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik, capaian kinerja tahun 2016 (98%), tahun 2017 (98%) dan tahun 2018 (100%) mengalami peningkatan;
2. Pada indikator Kualitas sumber daya lembaga Masyarakat, capaian kinerja tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%) dan tahun 2018(98,69%) persentase tetap;
3. Pada indikator Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat, capaian kinerja tahun 2016 (98%), tahun 2017 (99%) dan tahun 2018 (98,37%) persentase tetap.

Anggaran Belanja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 7.222.574.920,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 4.891.068.920,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 2.331.506.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 4.356.830.346,- atau terserap 89,08 % dan Belanja Langsung Rp 2.276.572.129,- atau terserap 97,64%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 897.498.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 874.444.537,- atau 98,84% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 42.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 42.900.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai dan jasa tenaga administrasi perkantoran selama 12 bulan dan materai sebanyak 1000 lembar terealisasi 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 13.809.862,- atau 57,54%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah pemakaian telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun selama 12 bulan dan realisasi kinerjanya 100%. Pembayaran listrik melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.165.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 59.165.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 25.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 24.600.000,- atau 97,62%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar sebanyak 8 unit dengan persentase capaian 97,62%.

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 195.830.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 194.727.000,- atau 99,44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayar untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja sebanyak 11 (sebelas) orang selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 17.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 17.200.000,- atau

100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah service komputer 18 unit, service AC 10 unit, service mesin rumput 2 unit, service mesin fotocopy 2 unit, service pronter 8 unit dengan persentase capaian 100%.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 58.807.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 52.926.525,- atau 90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 35.216.000,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 31.888.400,- atau 90,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

i. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.400.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 7.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik kantor selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.700.000,- atau 76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koran/majalah dalam 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 73.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 73.425.000,- atau 99,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 228.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 228.306.950,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang

melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

m. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 122.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 122.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 6 (enam) orang dengan realisasi kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 188.214.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.867.000,- atau 99,99% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.650.000,- atau 99,77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembangunan gedung kantor (Pembangunan plang kecamatan) yang diadakan 1 unit dengan realisasi kinerja 100%.

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 31.040.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 30.800.000,- atau 99,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 8 unit selama 1 tahun dengan realisasi kinerja 99,23%.

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 15.520.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 15.510.000,- atau 99,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 unit selama 1 tahun dengan realisasi kinerja 99,23%

d. Pengadaan Mebeler

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.999.999,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mebeleur kantor yang diadakan sebanyak 4 unit/set selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 99,99%.

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.778.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 59.778.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua sebanyak 6 unit selama 1 tahun dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.250.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.175.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.175.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan pencapaian kinerja (Lkj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 4 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 17.075.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 17.075.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2018 sebanyak 2 laporan dengan realisasi kinerja 100%.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 22.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi kinerja 100%.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 36.969.750,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.537.750,- atau 98,83 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 36.969.750,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.537.750,- atau 98,83. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan sebanyak 1 orang dengan realisasi kinerja 98,83 %.
2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 356.950.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 356.950.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :
 - a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 326.950.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 326.950.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.
 - b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 30.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan sebanyak 4 (empat) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 94.570.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 87.570.000,- atau 92,60 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
 - a. Pembinaan Kehidupan Beragama
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 94.570.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 87.570.000,- atau 92,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 216.203.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 197.734.342,- atau 91,46 % yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 216.203.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 197.734.342,- atau 91,46 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 91,46 %.

5. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 367.478.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 362.678.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 367.478.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 362.678.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT Kecamatan yang dibina selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 71.910.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 71.910.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 71.910.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 71.910.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 dengan realisasi kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 51.463.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.625.500,- atau 98,37 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 51.463.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.625.500,- atau 98,37 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 98,37 %.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2017 s/d 2018 adalah :

**Tabel 4. 44. Capaian Prestasi dan Penghargaan
Kecamatan Medang Kampai
Tahun 2017-2018**

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara 1 lomba yel yel 10 program PKK (dalam rangka jamboree PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
2	Juara II lomba pesen show baju harian PKK (dalam rangka jamboree PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
TAHUN 2018				
1.	Juara Harapan III Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Dumai Tahun 2018	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kota Dumai	Tim Penilai tingkat Kota Dumai Bagian Pemberdayaan Masyarakat (SEKDAKO)
2.	Juara Harapan III Lomba Evaluasi Kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2018	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kota Dumai	Tim Penilai tingkat Kota Dumai Bagian Pemberdayaan Masyarakat (SEKDAKO)
3.	Juara I Lomba Posyandu Teladan Tingkat Kota Dumai	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kota Dumai	Tim Dinas Kesehatan Kota Dumai
4.	Juara III Lomba Parade dalam rangka jamboree Kader PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
5.	Juara I Parade Devile (dalam rangka jamboree PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
6.	Juara I lomba Desain dan Peragaan Busana Melayu Harian (dalam rangka jamboree PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
7.	Juara II Lomba Dasawisma (dalam rangka jamboree PKK	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai

	Kota Dumai)			
8.	Juara II Yel yel 10 Program PKK (dalam rangka jambore PKK Kota Dumai)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
9.	Juara III UP2K Terbaik Lomba HKG PKK tk. Kota Dumai Tahun 2018	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai
10.	Juara II Lomba Joget Rebutan Kursi (dalam Rangka HUT DWP ke 19 Tahun 2018)	PKK Kecamatan Medang Kampai	Kota Dumai	PKK Kota Dumai

Sumber : Kecamatan Medang Kampai

PERMASALAHAN

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.
3. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
4. Masih adanya beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD tapi pelaksanaannya belum.
5. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government*

dan *smart city*.

SOLUSI

1. Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan dan harus memenuhi persyaratan substansi, administratif dan teknis.
2. Memberikan kewenangan yang luas kepada Kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD agar dapat dilaksanakan.

KENDALA / HAMBATAN

Tahun 2018, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Medang Kampai setelah perubahan sebesar Rp. **2.276.572.129,-** jumlah ini mengakomodir 10 (sepuluh) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan di Kecamatan Medang Kampai, dan sebagian besar anggaran atau 36,79 % merupakan biaya beban tetap/Belanja Langsung digunakan untuk membayar insentif RT/LPMK, Kader Posyandu, Tenaga Persampahan, Keamanan dan Kebersihan Kantor. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan di Kecamatan Pemekaran khususnya.

KECAMATAN BUKIT KAPUR

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 45. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70 %	70 %	100 %
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70 %	70 %	100 %
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70 %	70 %	100 %

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing - masing kinerja tersebut. Nilai capaian Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2018 dapat dilihat dari rencana tingkat capaian pada rencana kinerja tahunan terhadap realisasi kinerja capaian sasaran. Adapun rincian capaian sasaran

tahun 2018 sebagaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sementara strategi dari indikator diatas adalah memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga arah kebijakan meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program kegiatan dan realisasi keuangan setiap tahunnya, yaitu:

Tabel 4. 46. Pencapaian Anggaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kinerja (%)
2017	2.797.000.000.-	2.730.345.016.-	97.62	100
2018	2.905.565.600.-	2.489.150.543	98.06	100

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

1. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan Bukit Kapur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini lebih mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Hal ini dilaksanakan sebagai landasan penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan Kecamatan Bukit Kapur.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, berbagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan ditingkat kecamatan yang diberikan harus sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Kecamatan Bukit Kapur dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan secara optimal untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota

2. Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan, Kecamatan Bukit Kapur lebih meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur yang profesional dan berkompetensi dengan berlandaskan IMTAQ dan IPTEK, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan data dan akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang.

Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2013 Kecamatan Bukit Kapur sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan. Kecamatan Bukit Kapur mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 2 (Dua) orang petugas. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang dianggarkan melalui penganggaran pada Kecamatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bukit Kapur sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya.

Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017, kepada masyarakat Kecamatan Bukit Kapur khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga penerima Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Bukit Kapur sampai tahun 2018 adalah :

Tabel 4. 47. Penerima Raskin Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penerima Raskin	Keterangan
01	Bagan Besar	388 KK	
02	Bukit Nenas	179 KK	
03	Bukit Kayu Kapur	600 KK	
04	Gurun Panjang	267 KK	
05	Kampung Baru	407 KK	
	Jumlah	1.871 Kk	

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

Jumlah penerima Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 ini adalah 1.841 KK .

Dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Bukit Kapur dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai.

Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis sampai tahun 2018 ini pada Kecamatan Bukit Kapur, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.

4. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Bukit Kapur sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam.

Setiap Lurah di Kecamatan Bukit Kapur mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Bukit Kapur akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Bukit Kapur. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Bukit Kapur akan aman dan terkendali.

Anggaran Belanja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.8.574.462.440,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.668.896.840,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.2.905.565.600,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.505.058.573,- atau 97.11% dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.849.150.543,- atau 98.06%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 983.844.060,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 941.053.724,- atau 95.65% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 100 %. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah materai dan benda pos lainnya dan jasa tenaga administrasi perkantoran.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.88.140.000,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.61.169.046,- (enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu empat puluh enam) atau 69.40%. Adapun

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pemakaian telepon, listrik dan speedy.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.84.426.000,-(delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.71.426.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau 84.60%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.156.750.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 156.750.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar

e. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan kantor.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.47.776.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.47.776.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.12.594.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.506.000,- (sepuluh juta lima ratus enam ribu rupiah) atau 83.42%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kebutuhan alat listrik kantor.

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.51.160.000,- (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.50.581.375,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 98.87%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor.

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor

j. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.127.520.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 127.520.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.163.778.060,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 163.625.303,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau 99.91%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah asn yang melaksanakan perjalanan dinas.

l. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah tenaga keamanan kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.80.948.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.80.948.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.45.948.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 45.948.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.35.000.000,- ((tiga puluh lima juta rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.46.395.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp. 46.395.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.9.095.000,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.9.095.000,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan kerja.

b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan prognosis tahun 2018

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.49.887.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.287.600,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 98.80 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.49.887.600,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 49.287.600,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 98.80 %. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.96.695.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.695.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 96.695.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 96.695.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan lima ribu rupiah) atau 100%. Adapun Indikator kinerja

keluaran kegiatan ini adalah Jumlah lomba MTQ dan STQ tingkat kecamatan yang diadakan.

6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.420.640.000,- (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 420.540.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau 99,98% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan

b. Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. Rp. 24.540.000,- (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau 99.59%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada kecamatan Bukit Kapur.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.318.076.600,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.305.152.879,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95.94% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 318.076.600,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp305.152.879,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95.94%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan yang prima pada masyarakat dengan target kinerja selama 1 tahun.

8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.836.794.340,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh

rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.836.793.340,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. Rp.836.794.340,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 836.793.340,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 24.400.000,- ((dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.47.885.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.47.885.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 47.885.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 47.885.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah TP.PKK yang dibina dikecamatan dan kelurahan

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DI RAIH

Kecamatan Bukit Kapur adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya ± 200 km², terdiri dari 5 (lima) Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Bagan Besar
- b. Kelurahan Bukit Nenas
- c. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
- d. Kelurahan Gurun Panjang
- e. Kelurahan Kampung Baru

Kecamatan Bukit Kapur menjadi barometer pelayanan kepada masyarakat. Prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2017 - 2018 adalah :

Tabel 4. 48. Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2017 - 2018

No	Uraian prestasi	Pemenang	Tingkat lomba	Penyelenggara
TAHUN 2017				
1	Juara I Lomba Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	Bagan Besar	Provinsi Riau	Provinsi Riau
2	Juara I Lomba Posyandu Teladan	Bagan Besar	Propinsi Riau	Propinsi Riau
3	Juara I Lomba UP2K	Bagan Besar	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
4	Juara Harapan III Lomba Kelurahan Terbaik	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
5	Juara Harapan I Lomba BBGRM	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
6	Juara III Lomba Poskamling Terbaik	Bukit Nenas	Tingkat Kota Dumai	Walikota Dumai
7	Juara III Lomba UPPKS	Bukit Nenas	Propinsi Riau	Propinsi Riau
TAHUN 2018				
1.	Juara I Lomba Posyandu Terbaik	Kelurahan Bagan Besar	Tingkat Nasional	Kementrian Dalam Negeri
2.	Juara II Penyuluh Keluarga Berencana Terbaik	Kelurahan Kampung Baru	Provinsi Riau	Provinsi Riau

PERMASALAHAN

- a) Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
- b) Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang lambat dan aparatur yang kurang profesional, serta belum banyaknya SDM kecamatan yang diikuti dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur kecamatan.

- c) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi didalam menjalankan tugas, masih rendahnya kepedulian pihak swasta/pengusaha terhadap pembangunan, serta masih rendahnya peran Musrenbang didalam pembangunan wilayah.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya dan masih kurangnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT

SOLUSI

- a) Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Bukit Kapur ditingkatkan secara optimal dalam menangani urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.
- b) Kecamatan Bukit Kapur akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal, akan segera mengusulkan SDM kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam bertugas.
- c) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas, peran serta aktif dari masyarakat, swasta dan pengusaha yang mendukung program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Bukit Kapur, adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up untuk mengoptimalkan penataan dan penggunaan ruang pembangunan wilayah dan masyarakat Kecamatan Bukit Kapur.
- d) Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling.

KENDALA / HAMBATAN

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2018 sebesar Rp. 8.574.462.440.- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai digunakan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 5.668.896.840.- (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) Dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.905.565.600 (dua miliar sembilan ratus lima juta lima

ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk mengakomodir 10 (sepuluh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan.

Anggaran tersebut jika dibandingkan dengan beban kerja Kecamatan Bukit Kapur masih belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh kecamatan agar pelayanan pada masyarakat dapat optimal. Mencermati hal di atas, maka sangat dibutuhkan adanya tambahan anggaran dari APBD Kota Dumai, untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bukit Kapur ke depannya.

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Sungai Sembilan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4. 49. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Sungai Sembilan
Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (%)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	70%	68,19%	97,41%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	70%	69,61%	99,44%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	70%	63,56%	90,80%

Sumber : Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2018 untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2018 adalah 70% dan terealisasi 68,19% atau 97,41%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator kinerja ini sebesar Rp. 463.050.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 451.050.000,- atau 97,41 %. adapun indikator kinerja keluarannya adalah honorarium kader posyandu balita dan usila dikecamatan selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan serta jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan dan peningkatan kinerja kader posyandu balita dan usila di Kecamatan Sungai Sembilan.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2018 adalah 70% dan terealisasi 63,56% atau 90,80%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator kinerja ini sebesar Rp. 768.300.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 764.050.000,- atau 99,45 %. adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 99,45%. Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas Kinerja Pengurus LPMK dan Ketua RT di Kecamatan Sungai Sembilan.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2018 adalah 70% dan terealisasi 69,61% atau 99,44%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator kinerja ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.399.400,- atau 90,80 %. adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah TP PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan selama 12 bulan atau 100%. Capaian kinerja ini memenuhi target yang diinginkan dengan terbina PKK di Kecamatan dan PKK di Kelurahan sebanyak 6 TP PKK. Tujuan utama kegiatan ini memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Anggaran Belanja Kecamatan Sungai Sembilan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.387.091.136,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.348.530.180,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.038.560.956,00.- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 5.275.789.526,00.- atau terserap 98,63% dan Realisasi Belanja Langsung Sebesar Rp. 2.980.069.807,00,-. atau terserap 98,07% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.108.327.956,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.094.143.844,- atau 98,72% yang dialokasikan melalui kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 62.780.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 58.280.000,- atau 92,83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai, benda pos dan jasa tenaga administrasi perkantoran dalam 11 bulan dan terealisasi sebanyak 10 bulan atau 90,91%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 64.548.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 66.153.161,- atau 102,49%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah rekening listrik, air bersih dan internet yang dibayar selama 12 bulan sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 81.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 81.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 25.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 23.130.550,- atau 91,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa sopir yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 257.822.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 257.822.500,- atau 91,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa petugas kebersihan kantor yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 13.550.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.650.000,- atau 85,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pemeliharaan AC, komputer dan mesin potong rumput sebanyak 42 kali dan terealisasi 34 kali atau 80,95%.
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.

- 53.709.679,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 53.663.800,- atau 99,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah alat tulis kantor selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.672.780,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.166.000,- atau 93,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- i. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.320.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.320.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.680.000,- atau 31,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan/koran sebanyak 1800exp dan terealisasi 720 exp atau 40%.
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 43.780.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 44.550.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makan minum rapat dan tamu selama 11 bulan dan terealisasi 11 bulan atau 100%.
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 166.345.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 166.207.833,- atau 99,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas sebanyak 24 orang dan terealisasi 33 orang atau 137,5%.
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 306.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 304.300.000,- atau 99,44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi 12 orang atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 155.506.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 154.886.800,- atau 99,60% yang dialokasikan melalui kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.799.800,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan kantor yang diadakan sebanyak 8 unit dan terealisasi 8 unit atau 100%

b. Pengadaan Mebeler

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 18.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mebeleur kantor yang diadakan sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit atau 100%.

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.620.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 84.002.000,- atau 99,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang direhab sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan atau 100%.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.086.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 14.085.000,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.580.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.580.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.580.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 12.580.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan pencapaian kinerja (Lkj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan)

sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.

2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 22.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan prognosis tahun 2018 sebanyak 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%.

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 22.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan akhir tahun sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan atau 100%

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 27.639.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 27.619.000,- atau 99,93% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 27.639.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 27.619.000,- atau 99,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan dan kelurahan selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 463.050.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 451.050.000,- atau 97,41% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 432.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- atau 97,22%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium Kader Posyandu dan Operasional Posyandu Balita dan Usila selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100 %.

b. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.050.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 31.050.000,-

atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dan terealisasi 5 Kelurahan atau 100 %.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 91.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 91.700.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Pembinaan Kehidupan beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 91.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 91.700.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah lomba MTQ/ STQ tingkat Kecamatan yang diadakan sebanyak 6 lomba dan terealisasi 6 lomba atau 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 286.408.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.430.763,- atau 92,14% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 286.408.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.430.763,- atau 92,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah operasional Kelurahan yang terpenuhi sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

8. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 768.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 764.050.000,- atau 99,45% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

a. Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 768.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 764.050.000,- atau 99,45%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan RT Kecamatan yang dibina 12 bulan selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.200.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah 32.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebanyak 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

9. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 45.399.400,- atau 90,80% yang dialokasikan kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 45.399.400,- atau 90,80%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 TP PKK dan terealisasi 6 TP PKK atau 100%.

PERMASALAHAN/ KENDALA

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan antara lain adalah :

1. Terbatasnya anggaran dimana pada tahun 2018 APBD Kota Dumai mengalami rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa kegiatan dipilih dan dikelompokkan untuk menjadi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan;
2. Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan efektifitas bidang pekerjaannya dan masih rendahnya tingkat pengetahuan aparatur di Kecamatan.

KONDISI YANG DIINGINKAN

1. seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan didalam penganggaran didalam penganggaran harus selaras dan seimbang dengan kebutuhan organisasi. Adapun beberapa pemilahan kegiatan prioritas harus benar-benar melihat aspek sumber daya manusia, kemungkinan pelaksanaan anggaran, serta pencapaian sasaran organisasi yang telah ditargetkan didalam strategis

2. sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri, mengingat bahwa kecamatan kini telah menjadi SKPD utuh, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas.

LANGKAH ANTISIPASI YANG DIAMBIL

Untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Sungai Sembilan telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

1. Diperlukan perencanaan yang matang dalam penganggaran, serta informasi yang seluas-luasnya, agar kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan perencanaan serta target - target dapat tercapai dengan optimal ;
2. Pembinaan kepada SDM di Kecamatan dilakukan secara antisipatif, dengan menerapkan sistem reward and punishment di Kecamatan Sungai Sembilan. Selain itu diperlukan pembinaan secara keseluruhan dalam pemahaman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan kegiatan ;

21. URUSAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Kota Dumai tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 4. 50. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Tahun 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian dalam (%)
Persentase rekomendasi yang selesai di tindak lanjuti	70%	67,44 %	96,34 %
Jumlah dokumen yang direviusetiap tahunnya.	5 Dokumen	4 Dokumen	80%

Untuk skala penilaian terhadap Indikator kinerja sasaran pemerintah, menggunakan Peraturan Menpan dan RB Nomor 15 Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.51. Skala Penilaian capaian indikator

No	Kategori	Nilai Angka (%)	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan,
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik,
4	B	>60 – 70	Baik,
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	>30 - 50	Kurang,
7	D	0 – 30	Sangat Kurang,

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti.

Pada tahun 2018 jumlah total rekomendasi adalah 476 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 321 temuan, sebanyak 60 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 95 temuan belum di tindaklanjuti.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebesar 67,44%, masih dibawah target 70%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai 96,34%, hal ini menunjukkan capaian dengan kategori **AA** dengan interpretasi **Sangat memuaskan**.

2. Jumlah dokumen yang direviu setiap tahunnya.

Berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD, Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Bahwa inspektorat wajib mereviu setiap tahunnya, pada tahun 2018 target 5 Dokumen sedangkan realisasi 4 Dokumen atau capaian kinerja dengan nilai 80,00 % hal ini menunjukkan capaian dengan kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**, Hal ini disebabkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak bisa dilaksanakan reviu mengingat terbatasnya waktu. Untuk Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan KUA PPAS telah dilaksanakan reviu.

Anggaran Belanja Inspektorat Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.10.519.294.018,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.500.714.150,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.4.018.579.868,00. Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.310.989.371,00 atau 97,08 % dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.395.487.100,00 atau 84,49%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut, yaitu :

1. Program Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.945.040.748,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.886.657.450,00 atau 93,82%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Administrasi perkantoran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.53.650.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.42.996.500 atau 80,14%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Surat terkirim sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100 %.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.47.938.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.684.200,00 atau 74,44%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100 %.

c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.15.680.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.620.000,00 atau 99,62% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Keluaran Persentase jasa peralatan perlengkapan kantor sebanyak 100% dan terealisasi 99,62 %

d. Kegiatan: Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.820.800,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.99.319.200,00 atau 98,51% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Petugas Kebersihan Kantor sebanyak 60 OB dan terealisasi 60 OB atau 100%

e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.96.904.519,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.96.061.150,00 atau 99,13%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan alat tulis kantor sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.67.589.129,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.66.645.400,00 atau 87,42% . Adapun indikator dengan indikator kinerja

- keluaran adalah Jumlah bulan Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.329.900,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.526.900,00 atau 87,42% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Alat listrik/elektronik sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.400.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah bulan penyediaan media sebanyak 12 bulan dan terealisasi 0 bulan atau 0%. dikarenakan Inspektorat dengan melalui internet untuk melihat berita - berita pengawasan dan sejenisnya
- i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.280.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.22.515.000,00 atau 82, 53% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah bulan makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%
- i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.400.218.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.397.195.100,00 atau 99,24% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perjalanan Dinas sebanyak 90 Kali terealisasi 90 Kali atau 100%.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.112.230.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.98.094.000,00 atau 87, 40% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jumlah Tenaga Keamanan Kantor sebanyak 60 OB dan terealisasi 55 OB atau 91,67%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.277.477.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.271.678.050,00 atau 97,91 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.33.233.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.29.906.000,00 atau 89,99% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengadaan sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit atau 100%.

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.185.744.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.184.107.050,00 atau 99,12% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit atau 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.28.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.665.000,00 atau 97,07% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 66 kali terealisasi 66 kali atau 100%.

d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor di rawat sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.23.020.190,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.18.000.000,00 atau 78,19 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.13.495.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.100.000,00 atau 89,66% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja sebanyak 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.9.525.190,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.900.000,00 atau 61,94% . Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan sebanyak 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.432.675.930,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.925.911.500,00 atau 79,17 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.082.805.380,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 913.049.700,00 atau 84,32%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 74 LHP dan terealisasi 70 LHP atau 94,59 %, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah diprogramkan yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus.

b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa

sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/ SJ tanggal 4 Maret 2016. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.194.631.200,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.455.800,00 atau 39,80%. Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 5 (lima) Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi adalah 4 (empat) Dokumen atau 80,00% dikarenakan waktu untuk mengevaluasi/mereviu sudah terlambat dan terbatasnya waktu.

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.216.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 215.850.000,00 atau 99,93%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 15 laporan dan terealisasi sebanyak 15 laporan atau 100%. Tercapainya target yang telah ditetapkan.

d. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.464.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.855.000,00 atau 27,42%. Adapun indikator kinerja keluarannya indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengawasan Reguler sebanyak 1 (satu) dokumen terealisasi sebanyak 1 (satu) Dokumen sebesar 100%

e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.201.081.350,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.196.540.600,00 atau 97,74%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (Dua) kali dan terealisasi 2 (Dua) kali atau 100%.

f. Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.964.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.387.000,00 atau 96,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100%.

g. Audit Khusus / Tertentu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 76.790.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.770.000,00 atau 21,84%. Adapun indikatornya adalah 1 Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 1 jumlah laporan Hasil Pemeriksaan sebesar 100%, kegiatan tersebut dilaksanakan di RSUD hanya pendampingan

h. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.157.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.302.000,00 atau 86,76%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD, yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasi 35 OPD atau 100%

i. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.154.990.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.082.500,00 atau 78,12 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan dengan target 8 OPD dan terealisasi 8 OPD atau terealisasi 100%

j. Pengendalian Gratifikasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.153.050.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.827.900,00 atau 68,80 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen/ Laporan dilaksanakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan atau terealisasi 100%.

k. Reviu Penyerapan Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.52.800.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.791.000,00 atau 86,73 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai dilaksanakan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan atau terealisasi 100%

5. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar

Rp.340.366.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.293.240.100,00 atau 86,15%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.303.050.000,00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 293.240.100,00 atau 96,76%. Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA dari yang direncanakan sebanyak 40 orang dan terealisasi 40 orang atau tingkat capaian 100%

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Perlu penambahan jumlah Auditor, dikarenakan banyaknya kegiatan pendampingan dan pengawasan yang memerlukan keterlibatan auditor.
2. Kualitas Sumber daya Manusia (SDM) belum memadai hal ini ditandai dengan banyaknya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Dumai yang belum mengikuti diklat-diklat terkait di bidang pengawasan.
3. Masih minimnya komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari OPD terkait.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran *outcome* dimasa yang akan datang adalah :

1. Menambah jumlah personil terutama Auditor di lingkungan Inspektorat Kota Dumai.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan Inspektorat Kota Dumai dalam program pelatihan yang disediakan oleh Diklat BPKP, Mendagri dan Inspektorat Provinsi.
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan perlu lebih diintensifkan, selain itu OPD dari manajemen diatas hingga ke staaf perlu lebih proaktif dan responsif menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan baik pengawas internal maupun eksternal
4. Saat ini di Inspektorat Kota Dumai sedang digiatkan slogan“ BRAVO INSPEKTORAT”. Sebuah harapan besar di lingkungan Inspektorat Kota Dumai, supaya Inspektorat lebih maju dan Berjaya ke depannya dan di hargai oleh OPD

22. URUSAN PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. 52. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian dalam (%)
Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada	100%
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	20%	15,1%	75,6%
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	96,6%	96,6%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama Bappeda tahun 2018 dan perbandingannya dengan capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

Pada Tahun 2018 telah tersusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018, Dokumen RKPD Tahun 2019, dan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Artinya target yang telah ditetapkan untuk indikator ini di Tahun 2018 telah terealisasi dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2017, pada tahun 2017 telah tersusun 2 dokumen perencanaan, yaitu; (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017; dan (2) Dokumen RKPD Tahun 2018, artinya capaian indikator ini di tahun 2017 dan 2018 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Untuk indikator ini, pada Tahun 2018 Bappeda mampu mengakomodir 15,1% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Dari 228 usulan yang diakomodir dalam RKPD tersebut, 96 usulan merupakan usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 68 usulan merupakan usulan bidang perekonomian,

dan 64 usulan merupakan usulan bidang sosial, budaya dan SDM. Realisasi di tahun 2018 ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 15%, meskipun capaiannya hanya 75,6%.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Pada Tahun 2018 terdapat 3 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
- 2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan

Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).

Dengan disyahrkannya ketiga peraturan tersebut, maka target yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 untuk indikator "Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA" dinyatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2017, pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada, diantaranya: (1) Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E); dan (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E), artinya capaian indikator ini di tahun 2017 dan 2018 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Pada tahun 2018 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 96,6%. Dari 178 program yang direncanakan dalam perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2019 yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2018 sebanyak 171 program. Artinya, capaian untuk indikator ini di tahun 2018 adalah sebesar 96,6%,

sementara pada tahun 2017 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah 100%

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Tahun Anggaran 2018, dimana total anggaran untuk 14 (empat belas) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah Rp. 9.002.963.380,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.734.977.010,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.002.963.380,-. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.279.187.172,- atau 87,80% dan Belanja Langsung terserap Rp. 7.193.187.172,- atau 80%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 disampaikan sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 3.600.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 1.800.000,- atau 50% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun sebanyak 600 Surat.
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 71.200.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 64.200.000,- atau 90,17% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Expo Dumai dan Hari-hari Besar Nasional serta Agama sebanyak 12 Bulan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 116.404.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 115.417.400,- atau 99,15% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa petugas kebersihan kantor sebanyak 6 Orang.
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 44.350.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 39.738.000,- atau 89,60% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 5 Unit.
- e. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 193.779.926,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 193.779.200,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah barang penyediaan alat tulis kantor sebanyak 12 Bulan.

- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 55.104.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 54.817.200,- atau 99,48% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah barang penyediaan cetak dan penggandaan sebanyak 12 Bulan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 23.586.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 23.586.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyediaan Instalasi Komponen Listrik sebanyak 12 Bulan.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 26.276.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 25.990.000,- atau 98,91% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 Bulan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan dana sebesar Rp. 85.189.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 53.337.000,- atau 62,61% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyediaan Instalasi Komponen Listrik sebanyak 12 Bulan.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 640.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 612.084.638,- atau 95,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan daerah sebanyak 40 Kali.
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 124.250.075,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 124.250.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor sebanyak 6 Orang.
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan dana sebesar Rp. 536.052.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 518.032.000,- atau 96,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa pelayanan perkantoran sebanyak 29 Orang.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

dialokasikan dana sebesar Rp. 109.620.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 70.999.000,- atau 64,77% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur Bappeda sebanyak 1 Unit.

b. Pengadaan mebeleur

dialokasikan dana sebesar Rp. 35.720.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 30.720.200,- atau 86,00% dengan capaian kinerja a 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan mebeleur kantor sebanyak 1 Unit.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

dialokasikan dana sebesar Rp. 414.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 278.684.600,- atau 67,32% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan mebeleur kantor sebanyak 1 Unit.

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dialokasikan dana sebesar Rp. 388.764.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 302.104.891,- atau 77,71% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pe-meliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas sebanyak 1 Unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

dialokasikan dana sebesar Rp. 24.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 5.000.000,- atau 20,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal sebanyak 7 Orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 15.000.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 2 Dokumen.

- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp. 21.600.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 21.600.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 Dokumen.
5. Program Pengembangan Data/Informasi
- a. Kegiatan Penyusunan profile daerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 120.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 74.631.448,- atau 62,19% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku informasi tentang data-data daerah sebanyak 1 Buku, Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen dan Jumlah admin OPD Kota Dumai sebanyak 36 Orang.
- b. Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 139.335.300,- atau 46,45% dengan capaian kinerja 80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku informasi tentang data-data daerah sebanyak 1 Buku, Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen dan Jumlah admin OPD Kota Dumai sebanyak 36 Orang.
6. Program Pengembangan Perumahan
- a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
dialokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 195.772.650, atau 97,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Pemantapan Dokumen RP2KP-KP sebanyak 1 Dokumen.
7. Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan
- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
dialokasikan dana sebesar Rp. 251.423.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 205.879.228,- atau 81,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan TKPK sebanyak 1 Dokumen.
8. Program Kerjasama Pembangunan
- a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 247.899.400,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 149.780.300,- atau 60,42% dengan capaian kinerja 60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Koordinasi yang

dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 Tahun, Jumlah Dokumen TJSP sebanyak 1 Laporan dan Jumlah Buletin Pemecahan masalah-masalah Daerah sebanyak 1 Buletin.

9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

dialokasikan dana sebesar Rp. 101.259.370,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 100.994.193,- atau 99,74% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Koordinasi dalam rangka rencana tata ruang perbatasan dan Program Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebanyak 1 Kali.

10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

a. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 76.450.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.028.200,- atau 99,45% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terkoordinasinya Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan sebanyak 6 Kali.

b. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

dialokasikan dana sebesar Rp. 132.843.050,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 127.554.991,- atau 96,02% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian sebanyak 1 Dokumen.

c. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

dialokasikan dana sebesar Rp. 199.500.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 169.540.401,- atau 84,98% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Perencanaan Pusat-Pusat Industri sebanyak 1 Dokumen.

d. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 295.278.300,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 239.880.796,- atau 81,24% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Perencanaan akses air bersih/minum dan sanitasi di Kota Dumai sebanyak 2 Dokumen.

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

dialokasikan dana sebesar Rp. 127.928.550,- dari dana yang telah dialokasikan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 127.880.600,- atau 99,96% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen dan data-data hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaann Fsik dan Prasaran Wilayah sebanyak 1 Dokumen.

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

dialokasikan dana sebesar Rp. 167.955.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 130.590.000,- atau 77,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Forum OPD sebanyak 1 Kegiatan.

- b. Kegiatan Penetapan RPJMD

dialokasikan dana sebesar Rp. 488.100.000,-, dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 347.610.757,- atau 71,22% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 yang tersusun sebanyak 1 Dokumen.

- c. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

dialokasikan dana sebesar Rp. 242.920.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 235.558.900,- atau 96,97% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RKPD yang disusun sebanyak 75 Dokumen/Buku dan Jumlah Dokumen perubahan RKPD yang disusun sebanyak 75 Dokumen/Buku.

- d. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

dialokasikan dana sebesar Rp. 282.720.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 244.359.100,- atau 86,43% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan pra dan pasca Musrenbang Provinsi Riau dan keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2018 sebanyak 3 Kali.

- e. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 199.586.000,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 180.213.415,- atau 90,29% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah LAKIP yang disusun dan disampaikan ke Mendagri dan Pemerintah Provinsi sebanyak 1 Dokumen.

- f. Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

dialokasikan dana sebesar Rp. 249.405.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 237.241.769,- atau 95,12% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.

- g. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dialokasikan dana sebesar Rp. 184.465.000,- , dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 132.210.000,- atau 71,67% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD sebanyak 4 Dokumen, Jumlah Koordinasi Monev ke Provinsi Riau sebanyak 4 Kali dan Jumlah Koordinasi Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebanyak 4 Kali.
- h. Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
dialokasikan dana sebesar Rp. 170.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 94.765.861,- atau 55,74% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 100 Orang.
- i. Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai
dialokasikan dana sebesar Rp. 226.610.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 38.346.700,- atau 16,92% dengan capaian kinerja 20%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaporan RAD-PK dengan target 1 dokumen. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2018 adalah 1 dokumen, namun hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan yang secara fisik terlaksana hanya dalam bentuk koordinasi. Sehingga secara kualitas fisik kegiatan ini hanya terlaksana 20%. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya SE Mendagri terkait Evaluasi RAD-PK.
- j. Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals
dialokasikan dana sebesar Rp. 237.000.000,- , dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 147.854.200,- atau 62,39% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG's sebanyak 1 Dokumen.
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- a. Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

dialokasikan dana sebesar Rp. 187.223.700,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 172.350.766,- atau 92,06% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

dialokasikan dana sebesar Rp. 107.237.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 76.037.000,- atau 70,91% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan Monev sebanyak 1 Dokumen.

13. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

dialokasikan dana sebesar Rp. 192.312.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 182.488.600,- atau 94,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya sebanyak 90 %.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

dialokasikan dana sebesar Rp. 137.824.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 125.910.000,- atau 91,36% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

dialokasikan dana sebesar Rp. 185.640.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 177.957.100,- atau 95,86% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan dan SDM sebanyak 90 %.

d. Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan

dialokasikan dana sebesar Rp. 181.240.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 172.833.900,- atau 95,36% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase koordinasi perencanaan bidang aparatur sebanyak 90 %.

e. Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 167.163.829,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 44.780.000,- atau 26,79% dengan capaian kinerja 60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen data dan informasi Perencanaan Pembangunan bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan sebanyak 1 Dokumen.

14. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

di alokasikan dana sebesar Rp. 276.397.490,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.678.720,- atau 56,69% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan muatan Teknis tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang sebanyak 2 Dokumen.

b. Survey dan Pemetaan

dialokasikan dana sebesar Rp. 138.086.290,- dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 137.221.630,- atau 99,37% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai; Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan data spasial; Terciptanya Sistem Informasi Pemetaan sebanyak 1 Dokumen.

PERMASALAHAN

Permasalahan lain yang berkenaan dengan Pencapaian Kinerja Utama Bappeda adalah :

1. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebanyak 96,6%. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 100%;
2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Pada tahun 2018, sebanyak 15,1% usulan masyarakat tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 20%.

SOLUSI

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bappeda Kota Dumai tahun 2018, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
2. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun; Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan.

23. URUSAN KEUANGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.53. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (dalam %)
Persentase belanja pendidikan	20%	25,86%	129,3%
Persentase belanja kesehatan	10%	21,34%	213,4%
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Hasil Opini BPK	WDP	WTP	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2018 dapat disampaikan adalah, sebagai berikut:

1. Persentase belanja pendidikan (20%)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.142.375.774,98. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, adapun persentase belanja pendidikan sebesar 20% yaitu Rp. 228.475.191.355. Dalam realisasinya

alokasi belanja pendidikan sebesar Rp. 295.379.833.169 atau sebesar 25,86%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja pendidikan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 20%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 129,3%.

2. Persentase belanja kesehatan

Alokasi persentase belanja kesehatan 10% sebesar Rp. 114.237.595.677,49. Dalam realisasinya alokasi belanja kesehatan sebesar Rp. 243.774.503.865 atau sebesar 21,34%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja kesehatan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 10%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 213,4%.

3. Penetapan APBD

Penetapan APBD yang ditargetkan dalam indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2018 yaitu Penetapan APBD tepat waktu. Adapun realisasinya yaitu terlaksananya penetapan APBD tepat waktu yaitu penetapan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember 2018 yang tepatnya pada tanggal 26 Desember 2018.

4. Hasil Opini BPK

Hasil Opini BPK yang ditargetkan dalam indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2018 yaitu WDP. Dalam realisasinya hasil opini BPK yang diperoleh pada tahun 2018 yaitu WTP untuk Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2017. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.679.021.972,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung Rp. 19.199.058.339,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.479.963.633,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 17.461.096.287,- atau dengan persentase sebesar 90,95% dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp. 9.966.412.639,- atau dengan persentase sebesar 79,86%. Adapun secara keseluruhan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2018 sebesar Rp. 27.427.508.926,- atau sebesar 86,58%.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 2.908.386.928,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 420.646.958,- atau dengan persentase sebesar 85,54%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2018 sejumlah 13 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan sebesar Rp. 74.603.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 74.160.082,- atau sebesar 99,41%. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jasa surat menyurat sejumlah 12 bulan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp. 94.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.598.802,- atau sebesar 34,50%. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sejumlah 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 34.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.649.140,- atau sebesar 94,47%. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor sejumlah 12 bulan.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp. 121.712.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.089.600,- atau sebesar 97,02%. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah ruangan yang bersih dan nyaman sejumlah 12 bulan.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dianggarkan sebesar Rp. 94.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.013.000,- atau sebesar 66,43%. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja capaian kegiatan

- sebesar 100% dengan capaian jumlah jasa perbaikan peralatan kerja sejumlah 12 bulan.
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 138.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.601.080,- atau sebesar 99,99%. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah alat tulis kantor yang diperlukan sejumlah 12 bulan.
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 122.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.920.000,- atau sebesar Rp. 78,33%. Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah barang cetak dan penggandaan yang diperlukan sejumlah 12 bulan.
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dianggarkan sebesar Rp. 85.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.022.500,- atau sebesar 89,81%. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan sejumlah 12 bulan.
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 985.014.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 708.339.900,- atau sebesar 71,91%. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan sejumlah 12 bulan.
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 19.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.680.000,- atau sebesar 85,98%. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah bahan bacaan yang tersedia sejumlah 12 bulan.
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 36.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.235.000,- atau sebesar 96,36%.

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat dan tamu sejumlah 11 bulan.

l. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan sebesar Rp. 962.656.748,- dengan realisasi sebesar Rp. 960.555.866 atau sebesar 99,78%. Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sejumlah 12 bulan.

m. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor dianggarkan sebesar Rp. 137.715.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.875.000 atau sebesar 97,94%. Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah tenaga keamanan kantor sejumlah 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.012.812.881,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 818.547.403 atau sebesar 80,82%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018 sejumlah 4 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 470.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 437.289.789,- atau sebesar 93,04%. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah kendaraan dinas/operasional sejumlah 2 unit.

b. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan pengadaan mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 143.812.881 dengan realisasi sebesar Rp. 72.410.000,- atau sebesar 50,35%. Kegiatan pengadaan mebeleur capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah mebeleur yang tersedia sejumlah 1 paket.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 99.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.815.000,- atau sebesar 99,81%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pemeliharaan gedung sejumlah 1 paket.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.032.614,- atau sebesar 70,01%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sejumlah 12 bulan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 240.499.990,- atau sebesar 96,20%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2018 sejumlah 1 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 240.499.990,- atau sebesar 96,20%. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sejumlah 20 Orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 214.842.580,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 207.109.172,- atau 96,40%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 sejumlah 4 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp. 5.107.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.028.000,- atau sebesar Rp. 98,45%. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan sebesar 100%

dengan capaian jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sejumlah 1 dokumen.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dianggarkan sebesar Rp. 16.254.590,- dengan realisasi anggaran sebesar 15.705.150,- atau sebesar 96,62%. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan keuangan semesteran sejumlah 1 laporan.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dianggarkan sebesar Rp. 18.480.990,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.891.950,- atau sebesar 91,40%. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan keuangan akhir tahun sejumlah 1 laporan.

d. Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.484.072 atau sebesar 96,85%. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan sejumlah 1 laporan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 8.093.921.244,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.212.516.104,- atau 76,76%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja

Kegiatan penyusunan standar belanja, dianggarkan sebesar Rp. 560.000.000,- realisasi sebesar Rp. 497.620.886,- atau sebesar 88,84%. Kegiatan penyusunan standar belanja pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah buku standar harga barang dan jasa sebanyak 1 buku.

Adapun hasil kegiatan penyusunan analisa standar belanja berupa dokumen analisa standar belanja dalam rangka mewujudkan sistem integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD Kota Dumai.

b. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan penyusunan standar satuan harga, dianggarkan sebesar Rp. 173.392.380,- realisasi sebesar Rp. 158.625.380,- atau sebesar 91,48%. Kegiatan penyusunan standar satuan harga tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah buku standar harga barang dan jasa sebanyak 1 laporan.

Adapun hasil kegiatan penyusunan standar satuan harga berupa buku standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan pedoman penetapan harga barang dalam penyusunan APBD Tahun 2019.

c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.100.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.024.804.314,- atau 93,16%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang APBD Tahun 2019 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.180.000.000,- realisasi sebesar Rp. 119.564.702,- atau 66,42%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 622.000.000,- realisasi sebesar Rp. 201.360.035,- atau 32,37%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018.

- f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp. 89.023.550,- atau 59,35%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- g. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp. 719.212.753,- realisasi sebesar Rp. 447.206.794,- atau 62,18%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perda.

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.

h. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.151.597.061,- realisasi sebesar Rp. 131.297.496,- atau 86,61%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perwa.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2017

i. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp.475.800.000,- realisasi sebesar Rp. 378.993.511,- atau 79,65%. Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan sebanyak 15 orang.

Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang aturan pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya sosialisasi aturan baru dibidang keuangan sejumlah 15 orang.

j. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dianggarkan sebesar Rp. 240.897.000,- realisasi sebesar Rp. 236.959.071,- atau 98,37%. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah peserta bimbingan teknis dan sosialisasi manajemen /aset barang milik daerah sejumlah 240 orang.

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah yaitu mengikutsertakan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dalam bimbingan teknis pengelolaan barang milik

daerah serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugasnya.

k. Kegiatan inventarisasi aset

Kegiatan inventarisasi Aset dianggarkan sebesar Rp. 251.997.200,- realisasi sebesar Rp. 242.477.358,- atau 96,22%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program dokumen penelusuran gedung dan bangunan, penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 2 dokumen. Kegiatan inventarisasi Aset menghasilkan dokumen penelusuran gedung/ bangunan yang pendanaannya bersumber APBD dan APBD Provinsi.

l. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan pengamanan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 93.750.000,- realisasi sebesar Rp. 93.750.000,- atau 68,64%. Kegiatan pengamanan barang milik daerah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program Peningkatan Pengamanan Fisik Terhadap Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan .

Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pengamanan aset dengan tujuan sesuai peruntukkan dan penggunaannya.

m. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.234.997.650,- realisasi sebesar Rp. 188.807.622,- atau 80,34%. Kegiatan penghapusan barang milik daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah terlaksananya penghapusan barang milik daerah sebanyak 36 OPD.

Kegiatan penghapusan barang milik daerah merupakan kegiatan untuk melakukan penghapusan barang milik daerah pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Dengan kegiatan ini diharapkan tercapainya efisiensi penggunaan barang milik daerah yang terorganisir.

n. Kegiatan Penertiban Aset

Kegiatan Penertiban Aset dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- realisasi sebesar Rp. 62.609.875,- atau 35,78%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah penertiban aset

berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD Baru sebanyak 36 OPD.

Kegiatan penertiban aset menghasilkan kegiatan penertiban aset terhadap 36 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Dumai dengan maksud menertibkan seluruh aset milik Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan peruntukannya.

o. Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.137.708.110,- atau 91.81%. Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian Program jumlah data PNS yang terbaru sebanyak 4661 orang.

Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan kegiatan pendataan dalam rangka pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Dumai

p. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- realisasi sebesar Rp.149.813.900,- atau 49,94%. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan sejumlah 1 paket.

Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen keuangan Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi keuangan.

q. Kegiatan Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU

Kegiatan Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU dianggarkan sebesar Rp.106.000.000,- realisasi sebesar Rp.99.017.481,- atau 93,41%. Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU tingkat pencapaiannya sebesar 100% dengan capaian program adalah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebanyak 36 OPD.

Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU merupakan kegiatan yang setiap tahun dianggarkan. Adapun kegiatan ini menghasilkan Dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pada 36 OPD di Kota Dumai.

r. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 135.575.500,- realisasi sebesar Rp. 94.238.950,- atau 69,51%. Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah (1) Register SP2D BL dan BTL Perbulan sejumlah 1.500 lembar; (2) Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sejumlah 36 buku; (3) Register SP2D per SKPD sejumlah 3.500 lembar.

s. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dianggarkan sebesar Rp. 92.800.000,- realisasi sebesar Rp. 92.141.250,- atau 99,29%. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah (1) Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan sejumlah 1 laporan; (2) Rekapitulasi daftar mutasi barang sejumlah 1 laporan.

Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan menghasilkan dokumen barang milik Pemerintah Kota Dumai setiap tahunnya . Adapun dokumen yang dihasilkan sejumlah 2 dokumen yaitu (1) laporan barang milik daerah tahunan; dan (2) rekapitulasi daftar mutasi barang.

t. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD

Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD dianggarkan sebesar Rp.196.655.150,- realisasi sebesar Rp. 196.638.750,- atau 99,99%. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah jumlah OPD yang dilaksanakan rekonsiliasi sejumlah 36 OPD.

Kegiatan rekonsiliasi aset merupakan kegiatan rekon barang milik daerah diseluruh OPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi aset OPD yaitu agar pengelolaan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan.

u. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dianggarkan sebesar Rp.234.200.000,- realisasi sebesar Rp.221.182.709,- atau

94,44%. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) sebesar 100%, dengan capaian program sistem informasi barang milik daerah (SIM-BMD) dan Entry SIMDA BMD sejumlah 1 paket.

Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang milik daerah Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

v. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.143.510.620 realisasi sebesar Rp.61.717.000,- atau 43,01%. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan capaian program terlaksananya penilaian aset/barang daerah sejumlah 36 OPD.

Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah merupakan kegiatan penilaian aset/barang milik daerah yang dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Penilaian aset/barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penghapusan aset sehingga dilakukan penilaian aset terlebih dahulu.

w. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 185.000.000,- realisasi sebesar Rp.177.498.800,- atau 95,95%. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian program jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim sejumlah 15 orang.

Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah merupakan kegiatan yang mengirimkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terhadap aturan dibidang aset. Adapun kegiatan ini dengan mengirimkan sejumlah 15 orang yang dimaksudkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah memahami semua siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

x. Kegiatan Penyusunan standar biaya

Kegiatan Penyusunan standar biaya dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- realisasi sebesar Rp.184.518.728,- atau 92,26%. Kegiatan Penyusunan standar biaya sebesar 100% dengan capaian program buku standar biaya sejumlah 100 buku.

Kegiatan penyusunan standar biaya menghasilkan buku standar biaya tahun anggaran 2019. Buku standar biaya tahun anggaran 2019 digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Buku tersebut dibagikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Dumai.

y. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.257.234.375,- realisasi sebesar Rp.247.826.175,- atau 96,34%. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD sebesar 100% dengan capaian program jumlah skpd dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan sejumlah 36 SKPD.

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulannya kepada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dimaksudkan mensinkronkan antara realisasi belanja dan pendapatan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

z. Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung

Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,- realisasi sebesar Rp.124.444.535,- atau 99,56%. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung sebesar 100% dengan capaian program Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung sejumlah 8 laporan.

Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dimaksudkan mensinkronkan antara pengeluaran yang sudah dikeluarkan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya

aa. Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi

Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp.225.000.000,- realisasi sebesar Rp.213.123.661,- atau 94,72%. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan provinsi sebesar 100% dengan capaian program Data dana pusat dan provinsi sebanyak 1 laporan.

Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi untuk mensinkronkan data dana transfer pusat dan provinsi baik sifatnya dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak dan non pajak

bb. Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.137.805.200,- realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan capaian 0% dengan kata lain kegiatan tidak terlaksana.

Adapun alasan tidak terlaksananya kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah karena kegiatan ini akan dilaksanakan setelah adanya perubahan APBD 2018 dengan maksud dilakukan pergeseran anggaran. Namun dengan diadakannya Perubahan APBD 2018, maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan

cc. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.131.363.925,- realisasi sebesar Rp.77.347.500,- atau 59,02%. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dengan capaian sebesar 100% dengan capaian program jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai sejumlah 1 laporan.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai Tahun 2017 dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

dd. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.106.475.040,- realisasi sebesar Rp.53.990.000,- atau 50,71%. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian program jumlah laporan keuangan semesteran kota Dumai sejumlah 1 laporan.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Dumai Tahun 2018 dalam rangka persiapan penyusunan laporan akhir tahun Kota Dumai Tahun 2018

ee. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.238.960.390,- realisasi sebesar Rp.237.707.961,- atau 99,48%. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai sebesar 100 % dengan capaian program jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai sejumlah 1 laporan.

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR). Kegiatan TP-TGR dimaksudkan untuk penyelesaian kerugian negara

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai tahun 2016 – 2021 urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.54. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (Dalam %)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	18 %	24,01 %	133,39%
2.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	42 %	52,16 %	124,19%
3.	Persentase Peningkatan Pajak Daerah pada Bapenda	70 %	134,59 %	192,27%

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran di atas sebagai berikut :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 yaitu sebesar 18% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu sebesar 24,01% atau 133,39%.

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 yaitu sebesar 42% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu sebesar 52,16% atau 124,19%.

3. Persentase Peningkatan Pajak Daerah pada Bapenda

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 yaitu sebesar 70% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu sebesar 134,59% atau 192,27%.

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Dearah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.289.092.685,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.352.026.285,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.937.066.400,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.327.038.937,- atau 108,59% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.649.354.844,- atau 82,32%

Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2018 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- atau 50%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 410.280.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 341.624.254,- atau 83,27%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 289.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 260.160.560,- atau 89,93%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 99,92% artinya terpenuhinya target terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebesar 89,93%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 317.243.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 312.800.000,- atau 98,60%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran

100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 205.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 96.010.000,- atau 46,62%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan.

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 376.463.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 367.176.500,- atau 97,53%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 196.398.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 189.327.000,- atau 96,40%. Adapun tingkat nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target jumlah barang cetakan dalam 1 tahun.

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.609.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20.325.000,- atau 54,04%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya pemakaian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.

i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 700.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 534.786.410,- atau 76,40%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 95,50% artinya terpenuhinya target tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 76,40%.

- j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 28.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 26.380.000,- atau 92,56%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun.
- k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 83.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 33.925.000,- atau 40,82%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jumlah makan dan minum rapat dan tamu dalam 1 tahun.
- l. Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 757.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 756.368.356,- atau 99,85%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 224.142.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 224.076.000,- atau 99,97%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa tenaga keamanan kantor selama 12 bulan.
- n. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 170.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 170.400.000,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya jasa administrasi perkantoran selama 12 bulan
6. Program Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan:
- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 256.140.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 255.678.000,- atau 99,82%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran

100% artinya terlaksananya pembangunan gedung kantor sebanyak 2 paket, yaitu (1) terlaksananya pembangunan sumur bor, dan (2) tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan gedung kantor.

b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 470.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 463.467.100,- atau 98,61%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya penunjang kelancaran aktivitas kantor, berupa 1 unit mobil operasional.

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 79.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.850.000,- atau 11,20%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 50% artinya tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 2 paket, yaitu: (1) AC dan (2) tangga lipat.

d. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 80.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.168.000,- atau 72,71%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 50% artinya terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket, yaitu berupa kursi kerja.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 99.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 98.458.000,- atau 99,45%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 paket, yaitu pemeliharaan drainase, toilet dan gazebo.

f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 199.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 198.675.000,- atau 99,84%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya interior gedung kantor sebanyak 1 paket, yaitu berupa partisi ruangan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan:

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 175.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 104.500.000,- atau 59,54%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 58,97% artinya terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sebanyak 23 orang dari yang ditargetkan sebanyak 39 orang.

b. Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 52.400.000,- atau 87,33%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur sebanyak 12 kali

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 58.934.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 53.610.500,- atau 90,97%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.757.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 36.857.900,- atau 97,62%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen.

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 114.073.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 106.948.600,- atau 93,75%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersusunnya Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2016-2021, Renja Tahun 2019, dan RKA SKPD Tahun 2019 sebanyak 3 dokumen

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 483.621.800,- dan direalisasikan sebesar Rp 470.624.615,- atau 97,31%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pelayanan dan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selama 12 bulan.

b. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 445.830.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 379.364.688,- atau 85,09%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi pajak daerah melalui (1) iklan radio, (2) spanduk dan baleho yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; (3) pengumuman melalui media cetak lokal dengan total sebanyak 3 (tiga) media.

c. Kegiatan Monitoring penyampaian SPPT PBB.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 468.419.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 356.378.650,- atau 76,08%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB pada 7 kecamatan.

d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 105.119.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 101.635.667,- atau 96,69%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.

e. Kegiatan Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 389.643.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 207.760.800,- atau 53,32%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya wajib pajak dan objek pajak yang dilakukan penagihan.

f. Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 299.773.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 281.290.640,- atau 93,3%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 116,67% artinya terpenuhinya target terlaksananya jumlah Wajib Pajak dan Retribusi yang didata sebanyak 3.500 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR.

g. Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 165.961.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 154.229.455,- atau 92,93%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya rekonsiliasi perbedaan data salah saji, salah pencatatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 4 Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2018.

h. Kegiatan Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak / Retribusi Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 118.220.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 112.140.000,- atau 94,86%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 298% artinya terpenuhinya target peningkatan pelayanan keberatan pajak/retribusi daerah sebanyak 149 berkas dari target awal sebanyak 50 berkas.

i. Kegiatan Pemilihan Wajib Pajak Terbaik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 186.761.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 173.957.000,- atau 93,14%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya pemilihan objek pajak terbaik sebanyak 6 Objek Pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN dan Pajak Reklame.

j. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PBB.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 297.626.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 207.297.000,- atau 69,65%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sosialisasi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB P2) kepada masyarakat Kota Dumai pada 7 Kecamatan.

- k. Kegiatan Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 638.101.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 534.512.421,- atau 83,77%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terpeliharanya aplikasi SISMIOP selama 12 bulan.

- l. Kegiatan Penyusunan Basis Data OP PBB - P2.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 633.035.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 378.032.184,- atau 59,72%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Database PBB P2 yang valid sebanyak 2 paket, yaitu updating basis data PBB P2 pada Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota.

- m. Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 252.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 247.472.778,- atau 97,90%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya data hasil verifikasi penetapan pajak sebanyak 500 WP.

- n. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 180.761.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 69.911.500,- atau 38,68%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak reklame dengan sasaran 39 titik di wilayah Kota Dumai.

- o. Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 397.623.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 355.155.780,- atau 89,32%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak sebanyak 4 kali pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan Pajak Hotel secara langsung dengan wajib pajak, (2) Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ),

- (3) Pemeriksaan Pajak Hiburan, dan (4) Pemeriksaan Pajak Restoran dan Rumah Makan.
- p. Kegiatan Validasi Data Piutang PBB P2.
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 303.846.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 222.352.921,- atau 73,18%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya data piutang PBB P2 yang valid pada 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Timur.
- q. Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 269.271.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 242.755.500,- atau 90,15%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 5 Draft Perubahan Peraturan Daerah, yaitu: (1) Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, (2) Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, (3) Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, (4) Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, dan (5) Draft Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- r. Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 123.355.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 53.330.000,- atau 43,23%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 103,33% artinya terpenuhinya target terselenggaranya monitoring penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 4.650 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 4.500 SKPD/SKRD.
- s. Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 335.200.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 284.478.024,- atau 84,87%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 300% artinya terpenuhinya target terlaksananya penilaian khusus objek pajak non standar sebanyak 30 Objek Pajak.

t. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 115.090.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 97.640.000,- atau 84,84%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan target terpenuhinya sarana promosi dan informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada kegiatan Dumai Expo Kota Dumai Tahun 2018 sebanyak 1 paket.

u. Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 253.586.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 177.203.032,- atau 69,88%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 7 kelurahan di wilayah Kota Dumai, yaitu: (1) Kelurahan Sukajadi, (2) Kelurahan Dumai Kota, (3) Kelurahan Pangkalan Sesai, (4) Kelurahan Jayamukti, (5) Kelurahan Bintan, (6) Kelurahan Lubuk Gaung, dan (7) Kelurahan Bangsal Aceh.

v. Kegiatan Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 265.010.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 261.147.916,- atau 98,54%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target terlaksananya sistem online pembayaran pajak sebanyak 1 paket aplikasi arsip pajak daerah elektronik.

w. Kegiatan Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 64.426.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 63.385.700,- atau 98,38%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Prediksi APBD Murni Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen Prediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

x. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang PBB P2

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 336.369.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 155.789.805,- atau 46,32%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran

73,85% artinya petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 sebanyak 48 orang

y. Kegiatan Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 82.830.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 82.600.000,- atau 99,72%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya 1 buah Dokumen SOP Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

z. Kegiatan Forum Group Discussion (FGD)

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 189.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 149.873.822,- atau 79,09%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya rapat koordinasi PBB dengan hasil 1 laporan

â. Kegiatan Verifikasi BPHTB

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 53.562.766,- atau 53,56%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 10% artinya tersedianya data PBB yang valid sebanyak 30 orang

24. URUSAN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai atau Revisi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 4.55 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Dumai Tahun 2018**

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Capaian (dalam %)
Persentase pelanggaran disiplin	0.28	0.05	17.85
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	58	58.83	101.43
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32 orang	31 orang	96,88%

1. Persentase pelanggaran disiplin

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumaisebesar 0.28% dan capaian indikator ini sampai tahun

2018 sebesar 0.05%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM aparatur melalui pembinaan disiplin dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan produk hukum berupa keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2018, kasus pelanggaran disiplin PNS yang diproses sebanyak 4 kasus tetapi hanya 2 kasus yang terselesaikan hingga menjadi SK Penjatuhan Hukuman Disiplin

2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Pelatihan Kota Dumai sebesar 58% dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 adalah 101.43%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan “Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan” adapun kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural yang akan berperan dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Pada tahun 2018, kegiatan ini diikuti oleh 17 orang dengan rincian yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 2 Orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 15 orang

3. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai sebanyak 32 orang dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 adalah 96.88%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan “Assessment Center Pemerintah Kota Dumai” adapun kegiatan ini bertujuan untuk memprediksi kinerja dari assessment bila ia menduduki jabatan tertentu dengan cara menyusun profil tentang kekuatan dan kebutuhan pengembangan yang diperlukannya sehingga dari hasil penilaian kompetensi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Pada tahun 2018, kegiatan ini hanya sampai tahap evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi dikarenakan tidak adanya anggaran perubahan maka pelaksanaan proses promosi maupun rotasi tidak terealisasi sehingga terdapat kekosongan jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi 31 orang

Keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase Pelanggaran Disiplin” disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan PNS Kota Dumai semakin memahami serta mentaati aturan mengenai kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana peran serta Kepala Daerah maupun Kepala OPD yang turut berperan aktif dalam penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sedangkan keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural” disebabkan karena antusiasnya pejabat eselon yang menduduki eselon II dan III dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan walaupun masih terdapat keterbatasan dalam hal penganggaran sehingga jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat terbatas.

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.889.828.200,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.852.613.100,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.037.215.100,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.516.216.087,- atau 88,21% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.297.310.767,- atau 85,31%. Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp 1.743.730.600 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.592.416.248 atau sebesar 91,32% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 117.240.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.913.400,- dan atau sebesar 86,07% adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.440.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.920.000,- dan atau sebesar 59,67% adapun indikator kinerja keluaran adalah pembayaran rekening listrik dan air dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.

- 44.460.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.460.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 173.228.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 153.268.000,- dan atau sebesar 88.48% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga jasa kebersihan yang dibayar dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.300.000,- dan atau sebesar 88.44% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dengan target 27 unit atau capaian realisasi 92.59%;
- f. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 134.482.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 128.446.510,- dan atau sebesar 95.537% adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 146.812.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 131.797.500,- dan atau sebesar 89.77% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.436.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.936.500,- dan atau sebesar 98.30% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan peralatan listrik dan elektronik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%;

- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 242.650.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 208.422.468,- dan atau sebesar 85.89% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 22 unit atau capaian realisasi 100%;
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 36.390.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.840.000,- dan atau sebesar 68.26% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan dengan target 10 jenis koran atau capaian realisasi 100%;
- k. Penyediaan bahan logistik kantor
- l. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.800.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.800.000,- dan atau sebesar 100%. adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan makan dan minum kegiatan di BKPP dengan target 11 bulan atau capaian realisasi 100%;
- m. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.215.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- dan atau sebesar 95.87% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dengan target 11 bulan atau capaian realisasi 100%;
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 473.976.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 473.806.870,- dan atau sebesar 99.96% adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target 58 orang atau capaian realisasi 100%;
- o. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 167.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.800.000,- dan atau sebesar 87.80% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga

keamanan kantor dengantarget 8 orang atau capaian realisasi100%

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp 409.811.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.398.405.190,- atau sebesar 97.22% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ruangan yang terpeliharadengantarget 1 gedung atau capaian realisasi 100%;

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.286.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.030.190,- dan atau sebesar 94.35% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara dengan target 5 unit atau capaian realisasi 100%;

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.525.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.375.000,- dan atau sebesar 99.51% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dengantarget 79 unit atau capaian realisasi 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp 85.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.64.505.650,- atau sebesar 75.89% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengelolaan (LHKPASN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.505.650,- dan atau sebesar 75.89% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengumpulkan LHKPN dan LHKASN sebanyak 85orang dengan tingkat capaian sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp 199.335.000,- dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp.135.344.796,- atau sebesar 67.90% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.335.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 135.344.796,- dan atau sebesar 67.90% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 25 orang atau capaian realisasi 100%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp 59.490.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.865.000,- atau sebesar 83.82% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.845.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.600.000,- dan atau sebesar 72.17% adapun indikator kinerja keluaran adalah laporan capaian kinerja dan keuangan dengan target 2 dokumen atau capaian realisasi 100%;

b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.290.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.600.000,- dan atau sebesar 83.49% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya pelaporan prognosis anggaran BKD dengan target 2 dokumen atau capaian realisasi 100%;

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.355.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.665.000,- dan atau sebesar 93.06% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan akhir tahun dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 100%

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Rp2.539.848.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.056.773.883,- atau sebesar 80.98% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Seleksi Penerimaan Calon PNS

- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 352.610.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 222.019.216,- dan atau sebesar 62.96% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi dari pelamar umum dengan target 5000 orang atau capaian realisasi 100%
- b. Penempatan PNS
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 115.022.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.757.000,- dan atau 58.913% adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase penempatan PNS sesuai formasi jabatan dan kompetensi dengan target 80% atau capaian realisasi 100% ;
- c. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.874.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.001.107,- atau 97.98% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang naik pangkat dengan target 700 orang atau capaian realisasi 133%;
- d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 356.730.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 338.246.908,- atau 94.82% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi yang akurat dan berkelanjutan dengan target 4000 PNS atau capaian realisasi 100%.
- e. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 52.445.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.688.824,- atau 94.74% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS penerima Satya Lencana Karya Satya dengan target 343 orang atau capaian realisasi 100%;
- f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 37.210.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang diperkirakan mengalami kasus dengan target 5 kasus atau capaian realisasi 100%;
- g. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 274.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 230.065.665,- atau 83.90% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar dengan target 7 orang atau capaian realisasi 100%;
- h. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 472.690.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 462.432.155,- atau 97.83% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang lulus Diklat PIM II dan Diklat PIM III dengan target 17 orang atau capaian realisasi 100%.
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 135.825.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.600.000,- atau 27.68% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SKPD/Unit Kerja yang dimonitoring dengan target 37 SKPD atau capaian realisasi 100%;
- j. Pelaksanaan sumpah/janji PNS
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.801.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.684.800,- atau 63.62% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang diangkat sumpah dengan target 200 orang atau capaian realisasi 100%
- k. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 202.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.300.000,- atau 97.67% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai dengan target 4000 PNS atau capaian realisasi 100%;
- l. Assessment Center Pemerintah Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 219.717.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 193.018.208,- atau 87.85% adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan target 100% atau capaian realisasi 100%;

m. Peringatan Hari KORPRI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.722.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.960.000,- atau 50.66% adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase ASN yang mengikuti peringatan hari KORPRI dengan target 80% atau capaian realisasi 100%.



BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2018

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/ Kota atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemberian tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Dumai hanya menerima tugas pembantuan 1 (satu) OPD yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai.

Pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan. Adapun rincian Program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2018 Nomor SP-DIPA-018.04.4.099315/2018 revisi keempat tanggal 28 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 050/SK/DIS-TPH-BUN/556 tanggal 03 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2018. Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Sayuran Dataran Rendah Tahun Anggaran 2018. Tugas pembantuan ini terdiri dari 2 program yakni ; Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan alokasi anggaran Rp. 773.090.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.754.552.000,- atau 97,60%. Selanjutnya Program Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp. 883.410.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 725.330.000,- atau 82.10%.

B. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2018 Nomor SP-DIPA-018.03.4.099314/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 824/DISTPHBUN-PERENC/641 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun Anggaran 2018. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 284.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.284.500.000,- atau 100%.

C. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan

Tugas pembantuan ini dengan Nomor : SP-DIPA-018.11.3.099426/2018 tanggal 07 Desember 2017, merupakan dana tugas pembantuan yang dititipkan melalui kegiatan dekosentrasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau yang kegiatannya dialokasikan untuk Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau Nomor : OT.210/01/SATKER-BKPR/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Anggaran/Kegiatan Dekonsentrasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau di Kota Dumai. Tugas pembantuan ini terdiri dari

1 program yakni ; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 287.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 286.200.000,- atau 99,7% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 238.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238.000.000,- Atau 99,87% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dengan target 4 Desa/Kelompok dan realisasi 4 Desa/Kelompok.

b. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.700.000,- Atau 99,00% dari anggaran

c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.18.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.500.000,- Atau 98,930% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Dukungan manajemen dan administrasi dengan target 12 bulan layanan dan realisasi 12 bulan layanan.



BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2018

BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2018

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- a) SMA Negeri 1 Padang Panjang
- b) Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD)
- c) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Dasar Hukum

- a) Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor : 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011.
- b) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) Nomor : 40/KLH/2014 Tanggal 17 Desember 2014
- c) Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan Nomor 5/DINKES/2016 Tanggal 05 April 2016

3. Bidang Kerjasama

- a) Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School.
- b) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+).

- c) Bidang Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat.

4. Nama Kegiatan

- a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah :
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Muatan Lokal
 - Pertukaran Siswa
 - Pertukaran Guru
- b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah :
- Persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Program REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
 - Integrasi strategi daerah REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau.
 - Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau.
 - Pengembangan berbagai program dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau.

- Perubahan paradigma dan budaya kerja diseluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Riau.
 - Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD +.
 - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (terutama lahan gambut)
- c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah:
- Memfasilitasi Pihak kedua dalam pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat sampai dengan penyampaian hasil seleksi kepada Pihak Kedua.
 - Melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP oleh Kepala Badan kepegawaian Negara dilakukan secara bersama-sama para pihak; dan.
 - melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan
 - menyampaikan usulan rincian kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat kepada Menpan dan rb dan Kepala BKN
 - melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomor Induk Pegawai oleh Kepala BKN dilakukan secara bersama-sama
 - menetapkan kelulusan dan mengumumkan kelulusan dengan SK Gubernur/Walikota berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Pihak Kesatu
 - menetapkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS di Lingkungan Pemko Dumai
 - menempatkan dan mendayagunakan CPNS di Lingkungan Pemko Dumai sesuai dengan penetapan kebutuhan

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
- b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
- c) Dinas Kesehatan Kota Dumai

6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 71 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 40 orang, D-III sebanyak 3 orang, D-II sebanyak 1 orang, SMA sederajat sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.1.

**Tabel. 6.1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai**

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	4
3.	Pembina	IV/a	20
4.	Penata Tk.I	III/d	6
5.	Penata	III/c	12
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	9
7.	Penata Muda	III/a	9
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	6
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
Jumlah			71

b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebanyak 43 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 5 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 22 orang berpendidikan sarjana (S1) PNS dan 3 orang berpendidikan Diploma (D3), 1 orang berpendidikan dimploma 4 (DIV), serta 8 orang berpendidikan SMA dan 4 orang berpendidikan SD.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.2 Dibawah ini:

**Tabel 6.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai**

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina TK.I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	10
4.	Penata	III/c	10
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	5
7.	Pengatur TK.I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	5
9.	Pengatur Muda TK.I	II/b	2
10.	Juru Muda Tk.I	I/d	1
11.	Juru	I/c	2
JUMLAH			43

c) Dinas Kesehatan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan termasuk puskesmas adalah sebanyak 441 orang. Dari 441 orang pegawai tersebut, sebagian besar pegawai, yaitu 365 orang adalah tenaga fungsional, 42 orang sebagai tenaga umum, dan 34 orang memegang jabatan struktural.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.3 Dibawah ini:

Tabel 6.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Pada Tahun 2018

No.	Uraian unit kerja	Golongan				
		I	II	III	IV	Total
1.	Dinas Kesehatan Kota Dumai	0	8	39	6	69
2.	Puskesmas Dumai Kota	0	4	37	2	43
3.	Puskesmas Dumai Barat	0	16	31	2	49
4.	Puskesmas Bukit Kapur	0	11	25	0	36
5.	Puskesmas Sungai Sembilan	0	6	20	1	27
6.	Puskesmas Medang Kampai	0	10	30	-	40
7.	Puskesmas Bukit Timah	0	11	25	-	36
8.	Puskesmas Bumi Ayu	0	21	25	1	47
9.	Puskesmas Jaya Mukti	0	11	31	2	44
10.	Puskesmas Purnama	0	7	19	2	28
11.	Puskesmas Bukit Kayu kapur	0	11	15	0	26
12.	UPTD Gudang farmasi	0	0	3	1	4
		0	0	8	0	8
	TOTAL	0	116	308	17	441

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Daerah Lain

8. Jangka Waktu kerjasama

a) Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan

b) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak

dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah 5(lima) Tahun

c) Jangka Waktu Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah 2(dua) Tahun

9. Hasil Kerjasama

a) Hasil Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah untuk kemajuan bersama dalam bidang Pendidikan

b) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi program REDD+ di Provinsi Riau

c) Hasil Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan Jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat

10. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, sehingga kerjasama yang terjalin dapat berjalan sebagaimana semestinya.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- a) Abadi Megah Promosindo
- b) PT. Inti Griya Prima Sakti
- c) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
- d) PT. Pelindo (Persero)
- e) PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo
- f) PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera

- g) PT. Batam Bahari Sejahtera
- h) PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari
- i) SMP Darma Yudha Pekanbaru
- j) PT. (Persero) PELINDO I Dumai
- k) PT. Pembangunan Dumai
- l) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai
- m) Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- n) PT. Mayatama Solusindo
- o) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- p) Badan Informasi Geospasial
- q) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- r) PT. Asuransi Jiwa Taspen
- s) Yayasan Bhakti Tanoto
- t) Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Taffaquh Fiddin Dumai
- u) PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Pekanbaru
- v) Universitas Gadjah Mada
- w) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

2. Dasar Hukum

- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- b) File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pembangunan Plasa Dumai Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 4 April 2007
- c) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan kurikulum lalu lintas pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008

- d) Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tentang Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009
- e) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009
- f) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011
- g) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- h) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- i) Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011
- j) MoU antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai nomor 379/PEMB/III/2002 dan US.11/1/5/P.I-2002
- k) Perjanjian pengelolaan pantai marina teluk makmur antar Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai Nomor : 281/DISBUDPARPORA/2015 dan Nomor : 117/PDM-DMI/VII/2015-112
- l) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Nomor : 8/Bapenda/2017 dan Nomor : 01.1 PJ/AGA.01.01/ADUM/2017
- m) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor : 14/Dishub/2017
- n) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo Nomor : 27/DPMPTSP/2017 dan Nomor : MY/PKS/1017001

- o) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 21/Bappeda/2017 dan Nomor : MoU-7/PW04/3/2017
- p) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial Nomor : 28/Bappeda/2017 dan Nomor : B-3.4/SESMA/PK/11/2017
- q) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 2/Inspektorat/2017 dan Nomor : MoU-1/PW04/3/2017
- r) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen Nomor : 11/ORG/2018
- s) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto Nomor : TF.JKT/PP/PKS/2018/VII/046 dan Nomor : 16/DISDIKBUD/2018
- t) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Nomor : 12/DISDIKBUD/2018 dan Nomor : 124/B/IAI-TF/VI/2018
- u) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Nomor : 10/ORG/2018
- v) Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada Nomor : 14 /BPKAD/ 2018 dan Nomor : 5067 /UN1.P/ DIT-KAUI/ DN/ 2018
- w) Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai

3. Bidang Kerjasama

- a) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata
- b) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi
- c) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas

- d) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai)
- e) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai)
- f) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional)
- g) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- h) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- i) Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan
- j) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- k) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah pengelolaan pantai marina teluk makmur
- l) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota
- m) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Pinang Kampai Dumai
- n) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai

- o) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Dumai
- p) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai
- q) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pengembangan manajemen Pemerintah Daerah
- r) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah Produk Asuransi Taspen Save
- s) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah bidang pendidikan dasar
- t) Bidang Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah bidang pendidikan terutama penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal dan buku bagi guru
- u) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah layanan klim otomatis dan penyetoran iuran wajib ASN dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
- v) Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah bidang pengelolaan keuangan daerah
- w) Bidang Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan Hukum dan Pemajuan HAM di Daerah

4. Nama Kegiatan

- a) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur
- b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai

- c) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah :
- Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai
 - Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
 - Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas
- d) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain : Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Ro-Ro di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai
- e) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh
- f) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan
- g) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- h) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- i) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah :
- Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
 - Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
 - Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra

- Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
 - Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal
- j) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- k) Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah bahwa pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai memiliki aset berupa Pantai Marina Teluk Makmur yang terletak di Kecamatan medan Kampai Kelurahan Teluk Makmur, dalam melaksanakan dan mendukung program pariwisata Kota Dumai, Pihak pertama membutuhkan bantuan Pihak kedua yakni PT. Pembangunan Dumai berupa pengelolaan Pantai marina berdasarkan sura no. 102.01/PDM-DMI/V/2015-073 perha permohonan izin untuk mengelola Pantai Puak Marina Bahari
- l) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah mekanisme pembayaran rekening listrik pihak Pemerintah Kota dan PPJ, Penertiban PJU-Swadaya, Meterisasi PJU dan pembangunan dan pemeliharaan PJU
- m) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM dan 3. bidang aset dan keuangan
- n) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki, menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif untuk menyelesaikan setiap hambatan serta membentuk tim kerja untuk mempersiapkan data dan informasi serta mengusulkan langkah dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai
- o) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi manajemen perencanaan pembangunan

daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan aplikasi Simda perencanaan

- p) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai
- q) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
- r) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah pengelolaan dan penyelenggaraan asuransi melalui produk asuransi Taspen Save guna meningkatkan kesejahteraan PNS
- s) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah penyelenggaraan bantuan teknis peningkatan kualitas pendidikan dasar
- t) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal dan buku bagi guru dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
- u) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah layanan klim otomatis dan penyetoran iuran wajib ASN dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
- v) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Dumai
- w) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan Hukum dan Pemajuan HAM di Daerah

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
- b) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
- c) Dinas Perhubungan Kota Dumai
- d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
- e) Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai
- f) Dinas Sosial Kota Dumai
- g) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
- h) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai
- i) Bappeda Kota Dumai
- j) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- a) Dinas Pendidikan Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dibantu oleh 71 personel. Dengan kualifikasi pendidikan, S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 40 orang, D-III sebanyak 3 orang, D-II sebanyak 1 orang, SMA sederajat sebanyak 1 orang. Komposisi PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.4.

Tabel. 6.4 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	4
3.	Pembina	IV/a	20
4.	Penata Tk.I	III/d	6
5.	Penata	III/c	12
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	9
7.	Penata Muda	III/a	9
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	6
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
Jumlah			62

- b) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibantu oleh 33 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 2 orang (S2), 19 orang (S1), DIII 6 orang, dan SMA sebanyak 6 orang.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.5 dibawah ini :

Tabel 6.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/B	2
3.	Pembina	IV/A	2
4.	Penata Tingkat I	III/D	6
5.	Penata	III/C	7
6.	Penata Muda Tingkat I	III/B	6
7.	Penata Muda	III/A	7
8.	Pengatur Tk.I	II/D	1
9.	Pengatur	II/C	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	0
11.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			33

c) Dinas Perhubungan Kota Dumai

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebanyak 112 orang. Dari jumlah pegawai tersebut diatas sebanyak 7 orang berpendidikan S2/pasca sarjana, S1/sarjana sebanyak 31 orang, D3 sebanyak 10 orang, D2 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 59 orang, SLTP 1 orang dan SD 2 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.6 Dibawah ini:

Tabel 6.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	10
4.	Penata	III/c	12
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	18
6.	Penata Muda	III/a	12
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	14
8.	Pengatur	II/c	11
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	27
10.	Pengatur Muda	II/a	3
11.	Juru Muda Tingkat I	I/d	1
JUMLAH			112

d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 8 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 1 (satu) orang (S3), 1 (satu) orang S2 dan 6 (lima) orang (S1).

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.7 dibawah ini:

Tabel 6.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina	IV/A	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata	III/C	1
4.	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
	Penata Muda	III/A	1
JUMLAH			8

e) Bagian Adm. Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

Jumlah Jumlah Pegawai pada Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 10 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 2 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 5 orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang berpendidikan SMU.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada table 6.8 Dibawah ini :

Tabel 6.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bagian Adm. Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	1
3.	Penata Tingkat I	III/D	1
4.	Penata	III/C	1
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
6.	Penata Muda	III/A	-
7.	Pengatur	II/C	2
8.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			10

f) Dinas Sosial Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Dumai dibantu oleh 22 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 3 orang (S2), 9 orang (S1), DIII 1 orang, dan SMA sebanyak 9 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.9 Dibawah ini :

Tabel 6.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Sosial Kota Dumai

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jlh (orang)
1.	Pembina Tk.I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	2
3.	Penata Tingkat I	III/D	6
4.	Penata	III/C	4
5.	Penata Muda Tk.I	III/B	1
6.	Penata Muda	III/A	3
7.	Pengatur Tk.I	II/D	2
8.	Pengatur	II/C	2
	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			22

g) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Jumlah Karyawan/Pegawai pada Badan Pendapatan Kota Dumai adalah sebanyak 75 orang yang terdiri dari PNS. dengan 7 orang berpendidikan S(2), S1 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 36 orang dan SLTP sebanyak 0 orang serta 1 orang SD.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.10 Dibawah ini :

Tabel 6.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Pendapatan Kota Dumai

No	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	PNS
2.	Pembina	IV/a	54	PNS
3.	Penata Tingkat I	III/d	6	PNS
4.	Penata	III/c	12	PNS
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	6	PNS
6.	Penata Muda	III/a	11	PNS
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	10	PNS
8.	Pengatur	II/c	18	PNS
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	PNS
10.	Pengatur Muda	II/a	3	PNS
11.	Juru Muda	I/c	1	PNS
J U M L A H			75	PNS

h) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibantu oleh 48 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 5 orang, 26 orang (S1), DIII sebanyak 5 orang, SMA sebanyak 12 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.11 Dibawah ini :

Tabel 6.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Dumai

NO	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	PNS
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	PNS
3.	Pembina	IV/a	4	PNS
4.	Penata Tingkat I	III/d	7	PNS
5.	Penata	III/c	10	PNS
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	12	PNS
7.	Penata Muda	III/a	10	PNS
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	7	PNS
9.	Pengatur	II/c	19	PNS
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	11	PNS
11.	Pengatur Muda	II/a	4	PNS
12.	Juru Tk. I	I/d	0	PNS
13.	Juru Muda Tk.I	I/c	2	PNS
14.	Juru Muda	I/a	0	PNS
JUMLAH			88	PNS

i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 47 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 24 Orang dan 23 orang TKS. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 13 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 20 orang berpendidikan Sarjana (S1), 5 orang berpendidikan Diploma (D3) dan 9 orang SMU.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.12 Dibawah ini :

Tabel 6.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

NO.	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	2	3	4
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	9
3.	Penata Tingkat I	III/D	4
4.	Penata	III/C	9
5.	Pengatur	II/C	1
6.	Honorar (TKPK)	-	23
JUMLAH			47

j) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 52 orang. Dari jumlah Pegawai diatas sebanyak 6

orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 25 orang berpendidikan Sarjana (S1), 6 orang berpendidikan Diploma (D3) dan 15 orang SMU.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.13 Dibawah ini

Tabel 6.13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada BPKAD Kota Dumai

NO.	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2.	Pembina	IV/A	3
3.	Penata Tingkat I	III/D	11
4.	Penata	III/C	8
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
6.	Penata Muda	III/A	10
7.	Pengatur Tk. I	II/D	5
8.	Pengatur	II/C	10
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1
10.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			52

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tidak terdapat penggunaan dana APBD Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

8. Jangka Waktu kerjasama

- Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun
- Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.
- Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku
- Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak

- f) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- g) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- h) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- i) Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas
- j) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah berlaku sampai adanya kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua pihak
- k) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- l) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- m) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah berlaku sepanjang pelayanan navigasi penerbangan masih dilaksanakan
- n) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah selama 5(lima) Tahun
- o) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun
- p) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah selama 5(lima) Tahun
- q) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun

- r) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah berlaku sejak ditandatangani sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini
- s) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah 3(tiga) Tahun
- t) Jangka Waktu Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah tidak dibatasi selama masih diperlukan
- u) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah tidak terbatas
- v) Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah 3(tiga) Tahun
- w) Jangka Waktu Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah 2(dua) Tahun

9. Hasil (Output) dari Kerjasama

- a) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Sarana dan Prasarana Objek Wisata Bunga Tujuh
- b) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah :
 - Tersedianya pusat perbelanjaan yang representatif bagi masyarakat Kota Dumai
 - Diperolehnya kompensasi/royalti sebagai Pendapatan Daerah Kota Dumai sebesar US\$ 6.000,- (enam ribu dolar Amerika) per Tahun selama jangka waktu kerjasama
 - Pada akhir masa kerjasama seluruh bangunan Plasa Dumai beserta fasilitas pendukung lainnya menjadi milik Pemerintah Kota Dumai
- c) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah adanya pemahaman dan pengetahuan Perundang-undangan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada Siswa/siswi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

- d) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Meningkatkan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Kota Dumai
- e) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Wilayah Perairan
- f) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Pelabuhan (Dermaga)
- g) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga)
- h) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Peningkatan PAD dari Jasa Kepelabuhanan (Dermaga)
- i) Hasil Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah Memberikan Kesempatan kepada Guru untuk saling bertukar materi informasi tentang metode dan prakteknya dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan secara umum, memperluas kesempatan untuk saling berhubungan dengan berinteraksi dengan warga Sekolah, Pertukaran Guru dan Siswa.
- j) Hasil kerjasama antara PT. (Persero) PELINDO I Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pelabuhan PT. Pelindo
- k) Hasil Kerjasama antara Pemerintah kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai adalah pinjam pakai aset dan pengelolaan Pantai Marina
- l) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah Kelancaran penerimaan PAD berasal dari PPJ dan pelunasan pembayaran rekening listrik serta pengawasan dan penertiban PJU-Swadaya
- m) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang sbb: 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM, 3. Bidang Aset dan Keuangan
- n) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah

- Pengembangan, penataan, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan untuk distribusi penyiaran TV kabel dan internet di wilayah Kota Dumai,
 - Konsultasi teknik, keuangan dan administrasi, penyusunan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, perizinan terkait, sosialisasi dan hal-hal lain
- o) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi Manajemen perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan Aplikasi Simda perencanaan apabila diperlukan
- p) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah Penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Pengembangan data dan informasi geospasial, Pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kota Dumai
- q) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
- r) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah Produk asuransi Taspen Save bagi PNS
- s) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah menyelenggarakan lokakarya pelatihan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di sekolah mitra. Memberikan bantuan teknis secara terbatas kepada Sekolah mitra dan sekolah non-mitra untuk melaksanakan program Pelita Pendidikan
- t) Hasil Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah Seminar Workshop, Bimtek dalam rangka peningkatan kemampuan guru dalam penelitian dan penulisa ilmiah serta penerbitan buku dan jurnal yang menampung tulisan ilmiah guru
- u) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah ;
1. Layanan Klim Otomatis terdiri dari pembayaran klim pensiun pertama, tabungan hari tua, pengembalian tabungan perumahan, taspen save

2. Layanan pengajuan pensiun janda/duda/yatim piatu bagi PNS yang meninggal dunia pada masa aktif
 3. Layanan pengajuan hak tabungan hari tua dan asuransi kematian bagi PNS yang mengalami kejadian pensiun/meninggal/keluar dan bagi anggota keluarganya yang mengalami kejadian meninggal dunia
 4. Layanan pengajuan pengembalian iuran pensiun bagi PNS yang berhenti dan tidak mendapat hak pensiun
 5. Layanan jaminan kematian bagi PNS yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja
 6. Layanan jaminan kecelakaan kerja bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja
 7. Layanan penerbitan kartu peserta taspen
 8. Layanan pemotongan hutang PNS atas permintaan BPKAD Pemerintah Kota Dumai yang masih mempunyai kewajiban hutang kepada Negara yang belum terselesaikan pada masa aktif sebagai PNS
 9. Pemanfaatan fasilitas diskon/potongan harga bagi PNS yang bertransaksi di Merchant yang bekerjasama dengan Taspen menggunakan kartu peserta Taspen
- v) Hasil Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah : Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
- w) Hasil Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah :
1. Penyusunan Naskah Akademik, keterangan/penjelasan
 2. Penyusunan dan peningkatan program legislasi daerah/program pembentukan Perda
 3. Penyusunan Ranperda
 4. Penyusunan Ranperkada
 5. Harmonisasi dan sinkronisasi Ranperda
 6. Evaluasi Perda
 7. Peningkatan kompetensi pembentukan produk hukum daerah
 8. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
 9. Pendidikan HAM

10. Pembinaan Hukum Nasional di daerah (Penyuluhan hukum, pembentukan kelompok sadar hukum, pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum dan konsultasi hukum)

10. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, hanya saja terdapat beberapa MoU Kerjasama yang perlu ditinjau ulang kembali terutama pada Bidang Kerjasama Perhubungan Udara (Pinjam Pakai Bandar Udara Pinang Kampai). Dimana terdapat beberapa pasal/ayat pada perjanjian dimaksud sangat membebani Pemerintah Kota Dumai (seperti pembayaran PBB Bandara dibebani ke Pemerintah Kota Dumai) dan panjang Runway hanya 1.800 m x 30 m hanya bisa didarati pesawat F-100 dan sejenisnya secara terbatas. Selanjutnya Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Kantor Pertanahan Kota Dumai tentang kegiatan sertifikasi tanah asset Pemerintah Kota Dumai dimana kurangnya persyaratan kelengkapan administrasi dikarenakan asal perolehan dari hibah masyarakat.

C. Kerjasama Dengan Luar Negeri

Untuk Tahun 2018 tidak terdapat pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Komunikasi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut.

Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ;

- a) Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah)
- b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

2. Materi Koordinasi

a) Forum MUSPIDA

Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan (meliputi pertahanan dan keamanan didarat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.

Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak.

b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi inteligen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang

terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

a) Forum MUSPIDA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu

- Pemerintah Daerah (dalam hal ini Walikota Dumai);
- Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);
- Kepolisian Resort Kota ;
- Pengadilan Negeri; dan
- Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu :

- Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
- Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
- Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
- Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)

- Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)

b) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah :

- Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda) ;
- Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda) ;
- Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda) ;
- Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda) ;
- Pos Daerah/Posda Badan Intelijen Daerah ;
- Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai) ;
- Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
- Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
- Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
- Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai).

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi melalui Forum Kominda telah dianggarkan dana yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2017 sebesar Rp. 537.950.000,-- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 97,51%

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai berjumlah sebanyak 14 orang dengan Kualifikasi pendidikan yang terdiri dari 2 orang S2, 7 orang berpendidikan S1, dan 5 orang berpendidikan SLTA Sederajat.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.14 dibawah ini :

Tabel 6.14 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Pembina	IV/A	1
3.	Penata Tingkat I	III/D	2
4.	Penata	III/C	1
5.	Penata Muda Tk.I	III/B	1
6.	Penata Muda	III/A	5
	Pengatur Tingkat I	II/D	1
JUMLAH		-	14

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Kominda selama Tahun 2018 sebanyak 2 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidental.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Jalinan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.

Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparatur pemerintah pusat di Daerah.

Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainnya adalah merupakan salah satu hasil dan manfaat yang

diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Instansi/Unit kerja.

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Penegasan Batas wilayah, baik batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat terbentuknya Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara

Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan dilingkungan Pemerintah kota Dumai belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian mulai sejak tahun 2005-2010 upaya penegasan batas tersebut sudah mulai dilaksanakan, yaitu ;

1. Batas Wilayah Kabupaten/Kota

➤ Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

➤ Batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun perangkat batas daerah di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aspek kewenangan dalam mengelola suatu daerah berbasis keruangan meliputi penataan dan penegasan batas, dalam rangka tertib administrasi kewilayahan.

Tujuan dan sasarannya adalah dengan adanya perangkat batas wilayah yang tegas dalam hal ini adalah melengkapi keberadaan pilar batas Kabupaten/Kota dan pilar batas Kecamatan/Kelurahan dengan melakukan pengukuran posisi, maupun perangkat batas yang lainnya (seperti koordinat batas, berita acara penetapan batas, peta batas dll), dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dalam frame wilayah batas yang jelas.

2. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat dan Lurah

melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai

Tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur beserta kelurahan yang ada diwilayah kecamatan tersebut melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur

Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Koata Dumai:

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pelacakan batas-batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai, membuat deskripsi batas dan peta administrasi kelurahan dan kecamatan, melakukan koreksi terhadap peta administrasi yang selama ini dipakai serta mengadakan musyawarah kesepakatan batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan batas kelurahan dan kecamatan yang definitif, dan akomodatif, menyelesaikan permasalahan batas administrasi baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan serta menyiapkan dokumen batas yang dapat dipergunakan untuk rencana pemekaran wilayah maupun pembuatan Perda batas antar kelurahan dan kecamatan.

Dari tahun 2011-2018 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai khususnya pada penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Rokan Hilir.

1. Penyelesaian Batas Daerah

Dalam pembinaan batas wilayah tersebut Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian Batas Daerah sebagai berikut:

1.1 Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011

Kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006 menimbulkan permasalahan dilapangan, sehingga Pemerintah Kota Dumai meminta

peninjauan ulang kembali atas kesepakatan dimaksud dan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Dan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

Tahun 2017

1. Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Fasilitasi percepatan penyelesaian Batas Antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Batas Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) Kali
2. Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan melaksanakan Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yang bertempat di Ruang Rapat Hotel Ayola, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memberikan draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Koreksi 1 Tanggal 11-13 April 2017 kepada Pemerintah Kota Dumai dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar dibahas dengan Tim PBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk meminta koreksi Kabupaten/Kota yang berbatasan terhadap :
 - Dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang masuk dalam rancangan Permendagri;
 - Koordinat batas (PBU/PABU, TK) dan garis batas antar titik koordinat batas
 - Perubahan-perubahan/koreksi (nama desa/kelurahan, kecamatan, toponimi rupabumi)
 - b. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan titik simpul batas sementara antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yaitu pada P.13 koordinat 01° 28' 27.852" LU dan 101° 19' 1.869" BT dengan pertimbangan:

- Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.14 dengan koordinat $01^{\circ} 29' 45.549''$ LU dan $101^{\circ} 20' 7.674''$ BT
 - .Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.12 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 2.79''$ LU dan $101^{\circ} 20' 25.93''$ BT
- c. Terhadap usulan tersebut pada nomor 2 (dua) diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten yang berbatasan serta melakukan verifikasi terhadap titik simpul tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini
 - d. Jika sampai pada waktu yang telah disepakati tersebut tidak ada laporan melalui Pemerintah provinsi Riau, maka Pemerintah Kabupaten bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dianggap sepakat terhadap koordinat titik simpul batas sementara usulan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan tersebut pada angka 2 (dua) diatas.
 - e. Pada rapat ini belum membahas segmen batas antara Kabupaten bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir
 - f. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk saling dipertukarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini. Data-data pendukung dan dokumen batas yang diserahkan bersifat final
 - g. Waktu verifikasi batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis akan ditentukan oleh Pemerintah provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan Dijen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
3. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi

Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangi bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

4. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama (Berita Acara Terlampir) Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama

Tahun 2018

1. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangi bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil

kesepakatan yang telah di tandatangi bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

2. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka klarifikasi peta batas kartometrik wilayah I yang bertempat di Ruang Rapat Magenta Lantai II Hotel Ibis Styles Gajah Mada Jakarta, dengan hasil kesepakatan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau sepakat terhadap simpul batas pada Tk.7 dengan koordinat $101^{\circ}19'01.869''$ BT dan $1^{\circ}28'27.852''$ LU dan perubahan nama simpul dari P.13 menjadi Tk.7. pemerintah Provinsi Riau dan Ditjen Bina Adm Kewilayaha sepakat menghilangkan 2 pilar yang dipasang oleh Pemerintah provinsi Riau yaitu Tugu 02B (2006) dan Tugu 03B (2006). Tim PBD Pusat akan melakukan pegecekan dan updating toponimi berita acara data hasil verifikasi nama rupabumi unsur alami, khususnya penamaan sungai sepit dan sungai bunian yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Riau, BIG dan kemendagri. Peserta Rapat menandatangani rancangan draft Permendagri dan peta kesepakatan batas daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Permendagri tentang batas daerah pada 5 (lima) segmen batas antar Kab/Kota di Provinsi Riau

1.2 Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dari tahun 2009-2016 kegiatan pelacakan dan penetapan batas Kecamatan dan Kelurahan belum ada ditindak-lanjuti dan terfokus pada kegiatan Batas antar Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2017

1. Lokasi kegiatan Survey tapal batas wilayah antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur yang terletak pada:
 - a. Kecamatan Dumai Timur, yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas
 - b. Kecamatan Medang Kampai, yang terletak di Kelurahan Mundam

- c. Kecamatan Bukit Kapur, yang terletak di Kelurahan Bagan Besar
 - d. Kecamatan Dumai Selatan, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah dan Kelurahan Mekar Sari
2. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Medang Kampai – Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan – Bukit Kapur melibatkan Tim Survey dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Bagian Administrasi pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai serta pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT di wilayah perbatasan antar Kecamatan
 3. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Dumai Selatan dengan Kecamatan Bukit Kapur, lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Bukit Timah, terdapat 8 (delapan) Tugu Batas yang diawali dari Jalan Mekar Sari Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan berakhir pada Jalan Perwira/Tuanku Tambusai, dapat disampaikan perihal sebagai berikut:
 - a. Dari 8 (delapan) tugu batas yang berada di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan masih utuh keberadaannya sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati sesuai dengan hasil laporan pelacakan tahun 2007
 - b. Terdapat perbedaan peta lampiran berita acara kesepakatan batas daerah antara Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kecamatan Bukit Kapur yang ditanda-tangani oleh camat dan lurah, dengan peta yang ditanda tangani oleh camat dan Kepala Daerah, yaitu pada letak posisi tugu batas 4 (empat).
 - c. Dari titik lokasi tugu batas 5 (lima) menuju lokasi titik tugu batas 6 (enam) dengan garis batas zik-zak dalam peta, batas alam dilapangan tidak ditemukan (maya).
 4. Survey Tapal Batas Pada batas daerah antara Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur terdapat 4 (empat) Tugu Batas di lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Mekar Sari, yang diawali dari Jalan Muhammad Toha dan berakhir pada parit Hawa menuju anak sungai Masjid, dapat disampaikan bahwa keberadaan dari

ke 4 (empat) tugu batas tersebut masih utuh dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007 dan batas alam seperti sungai dan parit yang disepakati sebagai batas daerah cukup jelas dilapangan, terkecuali batas jalan yang ditetapkan dari Jalan Muhammad Toha menuju Jalan PT. Gudang Garam dimana jalan tersebut merupakan Jalan Masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertaniannya dan jalan tersebut keberadaannya diatas lahan masyarakat serta kondisi di lapangan tidak ditemukan.

5. Survey Tapal Batas antar Kecamatan Dumai Timur dengan Kecamatan Medang Kampai di lokasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dan Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur terdapat 6 (enam) Tugu Batas, dapat disampaikan sebagai berikut;

- Tugu Batas 1, 2, 3, 5 dan 6 masih utuh keberadaannya dan sesuai dengan titik koordinat hasil laporan pelacakan tahun 2007,
- Antara tugu batas 3 (tiga) menuju tugu batas 4 (empat) ditemukan tugu batas yang tidak terdapat titik koordinat pada hasil laporan pelacakan 2007, dimana posisi tugu batas tersebut pada titik koordinat 1°39'19"2 N dan 101°28'49"3 E
- Tugu batas 4 (empat) tidak ditemukan dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007

1.3 Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

1. Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut. Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari maka Pemerintah

Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud.

Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.

2. Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud.

Namun demikian, untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai.

1.4. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

1. Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain

Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah

Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas.

Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepakati penyelesaiannya secara keseluruhan

Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, dan telah direkomendasikan oleh Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

2. Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan.

Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km)

Pada Tahun 2008 sudah dilakukan pelacakan batas dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kelurahan Batu Teritib dengan Basilam Baru dan Kelurahan Basilam Baru dengan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhan/100 %)

Pada Tahun 2017 sudah dilaksanakan survey kembali batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur dan menghasilkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2017 tentang batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dibantu oleh 11 Orang. Dengan kualifikasi pendidikan, 7 orang (S1), dan SMA sebanyak 4 orang.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.15 dibawah ini :

Tabel 6.15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Bag. Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2.	Penata Tingkat I	III/D	3
3.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
4.	Penata Muda	III/A	2
5.	Pengatur Tk.I	II/D	1
6.	Pengatur Muda Tk.I	II/B	2
7.	Pengatur Muda	II/A	1
JUMLAH			11

F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2018 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi.

2. Status Bencana

Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2018 dengan rincian;

- Kegiatan Koordinasi penanggulangan Daerah Rawan Bencana jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 117.585.000,-- (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 58.453.200,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 49,71%

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah :

- Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi antara lain; tidak melakukan

pembakaran lahan didalam membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

10. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah karyawan/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terdiri dari PNS sebanyak 35 orang, dari jumlah karyawan/pegawai diatas antara lain : Berpendidikan (S2) 2 Orang, Sarjana (S1) 10 orang, DII sebanyak 1 orang dan SLTA 24 orang. komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan pada tabel 6.16 berikut ini:

Tabel 6.16 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

No	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina	IV.a	1
2	Penata Tingkat I	III.d	4
3	Penata	III.c	2
4	Penata Muda Tk.I	III.b	4
5	Penata Muda	III.a	3
6	Pengatur Tk.I	II.d	2
7	Pengatur	II.c	17
8	Pengatur Muda Tk.I	II.b	4
9	Pengatur Muda	II.a	1
JUMLAH			38

11. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Dumai membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang mana didalam struktur Organisasinya terdapat UPT Pemadam Kebakaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Dengan ditetapkannya PERDA tersebut, maka resmilah Seksi Pemadam Kebakaran berpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

12. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan Daerah.

Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat.

H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Pada tahun 2018 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibantu oleh 53 Orang PNS dan 39 orang tenaga kerja sukarela. Dengan kualifikasi pendidikan, 2 Orang Magister (S2) 18 orang Sarjana (S1), 1 orang D3, 28 orang SMA, 2 orang SMP, dan 2 orang SD. Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 6.17 dibawah ini:

Tabel 6.17 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No.	Pangkat	Golongan ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I	IV/B	2
2.	Pembina	IV/A	2
3.	Penata Tingkat I	III/D	7
4.	Penata	III/C	6
5.	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
6.	Penata Muda	III/A	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/D	14
8.	Pengatur	II/C	4
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	2
10.	Pengatur Muda	II/A	7
11.	Juru Tingkat I	I/D	1
12.	Juru	I/C	2
13.	Juru Muda Tingkat I	I/B	-
14.	Juru Muda	I/A	-
JUMLAH		-	56

d. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki.

e. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Apabila ditemukannya adanya gangguan keamanan biasanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum bersumber dari dana APBD Kota Dumai Tahun 2018 dengan rincian ;

- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dialokasikan dana sebesar Rp. 274.350.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari dana yang

dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 250.100.000,- (dua ratus lima puluh juta seratus ribu upiah) atau sebesar 91,16%.



BAB VII PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2018 disampaikan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan amanah pembangunan dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Akhirnya disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai untuk dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 ini untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

WALIKOTA DUMAI



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si

